

**CULTURAL COMMUNICATION: AN  
ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON THE USE OF LEFT  
HAND BY THE SOCIETY AROUND KAMPUS PERAK,  
SOUTHEAST SULAWESI**

ABDUL JALIL\*

---

**ABSTRACT**

*The phenomenon of left hand use (which is culturally unusual) by the community around the Campus Perak urges the authors explore its background from the cultural approach in an ethnographic study. There had been some community practices around Campus Perak in Southeast Sulawesi that are considered as anomalies by outsiders' perspectives. Among those anomalies is the use of the left hand in giving something to others, such as serving food, writing, and signing letters. This paper explores the use of the left hand amidst the society around the Perak Campus. In general, several ethnic groups inhabit the area around campus, thus no particular ethnic dominates the use of everyday language. Tribal languages are commonly used among people from the similar ethnicity. In the context of formal ceremonies involving community outside Campus Perak, the use of left hand was seen as a culture shock. Meanwhile, the use of left hand was (intra)culturally acceptable since children were taught using left hands by their parents.*

**KEY WORDS:** *Left Hand, Cultural Communication, Campus Perak, Society*

**KOMUNIKASI BUDAYA: SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI  
PENGUNAAN TANGAN KIRI PADA MASYARAKAT DI SEKITAR  
KAMPUS PERAK**

**ABSTRAK**

Fenomena penggunaan "tangan kiri" oleh masyarakat di sekitar Kampus Perak, mendorong penulis untuk mencari akar masalah melalui pendekatan kebudayaan dengan metode etnografi. Di Kampus Perak Sulawesi Tenggara, banyak perilaku yang menurut kaca mata *others* banyak keganjilan. Di antara keganjilannya adalah penggunaan tangan kiri dalam memberikan sesuatu kepada orang lain, baik dalam hal memberikan makanan atau saat menulis, bahkan penandatanganan surat. Tulisan ini hendak melihat kembali sejauhmana penggunaan tangan kiri yang berlaku di sekitar Kampus Perak. Secara umum, kampus ini banyak dihuni oleh beberapa etnis, sehingga satu sama lain tidak dapat mendominasi sebagai penggunaan bahasa sehari-hari. Umumnya bahasa sesama suku sering digunakan ketika hendak bercakap dengan sesama jenis suku saja. Penggunaan tangan kiri akan dipahami oleh orang lain sebagai perilaku yang *shock culture* ketika dalam seremonial atau upacara resmi. Selain itu, hasil dari pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa tangan kiri yang digunakan oleh masyarakat tidak lepas dari pola pengasuhan orang tua terhadap penggunaan tangan kiri saat masih kecil.

**KATA KUNCI:** Tangan Kiri, Kidal, Komunikasi Budaya, Kampus Perak.

---

\*Jurusan Antropologi FIB UHO, alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari Sulawesi Tenggara Fax (0401) 390006 Telp. (0401) 394061, [abduljalil.uho@gmail.com](mailto:abduljalil.uho@gmail.com)/[jalil\\_kaya79@yahoo.co.id](mailto:jalil_kaya79@yahoo.co.id)

\*\* Naskah diterima Nopember 2016, direvisi Mei 2017 dan disetujui untuk dimuat Juni 2017

## A. PENDAHULUAN

Awal mula ide ini mengemuka setelah beberapa hari penulis tinggal dan menyatu menjadi bagian dari keluarga besar kampus Universitas Halu Oleo, kampus ini juga sering dikenal dengan kampus perak, konon penyebutan “kampus perak” karena diidentikkan dengan banyaknya logam dan kekayaan alam berupa bahan baku perak atau perusahaan pengembang perak.

Tulisan ini hendak mengungkap kegelisahan yang penulis rasakan ketika melihat interaksi antar mahasiswa, terkadang sebagian masyarakat di Sulawesi Tenggara, yang sering ditemukan dan lebih nyaman menggunakan tangan kirinya dari pada tangan kanan, sebagaimana kebudayaan kolektif yang selama ini diterima oleh penulis. Tentu gagasan ini tidak akan membicarakan penggunaan tangan kanan jauh lebih baik, sementara tangan kiri kurang baik. Beberapa hal yang perlu diungkap dalam penelitian ini bahwa penulis ketika membeli dan hendak makan siang, penjual sering memberikan pesanan penulis dengan tangan kirinya dari pada tangan kanannya. Pada saat perkuliahan, juga ada beberapa mahasiswa/mahasiswi yang familiar menggunakan tangan kirinya, misalnya dalam proses mencatat dan menuangkan tanda tangan pada absensi dalam kelas. Selain itu, penulis mengalami *shock culture* ketika penulis mengajak teman dari Jawa yang baru hadir di Sulawesi Tenggara melihat bahkan menerima dari *partner* (orang lain) yang nota bene orang Sulawesi Tenggara dengan tangan kiri.

Indonesia yang secara zona waktu dikategorikan dengan tiga tipe, waktu Indonesia bagian Barat (WIB), waktu Indonesia Tengah (WITA), dan waktu Indonesia bagian Timur (WIT) merupakan sebuah kekayaan dan keragaman yang perlu disyukuri, meskipun beberapa tahun yang lalu sempat diwacanakan untuk menjadikan satu zona, namun sepertinya belum siap. Artinya barangkali mereka yang menjadi subyek dalam tulisan ini, yang sehari-hari menggunakan tangan kiri adalah sebuah keragaman yang tetap dihormati, yang tidak boleh dinilai dengan kebudayaan *others*, yang dapat dipastikan bukan pemilik kebudayaan. Dalam antropologi sikap seperti ini disebut dengan istilah *etnografi emik*, meskipun beberapa teman yang penulis konfirmasi menyatakan

bahwa penggunaan tangan kiri dengan dalih apapun tidak dibenarkan, baik dengan alasan karena kidal atau bukan, tetap tidak dibenarkan terutama ketika dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat lain.

Hal lain yang sering kita dengar, terutama pada kebudayaan kolektif sebelum masuk di Kendari adalah “pakailah tangan kanan”, “pakailah dengan tangan yang bagus”, “pakailah tangan yang baik”. Tentu penyebutan itu lebih sering ditemukan di saat anak-anak kecil bersosial dengan teman sebayanya dengan didampingi masing-masing orang tuanya. Bisa jadi penggunaan “tangan kiri” sebagaimana kasus di Sulawesi Tenggara tersebut bukanlah “perilaku kidal” melainkan karena kebiasaan di waktu kecil yang sering tidak diingatkan atau dianggap sesuatu yang bukan menyimpang dan merupakan perilaku yang biasa-biasa atau mengalir begitu saja tanpa adanya sesuatu yang dianggap kurang sebagaimana pemahaman penulis pertama kali melihat kasus antar anak berinteraksi dengan menggunakan tangan kiri, artinya ada sebuah pemahaman penulis yang oleh Geertz diperlukan upaya untuk memahami bagaimana seseorang bisa memahami pemahaman yang bukan pemahamannya.<sup>1</sup> Senada dengan ungkapan lain, misalnya sebuah pertanyaan bahwa kata-kata yang selalu terungkap oleh orang tua, misalnya “jangan gunakan tangan kiri, ayo gunakan tangan manis...”, sebagai sebuah ungkapan yang masih kental dan dianggap salah, jika dalam proses interaksi dengan orang lain masih ada yang menggunakan tangan kiri, maka bagi budaya Timur bahwa tangan kiri dianggap sebagai ‘tangan jorok’, dalam arti tangan yang berguna untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kotor, seperti cebok dan lainnya sehingga tidak sopan untuk digunakan.<sup>2</sup>

Berbeda perilaku kidal, jika kidal lebih dipahami sebagai penggunaan tangan kiri sudah sejak kecil, tentu pemahaman penulis terkait kidal adalah sebuah keistimewaan seseorang dari Tuhan, yang sejak lahir karena tangan kanannya memang tidak berfungsi sebagaimana orang yang memiliki tangan kanan. Artinya tangan kanan yang dimiliki lemah, bahkan tidak sekuat tangan kiri dalam hal beraktivitas yang agak

<sup>1</sup>Geertz, *Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective* (New York: Basic Books, Inc., 1983), 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 5.

berat. Oleh karenanya tidak akan digunakan tangan kanan, maka tangan kiri yang lebih dominan.<sup>3</sup>

Sementara juga ada tipe yang mungkin bisa diungkap bahwa tangan kiri dan tangan kanannya saling berfungsi, mau menggunakan tangan kanan atau tangan kiri tidak masalah, ada juga yang memang tidak bisa menggunakan tangan kiri sebagaimana kebanyakan orang di Jawa, selain sejak kecil sering dibiasakan untuk menggunakan tangan kanan, baik saat memberi atau menerima dari orang lain. Setiap interaksi anak-anak selalu diperhatikan terutama dengan tangan mana, mereka memberi atau menerima dari temannya. Hal ini ternyata berbeda yang ditemukan penulis ketika hidup di Kendari, semoga saja memang sebuah kebetulan apa yang dilihat oleh penulis, tetapi setelah diperhatikan ungkapan-ungkapan terkait proses interaksi anak-anak mereka yang secara usia 2 (dua) tahun dalam proses interaksinya, tidak pernah penulis mendengar tentang ungkapan dari orang tuanya, bahwa apa yang anak mereka lakukan ketika saling memberi dan di saat yang lain menerima, tidak ada perhatian. Misalnya, mereka tetap *enjoy* dan tidak menganggap pemberian dan penerimaan oleh anak-anak mereka dengan tangan kiri “bukan sesuatu yang salah”, dengan bahasa lain, menjadi perilaku yang biasa saja dan telah membentuk kepribadiannya sampai dewasa. Berangkat dari itulah, penulis mencoba melakukan penelitian dengan metode etnografi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang secara sehari-hari lebih sering menggunakan tangan kirinya sebagai media berinteraksi dengan orang lain.

## B. KAJIAN LITERATUR

Komunikasi dapat diistilahkan sebagai peristiwa yang dilakukan lebih dari satu orang, sehingga antara komunikasi pertama dengan lawannya dapat berinteraksi secara hangat bahkan saling berbagi satu dengan yang lain selama masing-masing dari mereka saling timbal balik. Sebaliknya, komunikasi akan terputus bahkan cenderung kurang hangat jika masing-masing dari mereka yang berkomunikasi tidak

saling mengerti, apalagi jika latar belakang dari mereka berbeda kebudayaannya. Pada satu sisi, komunikasi yang terbangun lewat penggunaan tangan kiri antara pemilik kebudayaan dengan lawan bicara yang bukan dari kebudayaannya, tentu dibutuhkan pemahaman yang lebih, bagaimana komunikasi yang berbeda kebudayaan tetap bisa hangat dan saling diterima. Artinya, bagaimana komunikasi yang telah membudaya terkait dengan penggunaan tangan kiri oleh mereka yang sehari-hari menggunakan tangan kiri dapat diterima di tengah-tengah masyarakat yang nota bene adalah lain dari kebudayaannya. Pada saat yang bersamaan, penggunaan tangan kiri oleh mereka, yang secara sadar bahwa apa yang dilakukannya bukan bertentangan dengan kebudayaan lain, bukan hal yang menyimpang.

Hal inilah yang perlu dibangun saling memahami kebudayaan masyarakat, dalam istilah Geertz sebagai upaya menemukan makna dan bukan menemukan hukum dalam kajian interpretatif, masing-masing pemilik kebudayaan tidak dibenarkan menilai perilaku seseorang “baik” dan “bukan baik” sebelum ditemukan makna dari perilaku tersebut.<sup>4</sup> Setelah ditemukan makna dari perilaku tersebut, dimungkinkan satu sama lain saling memahami dan memberikan ruang setara agar komunikasi dapat hidup di tengah-tengah keberagaman suku yang ada di kota Kendari.

### Komunikasi

Komunikasi terkait dengan budaya di masyarakat, maka penulis menggunakan terminologi etnografi komunikasi. Lahirnya etnografi komunikasi sebagai kritik atas ilmu linguistik, yang hanya melihat sesuatu pada fisik bahasa. Terminologi etnografi komunikasi ditemukan oleh Dell Hymes dalam artikelnya *Introduction: Toward Ethnographies of Communications*,<sup>5</sup> yang diterbitkan pada tahun 1964, karya ini dimaknai sebagai pengembangan antropologi linguistik. Secara umum teori ini mengkaji peranan bahasa dalam perilaku komunikasi masyarakat cara bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat yang berbeda kebudayaannya. Lebih lanjut, Hymes mampu

<sup>3</sup> R.C. Oldfield. “The Assessment and analysis of handedness: the edinburgh inventory”. *Journal of Neuropsychologia*, vol.9 (1971): 97- 113.

<sup>4</sup> Clifford Geertz, *Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture* (American: Basic Books, Inc., 1973), 5.

<sup>5</sup> <http://communicationtheory.org/ethnography-of-communication/>, diakses pada 27 Mei 2017.

merumuskan model etnografi *speaking* menjadi etnografi komunikasi. Pendekatan etnografi komunikasi diartikan sebagai pendekatan terhadap *sosiolinguistik* bahasa, yaitu melihat penggunaan bahasa secara umum dihubungkan dengan nilai-nilai sosiokultural. Artinya menggabungkan sosiologi dan antropologi dalam konteks komunikasi.

Dalam konteks penggunaan tangan kiri oleh sebagian masyarakat Sulawesi Tenggara tidak cukup sekedar komunikasi verbal, melainkan diperlukan komunikasi fisik atau perilaku yang telah dilakukan. Dengan demikian, kasus penggunaan tangan kiri bagi masyarakat Sulawesi Tenggara merupakan peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang-ulang (*recurrent eventss*), bagi peneliti juga diperlukan inventarisasi komponen komunikasi yang membangun peristiwa komunikasi yang berulang serta dicari hubungan antar komunikasi yang membangun peristiwa komunikasi yang berulang-ulang sebagai permulaan komunikasi (*communication patterning*).

## Budaya

Rumusan kebudayaan yang dikemukakan oleh Clifford Geertz bahwa kebudayaan adalah suatu hal yang semiotik, hal-hal yang berhubungan dengan simbol. Simbol adalah sesuatu yang perlu ditangkap atau ditafsir maknanya dan pada giliran berikutnya dibagikan oleh dan kepada warga masyarakat, diwariskan kepada anak cucu dan ditularkan kepada generasi berikutnya. Dia sadar bahwa simbol bermakna yang dia paparkan juga sudah sebuah tafsiran, bahkan sebuah tafsiran atas tafsiran yang sudah lebih awal ada.<sup>6</sup> Persoalannya, apakah makna itu sendiri dalam teks atau simbol-simbol kebudayaan itu sendiri, atau makna tersebut justru timbul oleh rangsangan simbol dan teks termaksud.<sup>7</sup> Artinya pondasi Geertz terkait kebudayaan yang dianggap sebagai sistem semiotik mengandung simbol-simbol yang berfungsi mengkomunikasikan maknanya dari pikiran seseorang ke pikiran orang lain. Simbol dan makna tersebut berada dalam pikiran-pikiran

individu (*super organic*).<sup>8</sup>

Antropologi simbolik dibangun atas asumsi bahwa manusia adalah hewan yang melakukan simbolisasi, konseptualisasi, dan mencari makna.<sup>9</sup> Serta berupaya mengungkapkan cara-cara simbolik, baik manusia sebagai individual maupun kelompok-kelompok kebudayaan dari manusia.<sup>10</sup> Selain itu, antropologi simbolik juga disebut antropologi interpretatif yang diasosiasikan dengan sosok Clifford Geertz sebagaimana karyanya pada tahun 1973 yang berjudul *The Interpretation Of Cultures Selected essays* dan di tahun 1983 *Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture*.

Lebih jauh dalam penjelasan Ahmad Fedyani Syaifudin dalam menjelaskan interpretatif Clifford Geertz bahwa antropologi simbolisme atau antropologi interpretatif atau antropologi humanistik berupaya mengorientasikan kembali antropologi kebudayaan dari strategi menemukan eksplanasi kausal bagi perilaku manusia menjadi strategi untuk menemukan interpretasi makna dalam tindakan manusia.<sup>11</sup> Selain itu, Antropologi interpretatif menggunakan pendekatan ideografik yakni kajian mengenai satu kasus tunggal yang dapat menghasilkan pandangan teoritis dan makna-makna. Makna-makna disampaikan melalui penggunaan simbol-simbol yang berlaku bagi nilai-nilai, kode-kode, dan aturan-aturan.<sup>12</sup> Dari sini, kasus penggunaan tangan kiri oleh sebagian masyarakat di Sulawesi Tenggara yang akan diinterpretasikan oleh penulis, bagaimana menginterpretasi dari interpretasi warga masyarakat.

## Komunikasi Antar Budaya

Kebudayaan adalah komunikasi, dan komunikasi adalah kebudayaan. Dikatakan bahwa hanya manusia berbudaya yang berkomunikasi. Dan ketika manusia berkomunikasi, maka dia dipengaruhi oleh kebudayaannya. Manusia menyatakan selalu

<sup>8</sup> Clifford Geertz, *Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture* (American: Basic Books, Inc., 1973), 126-127.

<sup>9</sup> Clifford Geertz, *the Interpretation Of Cultures* (American: Basic Books, Inc., 1973), 140.

<sup>10</sup> Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.66

<sup>11</sup> *Ibid.*, 296-297

<sup>12</sup>*Ibid.*, 297

<sup>6</sup> Geertz, *Tafsir Kebudayaan* diterjemahkan oleh Francisco Budi Hardiman, cet. 6. (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. vii.

<sup>7</sup>*Ibid.*, vii.

membangun kemungkinan untuk menginterpretasikan kebudayaan kepada orang lain, begitu pula sebaliknya, orang lain menginterpretasikan kebudayaannya.<sup>13</sup>

Komunikasi lintas budaya adalah proses dan dinamika mempelajari komunikasi dalam pelbagai dimensi bentuk dan maknanya, baik di antara individu maupun kelompok suku bangsa dan ras yang berbeda pada jenjang “negara”. Sedangkan komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suatu suku bangsa atau bangsa yang sama.<sup>14</sup>

Gagasan dasar dari komunikasi lintas budaya terletak pada aspek-aspek: *pertama*, komunikasi antara orang-orang dan kelompok yang berbeda budaya, yang dipengaruhi oleh perbedaan sikap, sumber daya, sejarah dan banyak faktor lainnya; *kedua*, proses interpretasi dan interaksi yang dipengaruhi oleh partisipan dalam komunikasi.<sup>15</sup> Interaksi atau kontak yang terjadi dalam komunikasi lintas budaya adalah pertukaran sosial, kerjasama, persaingan, dan konflik. Setelah kontak terjadi, maka seringkali muncul konsep etnosentrisme.

Komunikasi antara budaya berarti komunikasi antara orang-orang yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan yang berbeda, baik dalam hal etnik, ras, suku, agama, sosial, ekonomi dan variasi-variasi yang lain.

Para ilmuwan sosial dan humaniora mengakui bahwa budaya dan komunikasi mempunyai hubungan timbal balik, ibarat dua sisi dari sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut. Aron Meko Mbete menyatakan bahwa *culture is communication and communication is culture*. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda.<sup>16</sup> Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda pula, dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda. Cara berkomunikasi kita sangat bergantung pada budaya kita: bahasa, aturan,

dan norma. Perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal dan akan menyebabkan sekurang-kurangnya komunikasi tidak lancar, timbul perasaan tidak nyaman, atau kesalahpahaman.

Dari beberapa konsep operasional tersebut dapat dipastikan bahwa penggunaan tangan kiri oleh masyarakat Sulawesi Tenggara lebih mudah ditemukan dan karenanya sebagian membudaya di tengah-tengah masyarakat, tentu jumlahnya tidak banyak. Secara umum, suku yang hidup dan berkembang di jazirah Sulawesi Tenggara Daratan adalah suku Tolaki. Sementara di kepulauan merujuk penyebutan wilayah dalam BPS 2010-2020, ada sekitar 17 kabupaten/kota, misalnya: Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Kota Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Wakatobi, Bombana, Muna, Muna Barat, Kota Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, meskipun juga ada suku-suku pendatang, misalnya suku Jawa, Bali, Sunda, dan beberapa suku yang lain, misalnya, Muna, Kolaka, Buton, Wakatobi, Bugis, dan Wawoni.<sup>17</sup>

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sekitar kampus perak Sulawesi Tenggara, baik masyarakat di depan kampus maupun mahasiswa itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode etnografi, yaitu melakukan observasi dan *interview* langsung pada para informan yang sehari-hari menggunakan tangan kiri sebagai media berinteraksi dengan orang lain, dengan kata lain mendeskripsikan kebudayaan berupa penggunaan tangan kiri sebagaimana adanya. Data penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari subyek yang menjadi objek penelitian, bagaimana subyek itu berfikir, hidup, dan berperilaku.<sup>18</sup> Data sekundernya terdiri dari beberapa sumber pustaka, baik elektronik (internet) maupun cetak, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terkait.

### D. HASIL

Penggunaan tangan kiri oleh beberapa

<sup>13</sup> Aron Meko Mbete (Penyunting), *Etnisitas, Pluralisme, dan Multikulturalisme: Perspektif Kajian* (Denpasar: Pelawa Mandiri-Pascasarjana kajian Budaya UNUD, 2008), 43.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 43.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>16</sup> *Ibid.*, IX.

<sup>17</sup> <https://sultra.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/74> (diakses pada 27 mei 2017).

<sup>18</sup> Suwardi Endra Swara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: UGM Press, 2003), 50.

informan dalam penelitian ini bervariasi. Terkadang penggunaan tangan kiri, karena memang tangan kanan tidak dapat difungsikan secara optimal, sebagaimana kebanyakan orang. Berikut penuturan Afsal:

“...Penggunaan tangan kiri olehnya dimulai sejak kecil, antara usia 5 (lima) tahun. Pernah suatu ketika hendak masuk SD (sekolah dasar), saya dipaksakan oleh orang tua untuk menulis dengan tangan kanan, agar ketika awal masuk SD bisa menggunakan tangan kanan sebagaimana teman-teman yang lain, sementara ketika tangan kiri digunakan untuk menulis, lebih mudah dan lancar...”.<sup>19</sup>

Lebih lanjut apa yang dikatakan Afsal, bahwa tangan kiri sudah biasa digunakan untuk hal-hal yang bersifat ringan, seperti menulis, memasak, dan aktivitas-aktivitas ringan yang lain, sementara untuk aktivitas yang berat, mengangkat meja, potong cabang pohon atau yang lain dan dianggap berat tetap tangan kanan. Sementara Kidal menurutnya adalah penggunaan tangan kiri lebih dominan. Penggunaan tangan kiri atau tangan kanan baginya adalah sama-sama baiknya, meskipun ada perasaan kurang nyaman ketika diingatkan oleh orang tua sewaktu masih kecil, misalnya selalu diingatkan agar tetap menggunakan tangan kanan ketika berinteraksi sosial dengan orang lain. Tentu baginya bukan hal yang susah ketika harus dirubah dalam berinteraksi, baik saat menyerahkan atau menerima dengan menggunakan tangan kanan, terutama ketika sadar akan memberikan sesuatu. Sementara sesuatu itu sudah berada di genggam tangan kiri, maka bisa dan mudah untuk dipindahkan pada tangan kanan, kemudian tangan kanan menyerahkan pada tangan kiri. Hal lain yang justru berat, ketika absensi atau tanda tangan jika diharuskan dengan kanan, rasanya tangan kanan gemetar dan sedikit sekali daya untuk menuangkan sebuah tanda tangan, selain hasil yang didapat tidak sebaik hasil dari tanda tangan dengan menggunakan tangan kiri.

Berbeda dengan informan lain, Lela Sri, mahasiswi Antropologi semester 3 (tiga) ini mengungkapkan bahwa tangan kiri

digunakannya secara total, artinya aktivitas baik yang ringan atau berat hanya tangan kiri. Penggunaan tangan kiri yang sering digunakan Lela, bukan karena faktor keturunan atau gen tertentu. Menurutnya apa yang telah terjadi pada perilakunya dengan tetap menggunakan tangan kiri semata-mata tangan kanan belum bisa berfungsi sebagaimana tangan kanan pada orang lain. Berikut pernyataan Lela:

“...Tangan kiri saya memang sudah lama saya gunakan sejak kelas SD. Maksudnya sejak SD baru sadar kalau saya ternyata menggunakan tangan kiri yang biasa saya gunakan dalam berinteraksi dengan orang lain...”.<sup>20</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tangan kiri yang digunakannya, semata-mata memang sejak kecil sampai saat ini. Artinya bagi Lela, dalam bersosialisasi penggunaan tangan kiri lebih sering dari pada tangan kanan, termasuk dalam hal-hal yang kecil, misalnya membolak-balik kertas terkecuali salaman.

Sebenarnya perilaku orang kidal justru bisa diuntungkan, terutama jika kidal atau penggunaan tangan kiri seseorang, juga diimbangi kemampuan tangan kanannya terutama dalam konteks menulis. Kidal dimaknai secara luas, tangan kiri bisa, tangan kanan juga bisa, semua bisa saling bergantian. Sebagaimana terungkap dalam salah satu pernyataan informan La Ode Aris:

“...Penggunaan tangan kiri memang pernah saya lakukan ketika saat sekolah bahkan sampai di SMA, namun oleh Guru saya dilarang bahkan cenderung dipaksa agar saya mengusahakan menulis dengan tangan kanan, apalagi sekarang setelah saya dewasa, saya tetap tidak membenarkan penggunaan tangan kiri dalam berinteraksi dan bersosial dengan orang lain”.<sup>21</sup>

Dalam penelitian penggunaan tangan kiri di masyarakat Sulawesi Tenggara ini, sebagian besar kasus penelitian cenderung kidal, meskipun kidal oleh mereka yang waktu kecil sampai usia SMA saja, kemudian waktu mahasiswa sudah bisa

<sup>19</sup> Wawancara dengan Afsal, 22 Agustus 2016.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Lela Sri, 24 Agustus 2016.

<sup>21</sup> Wawancara dengan La Ode Aris, 18 Agustus 2016.

menggunakan tangan kanan akibat saran dari seorang guru untuk menggunakan tangan kanan, sebagaimana pernyataan informan La Ode Aris. Menurut Aris, perilaku kidal ternyata tetap bisa berubah dengan pola berperilaku setiap hari dengan tangan kanan.

Temuan dan pembacaan penulis dalam konteks penggunaan tangan kiri menemukan pola sejak kecil itulah yang menjadikan perilaku dengan tangan kiri menjadi kebiasaan dan bukan sesuatu yang menyimpang atau ganjil, bahkan kidal (jika kidal adalah penggunaan tangan kiri). Perilaku penggunaan tangan kiri sejak kecil inilah yang perlu dilatih untuk tetap menggunakan tangan kanan.

Sebenarnya setiap anak sejak kecil berpeluang menjadi kidal. Bagaimana kalau sudah terlanjur kidal? Ada baiknya bagi yang sudah terlanjur kidal, untuk belajar menggunakan tangan kanan. Mereka yang kidal akan lebih mudah belajar menggunakan tangan kanan. Sedangkan kita yang selalu menggunakan tangan kanan akan kesulitan bila belajar menggunakan tangan kiri. Kebudayaan kolektif sebagai pemilik budaya dimana seseorang hidup dan dibesarkan, tentu berusaha menjadikan etika-etika yang hidup menyatu menjadi perilaku masyarakat tetap dikedepankan, dihormati. Manusia sebagai makhluk sosial, tetap mengikuti etika yang berlaku di masyarakat jika masih mau dianggap oleh orang lain. Lain halnya, bila seseorang rela dianggap tidak tahu etika atau orang yang tidak mau mengganggu orang lain.

Sementara jika diperhatikan dalam perspektif agama atau budaya orang Jawa, mungkin juga budaya manapun, termasuk budaya orang Sulawesi, terutama yang sudah pernah hidup di Jawa karena studi dan lain hal, maka penggunaan tangan kiri oleh masyarakat Sulawesi Tenggara belum bisa diterima secara mutlak, artinya interaksi budaya yang berjalan antara mereka yang sesama Sulawesi, pada saat tertentu bisa diterima secara penuh, apakah dengan tangan kiri atau tangan kanan dalam bersosial. Sementara pada acara yang resmi, sebagian mereka dari orang Sulawesi Tenggara tetap berpendapat penggunaan tangan kanan di junjung tinggi, artinya berharap besar tetap menggunakan tangan kanan, misalnya serah terima jabatan. Pada konteks yang bukan resmi, masing-masing memberikan penilaian yang

berbeda. Berikut pernyataan dari Wa Ode Sifatu,<sup>22</sup> Dosen Antropologi UHO bahwa bagaimanapun budaya tetap dijunjung tinggi, terutama jika berinteraksi dengan orang Jawa atau bukan orang Sulawesi, maka penggunaan tangan kanan lebih diterima dari pada tangan kiri. Sementara mereka yang dari kecil sampai menjadi dosen hidup dan bersosial di dalam Sulawesi, melihat penggunaan tangan kiri bukan sesuatu yang menyimpang atau ada keganjilan, baginya yang terpenting masing-masing dari mereka mengkomunikasikan sesuatu antara subjek pertama dan kedua bisa diterima pesan yang saling diucapkan, berbeda jika dengan komunikasi penggunaan tangan kiri, masing-masing dari pihak tidak bisa saling menangkap pesan yang hendak dibicarakan, sehingga muncul komunikasi yang tidak efektif dan menimbulkan perilaku yang tidak lama.

Penulis sependapat bahwa apapun yang digunakan, dan dengan media apa saja tidak masalah selama yang bersangkutan merasa nyaman. Satu kasus apakah dalam masyarakat Kendari, khususnya yang mahasiswa di kampus Perak, apakah mereka menggunakan tangan kanan atau kiri merupakan pilihan. Bagi yang Kidal, sebuah definisi yang dipahami salah satu informan "kidal itu ya tangan kiri", maka tangan kiri yang dominan digunakan, sebaliknya informan lain menyebutkan bahwa sebenarnya kidal itu karena perilaku sejak kecil kurang mendapat perhatian oleh orang disekelilingnya ketika hendak memberikan sesuatu, sebagaimana ungkapan informan La Ode Aris. Pada saat yang bersamaan, ternyata perilaku tangan kiri yang oleh masyarakat lain tetap belum bisa menerima perlakuan itu, artinya dibutuhkan sebuah pemahaman bersama bahwa penggunaan tangan kiri adalah hal yang biasa, bukan sesuatu yang diperdebatkan. Tetapi dalam konteks dan lingkup yang lebih luas, penggunaan tangan kiri oleh mereka yang sejak kecil adalah tangan kiri dan pada saat dewasa, telah menjabat sebagai birokrat, maka pada sebuah *ceremonial* formal tertentu yang melibatkan dirinya dengan orang lain, tentu tetap dikedepankan etika berkomunikasi agar masing-masing budaya yang ada, tetap saling menghormati.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Wa Ode Sifatu, 21 Agustus 2016.

Menurut teori, perilaku seseorang ditentukan oleh penggunaan tangan. Biasanya sebelum bertindak, otak seseorang akan berfikir, mana yang boleh dan mana yang tidak, baik dalam lingkup kecil, sedang, besar. Tentu ungkapan itu benar dan seharusnya dilakukan, termasuk jika seseorang melihat kebudayaan orang dengan menggunakan tangan kiri dalam bersosial, sementara yang bersangkutan pada dasarnya memang bisa dengan tangan kanan, itu adalah sebuah perilaku yang pelan-pelan dapat dilakukan. Sebagaimana ungkapan La Ode Aris. Dalam penelitian terbaru, pilihan seseorang sangat mungkin juga dipengaruhi penggunaan tangan yang dominan, entah kita kidal/tangan kiri dominan karena yang kiri kurang bisa berfungsi maksimal atau tidak. Hal itu karena orang-orang yang menggunakan tangan kanan lebih sering memperhatikan sisi kanan halaman atau layar, sementara orang kidal memerhatikan sisi kiri. Peneliti kognitif Daniel Casasanto dari *The New School for Social Research* mengatakan bahwa ini dinamakan "hipotesis kekhususan tubuh", alias sebuah pendapat bahwa tubuh fisik kita memengaruhi keputusan yang kita buat dan cara kita berkomunikasi satu sama lain. Salah satu cara yang paling mudah untuk menerapkan hipotesis ini adalah dengan melihat apakah seseorang itu kidal atau tidak. "Melihat tangan mana yang dominan sangat mudah dijadikan parameter karena mudah dilakukan. Tangan kita sangat penting dalam menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia.

## E. PENUTUP

Penggunaan tangan, di satu sisi memang kidal karena tangan kanan tidak berfungsi sebagaimana kekuatan yang ada di tangan kanan. Meski demikian, lain orang berbeda perlakuan kidal. Sebagian setelah diarahkan ketika sudah remaja dan akhirnya dapat menggunakan tangan kanan dalam aktivitas menulis. Namun banyak pula yang waktu kecil kidal atau menggunakan tangan kiri, namun sudah berusaha menggunakan tangan kirinya tetap susah bahkan hasil dari tulisannya tidak bagus dan rasa pada tangan gemetar.

Secara umum, memang bukan hal yang aneh dan dianggap ganjil karena kebudayaan yang dibangun oleh masyarakat sekitar kampus perak tidak seketat di Jawa. Artinya, setiap perilaku

selalu dikontrol ketat oleh masyarakat di lingkungannya, kalau di Kendari, kami sering dan mendengarkan orang-orang begadang hingga dini hari, bisa 1 minggu 3 sampai 4 hari tidak pernah ada yang mengingatkan, mungkin saja diingatkan namun tidak diindahkan. Itu sebuah analog yang barangkali Kendari berbeda dan memang harus berbeda sebagai sebuah warisan leluhur. Tangan kiri yang digunakan pada masyarakat kampus perak ini, akhirnya bisa dipahami bahwa selain pola pengasuhan anak sejak kecil kurang diperhatikan apakah mereka waktu kecil dalam berinteraksi dengan sosial lainnya terutama dalam hal memberi dan menerima, menggunakan tangan kanannya atau malah tangan kirinya. Tentu di sini dibutuhkan sebuah pemahaman agar penggunaan tangan oleh masyarakat Kendari dipahami sebagai sebuah perilaku kidal, walaupun tetap digunakan tangan kiri, maka untuk konteks-konteks tertentu, diperlukan tangan kanan yang digunakan.

## Saran

Penelitian ini belum bisa mengungkap ketika dalam seremonial agak formal, yang secara umum ditemukan para birokrat reflek karena memang kesehariannya lebih menggunakan tangan kiri, maka setelah dikonfirmasi ada kesan bahwa tetap menggunakan tangan kanan, meskipun saat disaksikan tangan kiri yang mereka gunakan, namun setelah dikonfirmasi yang bersangkutan menjawab dengan tetap menggunakan tangan kanan. Artinya memang ada kesan bahwa tangan kiri tetap belum selayaknya digunakan utamanya ketika mereka menjadi salah satu figur publik, yang tanda tangannya sering digunakan untuk kepentingan publik, ada kesan mengedepankan tangan kanan ketika bersosial dengan orang lain. Meskipun dalam kesehariannya tangan kiri yang sering digunakan, tentu hanya pada mereka yang kebetulan birokrat dan tanda tangannya sering digunakan orang lain, memiliki kemampuan penggunaan tangan kanan dan kiri. Hasilnya akan berbeda, ketika memang tidak bisa menggunakan tangan kanan dan hanya bisa tangan kiri atau tangan kiri lebih baik dan memang lebih nyaman dari pada tangan kanan.

## DAFTAR PUSTAKA

---

### BUKU:

- Endra Swara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: UGM Press, 2003.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation Of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Geertz, Clifford. *Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture*. New York: Basic Books, 1973.
- Geertz, Clifford. *Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective*, New York: Basic Books, 1983.
- Geertz, *Tafsir Kebudayaan* diterjemahkan oleh Francisco Budi Hardiman, cet. 6. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mbete, Aron Meko. (Penyunting), *Etnisitas, Pluralisme, dan Multikulturalisme: Perspektif Kajian*. Denpasar: Pelawa Mandiri-Pascasarjana kajian Budaya UNUD, 2008.

### Jurnal:

- Oldfield, R.C. "The Assessment and analysis of handedness: the edinburgh inventory". *Journal of Neuropsychologia*, vol.9 (1971): 97-113.

### Internet:

- BPS 2010-2020. *Proyeksi Penduduk Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2020*. Lihat...<https://sultra.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/74> (Diakses pada 27 Mei 2017).

<http://communicationtheory.org/ethnography-of-communication/>, diakses pada 27 Mei 2017.

### Interview:

- Wawancara dengan La Ode Aris pada 18 Agustus 2016
- Wawancara dengan Lela Sri pada 21 Agustus 2016
- Wawancara dengan Wa Ode Sifatu pada 21 Agustus 2016
- Wawancara dengan Afsal pada 22 Agustus 2016



---

## TOPIK

---

# THE DYNAMICS OF WORSHIP IN GEREJA INJILI IN INDONESIA (GIDI) AFTER THE TOLIKARA CONFLICT: A CASE STUDY IN MOJOKERTA VILLAGE, KEDAWUNG SUBDISTRICT, SRAGEN REGENCY

MUSTOLEHUDIN\*

---

### ABSTRACT

*Evangelical church named Gereja Injili in Indonesia (GIDI) has been established in Sragen since 1990. Since its establishment to the mid-2015, there has been no significant disagreement with the local people. A friction appeared shortly after Tolikara conflict in July 2015. By employing a qualitative approach, this study finds out that: first, GIDI in Sragen has not obtained a juridical license according to Joint Ministerial Regulations (PBM) No. 8 and 9 2006. Second, the accusation of Surakarta Muslim Troops (Laskar Umat Islam Surakarta) that GIDI created disharmony in the society was proven not true. The church committee maintained a good cooperation with local society in terms of helping them during their celebration ceremonies.*

**KEY WORDS:** GIDI Sragen, House of Worship, LUIS, FKUB.

## DINAMIKA PERIBADATAN GEREJA INJILI DI INDONESIA PASCA KONFLIK TOLIKARA: STUDI KASUS DI DESA MOJOKERTO KECAMATAN KEDAWUNG SRAGEN

### ABSTRAK

Keberadaan Gereja Injili di Indonesia di Sragen telah ada sejak tahun 1990. Sejak berdiri hingga pertengahan tahun 2015 tidak terjadi kendala yang berarti. Gesekan mulai muncul pasca peristiwa konflik Tolikara bulan Juli 2015. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini diperoleh temuan bahwa; Pertama, secara yuridis GIDI di Sragen belum berizin sesuai PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 karena gereja ini sudah ada sejak tahun 1990. Kedua, tuduhan Laskar Umat Islam Surakarta bahwa gereja tersebut meresahkan warga tidak terbukti, hal ini disebabkan pengurus gereja menjalin kerja sama dengan warga dalam bentuk gotong royong apabila di antara warga mempunyai hajatan.

**KATA KUNCI:** GIDI Sragen, Rumah Ibadat, LUIS, FKUB.

---

\*Balai Litbang Agama Semarang Jl. Untung Suropati Kav 69 – 70 Bampakerep, Ngaliyan, Semarang Telepon (024) 7601327, Facs (024) 7611386, Email : [mustolehuddin@gmail.com](mailto:mustolehuddin@gmail.com)

\*\* Naskah diterima Februari 2017, direvisi Mei 2017 dan disetujui untuk dimuat Juni 2017

## A. PENDAHULUAN

Peristiwa konflik di Tolikara, yakni pembakaran kios-kios oleh pemuda GIDI dan merembet membakar mushola saat umat Islam menunaikan salat Idul Fitri 2015, memicu emosi sebagian umat Islam di Indonesia terhadap Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Salah satunya adalah aksi penolakan GIDI oleh Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) di Sragen. Sebagaimana dilansir media sosial bahwa LUIS meminta Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menutup dan menghentikan aktifitas GIDI karena belum ada izin dari Bupati Sragen, dan gereja tersebut menurut mereka meresahkan warga.<sup>1</sup> Di Sragen terdapat dua GIDI yakni di Dukuh Batu Kulon RT 18 RW 6 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung dan di Dukuh Jatirejo RT 3 Sambi Desa Sambirejo Kecamatan Sambirejo. GIDI tersebut menurut Endro koordinator LUIS, keberadaannya belum berizin baik ijin sementara maupun ijin permanen.

Kasus penutupan GIDI di Sragen tersebut di satu sisi dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, namun di sisi lain hal ini tidak terlepas dari kasus yang terjadi di Tolikara Papua yang melukai masyarakat muslim saat menunaikan ibadah salat Idul Fitri. Dalam kaca mata hukum, kasus Tolikara telah melanggar hak asasi umat Islam untuk menjalankan agamanya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Komnas HAM, bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Tolikara. Pelanggaran HAM tersebut adalah pertama terjadi kasus intoleransi. Bahwa hak atas kebebasan beragama seperti dijamin dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU 39 Tahun 1999 tentang HAM<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Panjimas Com. Tak Berijin Serta Resahkan Warga, LUIS Minta Dua Gereja GIDI di Sragen Tutup. <http://www.panjimas.com/news/2015/09/10/tak-berijin-serta-resahkan-warga-luis-minta-dua-gereja-gidi-di-sragen-ditutup> (diakses, Desember 2015)

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Fakta, (1) Bupati Tolikara, Usman Wanimbo mengakui sudah menandatangani bersama dua Fraksi DPRD Tolikara (2013) Perda tentang pelarangan dan pembatasan agama dan pengamalan agama tertentu di Tolikara. Perda itu dalam perspektif HAM dinilai diskriminatif. Bupati Tolikara berjanji akan memberikan dokumen Perda 2013 itu ke Komnas HAM. Fakta (2) adanya surat dari GIDI Badan Pekerja Wilayah Tolikara Nomor90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S. Th dan sekretaris Pdt Marthen Jingga, S.Th., MA. Nilasari. Komnas HAM : Terjadi Pelanggaran pada Peristiwa Tolikara. <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuarhary/komnas-ham-terjadi->

Dalam perspektif agama, bahwa sebagian masyarakat Tolikara yang mayoritas Kristen telah membatasi ruang kebebasan beragama di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat dampak konflik Tolikara di daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses terjadinya penolakan GIDI di Sragen, 2) Mengapa terjadi penolakan GIDI oleh Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) di Sragen. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah pertama; mendeskripsikan proses terjadinya penolakan GIDI dan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya penolakan oleh LUIS tentang keberadaan GIDI di Sragen.

## B. KERANGKA TEORI

Secara teoritis, kasus penutupan rumah ibadah terjadi karena adanya konflik yang terjadi di masyarakat. Mengenai kasus penutupan Gereja Injili di Indonesia Kabupaten Sragen dapat menjadi konflik horisontal apabila tidak ditangani dengan serius. Akan tetapi, apabila konflik tersebut dapat dikelola dengan baik melalui jalan dialog tentu tidak akan menimbulkan kontak fisik dalam masyarakat. Mengapa kasus GIDI di Sragen tidak sampai menimbulkan konflik horisontal? Hal ini karena terjadi interaksi positif pada masyarakat tersebut.

Interaksi yang berbentuk oposisi atau dissosiatif tidak mesti bersifat negatif tetapi juga dapat berakibat positif. Interaksi dissosiatif ini meliputi persaingan, dan pertikaian<sup>3</sup>. Persaingan merupakan suatu perjuangan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk melakukan aksi damai. Sedangkan pertentangan merupakan suatu perjuangan sosial yang

---

pelanggaran-ham-pada-peristiwa-tolikara (diakses 8 Desember 2015). Kedua, pelanggaran terhadap hak untuk hidup, sebagaimana dijamin dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya ada korban penembakan yang menyebabkan seorang meninggal dunia yaitu Wanimbo dan dan 11 orang terkena luka tembak. Ketiga, pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, sebagaimana dijamin dalam pasal 9 ayat (2), 29 ayat (1), 30 dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 tentang HAM. Keempat, pelanggaran terhadap atas kepemilikan, sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU Tahun 1999 namun demikian terdapat pembakaran yang menyebabkan terbakarnya kios/sentra ekonomi warga, rumah ibadah muslim (musala), dan rumah warga (property)

<sup>3</sup> Soleman B Taneko, Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1993), 121 - 122

dilakukan oleh individu (orang per orang) atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan melukai atau menghancurkan pihak lawan<sup>4</sup>. Persaingan tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya, akan tetapi persaingan juga terjadi dalam ranah religi atau agama<sup>5</sup>.

Ciri khas persaingan adalah adanya tujuan yang sama yang hendak dicapai. Penilaian yang berbeda didasarkan pada cara dan derajat mutu persaingan. Tidak adanya kekerasan dan ancaman untuk menghancurkan pihak lain juga merupakan ciri persaingan. Hal ini memungkinkan persaingan berjalan damai. Jadi bahwa tujuan persaingan sangat berperan, yang dikejar bukan pribadi peserta persaingan, melainkan nilai yang telah ditentukan,<sup>6</sup> sehingga upaya persaingan dilakukan secara damai atau secara "*fair play*", artinya selalu menjunjung tinggi batas-batas yang diharuskan. Namun demikian persaingan mempunyai tendensi ke arah pertikaian atau pertentangan, selain dapat pula mendorong untuk saling bekerja sama<sup>7</sup>.

Adapun pertikaian atau pertentangan (konflik) didefinisikan sebagai perjuangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu atau kelompok untuk memperoleh pengakuan status, kekuasaan dan pengaruh<sup>8</sup>. Sebaliknya dengan semakin melemahnya konflik, maka solidaritas internal menjadi semakin lemah<sup>9</sup>.

Faktor-faktor yang dapat mempertajam terjadinya konflik adalah adanya perbedaan ideologi yang mendasar karena tidak senang terhadap nilai-nilai kelompok lain, adanya perbedaan kelas, makin meningkatnya mobilitas status yang cenderung memaksakan kontak di

antara individu-individu dan kelompok-kelompok, dan makin intensifnya perjuangan politik yang cenderung menguburkan keadaan agama dengan kepentingan politik.

Sementara itu, Pruitt dan Rubin<sup>10</sup> menyebutkan sumber-sumber konflik adalah adanya determinasi tingkat aspirasi, determinasi persepsi tentang aspirasi pihak lain, dan tidak adanya alternative yang dapat diterima semua pihak. Dengan demikian, konflik terjadi karena adanya persaingan, pertentangan, adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, tidak adanya jalan tengah (alternatif solusi masalah) yang dilakukan antar pribadi dan kelompok yang terdapat dalam suatu masyarakat.

## Kajian Pustaka

Penelitian tentang penolakan maupun penutupan tempat ibadah pernah dilakukan CRCs UGM Yogyakarta. Dalam laporan tahunan lembaga tersebut, telah terjadi berbagai persoalan yang menyangkut rumah ibadah berupa pengalihfungsian, pembekuan, penyegehan, penutupan atau pengusuran, pengrusakan, teror, dan bom bunuh diri di dalam rumah ibadah<sup>11</sup>.

Hal ini seperti terjadi pada penutupan masjid jemaat Ahmadiyah di Samarinda, penyerangan sekelompok massa terhadap Gereja Katolik Petrus dan Paulus di Temanggung, penyerangan sekelompok massa terhadap Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Temanggung, penyerangan sekelompok massa terhadap Gereja Pantekosta di Kaloran, penyerangan Gereja GPIB Bekasi, penutupan dan pengalihfungsian masjid Ahmadiyah di Depok, penyegehan GKI Taman Yasmin Bogor, penyegehan masjid Ahmadiyah di Karanganyar Jawa Tengah, teror bom di halaman Gereja Pantekosta Pasar Surabaya, pembakaran Kapela Katolik Santo Antonius di Air Molek Riau, pembongkaran masjid Rahdatul Islam oleh pihak pengembang di Medan, dan ledakan bom bunuh

<sup>4</sup> Kimball Young and Mack Raymond W, *Sociology and Social Life* (New York: American Book Company, 1959), 192 - 193

<sup>5</sup> Soleman B Taneko, *Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1993), 21

<sup>6</sup> Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)

<sup>7</sup> Soleman B Taneko, *Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1993), 121

<sup>8</sup> Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Routledge, 1956), 7

<sup>9</sup> Johnson, Doyle P, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, jilid 1 dan 2, diterjemahkan oleh Robert M Z Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1996), 95

<sup>10</sup> Pruitt D.G dan Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 37

<sup>11</sup> Zainal Abidin Bagir dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*. (Yogyakarta : Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center For Religious and Cross-cultural Studies) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2011), 42

diri di masjid Polres Cirebon<sup>12</sup>.

Pemetaan rumah ibadah yang dilakukan Zakiyah<sup>13</sup> dijelaskan bahwa di Temanggung terjadi beberapa kasus terkait rumah ibadah; seperti penggunaan ruko sebagai tempat ibadah agama Kristen di Kelurahan Giyanti, penggunaan ruko sebagai tempat ibadah umat Kristen di Jampiroso, gedung bioskop menjadi tempat ibadah umat Kristen, dan penolakan pembangunan Budha Center di Temanggung.

Sementara itu, Mustolehudin<sup>14</sup> yang meneliti alihfungsi rumah toko (ruko) menjadi Vihara Prajna Maitreya diperoleh temuan bahwa, meskipun terjadi konflik antarwarga akan tetapi tidak sampai menimbulkan konflik secara fisik. Hal ini disebabkan tokoh agama, tokoh masyarakat menggunakan pendekatan budaya dialog yang dilakukan secara berkelanjutan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik yaitu Budha dan masyarakat sekitar di wilayah Kelurahan Sokanegara, Purwokerto Timur Banyumas.

Konflik yang terjadi di Sragen terkait penolakan GIDI, tidak terlepas dari peran media yang cenderung mengkompromi kasus tersebut sehingga menyebar secara luas melalui media sosial. Menurut Armando dalam Dauly<sup>15</sup>, media massa memiliki peran sebagai alat mobilisasi opini publik tentang konflik-konflik yang terjadi di suatu wilayah. Sebagai contoh adalah konflik pembakaran musala di Tolikara begitu cepat menerabas ruang dan waktu saat umat Islam di wilayah tersebut menunaikan ibadah salat Idul Fitri 2015. Begitu peristiwa ini terjadi, media sosial secara gencar memberitakan peristiwa tersebut, sehingga memancing emosi umat Islam di tempat lain di sebagian wilayah Indonesia. Salah satunya adalah mengakibatkan GIDI di Kabupaten Sragen ditentang oleh masyarakat di wilayah itu.

---

<sup>12</sup> Zainal Abidin Bagir dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*. (Yogyakarta : Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center For Religious and Cross-cultural Studies) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2011), 48 - 49

<sup>13</sup> Zakiyah, *Data Base Keagamaan Lembaga/Organisasi Kerukunan dan Kasus Keagamaan Kabupaten Temanggung*. (Semarang : Balitbang Agama Semarang Kementerian Agama RI 2015)

<sup>14</sup> Mustolehudin, *Pendekatan Sosiologis dalam Penangan Potensi Konflik Pendirian Masjid dan Vihara di Banyumas*. *Jurnal Al Qalam* (Vol 21, No. 1 Juni 2015), 55-66.

<sup>15</sup> Muhamad Zainuddin Dauly, *Mereduksi Eskalasi Konflik antarumat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2001), 134

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yakni penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati<sup>16</sup>. Jenis penelitian ini adalah penelitian kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara detail mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, atau lembaga. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen.

Wawancara dilakukan terhadap tokoh GIDI, jemaat GIDI, tokoh masyarakat, pejabat dari institusi terkait (Kementerian Agama, tokoh lintas agama (FKUB Kabupaten Sragen), dan masyarakat di sekitar GIDI. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi gereja pasca terjadinya penutupan, dan studi dokumen dengan membaca data-data yang terkait baik dari media sosial, data BPS, maupun studi pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu. Informasi kunci dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar gereja tersebut.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data-data yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis dengan teknik deskriptif yang merupakan suatu alur kegiatan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Analisis penelitian ini tidak hanya dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang dideskripsikan, tetapi sedapat mungkin memberi kejelasan obyek penelitian yang dilakukan<sup>17</sup>.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Setting Sosial Keagamaan Masyarakat Kedawung

Penduduk di Kecamatan Kedawung berjumlah 60.691 jiwa yang terdiri dari 29.951 berjenis kelamin laki-laki dan 30.740 berjenis kelamin perempuan. Secara umum masyarakat Kabupaten Sragen penduduknya beragama Islam. Penduduk beragama Islam berjumlah 59.826, Kritsen Protestan berjumlah 181, Katolik

---

<sup>16</sup> Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya 2000

<sup>17</sup> Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya (2000), 36

632, Hindu 10 orang, dan Budha 2 orang<sup>18</sup>.

Secara geografis dan demografis, luas wilayah Kecamatan Kedawung adalah 4.978 Ha, terdiri dari 10 Desa, 158 Dukuh, 88 RW, 301 RT. Wilayah Kecamatan Kedawung sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karangmalang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sambirejo, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Masaran.

Berdasarkan pemeluk agama tersebut, tentunya diperlukan adanya sarana prasarana untuk beribadah bagi masyarakat Kedawung. Adapun rumah ibadah di Kedawung adalah sebagai berikut; masjid 195, langgar 154, musala 19, gereja 7, kelenteng 3, dan pura 1 buah.

### **Profil GIDI**

Gereja Injili di Indonesia di Sragen, awal mulanya berdiri tahun 1980. Pada waktu itu yang menjadi ketua GIDI di Kabupaten Sragen adalah Pdt Lipius. Ia menjadi pelayan umat kristiani sejak tahun 1980 - 1990. Sejak berdiri jemaat kristiani GIDI tidak mengalami perkembangan yang berarti. Tokoh agama di Sragen Moechtinguddin memberikan penjelasan sebagai berikut:

“GIDI teng Sragen niki awalipun wonten Dusun Jatirejo lan Dusun Batu, kirang langkung jemaat GIDI antawisipun tigang doso (30) wonten Batu Mojokerto lan enem (6) keluarga wonten. Awit tahun 1990 an dugi sakmeniko jemaat kirang berkembang”.

GIDI di Sragen tepatnya di Jatirejo dan Batu, jemaatnya sekitar 30 orang di Batu Mojokerto dan 6 anggota keluarga di Jatirejo Sambi Sambirejo. Sejak tahun 1990-an sampai sekarang tidak mengalami perkembangan yang berarti.

Kemudian pada tahun 1990, GIDI Sragen membuat surat pemberitahuan tempat ibadah GIDI kepada Kepala Penyelenggara Bimas Kristen Protestan di Surakarta. Isi surat tersebut adalah pemberitahuan GIDI di Dukuh Batu Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen akan digunakan sebagai rumah ibadah pada setiap Minggu di Mojokerto jam 08.00 pagi, setiap hari Rabu di Mojokerto jam 15.00 sore,

setiap hari Minggu bertempat di Kedawung, Janggang jam 18.00 sore, dan setiap hari Rabu di Kedawung, Janggang jam 16.00 sore. Tempat kebaktian di rumah Bapak Sasro Mardi Kedawung, dan rumah Bapak Gito Sentono. Surat tersebut ditandatangani oleh Pdt Andreas Yikwa, dengan tembusan ke Camat Kedawung, Danramil Kedawung, dan Polsek Kedawung. Di akhir surat, terdapat tambahan yang isinya: 1) 'tempat kebaktian tersebut digunakan sebagai gereja sementara sampai dapat membangun gereja, 2) Pelayanan semula pertama dilayani oleh Pdt Stevanus Sutarjo (Injili), dan 3) Hari-hari kebaktian tersebut di atas bila perlu dapat dirubah atau ditambah.

Surat tersebut secara resmi telah diketahui Kapolsek Kecamatan Kedawung Bapak Darto, Danramil Kedawung Setu Tjiptohadi tertanggal 27 September 1990. Selain itu pula, surat diketahui Camat Kedawung Budi Setiawan BA, dan Sekretaris Desa Kedawung Sastro Rahman tanggal 28 September 1990. Surat tersebut juga diketahui oleh Kepala Desa Mojokerto Wito Hartana tanggal 7 Oktober 1990, dan RT 25 RW 24 tanggal 7 Oktober 1990 Bapak Sanasari, dan Ketua RT 19 Batu Mojokerto Bapak Gito Wiyono tanggal 9 Oktober 1990.

Berdasarkan surat pemberitahuan tentang tempat kebaktian GIDI di Dukuh Batu RT 18 Mojokerto Kedawung, pihak pengelola telah melakukan pendekatan persuasif kepada pemerintah. Artinya bahwa gereja ini secara hukum ingin tunduk kepada pemerintah.

Selanjutnya, masa kepemimpinan kependetaan GIDI di desa tersebut dipimpin oleh Pendeta Andreas Yikwa dari tahun 1990 hingga tahun 2000. Kemudian sejak tahun 2000 hingga sekarang tahun 2015, kepengurusan GIDI dilanjutkan oleh Pdt Wisnu Joko.

Pada akhir tahun 2015 itulah tepatnya 11 September terjadi gesekan akibat peristiwa Tolikara pada bulan Juli 2015. Setelah terjadi aksi penolakan oleh LUIS, gereja tersebut saat ini masih digunakan sebagai tempat ibadah keluarga. Jadwal kegiatan peribadatan gereja tersebut yaitu: Minggu jam 08.00 WIB, Minggu jam 11.00 siang, Rabu jam 18.00, dan Kamis jam 18.00.

### **Kronologi Penolakan GIDI Kedawung oleh LUIS**

Peristiwa penolakan LUIS terkait keberadaan

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen 2015

GIDI di Sragen menurut keterangan ketua FKUB Sragen tidak memiliki kaitan dengan GIDI di Papua. Namun demikian jika merujuk keterangan Mochtingoedin, GIDI di Sragen secara tersirat punya keterkaitan. Hal ini sebagaimana dijelaskan ketua FKUB Sragen berikut ini:

GIDI Sragen itu telah ada sejak tahun 1990. Waktu itu yang menjadi pelayan umat Kristen adalah Pdt Lipius. Beliau menjadi pengurus gereja antara tahun 1980 – 1990-an. Kemudian pada masa kepengurusan berikutnya dilayani Pdt Andreas Yikwa dan Pdt Wisnu Joko.

Selama ini tidak terjadi masalah terkait keberadaan GIDI di Dukuh Batu Mojokerto dan GIDI Jatirejo di Sambirejo. Menurut Bapak Fakhrudin wakil ketua FKUB Kabupaten Sragen mengatakan bahwa terkait penolakan GIDI menjelaskan sebagai berikut:

Terkait tuntutan LUIS tentang GIDI di Sragen terdapat dua poin utama. Pertama, bahwa GIDI Sragen belum berijin itu betul, tetapi kedua, bahwa GIDI meresahkan masyarakat setempat tidak terbukti. Hal ini setelah dilakukan pertemuan antara warga di RT 18 dukuh Batu dan pengurus GIDI, FKUB dan diketahui setelah dilakukan dialog bahwa warga sekitar gereja selama ini tidak merasa terganggu dengan keberadaan GIDI.

Berikut ini kronologi peristiwa penolakan GIDI di Dukuh Batu RT 18 Desa Mojokerto Kedawung Sragen.

#### 1. Jum'at, 17 Juli 2015

Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani menjelang salat Idul Fitri, sekitar pukul 07.00 WIT. Humas Polri Kombes Agus Rianto mengatakan, kasus ini bermula saat umat Islam Karubaga Kabupaten Tolikara hendak menjalankan salat Idul Fitri. Tiba-tiba, sekelompok massa dari luar berteriak-teriak. Umat muslim yang hendak salat sontak kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan Pos 756/WMS untuk meminta perlindungan. Sepeninggal umat Islam itu, musala tersebut dibakar.

"Saat itu ada yang berteriak, lalu umat muslim itu yang hendak salat itu langsung melarikan diri ke Koramil," Kata Agus kepada (Republika, Jum'at 17-7-2015).

#### 2. Kamis, 23 Juli 2015

Kemudian pada hari Kamis, 23 Juli 2015 bertempat di ruang rapat Tribata Mabes Polri pukul 08.00 WIB tadi telah berlangsung Video

Conference yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Beliau menyampaikan kronologis sebenarnya peristiwa Tolikara. Di Tolikara sedang berlangsung Seminar & KKR Pemuda GIDI tanggal 13-19 Juli 2015. Dalam proposal tertulis 22-27 Juli 2015. Ternyata pelaksanaannya tanggal 13-19 Juli dan ditutup tanggal 20 Juli 2015. Diantara tanggal tersebut ada tanggal 17 Juli yang bertepatan Idul Fitri. Badan pekerja GIDI Tolikara mengeluarkan surat yang berisi: 1) Larangan umat Muslim melaksanakan shalat Id di Tolikara. Shalat boleh di luar Tolikara, dan 2) Melarang umat Muslim untuk menggunakan jilbab.

Berdasarkan kajian Tim Pencari Fakta (TPF) yang dilakukan Muhammad Adlin Sila, Zainuddin Daulay, Sabara, dan Kiai Faroji, diperoleh temuan bahwa konflik di Tolikara dapat dikatakan sebagai konflik agama, karena melibatkan antara dua kelompok agama, yaitu GIDI dan umat Islam.<sup>19</sup>

Secara lebih detail Muhammad Adlin Sila menjelaskan bahwa peristiwa konflik tersebut bersumber dari surat yang dikeluarkan oleh Presiden GIDI (Pendeta Dorman). Petikan wawancara antara TPF<sup>20</sup> dengan Pendeta Dorman secara ringkas dapat diketahui sebagaimana penjelasan berikut ini.

Pada dasarnya kami tidak membenci umat Islam, tapi kami meminta mereka menghormati kami yang sedang menyelenggarakan Kebaktian Kebangunan Kerohanian (KKR) yang kebetulan waktunya berbarengan dengan pelaksanaan "Pembukaan Lebaran" (Salat Idul Fitri). Oleh karena itu, kami membuat surat agar salat Idul Fitri ditunda dulu pelaksanaannya atau dilaksanakan di luar Tolikara seperti di Wamena atau Jayapura. Karena kesulitan untuk pindah tempat ibadah, GIDI meralat surat tersebut dan mengizinkan untuk salat Idul Fitri, namun GIDI tidak mengizinkan menggunakan pengeras suara (TOA). Selain itu, salat agar dilaksanakan di musala bukan di lapangan. Karena himbuan kami tidak disosialisasikan oleh Kapolres Tolikara kepada umat Islam, maka peserta KKR yang

<sup>19</sup> Muhammad Adlin Sila, Menjadi Peneliti Pemerintah: Pengalaman Menjadi Anggota Tim Pencari Fakta Insiden Tolikara (dalam Marzani Anwar dkk), (Cerita Meneliti. Jakarta: Gaung Persada), 234

<sup>20</sup> Muhammad Adlin Sila, Menjadi Peneliti Pemerintah: Pengalaman Menjadi Anggota Tim Pencari Fakta Insiden Tolikara (dalam Marzani Anwar dkk), (Cerita Meneliti. Jakarta: Gaung Persada), 228

berjumlah kurang lebih 3.600 orang mendatangi umat Islam yang sedang salat untuk bicara baik-baik. Namun tiba-tiba ada suara tembakan dari polisi dan menimbulkan emosi pemuda GIDI, hingga akhirnya membakar kios yang merembet ke musala.

Peristiwa konflik tersebut secara cepat tersebar melalui media sosial, dan mengakibatkan terjadinya penolakan GIDI di sebagian wilayah di Indonesia. Salah satu organisasi keagamaan yang terpancing dengan peristiwa tersebut adalah Laskar Umat Islam Surakarta. Beberapa GIDI di Solo Raya dilarang untuk menyelenggarakan peribadatan di gereja tersebut. Salah satu GIDI yang dilarang atau ditolak oleh LUIS adalah GIDI di Sragen. Sehingga pasca terjadinya konflik pada bulan September mereka melakukan gerakan melarang GIDI beroperasi.

### 3. Tanggal 9 September 2015

LUIS melayangkan surat yang berisi tentang keberatan kegiatan GIDI yang ditujukan kepada 1) Pengurus GIDI Sragen; 2) Pendeta Andreas; 3) Ketua FKUB Sragen; 4) Plt. Bupati Sragen; 5) Kepala Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung dan Kepala Desa Sambi Kecamatan Sambirejo. Isi surat tersebut adalah bahwa GIDI di Sragen tidak ada ijin sementara maupun ijin permanen dan keberadaan GIDI menurut LUIS bahwa, GIDI di Sragen merupakan bagian GIDI yang ada di Tolikara Papua yang terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum dan mencederai toleransi antar umat beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 4. Hari Jum'at, 11 September 2015 pukul 10.00 WIB

Terjadi audiensi antara perwakilan kelompok Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dengan Kementerian Agama Kabupaten Sragen, dan FKUB. LUIS menyatakan bahwa GIDI di Sragen belum berijin dan meresahkan masyarakat setempat.

### 5. Hari Jum'at, 11 September 2015 pukul 11.00 WIB

LUIS demonstrasi ke GIDI di Dukuh Batu RT 18 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung. Kelompok LUIS menuntut kepada Bupati Sragen agar gereja tersebut ditutup. Selain itu sebagaimana telah disebutkan di atas, gereja ini oleh kelompok tersebut ditengarai menimbulkan masalah atau meresahkan masyarakat setempat.

Demonstrasi terjadi sekitar 30 menit,

kelompok LUIS diterima oleh Pdt. Wisnu dan pengurus gereja lainnya. Mereka menuntut agar gereja tidak melakukan kegiatan dengan mendatangkan jemaat dari luar Batu. Selain itu simbol-simbol gereja juga harus dicopot karena menurut mereka, GIDI belum berijin. Pada akhirnya simbol-simbol gereja dicopot seperti papan nama dicopot oleh aparat keamanan Polsek Kedawung.

### 6. Hari Selasa, 15 September 2015

Terkait dengan peristiwa demonstrasi yang dilakukan LUIS terhadap GIDI, akhirnya FKUB mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 450/1174/028/2015 yang menjelaskan tentang keberadaan GIDI di Sragen yang dipermasalahkan oleh LUIS. Kemudian setelah terjadi demonstrasi oleh LUIS, FKUB Kabupaten Sragen melakukan survei lokasi ke GIDI Dukuh Batu Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung dan GIDI Jatirejo, Desa Sambi Kecamatan Sambirejo.

### 7. Hari Selasa, 29 September 2015

Setelah diadakan survei di dua lokasi GIDI tersebut, bahwa kedua GIDI tersebut memang belum memiliki ijin mendirikan bangunan rumah ibadah. Bahwa GIDI yang terdapat di Dukuh Batu RT 18 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung dan GIDI Dukuh Jatirejo Desa Sambi Kecamatan Sambirejo Jemaah penggunaannya belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2008 Bab IV Pasal 14 ayat 2 point 2 (Jemaah paling sedikit 90 belum terpenuhi).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas FKUB Kabupaten Sragen perlu memberikan masukan sebagaimana bahan pertimbangan Bapak Bupati dalam mengambil kebijakan penertiban GIDI di Dukuh Batu RT 18 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung dan GIDI Dukuh Jatirejo Desa Sambi Kecamatan Sambirejo. Adapun masukan yang dimaksud adalah; 1) agar GIDI di Dukuh Batu RT 18 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung dan GIDI Dukuh Jatirejo Desa Sambi Kecamatan Sambirejo memfungsikan tempat ibadah tersebut sebagai rumah ibadah keluarga dan tidak mendatangkan jemaah dari luar lingkungan keluarga; 2) menghilangkan atribut-atribut ciri khas tempat ibadah gereja, 3) Tidak melakukan aktifitas yang dinilai sebagai upaya mempengaruhi pemeluk agama lain.

## Upaya Mediasi Konflik

Berdasarkan kronologi tersebut, terkait penolakan GIDI oleh LUIS, keberadaan GIDI di Sragen tidak dapat dilepaskan dari Pdt Lipius yang merintis GIDI pertama di Sragen. Meskipun tidak memiliki hubungan secara langsung dengan peristiwa pembakaran kios-kios yang kemudian merembet dan membakar musala yang dilakukan oknum warga Kristen di Tolikara, namun secara psikologis kasus tersebut dapat mempengaruhi emosi keagamaan umat lain terutama umat muslim. Kasus di Tolikara dapat dikatakan sebagai pemicu utama terjadinya gejolak di daerah lain. Sebelum terjadi konflik di Tolikara, sebenarnya masyarakat Sragen pada umumnya dan Dukuh Batu Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung dan Dukuh Jatirejo Desa Sambu Kecamatan Sambirejo tidak terjadi persoalan yang berarti. Akan tetapi ketika konflik muncul, maka hal ini dijadikan alasan untuk mencari kesalahan atau kekurangan pihak lain. Seperti yang dilakukan LUIS terhadap GIDI di Sragen. Adanya peraturan baru tentang PBM yang mengatur pendirian rumah ibadah dijadikan alasan untuk menolak GIDI karena belum berijin. Berdasar teori konflik, bahwa konflik terjadi biasanya ketika norma sosial dalam keadaan lemah atau sedang mengalami perubahan<sup>21</sup>.

Jika ditelusuri ke belakang, bahwa GIDI di Dukuh Batu RT 18 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung sesungguhnya telah memberitahukan secara resmi keberadaan GIDI kepada Kepala Penyelenggara Bina Kristen Protestan di Surakarta tahun 1990. Hal ini dapat diketahui dari surat pemberitahuan ibadah dengan nomor CK/GIDI/X/90 yang dibuat oleh pengurus Gereja Injili di Indonesia (GIDI) calon klasis Jawa Tengah dan DIY yang ditanda-tangani oleh Pdt. Andreas Yikwa.

Upaya mediasi konflik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen, dalam hal ini telah dilakukan oleh FKUB Kabupaten Sragen terkait penolakan keberadaan GIDI oleh LUIS. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan dialog dengan LUIS, survei lokasi GIDI, mengadakan pertemuan dengan warga Dukuh Batu Desa Mojokerto dan diadakan dialog terkait keberadaan GIDI tersebut. Kesepakatan yang

dilakukan terkait keberadaan GIDI pada saat itu adalah bahwa: 1) agar GIDI di Dukuh Batu RT 18 Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung dan GIDI Dukuh Jatirejo Desa Sambu Kecamatan Sambirejo memfungsikan tempat ibadah tersebut sebagai rumah ibadah keluarga dan tidak mendatangkan jemaah dari luar lingkungan keluarga, 2) menghilangkan atribut-atribut ciri tempat ibadah gereja, 3) tidak melakukan aktifitas yang dinilai sebagai upaya mempengaruhi pemeluk agama lain.

Terjadinya konflik GIDI di Sragen terjadi karena adanya pemicu, yakni konflik Tolikara. Hal inilah yang mendorong sekelompok masyarakat (LUIS) melakukan aksi penolakan GIDI di Sragen. Mengenai hal ini, Pruitt dan Rubin<sup>22</sup> menjelaskan bahwa terdapat tiga kondisi yang mendukung kemunculan sebuah kelompok pejuang (*struggle group*), yang seringkali menjadi pendukung pemicu dan pendorong terjadinya konflik. Peristiwa Tolikara dapat dikatakan sebagai faktor pemicu, dan gerakan aksi LUIS menolak GIDI di Sragen dapat dikatakan sebagai faktor pendorong konflik.

Terkait penolakan LUIS terhadap GIDI di Sragen, secara kewilayahan sebenarnya ini berada di luar komunitas LUIS, karena itu LUIS telah memasuki ranah wilayah kelompok lain jika dilihat dari aspek hukum administrasi negara. Artinya LUIS telah keluar dalam batas kewenangan mereka, dan ini secara teoritis LUIS sebagai pihak dari luar melakukan penekanan kepada kelompok lain meskipun Sragen masuk dalam kategori Solo Raya. Hal ini juga adanya faktor ideologi yang ditekankan oleh pemimpin kelompok tersebut yakni Edi Lukito sebagai penggerak massa.

Kasus demonstrasi yang dilakukan LUIS di Sragen tidak mendapatkan perlawanan dari pihak yang diunjuk rasa yakni GIDI. Hal ini dimungkinkan telah terjadi hubungan yang baik antara GIDI dan masyarakat setempat. Mengenai hal ini Wisnu Joko (15-12-2015) berpendapat:

“Kami sebagai pengembala umat nasrani di wilayah Batu telah menyatu dengan masyarakat dengan penduduk asli, meskipun jumlah jemaah kami tidak banyak akan tetapi masyarakat dapat menerima keberadaan kami”.

<sup>21</sup> Pruitt D.G dan Rubin, Teori Konflik Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

<sup>22</sup> Pruitt D.G dan Rubin, Teori Konflik Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 34

Mengenai hal ini juga diungkapkan oleh Sabar (15-12-2015) sebagai berikut:

“Setahu saya sejak adanya keberadaan GIDI di Batu tidak pernah terjadi persoalan dengan warga. Masyarakat tidak memandang agama sebagai perbedaan. Mereka secara bersama melakukan kegiatan gotong-royong baik pada acara manten, rewang dan kegiatan-kegiatan sosial lain dilakukan secara bersama”.

Berdasarkan fakta di lapangan dan tuduhan kelompok LUIS terhadap keberadaan GIDI yang menurut mereka meresahkan masyarakat setempat ternyata tidak terjadi. Justru masyarakat hidup rukun dan saling membantu jika ada anggota masyarakat mempunyai hajat. Seperti ketika ada hajatan pada tanggal 15 September 2015. Keluarga Bapak Wisnu Joko turut serta membantu warga yang punya hajat.

Fakta kerukunan warga Dukuh Batu Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung jika dilihat dari teori interaksi, bahwa persaingan yang terjadi justru menimbulkan efek positif. Menurut Taneko<sup>23</sup> interaksi yang berbentuk efek oposisi atau dissosiatif tidak mesti bersifat negatif tetapi juga dapat positif. Berdasar teori ini, justru telah terjadi interaksi sosial yang baik antara satu warga dengan warga lain.

Dengan demikian, meskipun terjadi pertentangan dari luar yakni dari LUIS, GIDI dan masyarakat desa setempat yang difasilitasi oleh FKUB Kabupaten Sragen dapat keluar dari konflik dan tidak timbul konflik yang lebih besar. Justru pihak gereja menjaga kondisi agar lingkungan di Dukuh Batu tetap terjaga aman, kondusif dan masyarakat tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh LUIS.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pasca aksi yang dilakukan oleh kelompok LUIS terkait keberadaan GIDI Dukuh Batu Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung salah satunya akibat konflik di Tolikara. Hal ini menurut LUIS pendiri GIDI di Sragen adalah Pdt Lipius yang pernah menetap di Sragen selama sepuluh tahun, akan tetapi GIDI Sragen dengan GIDI di Tolikara secara sosiologi

tidak memiliki keterkaitan secara langsung.

Secara hukum GIDI Dukuh Batu Desa Mojokerto belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena gereja ini belum memiliki ijin dari Bupati terkait pendirian rumah ibadah, karena memang GIDI berdiri sebelum PBM No. 19 dan 8 tahun 2006 lahir. Kemudian secara sosiologis, keberadaan GIDI tidak meresahkan masyarakat setempat sebagaimana yang dituduhkan Laskar Umat Islam Surakarta.[]

---

<sup>23</sup> Soleman B Taneko, Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1993), 121 - 122

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Johnson, Doyle P, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, jilid 1 dan 2*, diterjemahkan oleh Robert M Z Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1996) p. 95
- Cliford Geertz, Mojokuto, (*Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*), (Jakarta : PT Temprint, 1986) p.207
- Ahmad, Haidar Ali. 2012. *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadah*. Jakarta : Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Asry, Muhammad Yusuf. 2011. *Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta : Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Kimball Young & Mack Raymond W, *Sociology and Social Life* (New York: American Book Company, 1959) 192 – 193
- Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Routledge, 1956) 7
- Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya 2000
- Muhamad Zainuddin Dauly, *Mereduksi Eskalasi Konflik antarumat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2001) 134
- Muchtar, Ibnu Hasan. 2010. *Dilema Pendirian Rumah Ibadah: Studi Pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi*. Jurnal Harmoni Volume IX, Nomor. 35
- Mustolehudin, *Pendekatan Sosiologis dalam Penangan Potensi Konflik Pendirian Masjid dan Vihara di Banyumas*. Jurnal Al Qalam Vol. 21 No. 1 Juni 2015, Makassar : Balai Litbang Agama Makassar.
- Nilasari. *Komnas HAM : Terjadi Pelanggaran pada Peristiwa Tolikara*. <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/komnas-ham-terjadi-pelanggaran-ham-pada-peristiwa-tolikara> (diakses 8 Desember 2015).
- Panjimas Com. *Tak Berijin Serta Resahkan Warga, LUIS Minta Dua Gereja GIDI di Sragen Tutup*. <http://www.panjimas.com/news/2015/09/10/tak-berijin-serta-resahkan-warga-luis-minta-dua-gereja-gidi-di-sragen-ditutup> (diakses, Desember 2015)
- Pruit D.G dan Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) p. 37
- Sila, Muhammad Adlin, *Menjadi Peneliti Pemerintah : Pengalaman Menjadi Anggota TPF Insiden Tolikara dalam Marzani Anwar, Cerita Meneliti*, (Jakarta: gaung Persada, 2016), p. 228, 234
- Soleman B Taneko, *Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1993), 121 - 122
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Zainal Abidin Bagir dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*. (Yogyakarta : Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center For Religious and Cross-cultural Studies) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2011) 42
- Zakiyah, *Data Base Keagamaan Lembaga/Organisasi Kerukunan dan Kasus Keagamaan Kabupaten Temanggung*. (Semarang : Balitbang Agama Semarang Kementerian Agama RI 2015)

# THE STRATEGY AND COHERENCE OF READING TEXTS IN OPTIMIZING THE CHILD AWARENESS ON SOCIAL ENVIRONMENT

VILYA LAKSTIAN CATRA MULIA\*

---

## ABSTRACT

*Each text genre has their own social function to fulfill the purpose of reading activities, therefore texts serve as an inseparable medium of learning in schools. This study explores the function and purposes of texts in correlation of recent social issues in the society. The data includes textbooks from the most recent curriculum. The data was analyzed into some phases of each genre based on Islamic perspectives. Social literacy is essentially needed since early ages of the children to equip them with the knowledge of socializing. In this case, texts are expected to be internalized by the children in their surrounding social environment. Besides exploring the text genres, this study also formulates some suggestions for the development of texts as well as for the teachers who communicate the content of the texts to the students.*

**KEY WORDS:** *Social Function, Genre, Literacy, Text*

## STRATEGI DAN KEUTUHAN TEKS BACAAN DALAM MENGOPTIMALKAN KEPEDULIAN ANAK TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL

## ABSTRAK

Setiap *genre* teks memiliki fungsi sosialnya masing-masing untuk memenuhi tujuan dari aktifitas membaca. Oleh karena itu, teks menjadi media pembelajaran yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan belajar di sekolah. Berkaitan dengan fungsi dan tujuan dari teks yang lebih luas, penulis mengaitkannya dengan permasalahan sosial terkini di masyarakat dengan sumber data dari buku kurikulum terbaru. Literasi sosial diperlukan sejak dini untuk memberikan bekal pengetahuan bermasyarakat sehingga manfaat teks diharapkan dapat diinternalisasikan oleh anak-anak terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Selain mengeksplorasi *genre* teks pada sumber data, penulis juga berusaha memberikan saran pengembangan bagi teks maupun kepada guru sebagai pihak yang berperan penting sebagai penghubung berbagai aspek yang dibawa teks kepada para siswanya. Penulis memperoleh temuan tersebut melalui analisis pentahapan dari setiap *genre* dan sudut pandang Islami.

**KATA KUNCI:** Fungsi Sosial, Genre, Literasi, Teks

---

\*Penulis adalah Dosen Linguistik dan Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Email: [vilyalakstian@gmail.com](mailto:vilyalakstian@gmail.com). Alamat: Jl. Maluku No. 12 Keprabon Tengah, Banjarsari, Solo. Nomor telpon: 085 628 347 15.

\*\* Naskah diterima Februari 2017, direvisi Mei 2017 dan disetujui untuk diterbitkan Juni 2017

## A. PENDAHULUAN

Teks membantu guru dalam mentransfer ilmu dalam berbagai aplikasinya yang dapat diklasifikasikan dalam varian *genre*. *Genre*, melalui penggunaannya dalam tingkat wacana, juga berguna untuk memberikan instruksi kepada peserta didik. Memberikan instruksi kepada siswa melalui teks tentu telah mempertimbangkan tujuan pembelajaran, sehingga teks yang diberikan telah dikompilasi bahkan dapat diatur sedemikian rupa untuk mencapai apa yang diharapkan dari kegiatan belajar. Bahasa memfasilitasi informasi dan pengetahuan yang diajarkan melalui teks. Penyesuaian tersebut dikatakan oleh Christie (2002: 7) bahwa bahasa tidak pernah netral, karena bahasa selalu dilibatkan dalam merealisasikan nilai dan ideologi.

Varian dalam *genre* menyebabkan teks membawa fungsi sosial. Beragam fungsi yang dibawa oleh *genre* teks didasari oleh eksplorasi konteks budaya yang bertahap untuk mencapai tujuan (Eggs, 1994: 9). Selanjutnya, *genre* hadir sebagai respon terhadap *social action* (lihat Freedman, 1993: 222) sekaligus membawa fungsi bersama proses sosialnya (Santosa, 2003: 15). Pada habitat alamiahnya, terdapat hubungan antara teks terhadap lingkungan di sekitarnya.

Berhubungan dengan konteks masa kini di masyarakat kita, terdapat banyak masalah sosial seperti semakin melebarnya perbedaan sosial di masyarakat, bahkan adanya perekrutan anak menjadi bagian dari teroris (*Kompas*, 24 Desember 2016, hlm 1). Terdapat hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal, sebagaimana dilansir oleh Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian pada Oktober 2010 hingga Januari 2011. Sangat disayangkan juga, *Pew Research Center* 2015 merilis sekitar 4% atau 10 juta warga Indonesia mendukung gerakan radikal dimana sebagian besar merupakan anak-anak muda (lihat *BBC Online*, 18 Februari 2016).

Dari gejala di masyarakat tersebut, literasi sosial perlu untuk dipahami sedini mungkin. Salah satu cara adalah melalui sektor pendidikan. Untuk menangkis bahaya masalah di masyarakat tersebut, anak-anak perlu untuk selalu dipaparkan ihwal saling menghormati, menghargai, memahami sesama, dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Literasi penting untuk menjadi pembiasaan (Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016: 12).

Untuk menjadikannya *familiar* dengan kehidupan anak, literasi sosial penting menjadi perhatian bersama. Hal ini membuat jenis literasi ini lebih dikondisikan secara sosial sebagaimana, di sisi lain, tujuan literasi adalah menghadirkan peran setiap individu untuk menjadi seutuhnya dan berfungsi bagi masyarakat (Hauser et al, 2005: 24; Mulia, 2016: 114)

Pembiasaan tersebut dapat difasilitasi melalui berbagai fungsi sosial yang dimiliki setiap *genre* teks. Kurikulum yang terbaru mengintegrasikan berbagai domain. Bagi tingkat Sekolah Dasar (SD), kelas 1 hingga 6 diberikan pembelajaran tematik terpadu dimana hasil yang diharapkan adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi<sup>1</sup>. Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti pada setiap kelas. Dapat dilihat pada buku modul siswa setiap kelas diberikan berbagai tema. Pengintegrasian ini diharapkan dapat dioptimalkan karena proses belajar terasa saling menyatu mulai dari ilmu alam, sosial, agama, hingga kewarganegaraan. Dengan terintegrasinya berbagai subtema untuk menjelaskan mata pelajaran yang beragam, diharapkan pendidikan karakter juga dapat terlaksana. Presiden Joko Widodo (sebagaimana diberitakan *Kompas*, 27 Januari 2017) mengatakan bahwa pembangunan karakter penting karena saat ini kualitas interaksi sosial semakin menurun, hingga ancaman yang dapat muncul di bidang ideologi dan sosial budaya. Contoh yang tampak di masyarakat dapat dilihat dari masih adanya ketidakpedulian terhadap lingkungan, tawuran, hingga benih-benih radikalisme yang masuk ke ranah pelajar. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pendidikan karakter dan pengetahuan terhadap realitas kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Sebagaimana Tema Pengembangan Kurikulum 2013 dalam Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada *Workshop Press* yang dapat diunduh dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud): [http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan\\_Mendikbud\\_pada\\_Workshop\\_Pers.pdf](http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan_Mendikbud_pada_Workshop_Pers.pdf). Konsep tematik terpadu, dalam paparannya, disebutkan anak melihat dunia sebagai suatu keutuhan yang terhubung, bukannya penggalan-penggalan lepas dan terpisah. Keterkaitan satu sama lain antar mata pelajaran (mapel) sekolah dasar menyebabkan keterpaduan konten pada berbagai mapel dan arahan bagi siswa untuk mengaitkan antar mapel akan meningkatkan hasil pembelajaran siswa.

*Genre* berkontribusi besar dalam menyampaikan nilai-nilai sosial mulai dari mendeskripsikan, menceritakan, hingga menjelaskan sebagaimana beragamnya *genre* teks yang ada. Ini adalah strategi penyampaian materi yang terintegrasi itu melalui teks. Chamberlain dan Thompson (1998: 1) mengatakan *genre* sebagai jenis komunikasi dengan memberikan konteks. Teks untuk sekolah dibuat berdasarkan panduan standar sehingga sesuai dengan setting formal (Coulmas, 2013: 58; Cope & Kalantzins, 1993).

Terkait dengan literasi sosial yang menjadi permasalahan masyarakat saat ini, pengenalan terhadapnya perlu secara maksimal mulai dari SD. Pada tingkat SD, terdapat dua pengelompokan. Kelas 1 dan 2 adalah kelas awal atau rendah, sedangkan kelas 3 hingga 6 adalah kelas tinggi (Universitas Negeri Jakarta, 2012: 398).

Dari dasar tersebut, kelas 3 menjadi awal dari kelas tinggi yang perlu dioptimalkan demi kesiapan peserta didik di tengah masyarakat. Dua kelas sebelumnya yang masih dikatakan sebagai kelas rendah merupakan masa transisi dari masa taman kanak-kanak. Pada kelas 3 ini, terdapat tema yang relevan dengan masalah yang menjadi perhatian pada kajian ini, yaitu pada tema 4 berjudul *Peduli Lingkungan Sosial*. Di dalamnya terdapat subtema *Lingkungan Sosialku, Permasalahan di Lingkungan Sosial, dan Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial*.

Artikel ini memonitor kontribusi *genre* terhadap tema yang diajarkan sehingga diharapkan dapat dipantau seberapa optimal teks mampu mengemban tugas sebagai penyampaian nilai sosial itu.

Tujuan penelitian ini diperoleh dari menjawab masalah pada subjek penelitian ini yang diawali dengan menelusuri *genre* teks apa saja yang dihadirkan. Kemudian, penulis juga meneliti seberapa kuat teks-teks tersebut dalam menghadirkan fungsi sosial<sup>2</sup> kepada anak. Ini didapatkan dari melihat kelengkapan tahap pada teks. Semakin lengkap tahap yang dihadirkan pada setiap teks, semakin sempurna penyampaian fungsi sosialnya. Hingga kemudian, penulis turut memberikan saran pengembangan berdasarkan *genre* teks dan pentahapan yang ada dalam memahami tingkat keutuhan penyampaian

informasi dan pengetahuan melalui teks. Penulis juga kemudian memberikan alternatif kepada guru untuk melengkapi celah dari teks yang dapat dioptimalkan melalui aktifitas kelas. Selain bertujuan untuk meneliti dan mengeksplorasi, seluruh rumusan masalah tersebut juga sebagai kepedulian penulis karena tema *Peduli Lingkungan Sosial* penting sebagai bekal bagi anak untuk hidup di tengah masyarakat yang krusial saat ini.

## B. KAJIAN LITERATUR

Teks dibentuk mulai dari unit kebahasaan terkecil hingga membentuk wacana. Wacana dibangun oleh berbagai hubungan tekstual yang terikat dengan kalimat dan paragraf yang berturut-turut sebagai representasi tekstual dari tingkat lebih rendah hingga global (Gerot & Wignell, 1995: 17; Toledo, 2005: 1061-1062). Melalui pertimbangan makna secara semantik, teks dapat diklasifikasikan dalam berbagai *genre*.

### 1. Genre Teks

*Genre* merupakan proses dan aktifitas sosial, dalam hal ini meliputi teks, yang dapat dikenali dan diatur membentuk budaya (Ventola, 1987: 85). Manfaat *genre* berasal dari optimalisasi proses, tahapan, dan fitur linguistik yang dibawanya. Sebagai sebuah proses sosial yang berguna, *genre* dekat dengan jenis situasi, dengan konteks yang dibentuk berdasarkan stratifikasi menyesuaikan jenis teks (Matthiessen, Lam, & Teruya, 2010: 106).

Berbagai sifat itu diaplikasikan melalui berbagai tipe teks yang secara budaya merupakan spesifikasi dari penggunaan bahasa, baik tertulis maupun lisan, untuk memenuhi atau tercapainya tujuan. (lihat Gerot & Wignell, 1995: 192). Eggins (1994: 5) menjelaskan *genre* merupakan dampak dari konteks budaya yang mengeksplor struktur budaya yang bertahap sebagai cara mencapai tujuan. Kehadiran *genre* ini turut membantu tercapainya tujuan dari kegiatan belajar di sekolah sebagaimana diikat dalam kompetensi inti dan dasar. Berbagai kompetensi tersebut berkaitan erat dengan kompetensi lulusan yang diharapkan mampu menguasai tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan setiap kualifikasi kemampuannya.

Terdapat berbagai macam jenis teks. Gerot dan Wignell (1995: 192-223) menjelaskan, terdapat total 14 macam. Pengetahuan terhadap macam-macam teks menjadi penting mengingat keberadaan mereka merupakan beragamnya

<sup>2</sup>Fungsi sosial teks merupakan tujuan dari teks bagi konsumsi pembacanya.

proses sosial yang dihadirkan kepada pembacanya. Namun, hanya ditemukan 5 macam pada sumber data. Berikut ini adalah penjelasannya kelima macam *genre* yang diperoleh dari sumber data meliputi fungsi sosial dan pentahapannya.

a) Deskripsi

*Genre* ini bertujuan untuk mendeskripsikan orang, tempat, dan sesuatu. Dalam teks deskripsi, pentahapan yang tersedia meliputi identifikasi dan deskripsi. Bagian identifikasi mengidentifikasi fenomena yang akan dideskripsikan. Kemudian bagian deskripsi menampilkan pendeskripsian berdasarkan bagian, kualitas, maupun karakteristik.

b) Rekon

Berasal dari kata *recount*, *Genre* ini bertujuan untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian yang telah dialami dengan tujuan untuk menginformasikan atau menghibur. Pentahapan dalam teks ini meliputi orientasi, kejadian (*event*), dan reorientasi. Teks ini diawali dengan pengenalan setting dan partisipan yang terlibat. Kejadian yang dihadirkan merupakan apa-apa yang terjadi beserta urutan peristiwanya. Lalu, ditutup oleh reorientasi.

c) Laporan

*Genre* ini bertujuan untuk mendeskripsikan terjadinya sesuatu dengan rujukan pada lingkup alam, buatan manusia, atau fenomena sosial di lingkungan kita. Teks ini terdiri dari klasifikasi umum (*general classification*) dan deskripsinya. Teks ini diawali dengan menceritakan fenomena yang dibicarakan. Kemudian bagian deskripsi menjelaskan hal-hal seperti bagian-bagian (dan fungsinya), kualitas, dan perilaku (bila makhluk hidup) atau penggunaan (bila benda mati).

d) Naratif

*Genre* ini bertujuan untuk menghibur dan memberikan pengalaman yang aktual atau dialami oleh diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang berbeda. Naratif berhubungan dengan kejadian-kejadian problematis yang membawa pada krisis yang berakhir pada resolusi. Bagian-bagiannya adalah orientasi, evaluasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Terdapat beberapa bagian yang mirip dengan *Rekon*. Yang membedakannya adalah terdapat bagian evaluasi untuk mengevaluasi keadaan, komplikasi untuk menunjukkan krisis atau konflik, dan resolusi untuk menunjukkan bahwa

krisis atau konflik dapat dipecahkan. Jenis *genre* paling sering ditemukan pada teks cerita.

e) Eksposisi hortatori

*Genre* ini bertujuan untuk mengajak pembaca bahwa sesuatu sebaiknya atau sebaiknya tidak menjadi perkara. *Genre* ini menyajikan *thesis*, argumen, dan saran (*recommendation*).

Dengan melihat penjelasan di atas, bahasa sebagai teks juga mengandung nilai dan norma sehingga dapat dideskripsikan berbagai karakteristik dalam setiap jenisnya.

## 2. Kajian Terhadap Teks Anak Tingkat Sekolah Dasar

Dalam aplikasinya, teks telah diproduksi berdasarkan usia target pembaca anak-anak. Penelitian terhadap unsur kebahasaan dalam teks oleh Salceda, Alonso, dan Earls (2013) menemukan proses *decoding* dan interpretasi secara linguistik sebagai dua variabel yang secara sederhana dapat mengevaluasi dan menyediakan sebuah perkiraan yang bagus untuk mengukur pemahaman membaca oleh anak di sekolah dasar. Hal ini menunjukkan kontribusi unit-unit bahasa dalam menyampaikan pesan, sehingga jalinan kemampuan menginterpretasinya hingga tingkat pemahaman merupakan pemahaman terhadap isi dari teks.

Sedangkan dalam strategi penyampaian teks, Gallo dan Ness (2013) mendapati adanya ketertarikan yang besar terhadap teks informasional oleh anak usia sekolah dasar, khususnya kelas 3. Hal ini menarik dimana mayoritas beranggapan bahwa usia sekolah dasar, khususnya kelas 3, masih menyukai teks yang bergambar dan rekreatif, namun temuan Gallo dan Ness (2013) menemukan sebaliknya.

Pertimbangan dari aspek sosio-kultural di sekitar teks atau unit-unit wacana turut berpengaruh dalam tingkat pemahaman pembaca (Hicks, 1997; Toledo, 2005). Dari variasi hasil paradigma penelitian oleh Salceda, Alonso, dan Earls (2013) bersama Gallo dan Ness (2013), keduanya belum sampai pada kaitan teks yang turut membawa ideologi kehidupan sosial yang dapat disampaikan dengan berbagai cara. Padahal, keberadaan teks juga dikonsumsi oleh mereka yang hidup dalam lingkup konteks sosial yang lebih luas (yaitu masyarakat yang hidup dimana sebaran teks hadir di tengah-tengah mereka).

Penelitian ini juga terinspirasi oleh temuan Neuman dan Roskos (2012: 210) bahwa beragam *genre* teks mendukung pengembangan jaringan pengetahuan, keterampilan membaca, dan pembelajaran cakupan materi (*content-area learning*). Menurutnya, teks membantu anak menjadi lebih berpengetahuan. Fitzgerald et al (2015: 27) merumuskan sembilan karakteristik teks paling penting bagi kelas awal (sekolah dasar) meliputi level bahasa terkecil hingga wacana (*discourse*). Meskipun keragaman teks bermanfaat untuk memberi paparan pengetahuan yang variatif bagi anak, namun Neuman dan Roskos (2012) dan Fitzgerald et al (2015) mengesampingkan keutuhan teks. Ide dan informasi yang terkandung pada teks harus dihadirkan secara utuh sehingga maksud dan tujuan dari teks dapat disampaikan lebih sempurna daripada teks yang variatif namun hanya pada luaran atau cuplikan peristiwa semata. Tercapainya keutuhan informasi pada teks turut membantu guru untuk mengkomunikasikan materi secara efektif kepada siswa. Kemudian, teks dapat memberikan motivasi tujuan dan harapan dalam menggunakan informasi tersebut di masa yang akan datang (Nestojko et al, 2014: 1038). Inilah yang ditelusuri dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa kuat teks-teks yang diteliti dari sumber data dengan melihat kelengkapan tahap dari setiap jenis teks untuk mengukur keutuhannya dalam menyampaikan informasi.

Terkait dengan target pembaca dalam penelitian ini, secara umum, tujuan belajar di SD adalah mengembangkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan anak-anak menyangkut aspek perkembangan jasmani dan sosial, emosional dan intelektual, serta secara khusus untuk membantu anak-anak belajar dan untuk meletakkan dasar-dasar bagi proses belajar sepanjang hayat (Universitas Negeri Jakarta, 2012: 399). Khusus pada jenjang SD, pembelajaran dilakukan secara tematik di kurikulum 2013 dengan menyajikan tema dan subtema yang variatif di setiap kelasnya. Kedudukan teks dalam kaitannya dengan kurikulum adalah dengan menciptakan keselarasan dengan kompetensi yang diharapkan. Kepada peserta didik yang dipandu oleh guru, budaya belajar yang diciptakan dengan tujuan yang ingin dicapai menghadirkan teks sebagai fenomena linguistik yang dibentuk secara sosio-

kultural dan ideologis (Santosa, 2003: 15).

### C. METODE

Data diperoleh dari teks-teks pada Buku kelas 3 SD Kurikulum 2013 bertemakan *Peduli Lingkungan Sosial* yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015), khususnya pada bagian "Ayo Membaca". Bagian tersebut dipilih karena teks disajikan secara utuh, tidak *overlap* dengan teks latihan (contoh: melengkapi titik-titik, bernyanyi, menjawab pertanyaan, dan sebagainya). Hal ini dilakukan karena keterampilan membaca menjadi perhatian penuh dalam penelitian ini untuk memahami materi yang diajarkan dan terbebas dari "gangguan" (*distraction*). Oleh karena itu, lokasi penelitian dibatasi pada objek penelitian sebagaimana Lincoln dan Guba (1985: 42) katakan sebagai *focus-determined boundary*. Data yang dibutuhkan diperoleh dari sumber data.

Pemilihan teks menerapkan *sampling* berbasis kriteria (mengadopsi *criterion-based sampling* (sebagaimana Sutopo, 2006: 65). Kriteria data yang dibutuhkan adalah berbagai teks dengan ketentuan: a) berasal dari sumber data dengan tema *Peduli Lingkungan Sosial*, b) ada di setiap subtema yang difokuskan pada bagian "Ayo Membaca", dan c) merupakan wacana utuh yang dapat dibuktikan dengan pentahapan masing-masing *genre*.

Teks menjadi data primer dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder didukung oleh referensi yang relevan terhadap fokus analisis dalam penelitian ini. Analisis terhadap data yang diperoleh menggunakan pendekatan linguistik sistemik fungsional yang memandang bahasa sebagai teks yang dikelilingi oleh lingkungannya baik fisik atau non-fisik yang mendukung teks (Santosa, 2003: 16).

Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis dokumen, yaitu mengidentifikasi teks-teks tersebut sebagai data untuk didapati *genre*-nya dengan mempertimbangkan karakteristik pentahapannya. Penulis kemudian melakukan klasifikasi macam-macam *genre* teks yang ada, lalu diperinci dengan pentahapannya untuk mengukur tingkat keutuhan teks. Penulis meneliti keterhubungan antar klasifikasi yang diperoleh. Dari hasil tersebut, penulis melengkapi penyajian analisis dengan menghadirkan tabel dan gambar sehingga dapat membantu penulis

dalam menyampaikan hasil temuannya. Kemudian, diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran dari analisis yang dilakukan. Dengan rangkaian alur tersebut, penulis menerapkan model analisis isi (*content analysis*) sebagaimana model analisis yang dirumuskan oleh Spradley (1980) melalui empat macam tahap analisis: tahap domain untuk menentukan data, tahap taksonomi untuk mengklasifikasikan data, tahap komponensial untuk melihat hubungan antar komponen yang telah didapat dari taksonomi, dan tahap tema budaya untuk menarik kesimpulan.

#### D. HASIL

Teks telah banyak memberikan pengaruh dalam membantu kegiatan dan proses belajar di dunia pendidikan. Hal ini disebabkan oleh sifat alami dari teks yang hadir secara utuh merupakan realisasi dari *genre*. *Genre* teks dibangun oleh konteks situasi (*register*) yang merupakan ragam bahasa yang diekspresikan melalui fitur kebahasaan (Halliday, 1994: 33; Djatmika, 2012: 31). Terdapat beberapa sifat yang dibawa oleh *genre* seperti berorientasi tujuan, bertahap, dan berguna. Melalui teks, para siswa memperoleh informasi yang utuh berasal dari jalinan ide dari bagian awal hingga berakhirnya teks yang sedang dibaca. Dampak dari aktifitas membaca dapat ditelusuri dari hasil proses *decoding* terhadap internal setiap individu (Mulia, 2016: 85) dan internalisasi dalam diri mereka secara sosial (Gee, 1992; Hicks, 1997: 470).

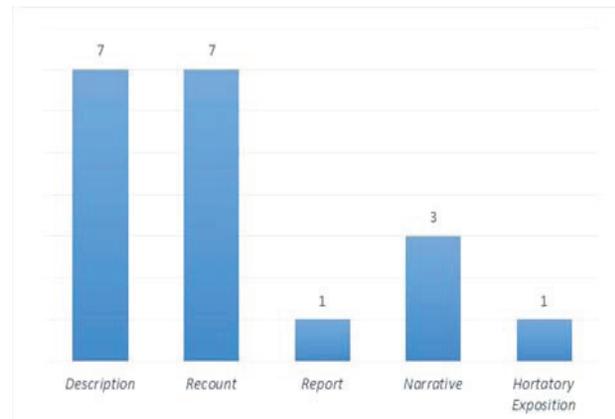
Di kelas 3 SD, sebagai awal dari kelas atas, berbagai mata pelajaran yang diintegrasikan berasal dari beberapa domain seperti pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (Penjasorkes), seni budaya dan prakarya, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), hingga pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pengintegrasian seluruh mata pelajaran tersebut didasari oleh kompetensi inti dan kompetensi dasar pada satuan pendidikan. Media pengintegrasian dilakukan melalui teks. Teks yang ditampilkan berparagraf-paragraf itu bertujuan untuk mencapai kompetensi tersebut.

Teks-teks yang dihadirkan di buku tentu tidak semata diberikan tanpa aturan. Tingkat koheren dan kohesif teks terhadap materi pembelajaran ini diikat oleh *register* yang

mengespresikan bahasa pada teks agar tetap dalam lintasan konteks situasinya, yaitu beragam domain tersebut yang membawa kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik.

Keberadaan teks tetap dikondisikan sebagai situasi baca dalam konteks atau kerangka edukasi formal untuk kebutuhan kolektif. Sebagai aktifitas sosial, *genre* merupakan formulasi dari situasi yang berulang di sekitar kita. *Genre* teks menunjukkan bentuk interaksi sosial yang berorientasi pada tujuan. Sifat fungsional teks ini bermanfaat untuk kebutuhan sekolah dan informal (Freedman, 1993: 222; Gerot & Wigell, 1995: 190). Cope dan Kalantzins (1993) menjelaskan *genre* dalam konteks penggunaannya di sekolah, yaitu menekankan pada konten, struktur, dan rangkaian tahap dimana pelajar “melek” (*literate*) dalam seting edukasi formal.

Dalam tema “Peduli lingkungan sosial” terdapat berbagai *genre* yang digunakan pada aktifitas membaca yang difokuskan pada bagian “Ayo Membaca”. Bagian ini dapat ditemui di setiap subtema. Berikut ini adalah sebaran *genre* teks dalam situasi belajar yang ditampilkan dari buku tematik kurikulum 2013 kelas 3 SD.



Gambar 1. Sebaran genre teks pada buku tematik *Peduli Lingkungan Sosial*

Bagian “Ayo Membaca” seringkali menggunakan gambar untuk melengkapi teks. Penerapan *multimodal* seperti ini memang membantu menarik pembaca usia anak-anak. Dalam menyampaikan informasi, penggunaan *genre* teks deskripsi dan rekon tampak dominan dibandingkan yang lain. Dengan mempertimbangkan fungsi sosial dari setiap *genre*, dapat dipahami bagaimana strategi yang digunakan untuk mengajarkan para siswa

mencapai kompetensi inti dan dasar dari materi yang diajarkan.

Dengan melihat fungsi sosialnya, strategi buku tersebut dalam mengajarkan materi tentang kepedulian lingkungan sosial—dalam konteks ini sebagai tema pembelajaran, dapat diketahui.

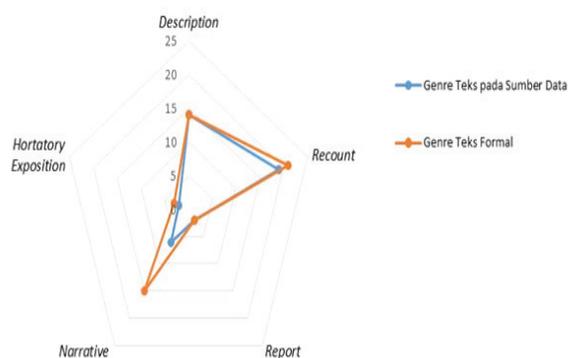
Gambar 1 menunjukkan gambaran secara umum dengan melihat sebaran teks bacaan bahwa bacaan pada buku tersebut lebih menekankan pada fungsi mendeskripsikan suatu objek menjadi fokus dalam kepedulian terhadap lingkungan dengan teks deskripsi. Selain itu, buku ini juga berusaha menyampaikan materi dengan cara menceritakan pengalaman seseorang melalui rekon. Teks naratif yang menyajikan cerita menduduki urutan di bawah teks deskripsi dan rekon dengan selisih yang cukup besar. Lalu teks laporan dan eksposisi sangat minim.

Fungsi sosial dapat dikenali karena juga didukung dengan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Ventola (1987: 89) menjelaskan bahwa *genre* dihadirkan sebagai proses atau aktifitas sosial yang dapat dikenali dan diatur sekaligus membentuk budaya. Oleh karena itu, *genre* teks dapat dibentuk agar dapat memenuhi tujuan sosialnya. *Genre* membawa konteks budaya. Hal ini berdampak pada penyajian teks yang dihadirkan melalui tahap-tahap untuk menyampaikan informasi. Tahap-tahap pada *genre* teks, seperti yang telah dikutip dari Gerot dan Wignell (1995) dalam kajian literatur di atas, merupakan sifat alami selayaknya manusia membutuhkan pentahapan untuk mencapai tujuan (Eggins, 1994).

### Mengungkap Keutuhan Teks

Setiap *genre* memiliki jumlah pentahapan (*staging*) secara formal yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan sosialnya. Dalam konteks kegiatan belajar di sekolah, pentahapan dari *genre* teks membantu siswa untuk mengikuti alur jalannya cerita atau informasi: yaitu bagaimana suatu kejadian memiliki awalan yang kemudian mencapai titik masalah atau konflik, lalu semuanya tersebut berakhir dengan solusi, penyelesaian, saran, dan sebagainya. Penyampaian informasi dilakukan secara utuh melalui pentahapan ini.

Untuk melihat keutuhan informasi teks pada sumber data penelitian ini, penulis menyajikannya seperti yang tersaji di bawah ini.



Gambar 2. Perbandingan pentahapan dari *genre* teks

### Gambar 2. Perbandingan pentahapan dari setiap *genre* teks

Garis-garis dalam *radar chart* di atas menunjukkan perbandingan keutuhan penyampaian informasi dari teks-teks yang pada buku tersebut didasari dari jumlah pentahapan dari setiap *genre*. Perbandingan terhadap pentahapan setiap *genre* teks dalam gambar tersebut dilakukan pada tingkat makro.

Secara formal, pentahapan dalam setiap *genre* dilakukan seluruhnya. Namun, buku ini menyampaikan informasi teks secara informal. Dapat dilihat, jumlah pentahapan lebih sedikit dari yang formal. Hal ini menunjukkan bahwa pentahapan teks tidak seluruhnya disajikan. Hal ini berdampak pada ketidakutuhan teks dengan struktur generiknya. Ada beberapa bagian yang tidak hadir pada teks. Ini dapat berdampak pada tidak seimbang penyampaian informasi dalam teks. Misalnya, *genre* eksposisi hortatori dalam teks berjudul *Lalu Lintas Macet* (lihat di halaman 90). Pentahapan yang dihadirkan adalah *thesis* dan argumen. Pada pentahapan secara formal, seharusnya ada bagian yang menyampaikan saran—sebagai tahap terakhir dari *genre* teks ini. Pada teks tersebut, pembaca hanya akan mengetahui permasalahan, sebab, dan akibatnya tanpa menyentuh apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Beberapa teks yang belum lengkap pentahapannya dapat ditemukan di *genre* rekon dan naratif. Kebanyakan pada teks rekon, bagian reorientasi tidak hadir. Bagian ini memang bersifat *optional* (pilihan) karena bersifat menutup teks. Tetapi, bila dimunculkan, akan lebih

memberi efek yang menarik kepada pembaca sehingga akan memperoleh kesan kepada mereka setelah membaca teks itu sampai selesai. Pada bacaan yang bagian orientasinya tidak hadir, dapat diketahui karena teks itu secara langsung menceritakan penerapan suatu aktifitas seperti yang tampak pada gambar yang ditampilkan sebelum teks.

Pada teks naratif, ketidakhadiran bagian resolusi disebabkan oleh tujuan teks itu yang menunjukkan adanya permasalahan saja (lihat *Ketika Pak Uun Sakit*, halaman 81). Sehingga, permasalahan yang ada pada cerita belum terpecahkan solusinya. Diceritakan pada bacaan tersebut Pak Uun adalah petugas kebersihan di sekolah Beni yang kala itu sedang sakit. Lingkungan menjadi kotor. Akibatnya, anak-anak banyak yang sakit. Namun, tidak disebutkan bagaimana tokoh-tokoh memecahkan masalah itu. Bisa saja bila Beni dan teman-temannya sadar dan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Tidak hadirnya resolusi ini menyebabkan pembaca tidak dapat meraih solusi, bahkan sulit untuk mencapai metakognisinya (keputusan yang diambil setelah membaca). Mulia (2016: 85) menjelaskan bagaimana kendali diri dan evaluasi dari proses kognitif menjalankan metakognisi pada pembaca.

Sedangkan, pada teks naratif yang lain hanya menampilkan bagian komplikasi saja karena merupakan cuplikan (lihat cuplikan cerita *Pulau Lombok*, halaman 129).

Pada teks-teks yang pentahapannya tidak lengkap, peran guru untuk melengkapi kekurangan itu sangat dibutuhkan. Guru diharapkan dapat mengintegrasikan dirinya, strategi mengajar, dan teks kepada para siswa-siswinya di dalam kelas sehingga *gaps* (celah) kekurangan dari teks dapat dilengkapi. Pengoptimalan itu dapat dilakukan melalui variasi aktifitas seperti,

- Memotivasi anak untuk mendeskripsikan apa yang ada di gambar. Hasilnya, akan didapati setting dan partisipan sebagaimana dibutuhkan dalam bagian orientasi pada teks rekon maupun naratif.
- Merangsang anak untuk menyampaikan perasaannya (khususnya dalam kata sifat) untuk mengisi bagian evaluasi, dan kesan dari suatu bacaan cerita untuk reorientasi. Hal ini dapat dioptimalkan untuk mengisi

kekurangan bagian tersebut pada teks naratif. Aktifitas untuk bagian reorientasi tersebut juga dapat diterapkan pada bagian rekon.

Meminta pendapat anak untuk mengutarakan apa yang perlu dilakukan bila menghadapi suatu masalah di masyarakat. Ini untuk melengkapi bagian saran yang belum dihadirkan pada teks eksposisi hortatori.

Beberapa aktifitas tersebut menciptakan adanya interaksi antara guru, siswa, dan teks. Aktifitas di atas akan terasa menyenangkan apalagi menggunakan media pembelajaran yang variatif, seperti gambar atau cuplikan video. Dengan adanya silabus dan rancangan pembelajaran, guru telah mempersiapkan berbagai hal termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pengembangan teks secara aplikatif menghadirkan unsur di luar teks yang dapat didesain relevan. Unsur kebahasaan yang telah ada di dalam teks tentu berpengaruh terhadap pemahaman pembacanya. Tetapi, unsur-unsur lain (di luar teks) juga berperan besar untuk menguatkan. Melalui aktifitas yang diatur sedemikian rupa, tujuan yang diharapkan dari pembaca dalam membaca teks dapat dicapai (lihat Berman, 2004: 109; Dreher & Singer, 1989).

Bila analisis di atas menunjukkan sebaran *genre* secara umum pada bacaan di dalam sumber data, bagaimana sebarannya pada setiap subtema? *Genre* teks dapat dikatakan sebagai suatu strategi komunikasi. Kaitan antara *genre* teks dengan subtema akan menunjukkan bagaimana strategi penyampaian pengetahuan yang didesain secara spesifik pada isu-isu yang diangkat.

Subtema	Genre					JUMLAH
	Description	Recount	Report	Narrative	Hortatory Exposition	
Lingkungan Sosialku Permasalahan di	2	4	1	0	0	7
Lingkungan Sosial	5	1	0	1	1	8
Kepedulian terhadap	0	2	0	2	0	4
Lingkungan Sosial	0	2	0	2	0	4
JUMLAH	7	7	1	3	1	19

**Tabel 1. Sebaran *genre* teks Peduli Lingkungan Sosial pada setiap subtema**

Terdapat tiga subtema dalam tema *Peduli Lingkungan Sosial* dalam buku tersebut, yaitu Lingkungan sosialku, Permasalahan di

lingkungan sosial, dan Kepedulian terhadap lingkungan sosial. Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap subtema memiliki *genre* yang unik ketika didapati hubungannya dengan subtema. Keterhubungan itu dapat dilihat dari fungsi sosial setiap *genre* teks. Subtema *Lingkungan Sosialku* lebih banyak menceritakan tentang pengalaman yang telah terjadi, sedangkan *Permasalahan di Lingkungan Sosial* dominan dideskripsikan. Lalu, *Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial* diceritakan dari pengalaman dan juga melalui cerita (lihat di buku tersebut cuplikan cerita Legenda Pulau Lombok di halaman 129 dan cerita Situ Bagendit di halaman 137).

Seperangkat materi yang diajarkan pada bagian subtema pertama akan mempengaruhi pengetahuan awal mereka terhadap tema pembelajaran. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari aktifitas membaca sebagai tindakan membuat makna dari teks. Pembaca yang baik memiliki tujuan dan menggunakan pengalaman dan latar belakang mereka untuk memaknai teks. Kemampuan membuat keterhubungan ini adalah kunci dari pemahaman terhadap teks. Oleh karena itu, bagian awal ini sangat penting untuk membangun pengetahuan awal itu, yang secara kebahasaan, meliputi cukupnya latar belakang isi dan kosakata dalam menghadapi informasi apalagi saat informasi itu tergolong baru bagi mereka (Bandingkan pemahaman teks oleh Tankersley, 2003: 90; Maine, 2015: 22).

### Memberdayakan Fungsi Sosial Teks

Berdasarkan jumlah temuan *genre* pada Tabel 1, didapati bahwa perhatian buku tersebut lebih menekankan pada berbagai permasalahan di lingkungan sosial. Penekanannya lebih pada mendeskripsikan. Kehadiran teks eksposisi perlu diapresiasi karena jenis teks ini bertujuan memaparkan dan mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Namun, jumlahnya hanya satu sehingga perlu ditambah lagi agar anak mengerti alasan-alasan terhadap masalah di lingkungan sosial. Dengan kehadiran berbagai alasan dari teks eksposisi, anak akan semakin memahami mengapa sesuatu itu terjadi dan merangsang mereka untuk kritis menemukan solusi.

Kepedulian terhadap lingkungan sosial disajikan melalui *genre* yang cenderung lebih aplikatif (lihat *Kelas yang Bersih* halaman 145;

*Kebiasaan Beramal* halaman 153). Selain itu, kehadiran cerita rakyat dalam *genre* naratif juga patut diberi penghargaan sehingga anak juga mengerti bahwa di negaranya juga ada berbagai cerita yang dapat memotivasi dirinya dalam menghadirkan nilai-nilai moral yang luhur. Bahkan, Knapp dan Watkins (2005: 220-221) menjelaskan bahwa *genre* teks ini tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga memiliki peran sosial yang kuat yaitu media pengubah opini dan sikap sosial. Hal ini berasal dari sifat alami *genre* tersebut dalam mengangkat isu sosial dan menghadirkan kompleksitas dan sudut pandang yang berbeda.

Telah menjadi sifat alami bahwa cerita dalam teks naratif membawa nilai-nilai moral. Cerita-cerita itu tidak secara langsung mengatakan pelajaran moral yang sesungguhnya, tetapi melalui alur kompleksitas cerita. Berman (2004: 109) memandangnya sebagai sikap (mental) wacana atau *discourse stance* yaitu kemampuan teks untuk mendeskripsikan fakta atau fantasi dengan cara yang bermacam-macam.

Begitu dominannya rekon dibandingkan dengan *genre* yang lainnya dapat ditelusuri dari perkembangan yang diperlukan pada usia tersebut. Berman (2004: 121) menjelaskan bahwa banyaknya teks tentang cerita pengalaman pribadi untuk materi di sekolah dilatarbelakangi oleh harapan pengembangan pengetahuan moral, sosial, dan kognitif. Dengan sudut pandang Islami, pengalaman belajar melalui jenis teks ini seperti terkandung dalam cuplikan Al-Quran Surat Yusuf ayat 111, "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal..."<sup>3</sup>

Melihat Tabel 1, keberadaannya teks yang relevan dengan subtema pertama karena pada bagian tersebut, materi disampaikan masih secara umum melalui pengalaman-pengalaman yang dialami. Didukung dengan teks deskripsi dan laporan, subtema ini memiliki peran yang penting dalam mengawali tema pembelajaran. Bila dilihat

---

<sup>3</sup> Terjemahan dikutip dari *Al Qur'an dan Terjemahnya*, halaman 366, dicetak oleh Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba 'At Al Mush-haf, Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262 Kerajaan Saudi Arabia, hadiah dari Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud, dibawah pengawasan Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia tahun 1422 H.

dari pembagian subtema, pembelajaran bersifat dari umum ke khusus.

Mempertimbangkan hasil temuan dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 yang bertema *Peduli Lingkungan Sosial*, teks berperan penting dalam menyampaikan pengetahuan—dalam konteks tema buku ini adalah berbagai ihwal yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Buku ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa secara terpadu dan terkait satu sama lain. Secara umum buku ini menerapkan berbagai kemampuan dari berbagai aktifitas yang diinstruksikan meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Namun pada kegiatan “Ayo Membaca” di buku ini, sebaran jenis teks menunjukkan adanya jenis teks yang terlihat dominan sekali yaitu deskripsi dan rekon. Teks yang lebih kritis seperti laporan dan Eksposisi Hortatori begitu lemah. Hal ini perlu menjadi perhatian karena paparan teks terhadap pembaca juga bertujuan untuk memberikan pengalaman atas peristiwa sosial di masyarakat, termasuk melalui pengalaman membaca.

Perlu untuk mengoptimalkan jenis-jenis teks lain dan belum dihadirkan untuk menambah pengalaman siswa pada aktifitas “Ayo Membaca” ini. Optimalisasi juga perlu pada jenis teks yang masih lemah atau sedikit jumlahnya pada buku tersebut.

Penulis menyarankan agar *genre* teks yang dihadirkan dapat lebih seimbang. Meskipun secara psikologis, para siswa pada kelas 3 SD ini masih dipengaruhi oleh sikap meniru dan memperhatikan sekitarnya sehingga fungsi teks secara dominan disesuaikan dengan kedua sikap tersebut, paparan beragam jenis teks yang kaya penting dilakukan untuk memberikan pengalaman “membaca” lingkungannya. Hal ini menghadirkan sudut pandang yang beragam pula terhadap suatu hal.

Selain menerapkan keseimbangan jumlah, *genre* teks yang dihadirkan dapat dibuat menjadi lebih bervariasi. Mempertimbangkan tema yang diajarkan, jenis teks seperti eksposisi analitik, yang bertujuan untuk membujuk pembaca bahwa terdapat suatu perkara, juga perlu dihadirkan. Selain itu, berita untuk menginformasikan kejadian yang penting diberitakan. Gallo & Molly (2013) menemukan bahwa pada sekitar usia tersebut sesungguhnya

anak memiliki ketertarikan untuk membaca teks informasional. Sebelumnya, Moss (2005) menemukan bahwa siswa sekolah dasar akan memilih teks yang informasional ketika diberi kesempatan (bandingkan dengan Mohr, 2006). Jenis-jenis teks tersebut penting untuk dioptimalkan. Bahkan, teks prosedur juga dapat dihadirkan agar anak memahami tahap-tahap untuk melakukan sesuatu.

Selain itu, pentahapan dalam setiap jenis teks turut memperlancar penyampaian informasi agar mampu memahami tensi permasalahan yang sedang dikaji dari setiap bahasan. Hal ini juga didukung fungsi teks yang juga berorientasi pada tujuan melalui konteks budaya teks yang dibangun. Pentahapan dan fungsi sosial adalah dua aspek yang esensial bagi *genre* sebagai proses sosial yang berorientasi pada tujuan. Meskipun, ragam bahasa yang digunakan lebih santai dan informal, keharmonisan yang dibangun dari pentahapan dan fungsi sosial teks perlu tetap utuh agar informasi yang disampaikan dapat lebih sempurna.

Dengan melihat tingkat keragaman dan keutuhan *genre* teks, hingga kreatifitas guru untuk melengkapi celah yang masih ditemukan dalam teks menunjukkan bahwa kehadiran *genre* teks dapat dieksploitasi dan dibetulkan, baik untuk kebutuhan sosio-kognitif maupun individu. Hal ini bertujuan juga untuk menyadarkan siswa-siswi terhadap literasi sosial agar mereka memperoleh pelajaran dari realitas di masyarakat. Bacaan menjadi produk dari pemaknaan konteks sosial. *Genre* mampu secara optimal sebagai alat untuk keterampilan kognitif dan sosialisasi kepada anak, yaitu bagaimana merasakan dan memahami secara emosional terhadap keadaan yang ada di sekitar mereka (bandingkan Santosa, 2013: 71; Baynham & Prinsloo, 2009: 24; Nelson, Aksu-Koc, & Johnson, 2001: 159).

## E. PENUTUP

Buku teks tematik kurikulum 2013 menempatkan perhatiannya yang cukup besar terhadap teks. Hal ini tampak dari berbagai *genre* teks yang digunakan mulai dari yang bertujuan mendeskripsikan, menceritakan, melaporkan, hingga menjelaskan.

Sebagai bagian dari proses sosial, teks-teks bertema *Peduli Lingkungan Sosial* digunakan dalam

buku tersebut untuk menjembatani siswa dalam memahami nilai-nilai sosial yang diajarkan. Kelas 3 adalah awal dari kategori kelas atas dalam jenjang SD. Meski baru awal, penting untuk memaparkan kepada mereka berbagai hal yang ada di masyarakat terkait tema yang diajarkan. Melalui budaya teks dan pentahapannya, anak-anak diharapkan mendapat pengalaman hingga menciptakan kesadaran mereka sebagai hasil dari proses membaca variasi bacaan yang turut membawa fungsi sosial. Anak belajar melalui pengalaman, hal ini juga berlaku dalam kegiatan membaca. Dengan *genre* teks yang kaya, anak sebagai pembaca dapat memperoleh beragam sudut pandang terhadap sesuatu dan/atau fenomena melalui setiap fungsi sosial teks.

Manfaat dari keragaman pengalaman yang dihadirkan dari variasi *genre* teks kepada anak membuatnya mengetahui apa saja yang dapat mereka temui di masyarakat, begitu juga bagaimana orang-orang di luar sana menghadapinya. Teks memperkenalkan siswa terhadap berbagai fenomena melalui jalinan logis dengan bahasa sehingga menghadirkan pembiasaan dan rekam jejak kesadaran mereka untuk siap menghadapinya di dunia nyata. Terkait dengan penjelasan ini, dapat kita hubungkan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Az Zumar ayat 9,

“..... Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”<sup>4</sup>

Tema *Peduli Lingkungan Sosial* terasa penting untuk masa seperti saat ini, yaitu penguatan nilai-nilai nasionalisme, keberagaman, dan cinta alam menjadi hal yang dibutuhkan untuk menjaga semangat Indonesia. Menggugah kesadaran siswa terhadap tujuan tersebut menjadi keharusan. Ada banyak cara untuk mengaplikasikannya di masyarakat, namun sangat esensial bagi teks, dalam hal ini kurikulum sekolah, untuk dapat memperoleh perhatian yang cermat karena teks membawa ideologi dan pembaca harus mengikuti alur informasinya dari awal hingga akhir. Peran guru sangat besar sebagai penghubung teks dengan target pembacanya—yaitu para siswa dan siswi sekaligus peserta didik. Terhadap tujuan

yang ingin dicapai, guru diharapkan juga mampu secara kreatif merespon teks. Hal ini juga sekaligus melengkapi kekurangan yang masih dapat ditemui di dalam teks.

## F. UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat, hidayah, berkah, inspirasi, dan pengetahuan yang diberikan-Nya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan selesai dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dewan Redaksi dan Penilai (*reviewer*) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia yang membantu penulis dalam mempublikasikan pemikiran dan penelitiannya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Rektor IAIN Surakarta Dr. Mudhofir, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Dr. H. Giyoto, M.Hum., Ketua Jurusan Sastra Inggris Dr. Hj. Lilik Untari, M.Hum, dan Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Dr. Imroatus Solikhah, M. Pd. atas segala dukungan dan semangat yang diberikan. Juga kepada kedua orangtua penulis yang selalu memberikan motivasi.[]

---

<sup>4</sup> Ibid. halaman 747

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya*. 1422H. Medinah Munawwarah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba 'At Al Mush-haf.
- Baynham, Mike, Mastin Prinsloo, eds. 2009. *The Future of Literacy Studies*. New York: Palgrave Mac Millan.
- BBC Online. 2016. "Anak-Anak Muda Indonesia Makin Radikal." Februari 18. [www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/02/160218\\_indonesia\\_radikalisme\\_anak\\_muda](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160218_indonesia_radikalisme_anak_muda).
- Berman, Ruth A. 2004. "Introduction: Developing Discourse Stance in Different Text Types and Language." *Elsevier: Journal of Pragmatic* 34: 105-124.
- Chamberlain, Mary, and Paul Thompson. 1998. *Narrative and Genre*. London: Routledge.
- Christie, Frances. 2002. *Classroom Discourse Analysis: A Functional Perspective*. London: Continuum.
- Cope, B, and M. Kalantzis. 1993. *The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing*. New York: The Falmer Press.
- Coulmas, Florian. 2013. *Writing and Society : An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Djarmika. 2012. *Perilaku Bahasa di Dalam Teks Kontrak dari Kaca Mata Linguistik Sistemik Fungsional*. Surakarta: UNS Press.
- Dreher, Mariam Jean, and Harry Singer. "Friendly Text and Text-Friendly Teachers." *Theory into Practice* 24 No. 2 (1989): 98-104.
- Eggs, Suzanne. 1994. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Pinter.
- Freedman, Aviva. "Show and Tell? The Role of Explicit Teaching in the Learning of New Genres." *Research in the Teaching of English* 27, No.3 (1993): 222-251.
- Gallo, Gina, and Molly K. Ness. "Understanding the Text Genre Preferences of Third-Grade Readers." *Journal of Language and Literacy Education* 9 No.2 (2013): 110-130.
- Gee, J.P. 1992. *The Social Mind: Language, Ideology, and Social Practice*. New York: Bergin & Garvey.
- Gerot, Linda, and Peter Wignell. 1995. *Making Sense of Functional Grammar*. Sydney: Gerd Stabler.
- Halliday, M.A.K. 1994. *Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.
- Hauser, Robert M. et al. 2005. *Measuring Literacy*. Washington: The National Academics Press.
- Hicks, Deborah. "Working Through Discourse Genre in School." *Research in the Teaching of English* 31 (1997): 459-485.
- Jurusan PGSD Universitas Negeri Jakarta. 2012. *Modul Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. "Pemberian ruang Kreatif Bagi Guru." *Majalah Jendela*, Juni.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2015. *Buku Tematik Terpadu 2013: Tema 4. Peduli Lingkungan Sosial*. Jakarta: Kementerian.
- . 2013. *Materi Kuliah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Knopp, Peter, and Megan Watkins. 2005. *Genre, Text, Grammar: Technologies for Teaching and Assessing Writing*. Sydney: University of New South Wales.
- Kompas. 2017. "Karakter Diperkuat." Januari 27: 11.
- Kompas. 2016. "Perekrutan Anak Jadi Teroris." Desember 24: 1.
- Lincoln, Y.S., and E.G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills : Sage Publication.
- Maine, Fiona. 2015. *Dialogic Readers: Children Talking and Thinking Together about Visual Texts*. New York: Routledge.
- Matthiessen, Christian M.I.M., Teruya, Kazuhiro, and Marvin Lam. 2010. *Keyterms in Systemic Functional Linguistics*. London : Continuum.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. n.d. *Kemdikbud*. Accessed May 28, 2017. [www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan Mendikbud pada Workshop Pers.pdf](http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan%20Mendikbud%20pada%20Workshop%20Pers.pdf).
- Mohr, K.A.J. 2006. "Children's Choices for Recreational Reading: A Three-Part Investigation of Selection Preferences, Rationales, and Processes." *Journal of Literacy Research* 38 No.1: 81-104.
- Moss, B. "Making a Case and a Place for Effective Content Area Literacy Instruction in the Elementary Grades." *The Reading Teacher* 59 No.1 (2005): 46-55.
- Mulia, Vilya Lakstian Catra. "Motif Ketertarikan Pembaca: Tinjauan Aspek Internal Teks Hingga Metakognisi." *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan DIALOG* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI) 39, No. 1 (2016): 81-88.
- Mulia, Vilya Lakstian Catra. "The Contributions of Literacy Skills to National Development." *Leksema* No. 2 (2016):111-118.
- Nelson, Keith E, Ayhan Aksu-Koc, and Carolyn E., eds Johnson. 2001. *Children's Language*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Salceda, Juan C. Ripoll, Gerardo Aguado Alonso, and Anny Patricia Castila Earls. "The Simple View of Reading in Elementary School: A Systematic Review." *Elsevier Espana* (2013):17-31.
- Santosa, Riyadi. 2011. *Logika Wacana: Analisis Hubungan Konjungtif dengan Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- . 2003. *Semiotika Sosial : Pandangan Terhadap Bahasa*. Surabaya : JP Press & Pustaka Eureka.
- Spradley, J.P. 1980. *Metode Etnografi*. Translated by M.Z. Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tankersley, Karen. 2003. *The Threads of Reading: Strategies for Literacy Development*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Toledo, Piedad Fernandez. "Genre Analysis and Reading of English as a Foreign Language." *Journal of Pragmatics* 37 (2005): 1059-1079.
- Ventola, Eija. 1987. *The Structure of Social Interaction: A Systemic Approach to the Semiotics of Service Encounters*. London: Frances Pinter.
- Wakil Menteri Pendidikan Republik Indonesia. n.d. *Kemdikbud*. Accessed May 28, 2017. [www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan Wamendik.pdf](http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan%20Wamendik.pdf).



## TOPIK

---

# THE EVALUATION OF MADRASAH UNGGULAN: A CASE STUDY OF MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) SERAWI SOUTH KALIMANTAN

FARIDA HANUN\*

---

### ABSTRACT

*This study aims at evaluating the management of Madrasah Unggulan regarding the input, process, and product in MIN Serawi, Kalimantan Selatan by employing qualitative design. The results show that: (a) MIN Serawi excels in the extra curricular activities, such as: science competition, Rudaat arts, and tahlil, (b) department of religion in central, city, and regency levels need to conduct coaching, quality assurance and supervision on the management of MIN Serawi which is conducted consistently and sustainably, (c) community involvement needs to be improved in order to attract more sources of funds.*

**KEY WORDS:** *Evaluation, Management, Madrasah, Unggulan*

## EVALUASI PENYELENGGARAAN MADRASAH UNGGULAN: STUDI KASUS DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) SERAWI KALIMANTAN SELATAN

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan madrasah unggulan terkait input, proses dan produk di MIN Serawi Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (a) keunggulan dan kekhasan MIN Serawi adalah kegiatan ekstrakurikuler KSM (Kompetisi Sains Madrasah), seni rudaat, dan kegiatan tahlilan, (b) Kementerian Agama Pusat/Kota/Kab perlu melakukan pembinaan, penjaminan mutu, dan pengawasan terhadap pengelolaan komponen-komponen strategis MIN Serawi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, (c) keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan dalam upaya penggalan sumber-sumber dana.

**KATA KUNCI:** Evaluasi, Penyelenggaraan, Madrasah, Unggulan

---

\*Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jl. MH. Thamrin N0. 6 Jakarta.  
E-Mail: [farida\\_ridwan@yahoo.com](mailto:farida_ridwan@yahoo.com)

\*\* Naskah masuk diterima Oktober 2016, direvisi November 2016 dan disetujui untuk diterbitkan Juni 2017

## A. PENDAHULUAN

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan merupakan satu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia menjadi lebih baik.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan sebagai berikut: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>2</sup> dipertegas bahwasanya: Pendidikan nasional Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang tersebut bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan, sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

Apalagi pada masa sekarang ini manusia dituntut untuk tahu banyak (*knowing much*), berbuat banyak (*doing much*), mencapai keunggulan (*being excellence*), menjalin hubungan dan kerja sama dengan orang lain (*being sociable*), serta berusaha memegang teguh nilai-nilai moral (*being morally*). Manusia unggul, bermoral, dan pekerja keras inilah yang menjadi tuntunan dari masyarakat global.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.

<sup>3</sup> Nana Syaodih dkk., *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah*

Kondisi ini yang mendorong madrasah harus memiliki mutu pendidikan yang baik. Mutu pendidikan dalam konteks pendidikan mencakup input, proses, dan output pendidikan. Saat ini para pengelola pendidikan berlomba-lomba membangun madrasah yang bermutu, mandiri dan unggul dalam mendidik inputnya.

Proses pendidikan pada madrasah sangat urgen dalam menerapkan teori dan konsep pembelajaran yang menyangkut dengan pengajaran. Komponen pengajaran banyak membutuhkan sumber daya yang profesional pada proses belajar mengajarnya, agar bisa menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Serawi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dalam proses pembelajaran (*transformasi*) mengutamakan mutu kelulusan (*output*) dari hasil pembelajaran

Dari latar belakang di atas, maka dipandang perlu melakukan evaluasi sebagai barometer penilaian pencapaian transformasi pendidikan yang diselenggarakan MIN Serawi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih jauh tentang Evaluasi Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Serawi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana input MIN Serawi?, (2) Bagaimana keunggulan dan kekhasan proses pembelajaran MIN Serawi? (3) Bagaimana mutu Lulusan MIN Serawi? (4) Apa faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan di MIN Serawi. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penyelenggaraan MIN Serawi terkait input, proses dan produk madrasah.

## B. KAJIAN LITERATUR

### Kerangka Teori

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sejauh mana tujuan atau program telah tercapai.<sup>4</sup> Sedangkan Suchman dalam Arikunto dan Jabar<sup>5</sup>

*Menengah* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 6.

<sup>4</sup> Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan* (Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2004), 1.

<sup>5</sup> Arikunto dan S. Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 1.

memandang bahwa, “evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan”.

Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar mengatakan bahwa, “evaluasi adalah penggambaran proses, mencari dan memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan”.<sup>6</sup> Evaluasi sangat berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif, dan evaluasi tidak sebatas proses pengumpulan data atau informasi sebagai landasan untuk menilai suatu kegiatan tetapi juga diikuti dengan pengambilan keputusan atas beberapa pilihan.

Evaluasi menurut Kumano merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen.<sup>7</sup> Evaluasi juga perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan perhitungan pembiayaan, memilih strategi terbaik dari berbagai alternatif strategi yang tersedia, meningkatkan efisiensi iklan pada umumnya, dan melihat apakah tujuan telah tercapai

Evaluasi program pendidikan merupakan proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif keputusan. Definisi ini menunjukkan bahwa melalui evaluasi program maka pendidik, mengelola program dan/atau pimpinan lembaga penyelenggara memperoleh berbagai informasi tentang sejumlah alternatif keputusan yang berkaitan dengan program pendidikan yang dievaluasi.<sup>8</sup>

Tujuan evaluasi pendidikan terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.<sup>9</sup> Pertama, tujuan umum adalah untuk memperoleh data pembuktian, yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan kurikuler serta bertujuan untuk mengukur, menilai tingkat efektifitas mengajar dan metode yang telah diterapkan oleh pendidik dalam proses pendidikan.

<sup>6</sup> Arikunto dan S. Jabar, Op. Cit., 2.

<sup>7</sup> Y. Kumano, *Authentic Assessment and Portfolio Assessment-Its Theory and Practice* (Japan: Shizuoka University, 2001), 15.

<sup>8</sup> Djudju Sujana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 20.

<sup>9</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* ( Jakarta: Rajagrafindo, 2011), 1.

Kedua, tujuan khusus adalah untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam menempuh program pendidikan (memunculkan sikap untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi), serta bertujuan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu cara yang paling efektif dalam menentukan/memecahkan masalah yang berkenaan pendidikan yang akan menjadi landasan untuk perbaikan mutu pendidikan.

Selanjutnya pengertian penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.<sup>10</sup>

Adapun definisi Madrasah Unggulan adalah sebuah madrasah program unggulan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki madrasah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan dunia, dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang ditunjang oleh akhlakul karimah. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan (input), proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.

### Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penyelenggaraan madrasah, Farida Hanun telah melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Madrasah Unggulan MIN Martapura.<sup>11</sup> Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lembaga pendidikan madrasah Ibtidaiyah Unggulan (MIN Model Martapura) perlu mempertahankan otonomi yang diberikan pemerintah dalam mengoperasikan lembaga pendidikannya baik dari waktu penerimaan siswa, sistem dan

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal 1.

<sup>11</sup> Farida Hanun, *Laporan Madrasah Unggulan di MIN Martapura Kalimantan Selatan* (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2014), 50.

pembinaan siswa, sistem penerimaan pendidikan dan tenaga kependidikan, sistem pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran dan jaringan kerjasama dengan pihak lain

Temuan lainnya adalah MIN Model Martapura dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik membutuhkan biaya tinggi, oleh karena itu pengelola madrasah harus lebih proaktif mencari sumber-sumber dana dari masyarakat baik dari kalangan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama maupun tokoh-tokoh masyarakat

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,<sup>12</sup> yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian dilakukan pada MIN Serawi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan: studi kepustakaan, pedoman wawancara, dan daftar isian. Analisis data dilakukan dengan cara merekam, mencatat, mengkaji, melakukan *check* dan *recheck*, mengklasifikasi, serta mengembangkan dan mengabstraksi data dan informasi yang diperoleh dari responden. Data-data yang di himpun melalui wawancara mendalam, kuesioner dan studi pustaka diolah dan dirumuskan menjadi laporan penelitian.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Input Madrasah

##### Kilasan Sejarah Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Serawi berdiri pada tanggal 1 April 1964 oleh Panitia yang dipelopori oleh tokoh alim ulama dan tokoh masyarakat yaitu Gr Badrun dan Gr Ays'ari yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai agama yang bertujuan untuk memperkokoh keagamaan bagi penduduk di sekitar madrasah, dan seiring berjalannya waktu, madrasah ini mendapatkan izin operasional tanggal 3 Januari 1978 sehingga madrasah ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan

mengikuti ujian persamaan madrasah negeri. Dari tahun ke tahun berjalan, hingga di tahun 1982 madrasah ini dinegerikan sehingga nama lembaga ini resmi menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Serawi.

Dari beberapa tahun berjalannya era pendidikan telah terjadi pergantian tampuk pimpinan sebanyak 9 kali pergantian. Adapun periode kepemimpinan MIN Serawi saat ini dipegang oleh Ibu Umsiah, S.D.I dari tahun 2012 sampai sekarang.

MIN Serawi berada di antara 2 kecamatan yaitu Kecamatan Tapin Tengah dengan Kecamatan Bakarangan, yang beralamat di Jl.Parigi Simbar Desa Serawi Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Lingkungan masyarakatnya agamis karena dekat dengan Majelis Ta'lim yang besar di Tapin, ekonomi masyarakatnya ada yang menengah dan menengah ke bawah. Kebanyakan dari mereka bermata pencaharian petani dan buruh tani, ada juga wiraswasta karena pendidikan mereka rata-rata hanya tamatan SD sederajat dan SMP sederajat.

Lingkungan masyarakat sekitar MIN Serawi kebanyakan agamis karena dengan majlis ta'lim yang besar di Tapin, ekonomi masyarakat kebanyakan bermata pencaharian petani (38%), PNS (14%), wiraswasta (45%), pengusaha (0,5%) dan lain-lain (2,5%). Adapun pendidikan mereka tamatan SD sebanyak 49%, SMP 17%, SMA 23%, D2 sebanyak 1,8% dan S1 sebanyak 9,2%.

#### Fasilitas Penunjang Pendidikan

Dalam rangka tercapainya misi yang telah di tetapkan, MIN Serawi telah berusaha melengkapi sarana sebagai fasilitas pendidikan yang menunjang terwujudnya tujuan program tersebut. Sarana yang dimiliki diantaranya ruang Kepala Sekolah, 33 ruang belajar (kelas), 2 Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Aula, Ruang Perpustakaan, Ruang BK, , Ruang Gudang serba guna, Wc, Tempat Ibadah, Kantin Sekolah, lapangan Olah Raga, ruang Koperasi /Warung Madrasah.

Sarana prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan, akan tetapi sarana dan prasarana di MIN Serawi belum terpenuhi seluruhnya, dan untuk upaya meningkatkan sarana MIN Serawi melakukan beberapa

<sup>12</sup> Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan Keenam belas, 2008), 45.

kerjasama. Pertama, kerjasama dengan Kementerian Agama sebagai induk dari madrasah, berupa pembangunan ruang kelas sebanyak 4 lokal ( awal berdiri ), pembangunan 6 ruang kelas ( periode Pak Kursani A, MA (1988), dan rehab ruangan saat periode Dra. Salmiah Rajebi (2008), rehab 4 lokal dan pembuatan teras tahun 2013, pengurukan halaman olahraga dan bermain tahun 2012.

Kedua, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan berupa pembangunan ruang kelas sebanyak 2 kelas Tahun 2011, pembangunan perpustakaan yang merupakan usulan dari komite madrasah tahun 2010. Ketiga, kerjasama dengan orangtua siswa, berupa infaq Jum'at seribu untuk pemasangan vapping batako halaman sekolah.

#### **Leadership Kepala Madrasah**

Kepala madrasah profesional dalam paradigma baru manajemen pendidikan akan memberikan dampak positif dan perubahan yang cukup mendasar dalam pembaruan sistem pendidikan di madrasah. Kepala madrasah seharusnya memiliki kemampuan dan pemahaman yang menonjol. Realita di lapangan menunjukkan peran kepala madrasah yang profesional mampu mengangkat nama madrasah sehingga mampu memperbaiki prestasi akademik siswa.

Kepala MIN Serawi memiliki gaya kepemimpinan yang sangat terbuka dan menciptakan iklim saling kebersamaan, agamis, tidak membedakan antara bawahan dengan atasan namun tetap berdiri pada posisi masing-masing sehingga tetap terjadi komunikasi yang baik dan saling menghargai. Iklim kepemimpinan seperti ini merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kemajuan di MIN Serawi.

Menurut Kepala MIN Serawi, terkait kepemimpinannya, dia menerapkan sistem manajemen yang diterapkan adalah manajemen terbuka, di mana untuk manajemen ini kepala madrasah selalu terbuka kepada guru-guru, komite, TU, mengenai pengelolaan dana baik dana BOS ataupun rutin. Semua perencanaan dan penganggaran kegiatan dibuka pada rapat penyusunan anggaran, agar semua guru bisa mengetahui penggunaan dana dan penerimaannya sehingga kerjasama dalam memajukan madrasah di harapkan bisa maksimal

di laksanakan karena semua merasa bahwa tidak ada yang ditutupi dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di musyawarahkan.

#### **Kualifikasi Ketenagaan yang Mumpuni**

Dalam hal ketenagaan pendidik, MIN Serawi telah memiliki tenaga pendidik saat ini berjumlah 12 orang terdiri dari 10 PNS dan 2 orang Non PNS, dibantu oleh 5 tenaga kependidikan yang terdiri dari 2 orang sebagai tenaga Tata Usaha yang menangani administrasi keuangan dan pengajaran, 2 orang tenaga perpustakaan yang menangani bagian administrasi perpustakaan baik peminjaman, katalog, dan pelaporan admistrasi perpustakaan lainnya, 1 orang tenaga penjaga sekolah yang tugasnya di bidang kebersihan dan perlengkapan madrasah .

Madrasah Ibtidaiyah Unggul harus memiliki guru yang unggul juga. Untuk mengembangkan kemampuan guru MIN Serawi, pihak madrasah sudah sering menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan sendiri oleh MIN Serawi maupun yang diselenggarakan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Tapin.

#### **Animo Masyarakat Masuk MIN Serawi**

Siswa yang mengenyam pendidikan di MIN Serawi kebanyakan berasal dari TK dan RA yang berdomisili di sekitar lingkungan madrasah, namun ada juga yang berdomisili cukup jauh dari madrasah. Mereka umumnya berasal dari masyarakat pedesaan dan pinggiran kota, selain itu ada juga berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Jumlah siswa yang bersekolah di MI Serawi dengan total keseluruhan sebanyak 162 siswa, dengan rincian siswa kelas 1 sebanyak 32, 23 siswa Kelas 2, 31 siswa kelas 3, 26 siswa kelas 4, 30 siswa kelas 5, dan 20 siswa kelas 6. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 78 dan perempuan sebanyak 84. Jumlah total rombongan ada 7 buah.

Bagi masyarakat di sekitar lingkungan MIN Serawi ini, pandangan mereka terhadap MIN Serawi cukup baik karena mereka sudah bisa memilih penyelenggaraan yang baik dan bermutu dibuktikan dengan adanya penambahan siswa yang masuk dan mendaftar ke MIN Serawi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah siswa tahun 2012/12013 25 siswa dan tahun 2013/2014 sebanyak 27. Kemudian meningkat lagi

menjadi 33 tahun 2014/2015.

Orang tua siswa yang memasukan anaknya ke MIN Serawi kebanyakan dari kalangan biasa saja dengan pendidikan tamatan SD sebanyak 14 orang=44%, SMP 4 orang =12%, SMA 7 orang =22%,S1 sebanyak 5 0rang=16%,D2 sebanyak 2 orang= 6%,untuk tingkatan ekonominya juga dari kalangan biasa saja di antaranya: petani sebanyak 13 orang = 41%, PNS sebanyak 8 orang=25%, wiraswasta sebanyak=10 orang=31%, pengusaha 1 orang=3%.

### **Kemandirian Pembiayaan**

Pembiayaan bersumber pada DIPA yang dapat membiayai untuk keperluan siswa dan kegiatan pembelajaran yang tertuang dalam dana BOS dan Dana Rutin. Di MIN Serawi ada juga Bantuan Siswa Miskin sebanyak 55 siswa yang mendapat bantuan langsung melalui Rekening siswa sebesar Rp. 225.000 setiap siswa per enam bulan.

Terkait dengan kemandirian pembiayaan MI Serawi, menurut Kepala MI Serawi bahwa saat ini sesuai dengan dana yang ada di sesuaikan dengan beberapa kegiatan yang dapat kami jalankan dan dianggarkan sesuai perencanaan untuk mengoperasionalkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan pembelajaran namun untuk peningkatan kualitas mutu guru, pendanaannya masih belum tercukupi.<sup>13</sup>

Komite madrasah dalam hal bantuan telah berusaha mencukupi anggaran operasional madrasah dalam berbagai kegiatan diantaranya kegiatan dalam bentuk bantuan infak siswa yang di jalankan setiap jum'at pagi dan turut membantu pemeliharaan halaman madrasah berupa pemasangan vapping batako untuk halaman upacara dan olahraga. Selain itu, tahun 2007 komite berpartisipasi dalam pembangunan perpustakaan dan sudah terealisasi pembangunannya pada tahun 2008.

### **Jaringan Kerja sama**

Madrasah unggul biasanya memiliki jaringan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi, terutama instansi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan kompetensi

siswa. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai instansi akan mempermudah siswa untuk menerapkan sekaligus memahami berbagai sektor kehidupan (*life skill*).

Adapun dalam hal mencari jaringan kerja sama, MIN Serawi telah berusaha mencari jaringan kerjasama untuk dapat meningkatkan pembangunan sumber pembiayaan dan sumber daya manusianya dengan instansi terkait. Misalnya dengan kantor kecamatan setempat untuk pengajuan pembangunan, dinas pendidikan kabupaten untuk merekrut pegawai yang diperlukan, dinas pendidikan propinsi untuk meningkatkan sarana prasarana gedung belajar dan sarana infrastruktur lainnya, dinas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi siswa-siswi dan pegawainya dalam hal pembinaan UKS. Sedangkan dinas tata kota dan kebersihan untuk meningkatkan pelayanan di bidang kebersihan dan lingkungan yang sehat dengan pemberian bantuan pohon-pohon hijau untuk penghijauan lingkungan madrasah.

## **2. Keunggulan Proses Pendidikan**

Kurikulum dan Kegiatan Peserta Didik

Madrasah unggul biasanya memiliki pengembangan kurikulum yang beda dengan madrasah lain, karena salah satu dimensi keunggulan sebagai ciri madrasah unggul yaitu adanya kurikulum yang diperkaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa yang seusianya.<sup>14</sup>

Pengembangan kurikulum (yang disesuaikan dengan kondisi daerah) telah dilakukan oleh MIN Serawi, di antaranya: untuk inovasi (pembaharuan) kurikulum umum ada penambahan jam pelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semula 5 Jp/minggu menjadi 6 Jp/minggu, IPS 4 JP/minggu menjadi 3 JP/minggu, SBK 4Jp/minggu menjadi 2 JP/minggu, sehingga bisa ditambahkan muatan lokal bahasa Inggris untuk pengenalan dasar bahasa Inggris.

Proses inovasinya adalah ditambahkannya

<sup>13</sup> Wawancara tanggal 15 Mei 2015 dengan Ibu Rumsiah, S.Pd.I (Kepala MIN Serawi Kab. Tapin Kalimantan Selatan).

<sup>14</sup>Depdikbud, *Pengembangan Sekolah Unggul* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2006), 25.

jam pelajaran muatan lokal bahasa Inggris karena mata pelajaran tersebut cukup penting untuk kelas dasar dan ada jumlah mata pelajaran yang di kurangi karena jumlah jam tersebut hanya merupakan mata pelajaran yang cukup.

**Kurikulum Agama.** Kurikulum Agama merupakan pedoman bagi guru dalam menyelenggarakan pembelajaran Agama. Kurikulum memberikan konsep-konsep standar dari mata pelajaran agama yang perlu diajarkan kepada siswa berdasarkan pertimbangan akademik dan perkembangan psikologi siswa. Apa yang akan diajarkan kepada siswa adalah apa yang sebenarnya diperlukan oleh siswa dan menstimulasi siswa untuk mempelajari sendiri (rasa keingintahuan). Untuk kurikulum mata pelajaran agama, MIN Serawi mengikuti kurikulum madrasah dari Kementerian Agama yang disebut kurma di mana mata pelajaran agama mengikuti kurikulum 2013 dengan alokasi waktu sesuai struktur kurikulum 2013

**Muatan Lokal.** Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya program muatan lokal dalam Standar Isi di Madrasah Ibtidaiyah, dilandasi kenyataan bahwa di Indonesia terdapat beranekaragam kebudayaan. Madrasah tempat program pendidikan dilaksanakan merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan di madrasah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang kekhususan yang ada di lingkungannya. Standar Isi yang seluruhnya disusun secara terpusat tidak mungkin dapat mencakup muatan lokal tersebut. Sehingga perlu disusun mata pelajaran yang berbasis pada muatan lokal.

Adapun Muatan Lokal yang diselenggarakan di MIN Serawi adalah (1) kegiatan BTA (Baca Tulis Al-Qur'an). Keunggulan dipilihnya BTA sebagai muatan lokal adalah untuk mencetak anak yang dapat membaca Al-Qur'an dan mengenal huruf hijaiyah dan tajwid bacaan Al-Qur'an dan (2) pengenalan Bahasa Inggris bagi siswa kelas III – kelas VI yang merupakan pelajaran dasar untuk melatih berbicara dengan bahasa Inggris.

**Pengembangan Diri.** Bentuk kegiatan pengembangan MIN Serawi adalah pendalaman ibadah berupa hafalan-hafalan do'a harian dan bacaan shalat. Selain itu, terselenggara juga seni-seni keagamaan, misalnya maulid Habsyi dan syair-syair Islami. Kegiatan ini sangat disokong

oleh Pemda Kab. Tapin, terbukti dengan kehadiran Bupati Tapin dalam setiap kegiatan khataman Al-Qur'an massal yang diselenggarakan oleh MIN Serawi sebagai Kepanitiaan dan bekerjasama dengan K2s Kabupaten Tapin Tengah.

**Ekstrakurikuler.** Kegiatan ekstrakurikuler diadakan secara swadaya dari pihak madrasah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah. Keragaman ekstrakurikuler di MIN Serawi di antaranya: pramuka, rudat, rebana, angklung, tahlilan.

**Pramuka.** Kegiatan pramuka di MIN Serawi dilaksanakan setiap Kamis sore jam 15.00 – 17.00, dengan pembina pramuka dari kwarcab dan kwarran dengan jumlah peserta pramuka 107 siswa dari siswa kelas III-VI, pada kegiatan ini melatih disiplin siswa dan keterampilan siswa.

**Rudat.** Kegiatan ini dilaksanakan setiap Sabtu sore jam 16.00-17.30, dengan pembimbing kegiatan dari guru dan orang luar dengan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 63 siswi dari kelas I –VI. Kegiatan seni Rudat bertujuan melatih kedisiplinan dan kerjasama antara siswi serta keserasian dan kekompakan sesama kawan.

**Rebana.** Kegiatan Rebana dilaksanakan setiap sore Senin jam 16.00-17.30, dengan pelatih dari guru dan mendatangkan orang luar. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan seni Rebana sebanyak 26 orang dari siswa kelas IV dan kelas V. Kegiatan ini melatih kebersamaan sesama siswi.

**Anklung.** Kegiatan seni Anklung dilaksanakan setiap Jumat sore jam 16.00-17.30 dengan pembimbing dari guru. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 40 orang dari siswa kelas IV dan V. Kegiatan seni Anklung bertujuan melatih konsentrasi dan ingatan siswa tentang tugasnya masing-masing.

**Tahlilan.** Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat pagi jam 07.30 -08.00 dengan pembimbing dari guru pengajar metode iqra dengan jumlah siswa yang mengikuti sebanyak 40 orang dari siswa kelas IV-VI. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan meningkatkan rasa sosial anak-anak dengan mengikuti ta'ziah apabila ada kematian di lingkungan madrasah dengan membaca surah yasin dan bertahlil untuk almarhum.

#### **Inovasi Pembelajaran**

Sistem pembelajaran yang di terapkan di MIN

Serawi tidak jauh beda dengan sistem pembelajaran yang ada di madrasah pada umumnya yaitu sistem reguler di mana siswa dan guru sama-sama aktif dengan penyelenggaraan waktu pembelajaran dari jam 07.30 dan pulang jam 12.00.

Proses belajar mengajar yang berlangsung di MIN Serawi pada dasarnya masih menggunakan sarana pembelajaran yang sama dengan madrasah reguler yaitu berupa ruang kelas, papan tulis+ kapur dan buku. Sese kali guru menggunakan alam sebagai sarana pembelajaran (pembelajaran di luar ruangan terbuka).

Dalam pengembangan potensi profesional, guru MIN Serawi harus menguasai banyak tentang beragam metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang dipakai oleh guru-guru MIN Serawi kebanyakan menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, metode penugasan dan metode latihan.

Pendekatan pembelajaran klasikal dengan menggunakan metode ceramah terkadang membuat siswa menjadi cepat bosan dan tidak memperhatikan materi yang diceramahkan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pembelajaran dianggap salah satu pemecahan yang sesuai.

Pembelajaran berbasis komputer (*komputer based instruction*) adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan komputer. Pemanfaatan TI dalam pembelajaran dapat menjadi sistem pembelajaran mandiri (*Instructor independent*) atau juga digabungkan dalam proses pembelajaran langsung (tatap muka di kelas) yang mengandalkan kehadiran guru.

Terkait kemampuan guru MIN Serawi dalam penggunaan IT, kondisi di lapangan menunjukkan sebagian guru MIN Serawi sudah menggunakan IT walau masih ada beberapa guru yang belum menguasai cara-cara menggunakan IT pada proses belajar mengajar. Solusi mengatasi hal ini diantaranya dengan memperbanyak pelatihan pada forum-forum kreatifitas keprofesional guru yang diwadahi pada KKG ataupun MGMP.

### **Budaya Madrasah**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri peserta didik agar berguna bagi individu, masyarakat, bangsa,

dan negara. Dalam proses pendidikan diperlukan keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

Selanjutnya, agama dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan moral spiritual peserta didik. Di sisi lain, banyak sekolah-sekolah yang kurang optimal dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah sehingga banyak keluhan masyarakat terhadap pendidikan agama di sekolah yang belum mampu mengokohkan akidah dan moral bangsa. Oleh karena itu, MIN Serawi berusaha menyelenggarakan pendidikan agama di MIN Serawi seoptimal mungkin melalui sistem pengajaran yang menyentuh aspek sikap dan perilaku pembiasaan serta penciptaan lingkungan madrasah yang kondusif.

Menciptakan lingkungan yang kondusif akan terkait dengan bagaimana menciptakan budaya madrasah yang baik. Seluruh *stakeholder* MIN Serawi sudah berusaha untuk menerapkan budaya madrasah yang baik di antaranya: (1) berbaris di depan kelas sebelum masuk, (2) membaca doa sebelum dan sesudah belajar, (3) ucapan salam ketika masuk kelas, (4) shalat berjamaah setiap hari, (5) upacara bendera, setiap pagi Senin, (6) senam massal, setiap Sabtu pagi, (7) membuang sampah di tempatnya, hidup bersih, (8) menghormati guru serta berdisiplin, (9) membaca Surah Yasin setiap pagi Jumat, (10) membaca surah-surah pendek di awal pembelajaran, (11) membaca Al-Qur'an setiap pagi, (12) pemberian *reward* bagi siswa dan guru yang berprestasi, (13) budaya terbuka dalam hal penggunaan anggaran.

### **3. Prestasi Akademik dan Non Akademik**

Sebagaimana dengan madrasah unggul lainnya, maka lulusan MIN Serawi memiliki banyak prestasi di bidang akademik dan non akademik. Adapun prestasi Siswa-siswa MIN Serawi dapat dilihat pada uraian berikut: a) *Tingkat Propinsi* Juara III lomba KSM Mapel IPA tahun 2014, b) *Tingkat Kabupaten* menjuarai: (1) Juara I: -Lomba Mapel IPA, Lomba Mapel Bahasa Indonesia, Lomba Mapel IPS, (2) Juara II: Lomba Mapel Matematika, Lomba Mapel Qur'an Hadits, Lomba Mapel IPA, Lomba Rudat, lomba Senam, Lomba lari, (3) Juara III: Lomba Kaligrafi Putra, Lomba kaligrafi Putri, Lomba azan, Lomba

Habsyi, Lomba Cerdas Cermat.

Sedangkan prestasi lembaga 2 Tahun terakhir meliputi: a) *Kecamatan*: Juara I Lomba Sekolah Sehat Tk Kec.Tapin Tengah Tahun 2014, b) *Kabupaten*: Juara I Lomba Sekolah Sehat Tk Kab.Tapin Tahun 2014 dan Juara I Lomba Madrasah Berprestasi Tk. Kab. Tapin Tahun 2014, c) *Propinsi*: Juara III Lomba Sekolah Sehat Tk Prop. Kalimantan Selatan Tahun 2014, Juara II Lomba Madrasah Berprestasi Tk Prop. Kalimantan Selatan Tahun 2014, dan Juara V Lomba Madrasah Berprestasi Tk Prop. Kalimantan Selatan Tahun 2011.

MIN Serawi selalu berusaha agar madrasah ini mampu menjadi madrasah unggulan. Dengan demikian diharapkan para alumni nantinya menjadi berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Dengan modal pengetahuan dasar di atas, alumni MIN Serawi terbukti mampu berkiprah memberikan kontribusi bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya sebaran alumni madrasah yang banyak melanjutkan ke MTs dan SMP dan di terima 100%. Untuk tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 15 siswa melanjutkan ke MTsN 1 Rantau, sebanyak 3 siswa ke SMP dan 2 orang ke pondok pesantren.

#### 4. Analisis Hasil Penelitian

Keunggulan Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah Ibtidaiyah Unggul MIN Serawi merupakan madrasah yang menekankan pada terciptanya iklim belajar yang positif di lingkungannya. Madrasah tipe ini telah mencetak *input* yang biasa-biasa saja menjadi *output* yang istimewa dan luar biasa.

Secara umum beberapa indikator yang menunjukkan madrasah itu unggul yaitu: (1) sekolah memiliki visi dan misi untuk meraih prestasi yang tinggi, (2) semua personel sekolah memiliki komitmen yang tinggi untuk berprestasi, (3) adanya program pengadaan staf sesuai dengan perkembangan IPTEK, (4) adanya kendali mutu yang terus-menerus (*quality control*), (5) adanya perbaikan mutu yang berkelanjutan (*Continous quality improvement*), (6) adanya komunikasi dan dukungan insentif dari orang tua murid dan masyarakat.<sup>15</sup>

Adapun kekhasan dan keunggulan yang

dimiliki Madrasah Ibtidaiyah Negeri Serawi diantaranya: lokasi madrasah terletak di pinggir jalan sehingga memudahkan akses jalan bagi para siswa, biaya gratis alias tidak dipungut bayaran, dibina oleh tenaga pengajar lulusan S1.

Selain itu, lembaga pendidikan MIN Serawi ini di mata masyarakat dianggap madrasah favorit. Citra favorit yang diberikan oleh masyarakat karena MIN Serawi sering menjuarai perlombaan KSM (Kompetensi Sain Madrasah) tingkat propinsi dan perlombaan Seni Rudat yang sangat digemari oleh masyarakat kalimantan Selatan. Ditambah lagi masyarakat sangat membutuhkan siswa-siswa MIN Serawi untuk kegiatan tahlilan jika ada masyarakat yang meninggal dunia. Kepandaian siswa-siswa dalam penguasaan lomba KSM dan seni Rudat serta kegiatan tahlilan menjadi daya tarik masyarakat Kab. Tapin untuk masuk bersekolah di MIN Serawi dan masyarakat memberikan cap sebagai madrasah yang favorit.

#### Faktor Pendukung dan Kendala

Sarana prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana masih perlu penambahan dan perbaikan dan tingkat kelayakan ruangan sangat layak namun perlu perawatan yang lebih intens lagi, misalnya pendingin ruangan, lantai masih ada yang belum di keramik, belum tersedianya kantin madrasah, gudang, dan mushalla.

Ke depan MIN Serawi harus melakukan pengembangan sarana dan prasarana. Misalnya: media pendidikan (buku, alat-alat praktik, media audio, mediao visual, dan media audio visual. Sedang prasarana meliputi: bangunan madrasah, berupa gedung, perpustakaan, laboratorium, dan perabot madrasah serta berbagai hal yang erat hubungannya dengan mutu madrasah.

#### Pendidik dan tenaga kendidikan

Guru merupakan ujung tombak kegiatan madrasah karena berhadapan langsung dengan siswa. Guru yang profesional mampu mewujudkan harapan-harapan orang tua dan kepala madrasah dalam kegiatan sehari-hari di dalam kelas.

Namun untuk menjadi guru profesional, bagi MIN Serawi masih ditemukan kendala yang salah satunya berkaitan dengan kompetensi guru. Masih adanya beberapa guru yang *miss match*

<sup>15</sup> Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah* ( Bandung: Bani Quraisy, 2004), 110-111.

karena pengangkatan awal dan sertifikasi yang diampu tidak merujuk ke ijazah. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu indikator keberhasilan guru mengajar adalah harus adanya kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu.

#### **Ketersediaan anggaran**

Anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan madrasah hanya bersumber dari dana yang diberikan pemerintah melalui dana DIPA Satker. Di tambah lagi jumlah siswa yang hanya sekitar seratusan berimbas pada sedikitnya dana BOD yang diterima. Di sisi lain MIN Serawi belum mempunyai donatur dari kalangan masyarakat sekitar Kab. Tapin. Kondisi ini berdampak pada kurangnya dana untuk operasional penyelenggaraan pendidikan baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler.

#### **Prestasi siswa**

Biasanya siswa-siswa madrasah unggulan adalah siswa-siswa yang memiliki berbagai talenta di antaranya: (1) memiliki prestasi akademik yang unggul, dan 2) memiliki bakat dan minat. Prestasi siswa MIN Serawi di tingkat propinsi hanya sedikit namun untuk tingkat kabupaten cukup banyak. Hal ini dikarenakan kurangnya ajang perlombaan yang diadakan oleh propinsi dan di sisi lain kurangnya jaringan kerjasama sehingga informasi tentang lomba-lomba yang di adakan jarang di ketahui oleh pihak MIN Serawi.

#### **Keterlibatan masyarakat**

Di dalam penyelenggaraan madrasah unggulan, pihak madrasah harus melibatkan masyarakat khususnya orang tua dalam kegiatannya. Kontribusi yang paling minimal sekali adalah memberikan pengawasan secara sukarela kepada siswa pada saat istirahat. Pada proses yang intensif, orang tua dilibatkan dalam proses penyusunan kurikulum madrasah sehingga orang tua memiliki tanggung jawab yang sama di rumah dalam mendidik anak sesuai pada tujuan yang telah dirumuskan dan terjalin sinkronisasi antara pola pendidikan di madrasah dengan pola pendidikan di rumah.

Begitu pula dengan komite madrasah yang ada di MIN Serawi sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan. Hal ini terbukti dengan adanya program yang membantu perawatan halaman melalui program batako seribu yang di gagas oleh komite madrasah dan

adanya pembangunan perpustakaan yang di usulkan oleh komite madrasah.

#### **Peranan pemerintah**

Peranan Kementerian Agama Kab. Tapin terhadap peningkatan penyelenggaraan MIN Serawi sangat signifikan, terutama dalam pembangunan ruang belajar, renovasi dan pemeliharaan melalui dana belanja yang di tuangkan dalam Dana DIPA Satker. Sedangkan pemerintah Daerah Kabupaten Tapin (Pemda) juga sudah melakukan pemberdayaan di MIN Serawi dalam bentuk bantuan berupa bangunan ruang belajar. Sedangkan dinas lingkungan hidup membantu dalam upaya kegiatan penghijauan.

Namun peranan Kementerian Agama tingkat pusat selama ini dirasakan masih kurang berperan dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di MIN Serawi, karena belum ada bantuan yang diberikan terutama dalam bentuk penyediaan sarana prasarana madrasah.

### **E. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian di MIN Serawi didapat kesimpulan sebagai berikut: Pertama, keunggulan dan kekhasan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Serawi adalah kegiatan ekstrakurikuler KSM (Kompetisi Sains Madrasah), Seni Rudat, dan kegiatan Tahlilan.

Kedua, faktor kendala penyelenggaraan MIN Serawi di antaranya: (1) Ketersediaan sarana prasarana masih perlu penambahan dan perbaikan yang lebih intens, (2) Kompetensi dan kualifikasi pendidik ada yang *miss match* karena pengangkatan awal dan sertifikasi yang di ampu tidak merujuk ke ijazah, (3) Anggaran hanya dari DIPA dan muridnya berkisar hanya ratusan orang.

Ketiga, faktor pendukung terselenggaranya MIN Serawi di antaranya: 1) Komite sangat mendukung penyelenggaraan madrasah (membantu pembangunan perpustakaan dan pembuatan batako), 2) Kemenag tingkat propinsi/ Kab/kota dan Pemda, telah berperan terhadap penyelenggaraan madrasah melalui program renovasi bangunan madrasah.

Keempat, program yang harus dilakukan ke depan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui program pendampingan dan perbaikan di berbagai bidang meliputi: pengembangan sarana prasarana (ruang kelas,

mushola, dll), peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik (mengurangi jumlah guru yang *miss match*), bantuan pendanaan serta perluasan jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat disarankan bahwa: Pertama, Kementerian Agama Pusat/Kota/Kab. perlu melakukan pembinaan, penjaminan mutu, dan pengawasan terhadap pengelolaan komponen-komponen strategis MIN Serawi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Kedua, kepala madrasah harus berusaha memberikan motivasi terhadap guru, siswa dan pegawai demi terwujudnya lembaga pendidikan yang berkualitas dan unggul.

Ketiga, Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam peningkatan mutu pendidikan, perlu melakukan upaya penyediaan anggaran yang lebih banyak bagi terselenggaranya madrasah Ibtidaiyah

Unggul dan di sisi lain keterlibatan masyarakat perlu juga ditingkatkan dalam upaya penggalan sumber-sumber dana.

#### **F. UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk meneliti, dan kepala MIN Serawi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan termasuk juga seluruh Guru dan Staf Tata Usaha yang turut membantu memberikan data dan informasi, juga kepada Redaktur Jurnal Dialog atas termuatnya tulisan ini, semoga tulisan ini memberikan wawasan dalam pendidikan agama di Indonesia.[]

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Arikunto dan S. Jabar. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Depdikbud. *Pengembangan Sekolah Unggul*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2006.
- Djaali dan Pudji Muljono. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, 2004.
- Hanun, Farida. *Laporan Madrasah Unggulan di MIN Martapura Kalimantan Selatan*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2014.
- Fattah, Nanang. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung: Bani Quraisy, 2004.
- Kumano, Y. *Authentic Assessment and Portfolio Assessment-Its Theory and Practice*. Japan: Shizuoka University, 2001.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan Keenambelas, 2000.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal 1.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo, 2011.
- Sujana, Djudju. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Undang-Undang Dasar 1945 .
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## THE DIALOGUES BETWEEN FIKH AND CULTURE IN THE PRAYER CALLS (ADZAN)

AHMAD MUNIF\*)

---

### ABSTRACT

*This paper attempts to examine the background of prayer calls (adzan) that was influenced by the customs and habits of the local people. Adzan which should be sounded immediately after the prayer time comes was deliberately sounded an hour later by the Muslims in Tlogogedong village, the southern part of Demak district. Though it seems that Muslims in Tlogogedong village do not follow the religious order to perform prayers in early time, this late prayer calls had a deeper purpose. The study finds out that the delayed adzan was intended to accommodate local people to perform another religious order, which is congregated prayers. The delay in prayer calls give more time for local people who work as farmers, for other professions to wait until their break times, and for children to finish their quranic reading activities. with religious texts related to the early morning prayer and congregational prayers. This finding indicates that there was a dialogue between religious order and local practice and situation that can be used an example or model in understanding Islamic texts by adjusting the local culture of a region.*

**KEY WORDS:** *Adzan, Prayer Time, Dialog, Local Culture*

## DIALOG FIKIH DAN BUDAYA DALAM KUMANDANG AZAN

### ABSTRAK

Tulisan ini mencoba menguraikan latar belakang dibalik kumandang azan yang dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Azan yang semestinya dikumandangkan di awal waktu sebagaimana perintah salat, oleh umat Islam di Dusun Tologogedong, ujung selatan Kabupaten Demak, sengaja diperlambat setengah hingga satu jam. Secara lahiriah, hal tersebut tampak seolah-olah umat Islam di Dusun Tologogedong tidak mengikuti seruan perintah untuk salat di awal waktu. Hasil dari kajian dalam tulisan ini, kumandang azan yang sengaja diperlambat tampak bertentangan dengan perintah salat di awal waktu, namun ternyata itu dilakukan agar masyarakat bisa melakukan perintah lainnya, yaitu salat berjamaah. Di sana ada proses dialog yang adaptif antara kebutuhan aktifitas masyarakat sehari-hari, seperti bertani di ladang, waktu rehat, dan aktivitas mengaji anak-anak, dengan teks keagamaan terkait tuntunan salat di awal waktu dan perintah salat berjamaah. Dialog tersebut bisa menjadi contoh atau model dalam memahami teks Islam dengan menyesuaikan budaya lokal suatu daerah.

**KATA KUNCI:** Azan, Waktu Salat, Dialog, Budaya Lokal

---

\*) Universitas Islam Negeri Walisongo, Jl. Walisongo no. 3-5 Kota Semarang, email: ahmadmunif@walisongo.ac.id

\*\* Naskah masuk diterima Mei 2017, direvisi Juni 2017 dan disetujui untuk diterbitkan Juni 2017

## A. PENDAHULUAN

Kumandang azan bagi umat Islam merupakan penanda bahwa waktu salat telah tiba. Kewajiban salat fardu adalah lima kali dalam sehari semalam, sehingga azan juga dikumandangkan lima kali. Hal tersebut berlaku di manapun Islam berada.

Mayoritas umat Islam di belahan dunia mengumandangkan azan di permulaan waktu salat. Permulaan waktu salat tersebut bisa diketahui dengan mengikuti pedoman awal waktu salat yang sudah diperinci dalam hadis Nabi Muhammad,<sup>1</sup> atau di era modern saat ini awal waktu salat bisa diketahui dengan melihat pada jadwal waktu salat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan kompeten, seperti jadwal waktu salat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, maupun ormas lainnya NU, Muhammadiyah, dan lainnya.

Ada fenomena unik mengenai kumandang azan yang dipraktikkan umat Islam di Dusun Tlogogedong yang merupakan bagian dari Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, di ujung selatan Kabupaten Demak. Di sini azan dikumandangkan lima kali dalam sehari semalam sebagaimana umumnya. Namun untuk tiga waktu salat (zuhur, ashar, dan isyak), azan sengaja dikumandangkan selang setengah jam sampai satu jam kemudian dari awal masuk waktu salat. Sedangkan untuk kumandang azan maghrib dan subuh dilaksanakan tepat di awal waktu.

Umat Islam di Dusun Tlogogedong sendiri, bisa dikatakan cukup religius. Tampak dari maraknya kegiatan keagamaan yang ada. Baik yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Nafas religiusitas sangat terasa di dusun yang seluruh penduduknya memeluk Islam ini.

Berangkat dari urain di atas, tulisan ini ingin menguak apa latar belakang diperlambatnya azan pada waktu zuhur, ashar, dan isyak di Dusun Tlogogedong tersebut. Hal ini mengingat

memperlambat kumandang azan secara lahiriah berlawanan dengan teks hadis nabi yang menganjurkan agar melaksanakan salat di awal waktu.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih wawasan pemahaman bagaimana memahami sumber utama agama islam, al-Qur'an dan hadis, dengan memperhatikan realitas sosial dan budaya setempat.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Waktu salat dan azan

Salat merupakan ibadah yang meliputi perbuatan dan ucapan khusus, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan membaca salam.<sup>2</sup> Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa salat menempati elemen terpenting dalam Islam. Disamping sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadat, salat diibaratkan Nabi Muhammad saw sebagai tiang agama. Orang Islam yang senantiasa menjalankan salat lima waktu berarti ikut menguatkan eksistensi Islam, dan sebaliknya orang Islam yang dengan sengaja meninggalkan shalat diibaratkan sebagai orang yang meruntuhkan agama Islam.<sup>3</sup>

Kewajiban salat bagi umat Islam adalah lima kali dalam sehari, yaitu waktu zuhur, ashar, maghrib, dan isyak. Dalam kondisi normal, kelima salat tersebut harus dilaksanakan pada waktu-waktu khusus yang telah dijelaskan dalam hadis nabi. Waktu zuhur dimulai sesaat matahari tergelincir dari posisi kulminasi atas. Waktu ashar ketika matahari menguning atau bayangan suatu benda lebih panjang daripada benda itu sendiri, ditambah panjang bayangan saat matahari pada titik kulminasi atas (zuhur). Waktu maghrib dimulai setelah matahari terbenam. Waktu isyak ketika bayangan mega merah sudah hilang atau malam benar-benar gelap. Dan waktu subuh ketika fajar pagi sudah menyingsing. Kelima waktu tersebut sebagai pertanda awal dan akhir melaksanakan salat kecuali waktu subuh yang dibatasi hingga matahari terbit.<sup>4</sup>

Ketika waktu salat tiba, azan

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah*, dengan mengutip hadits yang termaktub dalam Shahih Bukhari dan Muslim menguraikan lima waktu salat. Waktu zuhur sejak tergelincirnya matahari, waktu ashar ketika bayangan matahari sama dengan bendanya atau sinar matahari mulai menguning, waktu maghrib dimulai ketika akan matahari terbenam, waktu isyak saat mega merah hilang, dan waktu subuh ketika fajar terbit. Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kairo: Darul Hadis, 2004), 69-70.

---

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kairo: Darul Hadis, 2004), 65.

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kairo: Darul Hadis, 2004), 65.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* Juz 1 (Damsyiq: Daarul Fikr, 1985), 506-12, Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kairo: Darul Hadis, 2004), 69-75. Beberapa ayat Alquran yang menyinggung waktu salat, seperti QS. An-Nisa': 103, Hud: 114, al-Isra: 78, dan Taha: 130.

dikumandangkan untuk memanggil dan (atau) mengajak umat Islam menjalankan salat. Azan merupakan panggilan yang dikumandangkan dengan lafaz-lafaz khusus sebagaimana yang telah dilakukan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad dulu. Bilal, sahabat yang pertama kali diminta nabi untuk mengumandangkan azan, senantiasa melaksanakannya di awal waktu.<sup>5</sup> Dalam mengumandangkan azan, dianjurkan untuk dilaksanakan di tempat yang tinggi, yang diharapkan suaranya bisa didengar hingga skala yang luas.<sup>6</sup> Dalam perjalanan Islam selanjutnya, muazin (orang yang berazan) melakukan azan di menara.

Ketika Islam masuk di Indonesia, penyebar Islam melakukan inovasi dalam pelaksanaan azan. Di sebagian besar masjid di Jawa, umat Islam menabuh bedug dan (atau) memukul kentongan sebelum mengumandangkan azan.<sup>7</sup> Mungkin suara bedug dan kentongan dianggap lebih menggema dan suaranya bisa diengar dalam radius yang cukup jauh.<sup>8</sup> Seiring perkembangan zaman, dengan ditemukannya alat pengeras suara (*loud speaker*), umat Islam mengumandangkan azan dengan memanfaatkan pengeras suara yang menghasilkan suara sama dengan suara yang dikumandangkan muazin. Meskipun demikian, bedug dan kentongan tidak lantas ditinggalkan. Di banyak tempat, bedug dan kentongan masih dipakai sebelum azan dikumandangkan dengan pengeras suara.

## 2. Masyarakat Tradisional Islam Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang tidak terlalu luas dengan ciri khas khusus. Sebagaimana disinggung Paul H. Lindis yang menyebut desa sebagai daerah yang berpenduduk kurang dari 2500 jiwa. Disamping itu ditandai dengan pergaulan masyarakat yang saling kenal, memiliki perasaan yang kental dengan adat kebiasaan, dan bermata pencaharian dalam bidang agraris.<sup>9</sup>

### Masyarakat agraris pedesaan di Indonesia

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* Juz 1 (Damsyiq: Daarul Fikr, 1985), 539-40.

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* Juz 1 (Damsyiq: Daarul Fikr, 1985), 545-46.

<sup>7</sup> Handinoto dan Samuel Hartono. "Pengaruh Pertukangan Cina pada Bangunan Mesjid Kuno di Jawa Abad 15-16". *Dimensi Teknik Arsitektu*, 35, no. 1 (2007): 23-40.

<sup>8</sup> Darori Amin (ed.), *Islam & Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 190.

<sup>9</sup> Mahmuddin. "Strategi Dakwah Terhadap Masyarakat Agraris". *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 1 (2013): 101-13.

yang beragama Islam memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan masyarakat kota. Mereka diistilahkan juga dengan masyarakat tradisional Islam. Di antara ciri yang dilekatkan pada masyarakat Islam tradisional adalah; tidak dapat membedakan antara ajaran dan non-ajaran, kurang menghargai waktu, tidak memperlakukan tradisi yang terdapat dalam agama, dan terkesan jabariah-teosentris.<sup>10</sup>

Dalam perspektif lain, M. Ridwan Lubis, sebagaimana dikutip Baharudin, menyebutkan beberapa ciri (masyarakat) Islam tradisional, antara lain; keterkaitan yang mendalam pada mazhab dalam bidang fikih dan tasawuf, berkembang pada pola kehidupan pesantren, dan pola pemikiran yang statis (*taqlid*).<sup>11</sup>

Ciri masyarakat tradisional Islam di desa yang demikian, menjadikan interaksi antara anggota masyarakat berjalan lebih cair. Di samping itu pada ciri masyarakat ini ditandai dengan kepatuhan atau mengikuti apa yang disampaikan kyai. Hal demikian karena kyai dipandang memiliki nilai dan pengetahuan lebih dalam bidang agama dibandingkan dengan masyarakat awam. Disamping pula ketaatan kepada kyai diyakini sebagai manifestasi ibadah ketaatan kepada Tuhan, sebab kyai dirasa lebih dekat kepada Sang Khalik.<sup>12</sup> Ditambahkan oleh Martin Van Bruinessen, sebagaimana dikutip Izzah, kyai tidak hanya mengambil peran pada pendidikan dan pengajaran laiknya guru, kyai juga dipercaya sebagai pembimbing spiritual dan tempat mengadu secara pribadi karena diyakini memiliki penglihatan batin dan kesaktian ilmu tertentu.<sup>13</sup>

## C. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang termasuk jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibalik fenomena kumandang azan salat fardu di Dusun

<sup>10</sup> Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 142-44.

<sup>11</sup> Baharuddin. "Tipologi Pemikiran Keislaman di Indonesia Abad XXI". *MIQOT* 33, no. 1 (2009): 111-23.

<sup>12</sup> Iva Yulianti Umdatul Izzah. "Perubahan Pola Hubungan Kyai dan Santri Pada Masyarakat Muslim Tradisional Pedesaan". *Jurnal Sosiologi Islam* 1, no. 2 (2011): 31-48.

<sup>13</sup> Iva Yulianti Umdatul Izzah. "Perubahan Pola Hubungan Kyai dan Santri Pada Masyarakat Muslim Tradisional Pedesaan". *Jurnal Sosiologi Islam* 1, no. 2 (2011): 31-48.

Tlogogedong yang tergolong beda dibandingkan daerah lain, bahkan dengan dusun dan desa di sekitarnya.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, sumber primer dan sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. Sumber data sekunder (*secondary sources*) berupa data astronomis Dusun Tlogogedong dari *Google Earth* dan sumber lain yang menerangkan tentang Dusun Tlogogedong dan fenomena azan.

Pengumpulan sumber data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat tokoh terkemuka masyarakat di Dusun Tlogogedong dan asal-usul fenomena azan tersebut melalui interview mendalam (*in depth interview*). Sedangkan observasi digunakan untuk mengetahui lebih lanjut gambaran dan perilaku masyarakat di Dusun Tlogogedong.

Sedangkan dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah metode *kualitatif deskriptif*. Data yang telah terkumpul dideskripsikan sedemikian rupa agar bisa dipahami dan dicerna serta diperoleh gambaran yang utuh tentang fenomena azan salat fardu di Dusun Tlogogedong.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Potret Sosial Budaya Masyarakat Dusun Tlogogedong

Dusun Tlogogedong merupakan bagian dari Desa Tlogorejo. Terletak di bagian selatan Kabupaten Demak. Tepatnya di Kecamatan Karangawen. Secara geografis, Dusun Tlogogedong berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Wonosekar untuk sisi barat, berbatasan dengan Dusun Cogeh di sebelah utara, dan di selatan berbatasan dengan Desa Jragung. Dengan memanfaatkan *software google earth*, diketahui bahwa secara astronomis dusun Tlogogedong berada pada lintang  $7^{\circ}4'7.99''$  LS dan bujur  $110^{\circ}33'43.29''$  BT. Serta berada pada ketinggian 14 meter dari permukaan laut.

Akses menuju Dusun Tlogogedong tergolong cukup mudah, bisa dilihat dari infrastruktur jalan yang bisa dilalui kendaraan ukuran kecil hingga besar. Dari arah Kota Semarang menuju ke timur jurusan Kabupaten Grobogan sekitar 15 km. Berhenti sampai

perempatan pasar Karangawen lalu belok ke selatan sejauh 5 km.

Topografi Dusun Tlogogedong termasuk dataran. Dengan luas sekitar 150 hektare, sebagian besar masih berupa ladang persawahan. Oleh karena itu mayoritas masyarakat di sini bekerja sebagai petani. Petani berangkat ke ladang sejak pagi hari sebelum matahari terbit. Pada waktu tertentu, petani bergegas ke sawah usai menunaikan salat subuh berjamaah. Mereka pulang dari sawah pada tengah hari, antara pukul 11.00-12.00 waktu istiwa'.<sup>14</sup> Usai menunaikan salat zuhur berjamaah, mereka kembali berangkat ke ladang pada kisaran pukul 13.00-13.30 waktu istiwa'. Dan akan pulang pada saat masuk waktu asar.

Saat ini sebagian besar pemuda di dusun ini memilih bekerja di sektor non formal, seperti menjadi buruh pabrik, tukang, dan lainnya. Ada pula yang menjadi TKI di luar negeri seperti Hongkong, Korea Selatan, dan Malaysia.

Penduduk di dusun ini seratus persen beragama Islam. Nafas religius cukup terasa di dusun ini. Kumandang azan senantiasa bergema lima kali setiap hari. Meskipun dengan kuantitas jamaah salat yang fluktuatif. Saat matahari baru saja terbit, tampak lalu lalang anak-anak hingga remaja yang mengenakan busana khas muslim, perempuan berkerudung dan laki-laki berpeci, menuju Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang ada di dusun ini.

Tengah hari setelah waktu zuhur, pada hari-hari tertentu seperti Kamis, Jum'at, dan Sabtu diadakan pengajian. Pengajian dilakukan di musola-musola dengan bergiliran, juga ada yang menetap hanya diadakan di masjid. Diadakan pula pendidikan keagamaan di madrasah diniyah untuk anak-anak dan remaja. Ada pula yang menambah pendidikan agama di TPQ pada senja hari.

Pada malam hari setelah salat magrib, banyak diselenggarakan pengajian Al-Qur'an untuk anak-anak dan remaja, diselenggarakan mushola, masjid, dan rumah. Khusus untuk Senin malam dan Kamis malam, diadakan pembacaan dzibai'iyah (riwayat Nabi Muhammad saw) di mushola dan masjid. Diadakan pula pengajian

---

<sup>14</sup> Waktu istiwa' adalah waktu yang didasarkan pada pergerakan semu matahari setiap hari.

rutin untuk ibu-ibu tiap tanggal 1 dan 15 bulan kamariah.

Nuansa religius juga tampak dari kegiatan rutin mingguan yang dilakukan oleh Bapak-bapak, yaitu jamaah tahlil yang diadakan tiap malam jum'at. Orang di sini menyebutnya dengan istilah 'kumpulan'. Ada dua jamaah 'kumpulan' disini. Satu lagi yang menyelenggarakannya pada Selasa malam Rabu. Kalau yang jamaah malam Jum'at membaca bacaan 'pidak' dan tahlil, untuk jamaah yang malam rabu membaca Al-Qur'an dan tahlil.

Penyelenggaraan peringatan hari besar Islam juga masih tampak semarak. Seperti peringatan tahun baru Hijriah, 10 Muharam, maulid nabi Muhammad pada tanggal 10 Rabiul Awal, isra'mi'raj 27 Rajab, arwah jama' pada nishfu sya'ban (tanggal 15), dan lainnya. Kesemuanya tadi berpusat di masjid.

Pada bulan Ramadan bisa ditemui hiruk pikuk pelaksanaan salat tarawih dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an di masjid dan seluruh mushola. Dan pada malam idul fitri diadakan pawai takbir keliling dengan beragam pernak-perniknya.

Gambaran masyarakat Tlogogedong di atas menunjukkan bagaimana masyarakat Tlogogedong mempraktikkan ajaran dan menjaga syiar agama. Hal tersebut masih dilestarikan hingga saat ini.

## 2. Jadwal Waktu Salat Dusun Tlogogedong

Ada beberapa data yang dibutuhkan dalam melakukan hisab waktu salat. Untuk kepentingan ini, penulis mengambil contoh hisab waktu salat untuk Dusun Tlogogedong pada tanggal 19 Juli 2016. Data yang dibutuhkan antara lain;

- Lintang Tempat (f) =  $7^{\circ}4'7.99''$  LS
- Bujur Tempat (ë) =  $110^{\circ}33'43.29''$  BT.
- Tinggi tempat (TT) = 14 meter DPL
- Deklinasi matahari (d) =  $20^{\circ}46'04''$
- Perata waktu (e) =  $-00^j 06^m 19^d$
- Koreksi waktu daerah (KWD) =  $-0j 22m 12.89d^{15}$

Dengan data tersebut, diketahui jadwal waktu salat untuk Dusun Tlogogedong adalah sebagai berikut; pertama, Zuhur. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang waktu salat, dikatakan bahwa waktu zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir dari titik puncak, atau

<sup>15</sup>  $(105^{\circ} - 110^{\circ}33'43.29'')/15$

dalam istilah astronomi disebut meridian pass. Tergelincir bisa dimaknai ketika seluruh piringan matahari telah melewati titik meridian tersebut. Nilai diameter piringan matahari yang tampak dari bumi adalah sebesar  $0^{\circ}16'$  busur. Dengan memanfaatkan data di atas, diketahui bahwa waktu zuhur di dusun Tlogogedong adalah pukul 12 waktu hakiki (istiwa') atau pukul 11:27:25.11 WIB (waktu Indonesia bagian barat).<sup>16</sup>

Kedua, Ashar. Waktu ashar dimulai ketika bayangan benda yang terkena sinar matahari sama dengan benda itu sendiri. Untuk mengkonverisnya dalam jam, langkahnya diawali dengan menentukan zenith matahari terlebih dahulu.<sup>17</sup> Dari situ bisa dicari posisi tinggi matahari ( $h_0$ ) yang menunjukkan awal masuk waktu ashar.<sup>18</sup> Kemudian ditentukan sudut waktu matahari ( $to$ ) yang bisa dikonversi dalam satuan waktu.<sup>19</sup> Dengan menambahkan pukul dua belas, hasilnya adalah waktu ashar hakiki, yakni pukul 15:21:40.86.<sup>20</sup>

Kemudian dijumlahkan dengan koreksi waktu daerah, ditemukan waktu ashar menurut WIB, yaitu jam 15:05:46.97 WIB.<sup>21</sup>

Ketiga, Maghrib. Waktu maghrib dimulai saat matahari terbenam. Untuk bisa menentukan jamnya secara tepat dan akurat, dicari dulu berapa tinggi matahari ( $h_0$ ) saat matahari terbenam. Dimana untuk mengetahui tinggi matahari saat terbenam dengan memperhatikan kerendahan ufuk ( $ku$ ), refraksi, dan semi diameter matahari. Hasilnya  $h_0$  terbenam sebesar  $-0^{\circ}56'35.12''$ .<sup>22</sup>

<sup>16</sup> waktu zuhur (WIB) = pk 12 - (e) + KWD  
= pk 12 - (-0j06m19d) + (- 0j22m12.89d)  
= pk 11j 27m 25,11d WIB

<sup>17</sup> Zenith matahari (zm) = dm - LT  
=  $20^{\circ}46'04'' - (-7^{\circ}4'7.99'')$   
=  $27^{\circ}50'11.99''$  (nilai absolut)

<sup>18</sup> Cotan  $h_0$  = tan zm + 1  
= tan  $27^{\circ}50'11.99'' + 1$   
 $h_0 = 33^{\circ}12'06.3''$

<sup>19</sup> Cos to = sin  $h_0$  : cos LT : cos m - tan LT x tan dm  
Cos to = sin  $33^{\circ}12'06.3''$  : cos  $-7^{\circ}4'7.99''$  : cos  $20^{\circ}46'04''$   
- tan  $-7^{\circ}4'7.99''$  x tan  $20^{\circ}46'04''$   
to =  $50^{\circ}25'12.91''$  (: 15)  
=  $3^{\circ}21'40.86''$  (3j 21m40.86d)

<sup>20</sup> Waktu ashar hakiki = pk 12 + to  
= pk 12 + 3j 21m 40.86d  
= 15j21m40.86d

<sup>21</sup> Waktu ashar WIB = pk 15j 21m 40.86d WH - e + KWD  
= pk 15j 21m 40.86d WH - (-0j06m19d) + (- 0j22m12.89d)  
= pk 15j 05m 46.97d WIB

<sup>22</sup> Kerendahan ufuk (ku) =  $0^{\circ}1'.76\ddot{O}TT$   
=  $0^{\circ}1'.76\ddot{O}14$   
=  $0^{\circ}6'35.12''$

Langkah selanjutnya adalah menentukan sudut waktu matahari yang dikonversi ke dalam satuan waktu.<sup>23</sup>

Hasil waktu yang diperoleh dari sudut waktu di atas, dijumlahkan dengan pukul dua belas, hasilnya adalah waktu maghrib hakiki, yaitu pukul 17:53:17.21.<sup>24</sup> dengan menambahkan perata waktu dan KWD, diketahui jam waktu maghrib menurut waktu daerah, yaitu jam 17:37:23.32 WIB.<sup>25</sup>

Keempat, Isyak. Waktu isyak ditandai dengan hilangnya berkas sinar matahari (yang tampak berupa mega merah). Saat tersebut oleh ahli falak diperkirakan posisi (tinggi) matahari berada pada 17 atau 18 derajat di bawah ufuk.<sup>26</sup> Dari tinggi Matahari tersebut, kemudian dihitung sudut waktu matahari, yang bisa dikonversi menjadi satuan waktu.<sup>27</sup>

Kemudian dijumlahkan dengan pukul dua belas, dihasilkan waktu hakiki untuk isya', yaitu jam 19:06:13.81.<sup>28</sup> Dengan menjumlahkan waktu hakiki tersebut dengan perata waktu dan KWD, diketahui waktu isyak adalah pukul 18:37:41.92 WIB.<sup>29</sup>

Kelima, Subuh. Waktu subuh dimulai dengan kemunculan fajar *sadiq*, yaitu cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Pada keadaan ini, posisi (tinggi) matahari diperkirakan adalah 18 atau 19 derajat di bawah

ufuk. Untuk menentukan jam waktu subuh, diawali dengan menentukan tinggi matahari saat terbit yang nilainya sama dengan tinggi matahari untuk terbenam, yaitu (-0° 56' 35,12"). Kemudian dijumlahkan dengan -19 derajat tadi.<sup>30</sup> Langkah selanjutnya adalah menentukan sudut waktu matahari yang dikonversi menjadi satuan waktu (hasilnya dinegatifkan).<sup>31</sup>

Hasilnya dijumlahkan dengan pukul 12, diperoleh waktu hakiki untuk subuh, yaitu jam 4:45:12.81.<sup>32</sup> Kemudian dikalkulasi dengan perata waktu dan KWD menghasilkan waktu subuh adalah jam 4:16:40.92 WIB.<sup>33</sup>

Hasil perhitungan di atas, bila digunakan untuk keperluan ibadah masyarakat umum, misalnya dibuat jadwal salat, dilakukan ihtiyat dengan ketentuan, pertama, bilangan detik dibulatkan menjadi satu menit. Kedua, semua hasil perhitungan ditambah dua menit, untuk zuhur ditambah tiga menit.<sup>34</sup> Dengan demikian, jadwal waktu salat untuk dusun Tlogogedong pada tanggal 19 Juli 2016 bisa dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Jadwal waktu salat Dusun Tlogogedong tanggal 19 Juli 2016

Salat	Jam (WIB)	Kumandang azan
Zuhur	11:31	12:01
Ashar	15:08	15:48
Maghrib	17:40	17:40
Isyak	18:40	18:55
Subuh	04:19	04:19

### 3. Konteks Sosial Budaya dalam Kumandang Azan Salat Fardu di Dusun Tlogogedong

$$\begin{aligned}
 h_o \text{ terbenam} &= - ( \text{ref} + \text{sd} + \text{ku} ) \\
 &= - ( 0^\circ 34' + 0^\circ 16' + 0^\circ 6' 35,12'' ) \\
 &= - 0^\circ 56' 35,12'' \\
 {}^{23} \text{Cos } t_o &= \sin h_o : \cos LT : \cos dm - \tan LT \times \tan dm \\
 \text{Cos } t_o &= \sin -0^\circ 56' 35,12'' : \cos -7^\circ 4' 7,99'' : \cos 20^\circ 46' 04'' \\
 &- \tan -7^\circ 4' 7,99'' \times \tan 20^\circ 46' 04'' \\
 t_o &= 88^\circ 19' 18,15'' (: 15) \\
 &= 5j53m17.21d \\
 {}^{24} \text{WH} &= \text{pk } 12 + t_o \\
 &= \text{pk } 12 + 5j 53m17.21d \\
 {}^{25} \text{WIB} &= \text{pk } 17j 53m17.21d \text{ WH} - e + \text{KWD} \\
 &= \text{pk } 17j 53m17.21d \text{ WH} - (0j06m19d) + (- 0j22m12.89d) \\
 &= \text{pk } 17j 37m 23.32d \text{ WIB} \\
 {}^{26} h_o &= - 17^\circ + h_o \text{ terbenam} \\
 H_o &= - 17^\circ + (- 0^\circ 56' 35,12'') \\
 &= - 17^\circ 56' 35,12'' \\
 {}^{27} \text{Cos } t_o &= \sin h_o : \cos LT : \cos dm - \tan LT \times \tan dm \\
 \text{Cos } t_o &= \sin - 17^\circ 56' 35,12'' : \cos -7^\circ 4' 7,99'' : \cos 20^\circ 46' 04'' \\
 &- \tan -7^\circ 4' 7,99'' \times \tan 20^\circ 46' 04'' \\
 t_o &= 106^\circ 33' 27,1'' (: 15) \\
 &= 7j06m13.81d \\
 {}^{28} \text{WH} &= \text{pk } 12 + t_o \\
 &= \text{pk } 12 + 7j 06m 13.81d \\
 {}^{29} \text{WIB} &= \text{pk } 19j 06m 13.81d \text{ WH} - e + \text{KWD} \\
 &= \text{pk } 19j 06m 13.81d \text{ WH} - 0j06m19d + (- 0j22m12.89d) \\
 &= \text{pk } 18j 37m 41.92d \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 {}^{30} h_o &= - 19^\circ + h_o \text{ (terbit / terbenam)} \\
 h_o &= - 19^\circ + (- 0^\circ 56' 35,12'') \\
 &= - 19^\circ 56' 35,12''
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 {}^{31} \text{Cos } t_o &= \sin h_o : \cos LT : \cos dm - \tan LT \times \tan dm \\
 \text{Cos } t_o &= \sin - 19^\circ 56' 35,12'' : \cos -7^\circ 4' 7,99'' : \cos 20^\circ 46' 04'' \\
 &- \tan -7^\circ 4' 7,99'' \times \tan 20^\circ 46' 04'' \\
 t_o &= 108^\circ 41' 47,8'' (: 15)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 7j14m 47.19d \\
 &= (-)7j14m 47.19d
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 {}^{32} \text{WH} &= \text{pk } 12 + t_o \\
 &= \text{pk } 12 + (-)7j14m 47.19d \\
 &= \text{pk } 4j 45m 12.81d
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 {}^{33} \text{WIB} &= \text{pk } 4j 45m 12.81d \text{ WH} - e + \text{KWD} \\
 &= \text{pk } 4j 45m 12.81d \text{ WH} - 0j06m19d + (- 0j22m12.89d) \\
 &= \text{pk } 4j 16m 40.92d \text{ WIB}
 \end{aligned}$$

<sup>34</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1* (Semarang: Program Pascasarjana UIN Walisongo, 2011), 143. Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 125. Rumus perhitungan waktu sholat di atas penulis ambil dari dua buku ini.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat petani Tlogogedong berangkat ke ladang pagi hari jam enam. Kemudian mereka pulang ketika sinar matahari terasa menyengat badan dan (atau) mendengar suara bedug dari masjid atau dentingan suara jam dua belas dari pengeras suara masjid. Waktu setengah jam cukup bagi petani untuk perjalanan pulang dan bersih-bersih badan secukupnya. Kemudian ada kumandang azan zuhur. Petani kembali menuju ladang pada jam setengah dua. Patokan untuk pulang sore hari adalah bedug waktu ashar, yang bertepatan pukul setengah empat waktu istiwa. Hampir sama dengan waktu zuhur, waktu setengah jam dirasa cukup untuk pulang ke rumah dan bersih-bersih badan. Setelah mereka bisa bergegas ke masjid atau mushola untuk salat ashar berjamaah.

Usai berjamaah salat ashar dimanfaatkan untuk rehat dan kumpul keluarga, atau kegiatan ringan lainnya sampai datang waktu maghrib. Azan maghrib dikumandangkan segera saat matahari terbenam. Bakda magrib adalah waktu membaca Al-Qur'an. Anak-anak umumnya mengaji di kyai yang dipercaya untuk mengajari Alquran. Jam belajar Al-Qur'an ini sampai hadir kumandang azan isyak. Dan terakhir, azan untuk waktu subuh dikumandangkan tepat di awal waktu terbit fajar.

Azan untuk salat zuhur dikumandangkan pukul 12.30 waktu istiwa'. Dengan mengacu pada jadwal waktu salat di atas, diketahui ada selisih 30 menit dari awal masuk waktu zuhur. Kemudian azan waktu ashar berkumandang pada jam 16.00 waktu istiwa', atau selang 38 menit dari awal masuk waktu ashar. Berbeda dengan zuhur dan ashar, azan kumandang maghrib berkumandang tepat sesaat matahari terbenam atau awal waktu magrib. Sedangkan azan isyak berkumandang pada pukul 19.30 waktu istiwa'. Selang 24 menit dari awal masuk waktu isyak. Sementara subuh dikumandangkan tepat saat awal masuk waktu subuh. Menariknya, masjid sebagai pusat ibadah utama, memberi tanda bahwa waktu salat sudah masuk, misalkan untuk zuhur dan ashar, pada jam 12 istiwa' untuk zuhur dan jam setengah empat untuk waktu ashar, ditandai dengan pemukulan bedug.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Konon tradisi bedug dikaitkan dengan budaya Cina. Dari legenda Cheng Ho dari Cina, ketika Cheng Ho pergi ke Semarang disambut baik oleh penguasa Jawa, Cheng Ho

Apa yang dilakukan masyarakat muslim di dusun Tlogogedong bukan tanpa alasan dan dasar atau pijakan. Beberapa alasan fundamental sosial-religius diutarakan masyarakat setempat. Alasan yang bernuansa sosial sebagaimana dikemukakan Musthofa (70 th), sesepuh dan imam masjid. Menurutnya, praktek seperti ini sudah lama dijalankan. Ia menilai, pilihan untuk memperlambat azan untuk waktu zuhur, ashar, dan isyak merupakan bentuk kehati-hatian dan mengakomodasi fakta kehidupan yang dijalani masyarakat Tlogogedong. Lebih lanjut, ihtiyat yang dimaksud Musthofa adalah kehati-hatian untuk menjaga semangat salat berjamaah. Masyarakat Tlogogedong yang mayoritas petani, dimana ladangnya tidak berada di dekat rumah, membutuhkan waktu untuk perjalanan pulang dan bersih-bersih badan. Sehingga mereka akan tetap bisa ikut berjamaah dengan adanya perlambatan azan yang dikumandangkan.

Pendapat serupa juga diutarakan Abdul Muhyi (57 th) dan Zuhdi (60 th), imam mushola<sup>36</sup> di Tlogogedong. Ia menyebutkan bahwa azan ashar yang dikumandangkan jam empat dilatarbelakangi karena pada kisaran jam setengah empat, umat Islam di Tlogogedong masih bekerja di ladang. Sehingga perlu waktu untuk pulang dan (atau) membersihkan badan guna mengikuti salat jamaah.

Dalam bahasa lain, Abdul Khafidz (56 th), imam mushola dan guru madrasah diniyah, menyebut keberadaan azan yang diperlambat karena menyesuaikan lingkungan. Menurutnya, tampaknya para sesepuh di kampung ini memahami kondisi masyarakat yang mayoritas bekerja di sawah. Sehingga kalau azan saklek dilakukan di awal waktu, banyak masyarakat yang tidak 'nututi' (jawa) berjamaah.

---

memberikan hadiah berupa bedug. Pada saat itu, raja dari semarang mengatakan bahwa dirinya ingin mendengarkan suara bedug itu dibunyikan di masjid-masjid. Sejak itulah, bedug kemudian menjadi bagian dari masjid, seperti di negara China, Korea dan Jepang, yang memposisikan bedug di kuil-kuil sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Muhamad Muradlo. "Budaya dan Identitas Tionghoa Muslim di Kalimantan Barat". *Jurnal Lektur Keagamaan* 11, no. 2 (2013): 281-308.

<sup>36</sup> Mushola merupakan tempat ibadah yang skalanya lebih kecil dari pada masjid. Di Aceh dikenal dengan meunaseh, di minangkabau disebut dengan surau, dan di Jawa dikenal dengan langgar. Erwan Baharudin dan Sumrahayadi. "Pemaknaan Mahasiswa, Pengurus Masjid dan Komunitas Kajian Islam di Fakultas Ilmu Budaya Universitas XYZ Mengenai Masjid Sebagai Ruang dan Tempat". *Forum Ilmiah* 7 no. 3 (2010): 221-25.

Sementara Ulin Nuha (57 th), imam masjid, tidak melihat kalau azan yang diperlambat ini karena alasan masyarakat yang mayoritas petani. Ia menilai apa yang dilakukan sesepuh dulu lebih karena ihtiyat. Ihtiyah di sini dalam arti azan yang diperlambat setengah jam itu untuk memastikan bahwa waktu salat sudah benar-benar masuk waktunya.

Bisa dilihat, bagaimana masyarakat Islam Tlogogedong mendialogkan atau mengadaptasikan realitas sosial dengan 'urusan agama'. Menyikapi hal semacam ini, menarik apa yang diutarakan Syamsul Bakri;

"Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan jawa. "Wong Jowo" memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah Islam."<sup>37</sup>

Dalam bahasa sosiologi, langkah seperti itu bisa disebut akulturasi dalam skala yang lebih sederhana.<sup>38</sup> Namun yang lebih sesuai tampaknya adalah istilah adaptasi sosial, yaitu mencoba menyesuaikan dengan keadaan sosial. Dalam hal ini yang disesuaikan adalah teks keagamaan. Uniknyanya adaptasi tersebut dilakukan dengan memahami teks tanpa menghilangkan unsur penting dari keberadaan teks tersebut.<sup>39</sup>

Disamping alasan bernada sosiologis di atas, alasan religius sudah tentu merupakan keharusan. Dasar hukum agama merupakan keharusan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama. Perlambatan kumandang azan di dusun Tlogogedong merupakan pemahaman terhadap dua teks hadis, yaitu tentang tuntutan salat tepat pada waktunya<sup>40</sup> dan tuntunan salat

berjamaah.<sup>41</sup>

Abdul Muhyi berpendapat bahwa yang dilaksanakan di dusun Tlogogedong ini karena lebih mengedepankan berjamaah. Menurutnya, pertama, salat jamaah merupakan fardu kifayah. Dan kedua, salat berjamaah bisa menyempurnakan salat. Kalau salat sendirian, syarat rukunnya mungkin ada yang kurang sempurna. Ia juga menambahkan, pelaksanaan salat asar pada jam empat misalnya, itu masih tergolong awal waktu sebagaimana dianjurkan dalam hadis. Muhyi mengandaikan bahwa waktu dibagi tiga, awal, tengah, dan akhir. Jam empat ini masih tergolong awal waktu.

Hal senada diutarakan Musthofa, lebih utama mengedepankan salat berjamaah yang sedikit diperlambat dari pada salat sendiri di permulaan waktu. Karena untuk berjamaah memang dibutuhkan waktu untuk bersiap-siap.

Farihin (60 th) pun menegaskan hal serupa, pilihan mengedepankan salat berjamaah dengan konsekuensi memperlambat dilatarbelakangi oleh hadis yang menerangkan keutamaan berjamaah. Dimana pahalanya dua puluh tujuh kali lipat lebih besar dari pada salat sendirian, meskipun di awal waktu. Ia juga mengidentifikasi kemungkinan orang yang kurang sempurna atau banyak yang salah dalam menjalankan salat. Kemungkinan itu bisa ditutupi dengan melaksanakan salat secara berjamaah.

Ulin Nuha pun sependapat. Menurutnya hadis tentang perintah berjamaah itu ditafsirkan beragam. Ada yang menyebut sebagai fardu kifayah, ada yang menyebut sebagai fardu ain. Masyarakat muslim dusun Tlogogedong mengikuti pendapat yang menyebut salat berjamaah sebagai fardu kifayah.

Bagaimana dengan azan waktu isya' yang tidak terkait rutinitas kerja sebagaimana di siang hari (zuhur dan ashar)? Perlambatan kumandang azan waktu isya' bisa dengan melihat keberadaan

<sup>37</sup> Syamsul Bakri. "Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa)". *Dinika* 12, no. 2 (2014): 33-40.

<sup>38</sup> Paul N. Lakey. "Acculturation: a Review of the Literature". *Intercultural Communication Studies* 12, no. 2 (2003): 103-18.

<sup>39</sup> Dalam Adaptasi sosial yang terlibat dalam proses pengaruh mempengaruhi adalah individu dengan sosial dan sebaliknya. Di sini penulis melihat proses saling mempengaruhi itu melibatkan individu yang memahami teks agama dengan lingkungan sosial. Lihat misalnya tulisan Yoni Oktaviani, Elly Malihah, dan Mirna Nur Alia A. "Pengaruh Adaptasi Sosial Terhadap Integrasi Masyarakat Di Kelurahan Cikutra (Studi Deskriptif di Komplek Delima Cikutra dan Gang Sukarapih 3)". *Jurnal Sosieta* 5, no. 2 (2015): 30-45.

<sup>40</sup> Hadis bukhori nomor 527 menyebutkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُؤْتَى فِي صَلَاةِ الْإِسْلَامِ بِثَلَاثِ أَشْيَاءَ: بِإِخْلَافِ الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِهَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَبِإِخْلَافِ الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِهَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَبِإِخْلَافِ الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِنَّهُ يُؤْتَى بِهَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ."

Kalimat 'ala waqtiha dimaknai (syarh) dengan awal waktu. Penggunaan kata 'ala waqtiha tersebut, karena memang ada salat fardu yang lebih utama diakhirkan, seperti salat isya. Lih. Muhammad bin Shalih al-Usmain, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz 2 (Kairo: Maktabah Al-Islamiyah, 2004), 457.

<sup>41</sup> Salah satu hadisnya adalah

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَضْلٌ كَبِيرٌ فَاتَّبِعُوا فِيهَا أَوَّلَ صَلَاةٍ وَأَخِيرَهَا

Disamping tentang keutamaan salat berjamaah tersebut, ada juga hadis lain tentang perintah salat berjamaah di masjid, san lainnya. Lih. Muhammad bin Shalih al-Usmain, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Al-Islamiyah, 2004), 57-65.

jam belajar (*ngaji*) Al-Qur'an yang diadakan setelah salat magrib. Sejak dahulu, pada umumnya semua anak-anak 'diwajibkan' mengaji di mushola terdekat oleh orang tuanya. Menurut penuturan Abdul Muhyi, anak-anak yang belajar *ngaji* di mushola jumlahnya cukup banyak, sedangkan guru *ngaji* hanya satu. Untuk menuntaskan mengajar *ngaji* Al-Qur'an seluruh anak dalam satu mushola, butuh lebih dari jeda waktu antara maghrib dan isya'. Sehingga untuk menjembatannya, azan waktu isyak sedikit diulur sebagaimana yang ada hingga saat ini. Meskipun anak-anak yang belajar *ngaji* Al-Qur'an tidak seramai dulu, azan isyak dikumandangkan mengikuti kebiasaan yang sudah berjalan dari dulu tersebut.

Apa yang terjadi di dusun Tlogogedong ini merupakan pergumulan pemahaman terhadap teks agama dan konteks yang dihadapi. Hasil pemahaman yang dianggap baik dan membawa kebaikan bersama terus dipertahankan hingga saat ini. Mereka tidak berijtihad sendiri. Namun mengikuti hasil penafsiran dan pemahaman para ulama terdahulu terhadap teks agama yang terkodifikasi dalam fikih. Dalam bahasa kajian fikih, pemuka agama seperti imam masjid dan mushola, menimbang-nimbang antara perintah salat tepat waktu dan perintah salah secara berjamaah. Sementara bagi orang awam mereka bertaqlid mengikuti yang dilakukan pemuka agama setempat.

## E. PENUTUP

Uraian dari tulisan ini memberikan benang merah dalam dua hal, pertama, secara sosiologis masyarakat muslim dusun Tlogogedong mencoba melakukan proses adaptasi terhadap teks keagamaan terkait tuntunan salat di awal waktu dan perintah melaksanakan salat berjamaah. Proses adaptasi tersebut dengan menemukan titik temu antara teks keagamaan seperti perintah salat berjamaah, salat di awal waktu, dan kondisi sosial seperti kebutuhan petani untuk berladang, waktu rehat, waktu mengaji habis maghrib.

Kedua, dalam perspektif fikih, pemuka agama setempat (*kyai*) melakukan proses penimbangan dalam melaksanakan perintah salat di awal waktu dan salat berjamaah. Penimbangan tersebut dengan melakukan proses adaptif terhadap kondisi sosial. Menariknya, hasil dari proses adaptif tersebut dengan tetap mendudukkan teks keagamaan pada posisi utama.[]

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Amin, Darori (ed.). *Islam & Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Baharuddin, "Tipologi Pemikiran Keislaman di Indonesia Abad XXI". *MIQOT* 33, no. 1 (2009): 111-23. <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/download/176/166>. (diakses pada 10 Januari 2017).
- Baharudin, Erwan, dan Sumrahyadi. "Pemaknaan Mahasiswa, Pengurus Masjid dan Komunitas Kajian Islam di Fakultas Ilmu Budaya Universitas XYZ Mengenai Masjid Sebagai Ruang dan Tempat". *Forum Ilmiah* 7, no. 3 (2010): 221-25. <http://erwan.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/1146/2013/08/Memaknai-Masjid.pdf?mfihosiahfrgmix?ocvqgklwqgmfluf>. (diakses pada 20 Desember 2016).
- Bakri, Syamsul. "Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa)". *Dinika* 12, no. 2 (2014): 33-40.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak 1*. Semarang: Program Pascasarjana UIN Walisongo, 2011.
- Handinoto, dan Samuel Hartono. "Pengaruh Pertukangan Cina pada Bangunan Mesjid Kuno di Jawa Abad 15-16". *Dimensi Teknik Arsitektur* 35, no. 1 (2007): 23-40. [http://fportfolio.petra.ac.id/user\\_files/81-005/Dimensi1.pdf](http://fportfolio.petra.ac.id/user_files/81-005/Dimensi1.pdf). (diakses pada 15 Desember 2016).
- Izzah, Iva Yulianti Umdatul. "Perubahan Pola Hubungan Kyai dan Santri Pada Masyarakat Muslim Tradisional Pedesaan". *Jurnal Sosiologi Islam* 1, no. 2 (2011): 31-48. <http://jsi.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/11/8>. (diakses pada 19 April 2017).
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Lakey, Paul N. "Acculturation: a Review of the Literature". *Intercultural Communication Studies* 12, no.2 (2003): 103-18. <http://web.uri.edu/iaics/files/10-Paul-N.-Lakey.pdf>. (diakses pada 10 November 2016).
- Mahmuddin. "Strategi Dakwah Terhadap Masyarakat Agraris". *Jurnal Dakwah Tabligh* 14, no. 1 (2013): 101-13. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/317>. (diakses pada 10 November 2016).

## THE EFFECT OF ARABIC TEACHER COMPETENCE AND STUDENT INTEREST IN LEARNING ARABIC TOWARDS LEARNING OUTCOMES OF GRADE IX STUDENTS AT MTS AT KEBAYORAN LAMA SUBDISTRICT

NENENG LM\*)

---

### ABSTRACT

*This study aims at determining the factors that influence students' learning outcomes by examining the effect of Arabic teacher competence and students' interest in learning Arabic towards students' outcomes of Grade IX MTs (Islamic Junior High Schools) in Kebayoran Lama subdistrict. The study finds out that: first, there is a direct and significant influence of the high competence of teachers on students' Arabic learning outcomes. Secondly, there is a positive and significant effect of teacher competence on student interest. Thirdly, by the value of  $\beta_{32} = 0.46 > 0$ , the regression equation  $X_3 = -6.866 + 0,264X_2$ , the correlation coefficient  $r_{23} = 0.785$  and determination coefficient  $r_{23}^2 = 0.617$ , or 61.70% it can be inferred that there is a direct and significant influence of students' learning interest to their Arabic learning outcomes. These findings imply that obtaining good outcome in students' Arabic learning can be done by improving the competence of teachers and students' interest in learning.*

**KEY WORDS:** *Teacher Competence, Learning Interest, Learning Outcomes, Islamic Junior High School*

## PENGARUH KOMPETENSI GURU BAHASA ARAB DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS IX MTS DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar Bahasa Arab siswa dengan meneliti *Pengaruh Kompetensi Guru dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas IX Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama*. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, terdapat pengaruh langsung dan signifikan yang tinggi kompetensi guru terhadap hasil belajar bahasa Arab siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama. *Kedua*, terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi guru terhadap minat belajar siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama. *Ketiga*, dengan diperolehnya nilai  $\beta_{32} = 0,46 > 0$ , dengan persamaan regresi  $X_3 = -6,866 + 0,264X_2$ , koefisien korelasi  $r_{23} = 0,785$ , dan koefisien determinasi  $r_{23}^2 = 0,617$ , atau 61,70% menunjukkan terdapat pengaruh langsung dan sangat signifikan minat belajar siswa terhadap hasil belajar bahasa Arab siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama. Implikasi dari hasil penelitian di atas adalah hasil belajar bahasa Arab siswa dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kompetensi guru dan minat belajar siswa.

**KATA KUNCI:** *Kompetensi Guru, Minat Belajar, Hasil Belajar, Madrasah Tsanawiyah*

---

\*) Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Jl. Ir. H. Juanda Nomor 37 Ciputat, Tangerang Selatan. Email: neneng\_lm@yahoo.co.id

\*\* Naskah diterima April 2017, direvisi Mei 2017 dan disetujui untuk diterbitkan Juni 2017

## A. PENDAHULUAN

Latar belakang yang mendorong saya untuk melakukan penelitian ini adalah di Madrasah Tsanawiyah salah satu misi akademisnya internalisasi dan korelasi nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran dan sikap serta perilaku sehari-hari, mata pelajaran Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran pokok dan berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan selain sebagai alat komunikasi. Sementara nilai raport siswa masih banyak yang di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) walaupun tidak sedikit yang sudah mencapai di atas KKM. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis di beberapa Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama ditemukan adanya hasil belajar siswa yang belum mencapai KKM dan ada siswa yang memiliki nilai rata-rata tinggi, padahal mereka difasilitasi oleh guru yang sama.

Undang-undang No. 20/2003 tentang sisdiknas, Undang-undang No. 14/2005 tentang guru dan dosen, Undang-undang No. 19/2005 tentang standar nasional pendidikan, merupakan realisasi dari kepedulian pemerintah Indonesia terhadap dunia pendidikan. Dalam undang-undang standar nasional pendidikan banyak diatur permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan, dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang merupakan bagian dari sistem pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam mempersiapkan masa depan siswa, generasi pembangunan bangsa. Secara tegas dalam Surat Keputusan Mendikbud No. 054/U/1993 tentang SLTP disebutkan bahwa: MTs adalah SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), dengan demikian kedudukan MTs secara yuridis sama dengan SMP umum.

Berdasarkan struktur kurikulum yang dijadikan acuan dalam proses pembelajaran, MTs identik dengan SMP. Tetapi karena MTs merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, maka dalam realisasinya terdapat sedikit perbedaan dalam hal muatan kurikulum pendidikannya, yaitu porsi pendidikan agama mendapat porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan SMP, yakni 2:11 jam pelajaran. Hal yang menjadi salah satu ciri khas pendidikan agama di MTs di antaranya

adalah dilaksanakannya pembelajaran Bahasa Arab, karena Bahasa Arab merupakan bahasa yang dapat digunakan untuk sarana penggalian ilmu agama Islam yang notabeneanya berasal dari negeri Arab dan sumber-sumber ajarannya pun berbahasa Arab yakni Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian keberhasilan pembelajaran Bahasa Arab merupakan syarat mutlak pendidikan di MTs.

Pendidikan yang terencana akan mengedepankan penciptaan suasana belajar, dan proses pembelajaran yang membuat siswa aktif dan dapat mengembangkan potensi dirinya. Untuk itu kompetensi guru Bahasa Arab adalah salah satu unsur dalam penentuan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pokok pelajaran dan kondisi kelas.

Disamping itu kompetensi yang dimiliki guru akan menunjukkan kompetensinya dalam mengajar. Kompetensi tersebut, akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesionalisme dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya guru bukan saja harus pintar tapi juga harus pandai mentransfer ilmunya kepada siswa sehingga diharapkan seluruh peserta didik, setidaknya sebagian besar siswa dapat berhasil dengan baik.

Untuk memperoleh hasil yang baik, selain partisipasi aktif dari guru, diperlukan juga siswa yang mau dan siap menerima ilmu yang disampaikan kepadanya. Aktifitas dan kerja keras siswa sangat diperlukan. Ngalim menyatakan dalam proses belajar mengajar di sekolah yang dimaksud *raw input* adalah siswa. Sebagai *raw input* siswa memiliki karakteristik tertentu, baik fisiologis maupun psikologis.<sup>1</sup> Mengenai fisiologis adalah bagaimana kondisi fisiknya, panca inderanya, dan sebagainya. Sedangkan yang menyangkut psikologis adalah minatnya, tingkat kecerdasannya, bakatnya, motivasinya, kemampuan kognitifnya, dan sebagainya. Semua ini dapat mempengaruhi bagaimana hasil belajarnya. Weiner mengatakan ada dua faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor bawaan utama, yaitu intelegensi dan bakat, sedangkan faktor eksternal adalah karena adanya interaksi dengan

---

<sup>1</sup> Ngilim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 107.

lingkungan, antara lain yang mendorong munculnya minat.

Faktor internal atau disebut faktor endogen lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa antara lain seperti minat belajar, kesehatan, perhatian, ketenangan jiwa di waktu belajar, motivasi, kegairahan diri, cita-cita, kebugaran jasmani, dan kepekaan alat-alat indra dalam belajar. Sedangkan faktor eksternal/eksogen yang mempengaruhi keberhasilan siswa adalah lingkungan belajar (suasana kelas), cuaca, letak sekolah (di tempat ramai atau tidak), faktor interaksi sosial dengan teman sebangku, interaksi siswa dengan pendidiknya, serta alat-alat belajar yang digunakan gurunya dalam PBM seperti media pendidikan, metodologi pembelajaran yang digunakan, dan buku-buku yang dipakai.<sup>2</sup>

Crow mengemukakan bahwa minat merupakan pendorong yang menyebabkan seseorang memberikan perhatiannya terhadap seseorang atau suatu aktifitas tertentu. Slameto menambahkan siswa yang memiliki minat terhadap suatu subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada subyek tertentu.<sup>3</sup> Crites dalam Safari menyatakan bahwa minat adalah kesadaran yang timbul bahwa obyek tertentu sangat disenangi dan melahirkan perhatian yang tinggi bagi individu terhadap obyek tersebut.<sup>4</sup>

Minat belajar siswa yang kuat terhadap mata pelajaran Bahasa Arab kemudian sering dipraktekkan dengan berkomunikasi Bahasa Arab bersama teman-temannya dan guru-guru di sekolah juga dengan orang tuanya di rumah, maka akan diperoleh kecakapan yang maksimal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang "Pengaruh kompetensi guru dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan"

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan? 2) apakah terdapat pengaruh

kompetensi guru terhadap minat belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan? 3) apakah terdapat pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi guru Bahasa Arab dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan dengan cara mencermati fenomena yang ada pada suatu wilayah penelitian agar peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan, dan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat: 1) mengungkap ada tidaknya pengaruh kompetensi guru Bahasa Arab dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 2) menambah pengetahuan penulis tentang berbagai permasalahan yang mempengaruhi hasil belajar Bahasa Arab siswa; 3) memberikan informasi positif bagi pihak madrasah dan guru Bahasa Arab khususnya untuk meningkatkan kompetensinya dan meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran Bahasa Arab sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai; 3) hasil penelitian juga dapat menambah referensi untuk penelitian lebih lanjut bagi yang berminat mengembangkannya.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya adalah hasil penelitian Mulyadi yang meneliti tentang Pengaruh Metode Pengajaran Bahasa dan Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa kelas III MTsN Sukamulya Balaraja Tangerang, yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar Bahasa Arab siswa yang memiliki minat tinggi dengan siswa yang memiliki minat rendah ditunjukkan dengan harga Q yang lebih besar yaitu  $5,56 > 4,08$ .<sup>5</sup>

Greene seperti yang dikutip oleh Syafril

<sup>2</sup> Aminuddin Rasyad, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: UHAMKA Press dan yayasan PEP-Ex 8., 2006), 99.

<sup>3</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 180.

<sup>4</sup> Safari, *Butir-butir Soal Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Puskurbuk, 2004), 71.

<sup>5</sup> Mulyadi, *Pengaruh Metode Pengajaran Bahasa dan Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa kelas III MTsN Sukamulya Balaraja Tangerang*, (Jakarta: Tesis, UHAMKA 2006), 124.

mengemukakan hasil penelitian Thomdike mengenai hubungan minat dengan hasil belajar terdapat korelasi sebesar 0,89. Minat belajar mempunyai prediksi yang tinggi terhadap kecakapan yang diperoleh. Penelitian Einsenberger juga menyatakan bahwa semakin tinggi minat seseorang ke arah suatu objek, maka usaha untuk mencapainya akan lebih besar. Selanjutnya dikatakan bahwa usaha ini akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh seseorang.<sup>6</sup>

Penelitian lain yang berhubungan dengan minat siswa adalah hasil penelitian Turni Swastiati, yang meneliti tentang Hubungan Antara Minat Siswa dan Kemampuan Mengajar Guru terhadap Prestasi Belajar Bahasa Inggris Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Depok,<sup>7</sup> menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara minat siswa dengan prestasi belajar Bahasa Inggris siswa dengan keeratan hubungan antara keduanya adalah 0,89. dan berdasarkan koefisien determinasi antara kedua variabel dapat dinyatakan bahwa minat siswa memberikan kontribusi sebesar 73 % terhadap prestasi belajar Bahasa Inggris.

## B. KAJIAN LITERATUR

### 1. Hasil Belajar

Budiningsih dalam bukunya "Belajar dan Pembelajaran" menyatakan bahwa, menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.<sup>8</sup> Hal serupa disampaikan oleh Morgan bahwa belajar adalah perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari latihan atau pengalaman.<sup>9</sup>

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa belajar adalah sebagai suatu perubahan seluruh tingkah laku individu yang

relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.

Pembelajaran yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *intruction* ini banyak dipengaruhi oleh psikologi kognitif-holistik yang menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Selain itu istilah ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah siswa mempelajari berbagai hal dengan berbagai macam media seperti bahan-bahan cetak, program televisi, gambar, audio, dan lain-lain, sehingga semua itu mendorong terjadinya perubahan peranan guru sebagai sumber belajar menjadi fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar.<sup>10</sup>

Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah memfasilitasi proses pembelajaran untuk menunjang terjadinya perubahan perilaku kearah positif bagi siswa sebagaimana dikemukakan Djahiri dalam Kunandar, dalam proses pembelajaran prinsip utamanya adalah adanya proses keterlibatan seluruh atau sebagian besar potensi diri siswa (fisik dan non fisik) dan kebermaknaannya bagi diri dan kehidupannya saat ini dan di masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Apa yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar sering disebut dengan prestasi belajar, ada juga yang menyebutnya dengan istilah hasil belajar.<sup>12</sup> Hasil belajar menurut Kunandar adalah kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Abdurrahman hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar.<sup>14</sup>

Hasil belajar siswa seperti yang telah diuraikan di atas, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Klausemeier dan Goodwin menyampaikan sejumlah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu: "karakteristik siswa, tenaga pengajar, materi yang dipelajari, media pengajaran, karakteristik fisik sekolah,

---

<sup>6</sup> Syafril, *Keefektifan Strategi Pengajaran dan Pengaruh Minat terhadap Hasil Belajar Dasar-dasar Pendidikan: Suatu Eksperimen di IKIP Bandung*, (Jakarta: Tesis, Fakultas Pascasarjana IKIP 1990), 41.

<sup>7</sup> Turni Swastiati, *Hubungan Antara Minat Siswa dan Kemampuan Mengajar Guru terhadap Prestasi Belajar Bahasa Inggris Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Depok*. (Jakarta: Tesis : UHAMKA 2006), 93.

<sup>8</sup> C. Asri Budiningsih, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005), 20.

<sup>9</sup> M. Ngalm Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 84.

---

<sup>10</sup> Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 78.

<sup>11</sup> Kunandar, *Guru Profesional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 265.

<sup>12</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Cetakan ke 3 (Bandung: Sinar Baru, 1991), 49.

<sup>13</sup> Kunandar, *Guru Profesional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 265.

<sup>14</sup> Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak berkesulitan Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 37.

lingkungan serta faktor kurikulum dan tujuan pengajaran.”<sup>15</sup> Rooijackers mengemukakan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari pengajar.<sup>16</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil belajar Bahasa Arab siswa adalah suatu usaha pencapaian yang dilakukan siswa dalam kegiatan belajarnya, yang tingkat keberhasilannya sangat tergantung pada intelektual, keterampilan motorik dan afektif siswa tersebut.

## 2. Kompetensi Guru

Upaya meningkatkan mutu pendidikan dan proses interaksi belajar mengajar di kelas menuntut adanya kemampuan guru secara profesional agar dapat mencapai hasil yang optimal. Peningkatan mutu dalam proses pembelajaran diusahakan dengan pengembangan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran masih tetap memegang peranan penting, tidak dapat digantikan oleh mesin, radio, tape recorder, atau bahkan oleh komputer yang paling modern sekalipun. Masih terlalu banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan, dan lain-lain yang diharapkan dari hasil suatu proses interaksi belajar mengajar yang tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut. Di sinilah kelebihan guru dari alat-alat yang diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupannya.

Kompetensi atau kemampuan dapat dipahami dalam dua aspek, aspek yang tampak dan aspek yang tidak tampak.<sup>17</sup> Kompetensi dalam aspek yang tampak disebut *performance* (penampilan). *Performance* ini tampil dalam bentuk tingkah laku yang dapat didemonstrasikan sehingga dapat diamati, dilihat, dan dirasakan. Kompetensi dalam aspek yang tidak tampak disebut kompetensi dalam aspek rasional. Hal ini tidak dapat diamati, karena tidak tampil dalam bentuk perilaku yang empiris. Kemampuan dalam

aspek rasional ini, pada umumnya dikenal dalam taksonomi Bloom sebagai *kognitif, afektif, dan psikomotorik*. *Kognitif* berhubungan dengan kemampuan melakukan, *afektif* berhubungan dengan sosial-emosional, dan *psikomotorik* berhubungan dengan keterampilan.<sup>18</sup>

Kedua aspek kompetensi tersebut memiliki hubungan saling berinteraksi. Kemampuan dalam arti *performance* akan berkembang jika kemampuan rasional mengalami peningkatan. Seseorang yang telah menguasai banyak teori ilmu pengetahuan akan membuat penampilan profesinya lebih berkembang. Perbaikan pada *performance* seseorang akan meningkatkan kemampuan rasionalnya. Cara belajar seperti ini sering disebut dengan *learning by doing*. Sebaliknya kemampuan rasional akan berkembang jika ada peningkatan dalam *performance*. Ungkapan yang menyatakan “pengalaman adalah guru yang baik” menunjukkan pengembangan kemampuan rasional melalui praktik nyata. Praktik nyata itu akan memberi umpan balik yang mengembangkan kompetensi yang rasional.

Moh. Uzer Usman menyatakan kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.<sup>19</sup>

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang melekat padanya dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir serta bertindak, yang dapat menunjukkan kualitas dirinya.

Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>20</sup>

Disamping harus memiliki kompetensi tertentu, dalam kegiatan pembelajaran juga guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis, yaitu sebagai fasilitator, pengelola, demonstrator, dan evaluator.

Sebagai fasilitator, guru berperan

---

<sup>15</sup> Herbart J. Klausmeier dan William Goodwin, *Learning and Human Abilities: Educational Psychology* (Newyork: Harper & Row, 1971), 13.

<sup>16</sup> Ad. Rooijackers, *Mengajar Dengan Sukses* (Jakarta: Gramedia, 1989), 15.

<sup>17</sup> W. Gulo, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 34.

---

<sup>18</sup> W. Gulo, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 35.

<sup>19</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996), 4.

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 14/2005 tentang Guru dan Doses, Bab IV, pasal 10 ayat 1, 2005

memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan dalam menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Sebagai demonstrator, guru mampu menjadi teladan bagi siswa. Dan sebagai evaluator, guru mampu melaksanakan evaluasi terhadap semua aspek perkembangan siswa, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal ini sangat penting, karena pencapaian manusia seutuhnya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan dan pembelajaran.

### 3. Minat Belajar Siswa

Dalam proses pembelajaran, faktor siswa dan segala yang mempengaruhinya akan sangat menentukan keberhasilan dalam belajar. Sebagai manusia yang memiliki beberapa potensi, siswa diyakini mempunyai bakat, motivasi, dan minat terhadap sesuatu.

Minat adalah kecenderungan dalam diri anak didik untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangkan sesuatu.<sup>21</sup> Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Suatu minat dapat ditafsirkan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai sesuatu dari pada hal lainnya, serta dapat dimanifestasikan melalui partisipasi seseorang dalam suatu aktifitas/kegiatan.

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini mendatangkan kepuasan, bila kepuasan berkurang, maka minat pun berkurang.<sup>22</sup>

Minat merupakan aspek psikis manusia yang mendorongnya untuk memperoleh sesuatu atau untuk mencapai suatu tujuan. Suatu peristiwa atau objek yang menyenangkan perasaan seseorang akan dapat menimbulkan minatnya terhadap peristiwa atau objek tersebut. Hilgard dalam Slameto mendefinisikan minat sebagai *"interest is presiting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content"* minat adalah kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan

dan mengengang beberapa kegiatan.<sup>23</sup>

Dari kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa minat adalah besarnya perhatian, kegiatan, dan kebutuhan seseorang terhadap suatu objek. Dengan demikian, minat belajar berarti besarnya perhatian, kegiatan, dan kebutuhan siswa terhadap mata pelajaran yang dihadapinya ketika belajar.

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, niscaya siswa tidak akan belajar dengan baik karena tidak ada daya tarik baginya. Bahan pelajaran yang menarik bagi siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan lebih lama dalam ingatannya.

William James dalam Moh. Uzer Usman mengemukakan bahwa minat merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa.<sup>24</sup> Crow and Crow dalam Djaali menyatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.<sup>25</sup>

Dengan demikian minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survai kausal, dengan teknik analisis regresi. Dalam hal ini, Singarimbun mengemukakan bahwa penelitian survai adalah: "Penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok".<sup>26</sup>

Lokasi penelitian ini adalah Madrasah Tsanawiyah yang terdapat di Kecamatan Kebayoran lama. Secara umum rancangan penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

<sup>23</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya* (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003), 57.

<sup>24</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996), 27.

<sup>25</sup> Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PPS UNJ, 2000), 155.

<sup>26</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1995), 3.

<sup>21</sup> Tayar Yusuf dan Saiful anwar, *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 99.

<sup>22</sup> Elizabeth. B. Hurlock, *Child Development, Perkembangan Anak*, alih bahasa: M. Meitasari Tjandrasa, (Jakarta:Erlangga, 2003),

tertentu. Untuk mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian sering sulit dilakukan, oleh karena itu data yang telah terkumpul sebelum diketahui validitasnya, dapat di uji melalui pengujian reliabilitas dan obyektivitas. Rancangan penelitiannya meliputi proses memilih pengukuran variabel, prosedur dan teknik sampling, instrumen, pengumpulan data, analisis data yang terkumpul, dan pelaporan hasil penelitian.

Populasi atau *universe*, adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.<sup>27</sup> Populasi juga merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>28</sup>. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama yang berjumlah 912 orang.

Menurut Marzuki, sampling adalah "cara pengambilan sampel"<sup>29</sup>. Dalam penelitian ini sampling adalah teknik yang dipergunakan untuk mengambil, memilih atau menentukan sampel penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>30</sup> Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Sedangkan menurut Arikunto, sampel adalah "sebagian individu atau wakil populasi yang diteliti".<sup>31</sup> Lebih lanjut Arikunto menjelaskan bahwa: "Sebagai acuan apabila subyek yang diteliti kurang dari 100, lebih baik

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, sedangkan jika lebih dari 100, maka lebih baik diambil antara 10%, 15% ,atau 25% atau lebih". Hal senada dikemukakan Sudman dalam Santosa jumlah sampel dalam penelitian korelasional minimum 30. Dalam penelitian eksperimen masing-masing kelompok minimum berjumlah 15 dan untuk penelitian survai sampelnya minimum 100<sup>32</sup>.

Adapun sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagian individu (siswa) yang diteliti sebagai wakil yang dianggap representatif dari populasi (seluruh siswa), hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel ini nilai karakteristik perkiraan, yakni taksiran mengenai keadaan populasi (siswa secara keseluruhan).

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik *multiple stage random sample*. Yaitu sampel ditarik dari kelompok populasi, tetapi tidak semua anggota kelompok populasi menjadi anggota sampel.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah berupa tes dan angket atau kuesioner. Instrumen hasil belajar dari nilai tes yang dibuat penulis ditujukan untuk menjangkau data mengenai variabel hasil belajar Bahasa Arab Siswa, sedangkan kuesioner untuk menjangkau data mengenai variabel kompetensi guru dan minat belajar siswa. Instrumen tes disusun sebanyak 40 butir pertanyaan berupa pilihan ganda dan kuesioner disusun masing-masing 40 butir yang berisi sejumlah pernyataan tertutup tentang operasionalisasi dari pernyataan serta mengacu pada skala *likert* untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden yang berupa pernyataan dengan klasifikasi tidak pernah dengan skor 1, jarang dengan skor 2, kadang-kadang dengan skor 3, sering dengan skor 4, dan selalu dengan skor 5.

Prosedur kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap *member check*. Data yang telah terkumpul diolah dengan prosedur: *Editing, Coding, Work sheet*, analisis statistik, yaitu dengan analisis deskriptif

---

<sup>27</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995), 152.

<sup>28</sup> Sugiyono, Prof. Dr., *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2005), 90.

<sup>29</sup> Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1986), 43.

<sup>30</sup> Sugiyono, Prof. Dr., *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2005), 91.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 117.

---

<sup>32</sup> Santosa Murwani, dkk., *Pedoman Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Program Pasca Sarjana UHAMKA, 2008), 22.

<sup>33</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), 333.

dan analisis inferensial.

Adapun hipotesis yang hendak diuji kebenarannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: : 1) terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan; 2) terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap minat belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan; 3) terdapat pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hipotesis dalam penelitian ini, yang *pertama*, *kedua* dan *ketiga* diuji dengan teknik analisis regresi dan korelasi sederhana. Masing-masing pengujian hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa

Hipotesis *pertama* yang diuji adalah untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dengan kata lain semakin baik kompetensi guru, maka akan semakin baik pula hasil belajar Bahasa Arab siswa. Secara statistik, hipotesis di atas dirumuskan sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_{31} = 0$$

$$H_1 : \rho_{31} > 0$$

Keadaan tersebut menginformasikan bahwa  $H_0$  (Hipotesis nol) adalah tidak terdapat pengaruh kompetensi guru ( $X_1$ ) terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa ( $X_3$ ), melawan alternatif  $H_1$  (Hipotesis alternatif) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung kompetensi guru ( $X_1$ ) terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa ( $X_3$ ).

Pengaruh antar variabel ditentukan dengan pengujian hipotesis menggunakan korelasi *pearson product moment*. Dari hasil perhitungan, diperoleh koefisien variabel kompetensi guru ( $X_1$ ) dan hasil belajar Bahasa Arab siswa ( $X_3$ )  $r_{13} = 0,773$ . Untuk memakai nilai koefisien korelasi, selanjutnya dihitung pula uji kebermaknaan koefisien korelasi variabel kompetensi guru ( $X_1$ ) dan hasil belajar Bahasa Arab siswa ( $X_3$ ) melalui uji-t. Hasil pengujian koefisien korelasi tersebut adalah sebagai berikut:

n	r <sub>13</sub>	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	
			α = 0,05	α = 0,01
100	0,773	12,06226**	2,00	2,66

Keterangan:

r<sub>13</sub> = koefisien X<sub>1</sub> dan X<sub>3</sub>

\*\* = sangat signifikan ( $t_h > t_t = 12,06226 > 2,00/2,66$ )

Tabel di atas, menunjukkan bahwa koefisien korelasi  $r_{13} = 0,773$ , dan uji signifikansi koefisien korelasi yang dilakukan dengan statistik uji-t, seperti terlihat hasilnya pada tabel koefisien di atas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung} = 12,06226$ . Dalam daftar distribusi t pada tarap signifikan  $\alpha = 0,005$  dan db =  $n - 2 = 100 - 2 = 98$  diperoleh hasil  $t_{tabel} = 2,00$ . Dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $12,06226 > 2,00$ .

Untuk mengetahui kontribusi variabel kompetensi guru terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa, dilakukan dengan analisis determinasi yang ditunjukkan oleh besaran R *sequer*, hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai R *sequer* = 0,598 yang diperoleh dari koefisien determinasi (KD) =  $r_{13}^2 \times 100\%$  atau  $0,773^2 \times 100\% = 59,80\%$ . Hal ini berarti bahwa variabel hasil belajar Bahasa Arab siswa ditentukan oleh kompetensi guru sebesar 59,80%, sedangkan sisanya  $100\% - 59,80\% = 40,2\%$  dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Uji individual pengaruh variabel kompetensi guru ( $X_1$ ) terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa ( $X_3$ ) diperoleh nilai  $\rho_{31} = 0,42$  jelas bahwa nilai probabilitas  $\rho_{31} = 0,42 > 0$ . Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Dari keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan kompetensi guru terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa.

2. Pengaruh kompetensi guru terhadap minat belajar Bahasa Arab siswa

Hipotesis *kedua* yang diuji adalah untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap minat belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dengan kata lain semakin baik kompetensi guru, maka akan semakin baik pula minat belajar Bahasa Arab siswa. Secara statistik, hipotesis di atas dirumuskan sebagai berikut :

$$H_0 : \rho_{21} = 0$$

$$H_1 : p_{21} > 0$$

Keadaan tersebut menginformasikan bahwa  $H_0$  (Hipotesis nol) adalah tidak terdapat pengaruh kompetensi guru ( $X_1$ ) terhadap minat belajar Bahasa Arab siswa ( $X_2$ ), melawan alternatif  $H_1$  (Hipotesis alternatif) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung kompetensi guru ( $X_1$ ) terhadap minat belajar Bahasa Arab siswa ( $X_2$ ).

Pengaruh antar variabel ditentukan dengan pengujian hipotesis menggunakan korelasi *pearson product moment*. Dari hasil perhitungan, diperoleh koefisien variabel kompetensi guru ( $X_1$ ) dan minat belajar Bahasa Arab siswa ( $X_2$ )  $r_{12} = 0,763439$ . Untuk memakai nilai koefisien korelasi, selanjutnya dihitung pula uji kebermaknaan koefisien korelasi variabel kompetensi guru ( $X_1$ ) dan minat belajar Bahasa Arab siswa ( $X_2$ ) melalui uji-t. Hasil pengujian koefisien korelasi tersebut adalah sebagai berikut:

n	r <sub>12</sub>	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	
			α = 0,05	α = 0,01
100	0,763439	11,7013**	2,00	2,66

Keterangan:

r<sub>12</sub> = koefisien X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>

\*\* = sangat signifikan (t<sub>h</sub> > t<sub>t</sub> = 11,7013 > 2,00/2,66)

Tabel di atas, menunjukkan bahwa koefisien korelasi  $r_{12} = 0,763439$ , dan uji signifikansi koefisien korelasi yang dilakukan dengan statistik uji-t, seperti terlihat hasilnya pada tabel koefisien di atas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung} = 11,7013$ . Dalam daftar distribusi t pada tarap signifikan  $\alpha = 0,005$  dan db =  $n - 2 = 100 - 2 = 98$  diperoleh hasil  $t_{tabel} = 2,00$ . Dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $11,7013 > 2,00$ .

Untuk mengetahui kontribusi variabel kompetensi guru terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa, dilakukan dengan analisis determinasi yang ditunjukkan oleh besaran *R sequer*, hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai *R sequer* = 0,582 yang diperoleh dari koefisien determinasi (KD) =  $r_{12}^2 \times 100\%$  atau  $0,763^2 \times 100\% = 58,22\%$ . Hal ini berarti bahwa variabel hasil belajar Bahasa Arab siswa ditentukan oleh kompetensi guru sebesar 58,22%, sedangkan sisanya  $100\% - 58,22\% = 41,78\%$  dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Uji individual pengaruh variabel kompetensi guru ( $X_1$ ) terhadap minat belajar Bahasa Arab

siswa ( $X_2$ ) diperoleh nilai  $p_{21} = 0,76$  jelas bahwa nilai probabilitas  $p_{21} = 0,76 > 0$ . Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Dari keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan kompetensi guru terhadap minat belajar Bahasa Arab siswa.

3. Pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa

Hipotesis *ketiga* yang diuji adalah untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dengan kata lain semakin baik minat belajar siswa, maka akan semakin baik pula hasil belajar Bahasa Arab siswa. Secara statistik, hipotesis di atas dirumuskan sebagai berikut :

$$H_0 : p_{32} = 0$$

$$H_1 : p_{32} > 0$$

Keadaan tersebut menginformasikan bahwa  $H_0$  (Hipotesis nol) adalah tidak terdapat pengaruh minat belajar siswa ( $X_2$ ) terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa ( $X_3$ ), melawan alternatif  $H_1$  (Hipotesis alternatif) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung minat belajar siswa ( $X_2$ ) terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa ( $X_3$ ).

Pengaruh antar variabel ditentukan dengan pengujian hipotesis menggunakan korelasi *pearson product moment*. Dari hasil perhitungan, diperoleh koefisien variabel minat belajar siswa ( $X_2$ ) dan hasil belajar Bahasa Arab siswa ( $X_3$ )  $r_{23} = 0,785$ . Untuk memakai nilai koefisien korelasi, selanjutnya dihitung pula uji kebermaknaan koefisien korelasi variabel minat belajar siswa ( $X_2$ ) dan hasil belajar Bahasa Arab siswa ( $X_3$ ) melalui uji-t. Hasil pengujian koefisien korelasi tersebut adalah sebagai berikut:

n	r <sub>13</sub>	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	
			α = 0,05	α = 0,01
100	0,785	7,1516**	2,00	2,66

Keterangan:

r<sub>13</sub> = koefisien X<sub>1</sub> dan X<sub>3</sub>

\*\* = sangat signifikan (t<sub>h</sub> > t<sub>t</sub> = 7,1516 > 2,00/2,66)

Tabel di atas, menunjukkan bahwa koefisien korelasi  $r_{13} = 0,785$ , dan uji signifikansi koefisien korelasi yang dilakukan dengan statistik uji-t, seperti terlihat hasilnya pada tabel koefisien di atas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung} = 7,1516$ . Dalam daftar distribusi t pada

tarap signifikan  $\alpha = 0,005$  dan  $db = n - 2 = 100 - 2 = 98$  diperoleh hasil  $t_{\text{tabel}} = 2,00$ . Dengan demikian  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  atau  $7,1516 > 2,00$ .

Untuk mengetahui kontribusi variabel kompetensi guru terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa, dilakukan dengan analisis determinasi yang ditunjukkan oleh besaran *R sequer*, hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai *R sequer* = 0,617 yang diperoleh dari koefisien determinasi (KD) =  $r_{23}^2 \times 100\%$  atau  $0,785^2 \times 100\% = 61,70\%$ . Hal ini berarti bahwa variabel hasil belajar Bahasa Arab siswa ditentukan oleh minat belajar siswa sebesar 61,70%, sedangkan sisanya  $100\% - 61,70\% = 38,30\%$  dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Uji individual pengaruh variabel minat belajar siswa ( $X_2$ ) terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa ( $X_3$ ) diperoleh nilai  $\beta_{32} = 0,46$  jelas bahwa nilai probabilitas  $\beta_{32} = 0,46 > 0$ . Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan minat belajar siswa terhadap hasil belajar Bahasa Arab siswa.

## E. PENUTUP

Mengacu pada informasi dan hasil analisis data terhadap variabel-variabel dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi Guru terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan dibuktikan dengan diperolehnya nilai dengan  $\beta_{31} = 0,42 > 0$ , dengan persamaan regresi  $X_3 = -8,179 + 0,268 X_1$ , koefisien korelasi  $r_{13} = 0,773$ , dan koefisien determinasi  $r_{13}^2 = 0,598$  atau 59,80 %. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi guru merupakan satu di antara beberapa faktor yang menentukan hasil belajar Bahasa Arab siswa. Dengan demikian, jika ingin memperoleh hasil belajar siswa yang memuaskan, maka diperlukan guru yang berkompeten.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kompetensi Guru terhadap Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai

dengan  $\beta_{21} = 0,76 > 0$ , dengan persamaan regresi  $X_2 = 25,137 + 0,785 X_1$ , koefisien korelasi  $r_{12} = 0,763$  dan koefisien determinasi  $r_{12}^2 = 0,582$  atau 58,22 %. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi guru merupakan satu diantara beberapa faktor yang menentukan minat belajar siswa. Dengan demikian, jika menginginkan para siswa memiliki minat belajar yang tinggi, maka diperlukan guru yang berkompeten.

3. Dengan diperolehnya nilai dengan  $\beta_{32} = 0,46 > 0$ , persamaan regresi  $X_3 = -6,866 + 0,264 X_2$ , koefisien korelasi  $r_{23} = 0,785$  dan koefisien determinasi  $r_{23}^2 = 0,617$  atau 61,70 % membuktikan bahwa hipotesis ke tiga yang diajukan yakni "terdapat pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa" adalah diterima dengan hasil pengujian signifikan. Hal ini membuktikan bahwa minat belajar siswa merupakan satu di antara beberapa faktor penentu hasil belajar Bahasa Arab siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi minat belajar siswa semakin tinggi juga hasil belajar Bahasa Arab siswa.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang menyatakan bahwa Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan dipengaruhi oleh kompetensi guru dan minat belajar siswa, memberi implikasi bahwa untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Arab siswa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi guru dan mengoptimalkan minat belajar siswa.

Oleh karena itu, penulis mengajukan saran yang mungkin ada relevansinya dengan penelitian ini.

1. Kompetensi guru dan minat belajar siswa adalah di antara faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar Bahasa Arab Siswa. Dengan kompetensi pedagogik guru didukung oleh minat belajar yang tinggi dari siswa maka hasil belajar Bahasa Arab siswa akan jauh lebih baik dari sebelumnya, maka upaya-upaya ke arah peningkatan tersebut sudah selayaknya mendapat perhatian baik dari para orang tua siswa, para guru, pimpinan madrasah, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Kompetensi atau kemampuan yang dimiliki guru akan terwujud dalam bentuk

penguasaan pengetahuan dan profesionalitas dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Mengingat guru adalah sebagai salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan peserta didik, oleh karena itu sebagai seorang guru semestinya selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensinya dan memiliki sikap realistis yang mampu memperhatikan materi pembelajaran serta kemampuan intelektual peserta didiknya.

3. Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa akan mengalami aktivitas mental seperti mengembangkan kemampuan intelektual, mengembangkan kemampuan berpikir, dan aktivitas jasmani seperti mengerjakan sesuatu, menyusun kalimat atau paragraf, menyimpulkan materi pembelajaran dan lain-lain. Maka untuk meningkatkan minat belajar siswa seorang guru disarankan membuat berbagai kegiatan belajar yang variatif yang berorientasi pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan menantang, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis penemuan, dan sebagainya. Selain itu untuk menumbuhkan minat belajar siswa, guru juga perlu mengkondisikan semua sumber belajar sedemikian rupa agar sesuai dengan kepentingan dan kemampuan siswa,

mengendalikan disiplin dan suasana belajar, sehingga para siswa terdorong untuk lebih semangat belajar.

## **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada akhir bahasan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat: Kepala Madrasah dan guru-guru Madrasah Tsanawiyah di Kebayoran Lama, kepada suami, anak-anak, serta keluarga yang senantiasa mendukung, memotivasi, dan membantu, sampai terselesaikannya karya tulis ilmiah ini, rekan mahasiswa, rekan widyaiswara, dan semua pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah membantu secara finansial dan spiritual, memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian saya akhiri dengan ucapan *alhamdulillah*, kiranya bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abdurrahman, Mulyono, *Pendidikan Bagi Anak berkesulitan Belajar*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- Ad. Rooijackers, *Mengajar Dengan Sukses*, Jakarta, Gramedia, 1989
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Budiningsih, C. Asri, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2005
- Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, PPS UNJ, 2000
- Gulo, W., *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta, PT Grasindo, 2004
- Hurlock, Elizabeth. B., *Child Development, Perkembangan Anak*, alih bahasa: M. Meitasari Tjandrasa, Jakarta, Erlangga, 2003,
- Klausemeier, Herbart J. dan William Goodwin, *Learning and Human Abilities: Educational Psychology*, Newyork, Harper & Row, 1971
- Kunandar, *Guru Profesional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Marzuki, *Metode Riset*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII, 1986
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998
- Murwani, Santosa, dkk., *Pedoman Tesis dan Disertasi*, Jakarta; Program Pasca Sarjana UHAMKA
- Purwanto, M. Ngalim, *Psikologi Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Rasyad, Aminuddin, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta, UHAMKA Press dan yayasan PEP-Ex 8., 2006
- Sanjaya, Wina, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1995
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003
- Sudjana, Nana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Cetakan ke 3, Bandung, Sinar Baru, 1991
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Undang-undang Republik Indonesia No. 14/2005 tentang Guru dan Doses, Bab IV, pasal 10 ayat 1, 2005
- Usman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1996
- Yusuf, Tayar dan Saiful anwar, *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1997

## DEMOCRACY AND REGIONAL SHARIA REGULATIONS: A SUKABUMI CASE

FIRMAN NUGRAHA\*)

---

### ABSTRACT

*This article sheds some lights on the implementation of regional sharia regulations (Perda syariah) from the perspective of democracy, focusing on the aspects of representation and accountability. Qualitative study was employed in this research. The study finds out that the presence of regional sharia regulations in the context of democratic Sukabumi is substantially representative. This is due to the fact that Sukabumi people represent the majority group, which is Muslims. However, from the side of accountability, the regulations have low level of accountability since the sharia regulations have not solved the real issues amidst Sukabumi people.*

**KEY WORDS:** *Accountability, Democracy, Regional Sharia Regulations, Reformation, Representative*

## DEMOKRASI DAN PERDA SYARIAT: KASUS SUKABUMI

### ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk membedah implementasi perda syariah di Sukabumi dalam perspektif demokrasi, dengan fokus utama pada representasi dan akuntabilitas. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perda bernuansa syariah ini dalam konteks demokrasi secara substantif cukup representatif. Karena masyarakat Sukabumi mewakili suatu kelompok Muslim yang mayoritas. Kendati memiliki akuntabilitas rendah karena belum menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi penduduk sukabumi.

**KATA KUNCI:** Akuntabilitas, Demokrasi, Perda Syariah, Reformasi, Representatif

---

\*) Balai Diklat Keagamaan Bandung. Jl. Soekarno hatta No. 716 Bandung

\*\* Naskah diterima Oktober 2016, direvisi November 2016 dan disetujui untuk diterbitkan Juni 2017

## A. PENDAHULUAN

Terbukanya iklim demokratisasi yang lebih luas di Indonesia sebagai efek domino dari runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 dan memasuki era reformasi mengubah arah dan tatanan politik di Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu ciri mendasar adalah adanya desentralisasi yang lebih tegas untuk beberapa aspek pemerintahan dengan terbitnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya menyebut mengenai otonomi daerah<sup>2</sup>. Lain dari itu otonomi daerah juga dimaknai oleh sementara elemen masyarakat dan elit politik di wilayah tertentu sebagai celah yang menarik untuk membangun suatu moda pemerintahan yang dianggap lebih relevan dengan nuansa daerah masing-masing termasuk lahirnya kebijakan daerah bernuansa syariah baik dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang merupakan hasil kompromi legislatif dan eksekutif maupun berupa instruksi atau keputusan kepala daerah dan turunannya berupa surat edaran.

Sejak Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut digulirkan telah lahir banyak perda yang secara substantif bernuansa syariah. Ahir-ahir ini mengemuka kehendak pemerintah pusat untuk menertibkan beberapa perda yang disinyalir kontraproduktif dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>3</sup> Kehendak penghapusan inipun bukanlah tanpa rintangan. Sejumlah elemen masyarakat (Islam) bergerak mengkritisi kebijakan ini, baik pro maupun kontra.<sup>4</sup>

Dalam beberapa penelitian terdahulu temuan terhadap lahirnya perda bernuansa syariah ini tidak sepenuhnya positif. Alih-alih terwujudnya penegakan hukum dalam konteks agama (Islam) yang memberikan jaminan konstitusional bagi pelaksanaan ajaran agama, telah melahirkan perilaku diskriminatif terhadap beberapa objek

seperti kelompok minoritas dan perempuan.<sup>5</sup> Wasisto Raharjo Jati melihat implementasi perda bernuansa syariah ini juga lebih dalam perspektif sosial politik ketimbang sebagai upaya positivisasi syariah Islam dalam konteks Negara kebangsaan di Indonesia maupun sebagai upaya pribumisasi syariah.<sup>6</sup> Dalam pendekatan sosial politik menurutnya tampak karena adanya kontestasi antara nilai antara demokrasi yang didukung kalangan nasionalis dan Islam oleh kalangan islamis. Kontestasi tersebut sebenarnya sudah lama terjadi bahkan sudah semenjak Orde Lama. Jatuhnya pemerintahan otoritarian menjadi penguat Islam dalam melakukan momentum menegakkan syariah di Indonesia.<sup>7</sup>

Jati mengelaborasi lebih lanjut bahwa jika dibandingkan dengan penerapan syariah di negara mayoritas Muslim lainnya, penerapan syariah Indonesia justru merupakan sebetulnya konsensus elite politik. Hal ini cukup berbeda dengan negara Muslim lainnya yang memang penerapan syariah sendiri dilakukan secara *bottom up* karena mayoritas penduduknya secara umum mazhab Islam-nya homogen. Fenomena tersebut cukup berbeda dengan penerapan syariah di Indonesia yang selebihnya dilakukan secara *top-down* oleh kalangan elite. Setidaknya menurut Jati, terdapat tiga isu penting perihal implementasi perda syariah ini, yaitu: 1) kegagalan dalam aplikasi *good governance*, 2) diskriminasi terhadap minoritas dan 3) aliran keuangan untuk mendanai partai dalam level lokal. Isu pertama, kegagalan *good governance* sendiri dimaknai sebagai kegagalan pemerintah dalam mengupayakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat sehingga memicu akar rumput untuk menginisiasi timbulnya perda syariah. Kedua, dimaknai sebagai bentuk gelombang ekstrimisasi dan fundamentalisme baru dalam Islam yang menolak adanya multiinterpretasi dalam ajaran agama dan berusaha menerapkan ajaran Islam secara kontekstual. Akibatnya yang menjadi korban adalah wanita, nonmuslim, maupun Muslim sendiri yang tidak mempunyai pemahaman sama. Ketiga, pendanaan dan

---

<sup>1</sup> Nadirsyah Hosen. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate". *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 3 (2005): 419-440. Printed in the United Kingdom, 419.

<sup>2</sup> Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang Penghapusan Perda Bermasalah', Senin, 13 Juni 2016, di Istana Merdeka, Jakarta, setkab.go.id.

<sup>4</sup> MUI tak Setuju Penghapusan Perda Syariah' Khazanah, *Republika.co.id*, Rabu, 22 Juni 2016.; 'Menteri Tjahjo: Tak Ada Penghapusan Perda Syariat' *Tempo.co*, Kamis, 16 Juni 2016.

<sup>5</sup> Komnas Perempuan *ibid.*

<sup>6</sup> Wasisto Raharjo Jati. "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah". *Jurnal Al Manahij* 7, no. 2 (2013): 305-318.

<sup>7</sup> Jati, *ibid.*, 312

konsolidasi merupakan upaya politik pragmatis yang dilakukan oleh para elite politik dalam mendekati para tokoh Islam yang memiliki basis massa besar dan memiliki dana melimpah. Maka penerapan perda syariah sendiri merupakan dari bagian upaya *kongkalingkong* politik untuk menyenangkan para tokoh Muslim tersebut.<sup>8</sup>

Dalam kajian lainnya seperti dilakukan Suismanto di Tasikmalaya, disebutkan penerapan perda syariah tidak lebih dari upaya elite politik untuk melakukan pencitraan dan mengembalikan romantisme nuansa islami dalam masyarakat sebagai upaya pengalihan isu terhadap korupsi dalam pemerintahan. Oleh karena itulah, syariah kemudian menjadi alat politik canggih bagi kelompok kepentingan tertentu untuk melaksanakan agenda tertentu. Maka daripada memuat substansi untuk membina umat Islam di Indonesia agar sesuai dengan agama, perda syariah lebih layak digunakan sebagai alat kooptasi terhadap kepentingan tertentu. Perda syariah dalam pandangan Suimanto hanya ramai di ruang para penguasa daerah, namun menjadi sunyi ketika dihadapkan pada publik. Hingga saat ini, relevansinya masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat daerah yang memandang urgensi diundangkannya syariah.<sup>9</sup>

Lebih jauh menurut Suismanto, daripada memberi identitas syariah dalam produk perda yang secara riil, justru memberikan batasan-batasan pada masyarakat untuk beraktivitas. Nuansa kaku dan konservatif masih termaktub dalam substansi perda syariah yang nyata memberikan efek marginalisasi kepada pihak tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi proses legalisasi syariah tidak berlangsung dalam dua arah, namun searah untuk mengatur masyarakat dan tidak kepada pemimpin. Kepala daerah merasa tidak wajib menjalankan syariah karena kapasitasnya sebagai *ulul amri* yang menuntut kesetiaan warganya. Maka jika demikian, perda syariah merupakan gaya baru kepala daerah untuk berkuasa dengan memanfaatkan agama sebagai identitas kekuasaannya.<sup>10</sup>

Pengamatan serupa juga tampak dalam

---

<sup>8</sup> Jati, *ibid.* 312

<sup>9</sup> Suismanto. "Perda Syariah dan Problematikanya (Kasus di Tasikmalaya)". *Aplikasia*, Jurnal Ilmu-ilmu Agama 8, no. 1 Juni (2007): 30-42.

<sup>10</sup> Suismanto, *ibid.*

risalah Muhtada yang mensinyalir ada tiga persoalan dalam perda syariah.<sup>11</sup> Persoalan pertama menyangkut diskriminasi. Dengan mengutip Crouch (2009) Muhtada menyebutkan bahwa beberapa perda syariah terkesan mendiskriminasi perempuan dan kelompok-kelompok minoritas. Perda Propinsi Gorontalo No. 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat, misalnya, mendiskriminasi perempuan sebagai obyek peraturan. Pasal 6 perda tersebut menyebutkan bahwa perempuan dilarang berada di luar rumah tanpa muhrim antara jam 12 malam sampai jam 4 pagi (ayat 1). Pasal tersebut juga mewajibkan perempuan untuk berpakaian sopan di tempat umum (ayat 2). Aturan-aturan serupa tidak berlaku bagi laki-laki. Peraturan tentang larangan beraktivitas bagi penganut Ahmadiyah di beberapa daerah juga merupakan contoh dari adanya problem diskriminasi ini. Ini misalnya dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Sumatra Barat No. 17/2011, Peraturan Gubernur Jambi No. 27/2011, Peraturan Bupati Pandeglang No. 5/2011, dan Peraturan Bupati Bekasi No. 11/2011.

Persoalan kedua terkait kualitas peraturan daerah. Tidak sedikit di antara perda-perda tersebut yang pasal-pasalannya merupakan hasil "*copy-paste*" dari pasal-pasal serupa di undang-undang atau perda-perda sejenis. Ini dapat ditemukan, misalnya dalam kasus perda-perda zakat. Contohnya, bunyi Pasal 3 Perda Kota Padang Panjang No. 7/2008 serupa dengan bunyi Pasal 3 Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 31/2003, Pasal 2 Perda Kota Padang No. 2/2010, Pasal 2 Perda Kabupaten Purwakarta No. 3/2007, dan Pasal 2 Perda Kota Cimahi No. 2/2008. Bunyi Pasal 4 Perda Kota Padang Panjang No. 7/2008 juga memiliki kesamaan dengan bunyi Pasal 3 Perda Kabupaten Solok Selatan No. 18/2006, Pasal 3 Perda Kabupaten Solok Perda No. 13/2003, dan Pasal 3 Perda Kabupaten Sumedang No. 1/2011. Masih banyak contoh-contoh kemiripan antar pasal dalam perda-perda zakat. Hal serupa juga bisa ditemukan untuk perda-perda tentang Madrasah Diniyah, baca tulis Al-Quran, serta busana Muslim. Kemiripan-kemiripan pasal antar perda sejenis ini mengisyaratkan bahwa perda-perda tersebut disusun tanpa proses kajian yang mendalam. Para pengusul dan atau pengambil

---

<sup>11</sup> Muhtada, *op.cit.*, 7-8.

kebijakan tekesan hanya meng-copy kebijakan dari daerah lain tanpa mengkaji apakah peraturan tersebut benar-benar dibutuhkan serta bisa diterapkan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah setempat.<sup>12</sup>

Persoalan ketiga adalah persoalan implementasi perda syariah. Hingga kini, penerapan perda syariah masih menjadi tanda tanya besar. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sangat sedikit, jika malah belum ada, kajian yang efektif tentang penerapan perda syariah di Indonesia. Perda Madrasah Diniyah di beberapa tempat di Jawa Barat, misalnya, masih menyisakan persoalan implementatif setelah bertahun-tahun perda-perda tersebut disahkan. Demikian pula halnya dengan ketentuan menyertakan sertifikat baca tulis Al-Quran bagi siswa yang mau melanjutkan ke jenjang di atasnya. Ketentuan tersebut baru sampai pada tataran "hitam di atas putih", belum sampai pada tataran implementasi. Akhirnya, perda-perda tersebut hanya kuat di wacana, namun lemah di pelaksanaan.

Berangkat dari kondisi tersebut, yaitu kajian-kajian yang melihat perda syariah secara kritis dan cenderung problematik maka penting tampaknya untuk melakukan kajian baru, terutama dalam lokus yang lebih terbatas dan perspektif yang berbeda mengenai implementasi perda syariah.

Artikel ini fokus utamanya adalah mengenai perda syariah di Kabupaten Sukabumi dalam perspektif demokrasi. Sukabumi memiliki dua perda bernuansa syariah yang cukup kental. Perda nomor 11 tahun 2005 tentang penertiban minuman beralkohol dan perda nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan Zakat. Berangkat dari pernyataan dalam fokus permasalahan, maka pertanyaan dalam artikel ini adalah (1) Bagaimana kehadiran perda syariah di Sukabumi dalam konteks representasi demokrasi? (2) Bagaimana kehadiran perda syariah di Sukabumi dalam konteks akuntabilitas demokrasi?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif. Observasi dan wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa narasumber dalam kurun tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2016. Data penting yang diperoleh dalam bentuk

dokumen adalah salinan perda syariah di Kabupaten Sukabumi. Juga data-data lainnya dari Kemenag Kabupaten Sukabumi. Data-data yang diperoleh diolah secara kualitatif.

## B. KAJIAN TEORI

### Demokrasi

Ada tiga teori demokratisasi: *Pertama*, pendekatan prosedural yang melihat proses konsolidasi demokrasi sebagai efektivitas dan stabilitas fungsi institusi-institusi politik. Indikasi bahwa sebuah negara sudah mencapai tahap konsolidasi demokrasi adalah dengan "two turnover tests," yaitu ketika sudah terjadi pergantian kekuasaan dua kali kepada penguasa yang berbeda, secara damai melalui pemilu yang jujur dan adil.<sup>13</sup> Kabupaten Sukabumi pada saat perda ini digulirkan baru periode pertama di era reformasi. Namun semangat perubahan tampak sangat kuat yang dalam telaahan Mujani dan Lidle,<sup>14</sup> merupakan kewajaran sejarah. Umat Islam di Kabupaten Sukabumi di era orde baru kerap sekali merasa terpinggirkan bahkan terabaikan porsi mereka akibat kebijakan politik dewasa itu. Keadaan ini serupa dengan analisis Suhani di Timur tengah ketika melihat perjuangan Islamis dalam memperjuangkan kesejatan dirinya untuk berislam secara kaffah.<sup>15</sup>

*Kedua*, pendekatan elitis yang melihat indikasi dari suatu konsolidasi demokrasi berdasarkan perilaku politik dan interaksi antara aktor-aktor serta kelompok-kelompok sosial yang relevan yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam demokrasi yang sudah terkonsolidasi, dalam kacamata pendekatan ini, akan tercapai apabila aktor-aktor utama di atas sudah dapat menerima aturan main politik—desain institusi politik—dan mengikuti aturan main yang ada tersebut. Dalam kacamata teori-elit, kelompok elit memiliki posisi strategis bukan hanya secara empirik, melainkan juga secara normatif, sebab publik, atau massa tidak pernah memiliki komitmen yang konsisten terhadap suatu

---

<sup>13</sup>Ahmad Norma Permata, *Perda syariah Islam, rekayasa institusional dan masa depan demokrasi* (Institut für Politikwissenschaft Westfälische Wilhelms-Universität für Scharnhorstraße 100 48043 - Münster Deutschland), 7.

<sup>14</sup>R. William Liddle. "New Pattern of Islamic Politics in Democratic Indonesia." *Asia Program Special Report*, No. 10 (April 2003). [www.csi.edu/topics/pubs/asiarpt\\_110.pdf](http://www.csi.edu/topics/pubs/asiarpt_110.pdf).

<sup>15</sup>Emad El-Din Shahin, *Political Ascent: Contemporary Islamic Movements in North Africa* (Boulder: Westview Press, 1998).

---

<sup>12</sup> Lihat juga laporan Komnas Perempuan 2010.

persoalan. Sikap masyarakat cenderung pasif, cair dan berubah-ubah dalam menanggapi berbagai persoalan. Hal ini karena pada dasarnya massa tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan mengevaluasi perkembangan yang ada secara mendalam, dan hanya mencerpap informasi dari media atau dari lingkungan yang biasanya bersifat artifisial.<sup>16</sup>

*Ketiga*, pendekatan budaya politik yang menganggap demokrasi mencapai tahap yang mapan apabila nilai-nilai demokrasi sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Analisis Survey menjadi alat utama dalam memantau perkembangan yang ada. Permata, mengutip dari Almond dan Verba (1963), budaya sipil merupakan faktor penentu perkembangan dan stabilitas demokrasi. Ada tiga tahapan dalam perkembangan budaya sipil: pertama, parokhial, di mana masyarakat belum memiliki kesadaran diferensiasi sistem politik, yaitu ketika sistem politik masih belum bisa dibedakan dengan sistem agama atau sistem kultur yang lain; kedua, subjek, yaitu ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran defensiasi sistem politik serta aktif berpartisipasi dalam institusi dan proses politik namun belum memiliki kesadaran maupun keterlibatan dalam pembuatan sistem itu sendiri (*input side*).<sup>17</sup>

Menurut Permata, ada dua konsep yang biasanya dijadikan ukuran oleh para pemikir ilmu politik dalam melihat kualitas sebuah demokrasi, yang dalam konteks ini bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan sebuah proses demokratisasi. Pertama, nilai representasi (*representativeness*) melihat kualitas sebuah demokrasi diukur dari sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada mencerminkan aspirasi politik (*political preferences*) masyarakat atau konstituen. Definisi demokrasi seperti yang diajukan Powel (dalam Permata), adalah pemerintahan di tangan rakyat; sehingga tidak bisa tidak sebuah pemerintahan yang demokratis harus mencerminkan keinginan dari rakyat. Pemerintah adalah wakil-rakyat, dan tugas mereka adalah menjalankan apa yang dikehendaki rakyat.<sup>18</sup>

Parameter kedua dari keberhasilan sebuah proses demokratisasi, atau produk dari sebuah

sistem demokrasi yang baik adalah bahwa pemerintah yang ada harus akuntabel, dalam pengertian bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Dalam penjelasan Schumpeter (dalam Permata), demokrasi merupakan sistem politik dimana para pemegang kekuasaan mempertanggungjawabkan yang mereka lakukan kepada rakyatnya; rakyat akan menentukan penilaian mereka melalui pemilihan, pemerintah yang dianggap memenuhi kebutuhan akan didukung terus, sedangkan pemerintah yang terbukti gagal memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehilangan dukungan dan otomatis kehilangan posisi sebagai pengambil kebijakan.<sup>19</sup>

### Perda Syariah

Perda syariah dalam artikel ini seperti yang diungkapkan oleh Muhtada sebagai setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait, atau setidaknya dianggap terkait, dengan hukum atau norma-norma ke-Islaman". Menurut Muhtada, Definisi ini mengisyaratkan bahwa apa yang disebut dengan perda syariah ada kalanya terkait langsung dengan hukum Islam. Tetapi, ada pula yang sesungguhnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan hukum Islam.<sup>20</sup>

Fokus permasalahan yang diatur dalam peraturan bernuansa syariah cukup beragam. Ditinjau dari kategorisasinya, meliputi perda syariah tentang moralitas, perda mengatur soal zakat, perda terkait dengan keimanan Islam, perda terkait dengan keuangan Islam, perda terkait dengan pendidikan Islam, perda terkait dengan busana Muslim, serta perda terkait dengan aturan-aturan di luar keenam hal di atas. Urutan inimenunjukkan representasi jumlah kategori seperti yang ditunjukkan Muhtada,<sup>21</sup> dalam tabel berikut.

---

<sup>19</sup>Ibid, 10.

<sup>20</sup> Dani Muhtada. "Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem, dan Tantangannya". Makalah dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang, 2.

<sup>21</sup>Ibid., 3

<sup>16</sup> Permata. *Loc.cit.*, 7.

<sup>17</sup> Ibid, 7.

<sup>18</sup> Ibid, 9.

Tabel 1. Kategorisasi dan Jumlah Perda Syariah

No.	Kategori Perda	Jumlah	Persentase
1	Moralitas	170	40
2	Zakat	62	15
3	Keimanan	59	14
4	Keuangan Islam	39	9
5	Pendidikan Islam	27	6
6	Busana Muslim	25	6
7	Lainnya	40	10
	Jumlah	422	100

Sumber: Dani Muhtada (2014)

Perkembangan peraturan bernuansa syariah dalam telaahan Muhtada menunjukkan pola penyebaran vertikal dan horizontal.<sup>22</sup> Penyebaran vertikal merujuk pada penyebaran perda syariah dari level nasional ke level provinsi, kabupaten, dan kota. Atau sebaliknya, dari level kabupaten dan kota, naik ke level provinsi atau nasional. Ini misalnya tampak pada pola penyebaran perda zakat. Perda-perda zakat di Indonesia muncul setelah diundangkannya UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Setelah undang-undang ini muncul, berbagai macam perda tentang zakat pun turut bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Perda zakat muncul pertama kali di Kota Cilegon pada tahun 2001, kemudian menyebar ke lebih dari 61 wilayah pemerintah daerah di 20 provinsi pada tahun 2012. Perda-perda zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini pada umumnya berisi “penyempurnaan” terhadap berbagai klausul yang dimuat dalam UU No. 38/1999.

Menurut Muhtada ada tiga “penyempurnaan” *content* yang dibawa oleh perda-perda zakat tersebut. Pertama, penguatan lembaga-lembaga zakat yang disponsori oleh pemerintah. Hampir semua perda zakat mengisyaratkan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk dana operasional bagi Badan Amil Zakat. Klausul yang menyebutkan dukungan serupa tidak ditemukan dalam UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Kedua, penguatan akuntabilitas pengelolaan zakat. Dalam UU No. 38/1999, Badan Amil Zakat diwajibkan memberikan laporan tahunan kepada DPR atau DPRD sesuai dengan tingkatannya (Pasal 19). Dalam perda-perda zakat, kewajiban memberikan

laporan ini diperluas, tidak hanya kepada badan legislatif (DPRD), namun juga eksekutif (Bupati atau Walikota). Ketiga, penguatan sanksi bagi pelanggar ketentuan undang-undang terkait zakat. Dalam UU No. 38/1999, sanksi bagi pelanggar ketentuan adalah kurungan tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tiga juta rupiah. Dalam beberapa perda zakat yang dikeluarkan pemerintah daerah, ketentuan tentang denda diperberat hingga tiga puluh juta rupiah, seperti tampak dalam perda zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi (Perda No. 2/2008) dan Kabupaten Purwakarta (Perda No. 3/2007). Menariknya, berbagai penyempurnaan yang dilakukan oleh perda-perda zakat di level kota dan kabupaten ini kemudian diakomodasi dalam undang-undang zakat yang baru (UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini artinya, proses penyebaran vertikal perda zakat berangkat dari level pemerintahan di tingkat nasional ke daerah, kemudian balik lagi ke atas dari level pemerintahan daerah ke level pemerintahan nasional.

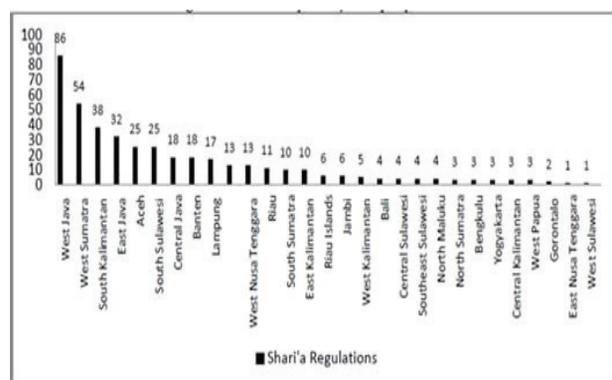
Selain penyebaran vertikal, penyebaran perda syariah di Indonesia juga menunjukkan pola horizontal. Artinya, perda syariah menyebar secara horizontal dari satu kabupaten atau kota ke kabupaten atau kota lainnya. Kasus ini tampak misalnya pada penyebaran perda tentang Madrasah Diniyah. Tidak seperti perda zakat, yang berangkat dari kemunculan regulasi serupa di level nasional, perda Madrasah Diniyah berangkat dari ketiadaan regulasi di tingkat nasional yang secara khusus mengatur tentang Madrasah Diniyah. Perda ini dimunculkan oleh beberapa pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam bagi siswa didik di wilayah bersangkutan, sekaligus memperkuat eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan agama informal di tengah masyarakat. Di Jawa Barat, misalnya, peraturan daerah tentang Madrasah Diniyah pertama kali muncul di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2001, lalu menyebar secara horizontal ke 15 kabupaten dan kota di Jawa Barat, seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Dalam pengamatan Muhtada, Jawa Barat dalam skala Nasional menempati urutan pertama sebagai daerah yang produktif menerbitkan

<sup>22</sup> *ibid.*, 4.

peraturan bernuansa syariah yang berjumlah 86.<sup>23</sup>

Tabel 2. Penyebaran dan jumlah perda syariah



Sumber: Dani Muhtada (2014)

Jumlah yang spektakuler itu jelas menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam membingkai tatanan berkehidupan di wilayahnya ada dalam kerangka syariah sebagai wujud implementasi Islam yang totalitas.

### Sukabumi dan Penerapan Perda Bernuansa Syariah

Kabupaten Sukabumi adalah wilayah di Barat Daya Jawa Barat dengan luas 3.934,47 km<sup>2</sup> meliputi areal dataran tinggi dan pantai dimana sebelah selatan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.<sup>24</sup> Dari segi komposisi jumlah penduduk yang pada tahun 2014 tercatat 2.438.389 jiwa,<sup>25</sup> mayoritas adalah Islam. Dari segi warna keorganisasian dan saluran politik, umat Islam Sukabumi telah lama memperlihatkan minatnya yang besar pada dimensi keislaman. Dimasa orde baru berkuasa misalnya, aspirasi politik umat Islam ada dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai wadah aspirasi politik umat Islam dewasa itu, dan selalu tampil sebagai pemenang urutan kedua setelah kekuatan orde baru.

Di era reformasi, saat pemilu pertama digelar pasca kejatuhan orde baru nuansa keislaman

juga tampak menemukan ruangnya yang lebih terbuka. Ini ditandai dengan pemenangan pasangan kepala daerah yang diusung oleh partai berorientasi Islam. Demikian pula dalam pemilihan umum kepala daerah berikutnya. Meskipun belum menjadi ukuran final terhadap keberpihakan umat Islam Sukabumi terhadap syariah, namun fenomena ini dapat dibaca masih antusiasnya umat Islam Sukabumi terhadap kewibawaan penegakan syariah sebagai manifestasi keberislaman.<sup>26</sup>

Di masa awal kemerdekaan Indonesia, ulama dan umat Islam di Sukabumi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam dinamika politik Nasional. Ketokohan K.H. Ahmad Sanusi untuk umat Islam Sukabumi tidaklah diragukan lagi kapasitasnya termasuk kiprahnya dalam pergerakan. Nama tersebut lebih dikenal dengan Ajengan Cantayan atau Ajengan Genteng atau Ajengan Gunung Puyuh. Cantayan adalah nama daerah tempat pesantren dimana K.H. Ahmad Sanusi mengemban amanah risalah dakwah sebelum pindah ke Genteng dan Gunung Puyuh.<sup>27</sup> Jadi untuk wilayah Sukabumi seperti halnya di daerah Priangan nama tokoh agama yang memiliki pesantren dan disebut ajengan lebih sering disebutkan nama daerahnya *ketimbang* namanya sendiri. Hal ini tampaknya untuk menghormati ketokohan yang dimaksud karena untuk menyebut nama adalah *pamali* (tabu) atau kurang sopan.

Kharisma K.H. Ahmad Sanusi bekasnya masih terasa sampai masa kini. Jejak perjuangannya dalam bentuk pesantren dan pemikirannya tentang Islam dapat terlihat dalam kiprah generasi penerusnya terutama di Gunung Puyuh. Bahkan pada tahun 2012 seminar tentang usulan penetapan K.H. Ahmad Sanusi sebagai pahlawan nasional telah dilakukan sekaligus sebagai pemantapan *draft* usulan tersebut kepada pemerintah dengan kajian utama dari Nina Herlina Lubis sejarawan Universitas Padjadjaran.

Namun demikian, dalam pengamatan penulis, bagi umat Islam Sukabumi kharisma kyai

<sup>23</sup>Ibid., 3; Lihat dan bandingkan dengan laporan Komnas Perempuan tahun 2010 *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia* tentang peraturan daerah yang diskriminatif.

<sup>24</sup> <http://sukabumikab.go.id/home/page.php?id=7&q=Letak-Geografis>

<sup>25</sup> Data dari disdukcapil Sukabumi <http://www.dukcapilkabsukabumi.org/> diunduh tanggal 14 Maret 2016.

<sup>26</sup> Pemilukada tahun 2015 di Sukabumi dimenangkan oleh dukungan partai nasionalis. Pada kali tersebut simbol Islam tidak tampak cukup kuat untuk menggiring kemenangan pemilu.

<sup>27</sup> Muhammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2001), 87.

atau tokoh agama Islam relatif merata. Artinya tidak hanya terpusat pada salah satu pesantren seperti Gunung Puyuh. Pesantren lainpun memiliki kharisma setara seperti al Masturiyah di Cisaat. Atau Asy-Syafi'iyah di Sukalarang. Bahkan banyak juga mereka yang menjadi santri dari Ajengan Jambudipa Cianjur.<sup>28</sup>

Nama-nama pesantren yang disebutkan di atas adalah mereka yang dapat dikatakan sebagai pesantren-pesantren yang telah cukup tua kiprahnya di Sukabumi. Di masa sekarang memang semakin tumbuh pola pesantren yang akomodatif dengan kemajuan zaman. Pesantren-pesantren baru bermunculan seperti di Renged Kadudampit, di Cibadak atau di Kabandungan dengan pola terpadu. Dan pesantren-pesantren bersejarah itupun turut beradaptasi dengan tuntutan masa sekarang sebagai upaya memelihara eksistensi dalam jalur dakwah maupun pendidikan.<sup>29</sup>

Pergerakan keagamaan di Sukabumi sendiri cukup dinamis. Dan Ulama di Sukabumi melihat hal tersebut sebagai bagian dari *fastabikul khoiroh*. Sejak masa pra kemerdekaan dinamika itu sudah tampak. Jika di Majalengka ada K.H. Abdul Halim yang dianggap peletak dasar modernisasi pendidikan pesantren di Jawa Barat maka sesungguhnya dalam irisan waktu yang sama di Sukabumi Ajengan Cantayan pun melakukan pola yang sama, yakni membentuk sistem kelas untuk para santrinya dan bertempat di Genteng.<sup>30</sup> Namun dalam pengamatan Iskandar K.H. Ahmad Sanusi dianggap lebih tradisional dibanding K.H. Abdul Halim dalam soal penggunaan sumber pengajaran yang hanya menggunakan kitab-kitab kuning klasik. Selain modernisasi pesantren, kyai di Sukabumi juga ada yang berjuang melalui jalur '*amali*', seperti K.H. Muhammad Basuni dari Cipoho yang menjadi ketua paguyuban pertanian dan perdagangan dan bergerak dalam wadah *Al Ittihadiyah Islamiyah* (AII).<sup>31</sup>

Atas keadaan itu maka tampak bahwa terdapat hubungan yang erat antara kyai dengan

masyarakat muslim di Sukabumi karena mereka para kyai tidak hanya berkutat dalam persoalan-persoalan agama yang abstrak melainkan juga yang aplikatif dengan kehidupan masyarakatnya yang cenderung bertani. Tidak mengherankan jika kedekatan ini membuahkan hubungan yang solid baik mereka yang pernah menjadi muridnya dengan cara nyantri ataupun tidak. Dalam kurun tertentu apapun yang dikatakan kyai akan didengar dan diikuti oleh masyarakat sebagai bentuk ketaatan atas pemimpin agama. Bahkan ketika kyainya sudah tidak berada ditempat, seperti kasus K.H. Ahmad Sanusi yang pernah dibuang oleh pemerintah kolonial ke *Batavia Centrum*, namun ketika kyai mengkritik kebijakan pemerintah terkait zakat yang harus disetor secara vertikal dan dianggap menyalahi syariat oleh K.H. Ahmad Sanusi difatwakan haram, maka banyak masyarakat yang enggan menyetorkan zakatnya melalui *amil* yang dibentuk pemerintah.<sup>32</sup>

Dinamika kyai dalam politik juga tampak. Rupanya sudah ada garis sejarah sejak K.H. Ahmad Sanusi berbeda pendapat dengan Kyai Iyek dari Pabuaran yang menjadi Kyai Kaum. K.H. Ahmad Sanusi berbeda pendapat mengenai selamatan kematian yang dilaksanakan tiga hari, menurutnya itu makruh dan cenderung haram, sementara Kyai Iyek berpendapat sah saja karena itu sidkah. Konon pernah dipertemukan dalam diskusi terbuka oleh pemerintah dan kesepakatannya adalah K.H. Ahmad Sanusi menerima jika itu benar-benar *sidkah* dan tidak memberatkan keluarga yang ditinggal mati. Namun menurut Iskandar persoalan sesungguhnya bukan Karena perbedaan pendapat dalam selamatan, namun karena K.H. Ahmad Sanusi yang pernah menjadi tokoh Syarikat Islam fatwa-fatwanya banyak dijadikan rujukan oleh murid-muridnya yang masih aktif di SI dan menggerakkan penguasa waktu itu. Sehingga setiap pengajian K.H. Ahmad Sanusi selalu dihadiri oleh polisi.<sup>33</sup>

Satu hal yang menarik dalam dinamika Islam dan Kyai di Sukabumi adalah meskipun memperlihatkan pola hubungan yang kadang dalam satu sisi begitu tajam namun dalam hal kesepakatan untuk mendukung pemerintahan

---

<sup>28</sup>Kyai yang menjadi narasumber dalam wawancara menyebutkan pilar-pilar utama (pesantren) dalam penyebaran Islam di Sukabumi dan Cianjur.

<sup>29</sup>Wawancara dengan unsur Pontren Kemenag Kab. Sukabumi (26 Februari 2016) dan data Pendidikan Islam Kabupaten Sukabumi.

<sup>30</sup>Iskandar, *ibid.* 121.

<sup>31</sup>*Ibid.* 117.

---

<sup>32</sup>*Ibid.* 119.

<sup>33</sup>*Ibid.*

yang sah dalam konteks keindonesiaan mereka sepekat. Pernah muncul dugaan bahwa Kyai Ahmad Sanusi akan *rendering* tidak suka berkompromi dengan pihak Nasionalisme, namun kenyataannya tidak demikian. Meskipun pernah disuarakan untuk membentuk partai sendiri bercirikan AII namun gagasan ini ditolak dalam kongres ke-empat di Cianjur. Pemikiran Kyai Ahmad Sanusi adalah umat Islam jangan sampai terpecah, karena masa itu sudah banyak partai benuansa Islam, dan banyak anggota atau partisan AII yang juga aktif di PNI. Hal ini pula yang meyakinkan umat Islam Sukabumi dan sementara Kyai di Sukabumi yang tidak mendukung atas makar yang dilakukan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan Darul Islam-nya.<sup>34</sup>

Dinamika Islam di Sukabumi ini sampai sekarang tampak terbuka. Sukabumi relatif terbuka dengan gerakan-gerakan keislaman. Ketika reformasi berlangsung, tampak dimanfaatkan oleh elemen-elemen masyarakat Islam Sukabumi untuk menunjukkan gairahnya terhadap Islam. Aktifitas Jemaah Tabligh (*Khuruj*) tampak mengemuka yang berpusat di Ciandam Sukabumi, dan mendapat dukungan kyai seperti dari Renged. Front Pembela Islam (FPI) juga terbentuk dengan segera mengikuti daerah lainnya. Gerakan Islam Reformis (Garis) juga hadir sebagai bagian dari Garis Cianjur. Demikian pula dengan Gabungan Organisasi Islam Bersatu (GOIB), hadir sebagai bagian dari kesempatan untuk membentuk organisasi yang bermuatan Islam. Hadirnya organisasi-organisasi ini terutama yang baru nampak sebagai respon atas peluang demokrasi di era reformasi selain sebagai kompensasi yang di masa orde baru organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan cenderung nasionalis seperti KNPI, Pemuda Pancasila, Kosgoro atau lainnya sebagai *underbow* Golkar.<sup>35</sup>

Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari geliat pembangunan dan kemajuan teknologi seperti halnya daerah lain di Jawa Barat tidak luput dari pengaruh buruk yang menjadi dampak

ikutannya sebuah perubahan. Ketika upaya pembangunan sumberdaya manusia digalakan dengan membangun sekolah-sekolah inpres (Instruksi Presiden) anak-anak di Sukabumi orientasi belajarnya berubah dari pesantren ke sekolah. Perubahan orientasi belajar inipun dipengaruhi oleh kondisi umum perekonomian dan sosial budaya di Sukabumi. Jika sampai tahun 80-an pengaruh kaum santri (termasuk kyai) masih demikian kuat terasa ditandai misalnya dengan masih adanya kebanggaan pada orang-orang tua yang non kaum santri (petani atau pedagang) yang bermenentukan santri atau kyai. Namun seiring dengan pembangunan yang ditawarkan orde baru (meskipun terkesan tebang pilih) orientasi ini berubah. Orang-orang yang berlatar belakang non santri cenderung lebih senang bermenentukan mereka yang sama-sama pedagang atau Pegawai Negeri Sipil (guru) yang dikirim pemerintah pusat sebagai dampak kebijakan inpres.<sup>36</sup>

Perubahan orientasi inipun berpengaruh terhadap pola pencarian kerja angkatan muda, dari bertani ke industri. Gelombang urbanisasi sejak tahun 80-an menjadi magnet yang besar untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga. Sisi buruk dari aktifitas ini adalah masuknya informasi baru dan gaya hidup baru pada masyarakat Sukabumi. Jadi, tidak mengherankan jika kemudian anak-anak muda termasuk dari daerah pinggiran di Sukabumi mulai akrab dengan minuman beralkohol dan perilaku menyimpang lainnya.<sup>37</sup>

Dinamika orientasi angkatan muda dalam perkembangan sosial ekonomi beririsan juga dengan minat untuk mempertahankan identitas Islam dalam simbol-simbol bermasyarakat termasuk berpolitik. Jika di masa orde baru saluran aspirasi politik berada dalam PPP, maka di era reformasi pilihannya semakin terbuka. Hadirnya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang merupakan transformasi dari PK (Partai Keadilan) banyak dilirik angkatan muda yang mungkin menganggap kendaraan lama tidak lagi fleksibel dalam mewadahi kehadiran mereka yang cenderung mempertahankan angkatan tua.

---

<sup>34</sup>Ibid. juga dalam wawancara dengan beberapa pelaku sejarah di masa itu di daerah Pajampangan yang menyatakan bahwa Muslim di Sukabumi tidak pernah mendukung gerakan DI.

<sup>35</sup>Wawancara dengan aktifis organisasi tersebut, lihat juga Martin Van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), 265; Masad Masrur. "Sejarah Singkat Komite Nasional Pemuda Indonesia". *Tribun Manado*, Selasa, 23 Juli 2013.

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan narasumber tokoh di Sukabumi Selatan (26 Februari, 26 Maret 2016).

<sup>37</sup>Wawancara (konfirmasi) dengan narasumber angkatan muda (26 Maret 2016).

Pengalaman politik ini terlihat dalam tiga periode PKS mendominasi kemenangan kadernya dalam pemilu pada, kecuali pemilu pada tahun 2015 kemarin.<sup>38</sup>

Kondisi-kondisi ini barangkali bisa menjelaskan bagaimana konteks sosial budaya dan konteks politik di Sukabumi yang cenderung apresiatif dan bahkan proaktif dalam memanfaatkan peluang reformasi dengan demokrasi yang semakin terbuka untuk memasukkan unsur Islam dalam tatanan pemerintahan di Sukabumi.

### Substansi Perda Syariah di Sukabumi

Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 mengatur tentang penertiban minuman beralkohol. Dilihat dari semangat umum yang dapat diambil dari tujuan pengaturan penertiban minuman beralkohol, sejatinya perda ini dapat saja dikatakan sebagai perda yang tidak memiliki hubungan dengan penegakan syariah. Karena pada dasarnya dapat dikaitkan dengan regulasi lain mengenai perdagangan atau kesehatan maupun ketertiban umum misalnya, terutama melihat poin menimbang butir (a) yang menyatakan:

“bahwa Minuman Beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam berfikir, berperasaan dan berperilaku yang mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa serta mengganggu keamanan dan ketertiban yang menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan asusila, kekerasan dan kriminalitas.”<sup>39</sup>

Namun pada poin menimbang butir (b) nuansa syariah muncul bahwa diantara perlunya perda ini adalah mengakomodir aspirasi umat Islam yang berjumlah mayoritas mencapai 99,6 % dari seluruh penduduk Kabupaten Sukabumi.

“bahwa aspirasi umat dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi yang berpenduduk 99,6 % beragama Islam mendesak dilakukannya penertiban dan pengaturan

mengenai Amar Ma’ruf Nahyi Munkar, pemberantasan Munkarot dan kemaksiatan di Kabupaten Sukabumi.”<sup>40</sup>

Semangat yang terkandung dalam huruf (b) ini sangat kuat nuansa keberIslamannya. Selain dari menggunakan term-term agama Islam, juga dengan menunjukkan data bahwa umat Islam adalah mayoritas. Semangat ini menjadi aspirasi keberagaman sekaligus keprihatinan sosial atas maraknya peredaran Minuman Beralkohol yang dapat dengan mudah diperoleh bahkan sampai ke pelosok daerah. Lain dari itu, Kabupaten Sukabumi memiliki asset wisata alam yang menjadi destinasi pengunjung seperti Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Ujung Genteng serta Wisata alam pegunungan di kaki Gunung Gede Pangrango. Hadirnya pusat-pusat wisata ini menarik minat pihak tertentu untuk berjualan dan diantara yang mereka jual adalah minuman beralkohol. Selain di kawasan wisata, penjualan minuman beralkohol juga dapat ditemukan pada kios-kios jamu di pinggir jalan. Bahkan pada tahun 1985-an, minuman beralkohol hasil fermentasi dari anggur dijual keliling oleh pedagang jamu.<sup>41</sup>

Minuman beralkohol yang diatur dalam perda ini dijelaskan pada Bab II tentang penggolongan minuman beralkohol. Penggolongan ini tampak merujuk pada regulasi tentang perindustrian dan perdagangan, bahwa minuman beralkohol di bagi pada tiga golongan. Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % sampai dengan 5 %. Minuman beralkohol golongan B yaitu kandungan ethanolnya lebih dari 5 % sampai dengan 20 %. Sedangkan Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20 % sampai dengan 55 %. Selain minuman beralkohol hasil pabrikasi, juga disebutkan minuman beralkohol tradisional yang dibuat melalui proses sederhana, temporer dan turun temurun sejenis anggur yang kadar ethanol-nya paling tinggi 15 % dengan tujuan kesehatan dan pengobatan.

<sup>38</sup>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; lihat juga Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik...*265; tentang PKS lihat juga Ahmad Norma Permata ‘A Study of The Internal Dynamics of the Prosperous Justice Party and Jamaah tarbiyah’ dalam Kees Van Dijk and Nico J.G. Kaptein, *Islam, Politics and Change* (Leiden: University Press, 2016), 29-76

<sup>39</sup>Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang memuat Perda Nomor 11 Tahun 2005, 134.

<sup>40</sup>Ibid.

<sup>41</sup>Persitiwa ini penyusun saksikan sendiri diantara anggota keluarga dengan latar belakang petani, pada tahun-tahun tersebut sering mengkonsumsi anggur yang menjadi ‘obat’ bagi pekerja keras yang ditukar per gelas kecilnya dengan sebutir telur bebek. Hal serupa penyusun konfirmasi dengan narasumber yang diwawancara terkait peredaran minuman beralkohol di Sukabumi.

Perda Nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat nuansa syariah-nya lebih kuat, meski juga dapat dipahami sebagai respon atas lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat. Sebagai wujud keberpihakan pemerintah atas umat Islam terlihat dalam poin menimbang yang menyatakan:

- a. bahwa penunaian zakat merupakan salahsatu kewajiban umat Islam yang telah mencapai nisab dan haul dengan tujuan untuk membersihkan harta dan diri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- b. bahwa Kabupaten Sukabumi berpenduduk mayoritas beragama Islam (99,6%) yang memiliki potensi sangat besar untuk mengelola zakat, dan hal tersebut hanya akan optimal, berhasilguna dan berdaya guna serta memiliki nilai ibadah jika dikelola profesional dan bertanggungjawab sesuai ajaran Islam<sup>42</sup>

Pada huruf (a) tertulis bahwa salahsatu tujuan penunaian dan pengelolaan zakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Namun demikian, sejatinya hal ini hanya akan berpusat pada umat Islam saja, Karena seperti dijelaskan dalam Bab IV tentang mustahiq, pada pasal 5 memuat delapan asnaf sesuai dengan ketentuan syara (fiqih). Jadi, konteks perda ini hanya untuk umat Islam di Kabupaten Sukabumi. Persis seperti pernyataan Bab III tentang muzaki yang pada pasal 4 butir (1) tentang amar kepada muzaki bahwa setiap muzaki wajib mengeluarkan zakat di daerah. Sebagai konsekwensi kewajiban ini pada Bab VII tentang sanksi, pasal 16 poin (3) dijelaskan bahwa setiap muzaki yang tidak menyerahkan zakatnya dengan sukarela maka BAZ dapat memaksa muzaki tersebut untuk menyerahkan zakatnya.<sup>43</sup>

Sebagai operasionalisasi dari tujuan pengelolaan potensi zakat tersebut, dalam perda ini ditentukan struktur kelembagaan pengelola zakat yang disebut Badan Amil Zakat seperti dijelaskan pada Bab V. BAZ menjadi satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Jika ada elemen masyarakat yang membentuk lembaga serupa (LAZ) maka dalam

---

<sup>42</sup>Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang memuat Perda Nomor 12 Tahun 2005, 144.

<sup>43</sup>Ibid., 154.

perda ini diwajibkan untuk memperoleh izin operasional dari Bupati atau jika izin operasional belum diperoleh, harus berkoordinasi dengan BAZ.<sup>44</sup>

### **Penerapan Perda Syariah di Sukabumi Perspektif Demokratisasi**

Memahami kesan keberpihakan pemerintah atas mayoritas dalam hal ini umat Islam nampaknya dapat dikaji dalam perspektif demokrasi. Demokrasi telah menunjukkan watak dasarnya ketika suara mayoritas memiliki posisi yang dominan dalam penetapan sebuah keputusan.<sup>45</sup> Demikian pula halnya dalam pengaruh aspirasi umat terhadap lahirnya perda.<sup>46</sup> Bahwa umat Islam telah menjadi bagian dari *pressure group* tampak dalam proses perizinan bagi pihak tertentu yang ingin menjual minuman beralkohol diantaranya harus mendapat persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi. Lain dari itu seperti dilansir media lokal, beberapa kelompok ormas Islam di Sukabumi kerap mendesak ke DPRD untuk segera mengesahkan perda-perda yang secara substansial beririsan dengan semangat *nahi munkar*.<sup>47</sup>

Sebagaimana diungkapkan di teori, bahwa untuk mengukur mutu hasil demokratisasi ada pada dua hal. Pertama, nilai representasi dan parameter kedua dari keberhasilan sebuah proses demokratisasi (akuntabilitas). Dengan dua parameter tersebut tampak bahwa perda bernuansa syariah di Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat *representativeness* yang cukup kuat. Ini ditandai dengan jumlah umat Islam di Sukabumi yang mayoritas dan dinyatakan langsung dalam isi perda. *Pressure group* yang menjadi saluran aspirasi umat Islam juga tampak aktif dalam memberikan dorongan kepada pemerintah maupun legislatif pentingnya kehadiran perda sebagai upaya legislasi normatif kepedulian pemerintah dan warga untuk

---

<sup>44</sup>Ibid., 149; lihat juga 'MUI Sukabumi Desak Perda Kekerasan Seksual Disahkan'. Khazanah. *Republika.co.id.*, Sabtu, 18 Juni 2016.

<sup>45</sup> Lihat Luca Ozzano. "Religious Fundamentalism and Democracy". *Journal Politics and Religion* 1/III/ (2009): 127-153.

<sup>46</sup> Jennifer L. Epley. "Development Issues and The Role of Religious Organizations In Indonesia". *Studies on Asia*, series II, vol. 1, num. 1. 39-52.

<sup>47</sup>Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang memuat Perda Nomor 12 Tahun 2005., 138

menegakan syariah sebagai tatanan pemerintahan.<sup>48</sup> Selain dukungan-dukungan kultural demikian, representasi ini juga didukung oleh struktur program yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dalam rencana pembangunan pemerintah daerah nuansa syariah cukup kental.<sup>49</sup>

Rumusan visi Kabupaten Sukabumi misalnya dengan berlandaskan pada capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2010 – 2015 yang lalu adalah “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Berakhlak Mulia, Maju, dan Sejahtera”. Penjelasan dari konsep-konsep visi ini menarik untuk dicermati, karena merujuk pada doktrin Islam. Akhlak Mulia merupakan kualitas sumber daya manusia dengan perilaku tertinggi dan terhormat, yang merujuk pada suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang memiliki 4 (empat) sifat utama yaitu: (1) Shiddiq yang berarti Jujur (2) Amanah yang berarti Dapat Dipercaya (3) Fathonah yang berarti Cerdas (4) Tabligh yang berarti Menyampaikan/Mentransformasikan.<sup>50</sup>

Dengan pencapaian kualitas perilaku tertinggi dan terhormat tersebut, diharapkan masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Sukabumi dapat mewujudkan kesatuan gerak langkah sehingga terwujud masyarakat yang berakhlak mulia, yaitu masyarakat yang berperilaku lurus dan jujur, saling percaya, cerdas, dan saling mengingatkan untuk berlomba dalam kebaikan dan kemajuan.

Maju, merupakan proses melangkah / bergerak ke muka, menuju keadaan yang lebih baik, lebih produktif, lebih menghasilkan, dan

lebih memberikan nilai tambah. Maju dimulai dari dalam, dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional sehingga pemerintah menjadi yang terdepan dalam memajukan masyarakat Kabupaten Sukabumi, guna mencapai dan berada pada tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Sejahtera, adalah kondisi masyarakat dimana tercipta rasa aman, sentosa, dan makmur, tercukupi kebutuhan hidup baik lahir maupun batin. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maju, dan sejahtera tidak hanya membangun generasi sekarang dan generasi yang akan datang, namun juga menyiapkan diri sebagai bekal manakala kembali ke haribaan Ilaahi nanti.

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada (tiga) Misi utama yang akan dijalankan, yaitu: (1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia (2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berkemampuan Memajukan Masyarakat (3) Membangun Perekonomian yang Tangguh, Berbasis Potensi Lokal, dan Berwawasan Lingkungan.<sup>51</sup>

Dalam mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki, mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang masih ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan, untuk mencapai Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Berakhlak Mulia, Maju, dan Sejahtera, maka rumusan tiga Misi Kabupaten Sukabumi ditetapkan dalam tujuan operasional yaitu :

**Misi pertama** ‘Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia,’ bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas perilaku serta membangun kembali modal sosial masyarakat
2. Meningkatkan akses layanan dan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan akses layanan dan derajat kesehatan
4. Mengendalikan perkembangan penduduk, menanggulangi kemiskinan, dan pengangguran
5. Membangun etos kerja yang produktif berlandaskan IMTAQ dan menguasai IPTEK<sup>52</sup>

**Misi kedua** ‘Mewujudkan Tata Kelola

---

<sup>48</sup>Tampaknya jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi yang mayoritas Muslim serta aktif mendorong DPRD untuk mengesahkan perda bernuansa syariah menjadi faktor dominan. Karena komposisi anggota DPRD menunjukkan partai Islam tidak mendominasi secara mutlak. Komposisi periode 2014 -2019 seperti tercantum dalam laman <http://dprd-sukabumikab.go.id/daftar-anggota-dprd/> sebagai berikut: Golkar 8 kursi, PDIP 7 kursi, PKS 6 kursi, PAN 6 kursi, Gerindra 5 kursi, PKB 4 kursi, Demokrat 4 kursi, PPP 4 kursi, Hanura 4 kursi dan Nasdem 2 kursi. Jadi, hadirnya perda bernuansa syariah tentu bukan hanya inisiasi dari partai Islam melainkan juga buah dari lobi politik dengan partai nasionalis.

<sup>49</sup>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025.; lihat juga ‘Perda di Kota Sukabumi Efektif Turunkan Peredaran Miras’. *Khazanah*. Republika.co.id. Kamis, 02 Juni 2016.

<sup>50</sup>Rencana Pembangunan ...ibid.

<sup>51</sup>Ibid.

<sup>52</sup>Ibid.

Pemerintahan yang Bersih dan Berkemampuan Memajukan Masyarakat,' bertujuan:

1. Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
3. Memajukan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan<sup>53</sup>

**Misi ketiga** 'Membangun Perekonomian yang Tangguh, Berbasis Potensi Lokal, dan Berwawasan Lingkungan,' bertujuan:

1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan lembaga keuangan mikro
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan<sup>54</sup>

Meskipun dinilai cukup representatif, perda syariah di Kabupaten Sukabumi masih menyisakan persoalan pada aspek akuntabilitas. Munculnya analisis yang meragukan aspek legalitas dari perda itu sendiri ketika diperhadapkan dengan regulasi lebih tinggi serta munculnya dampak diskriminatif dalam tataran implementasi menjadi sandungan bagi perda ini. Dalam perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengaturan minuman beralkohol yang kemudian diperkuat dengan perda Nomor 7 Tahun 2015, masih dapat dilihat adanya "pelanggaran" dari elemen masyarakat Kabupaten Sukabumi sendiri. Boleh jadi perda ini belum tersosialisasi dengan baik, atau ada tantangan lain dari *setting* sosial ekonomi yang "memaksa" sebagian warga untuk "melanggar" dengan tetap menyediakan minuman beralkohol tanpa melalui prosedur perizinan yang ditetapkan dalam perda tersebut.<sup>55</sup>

Demikian pula dengan akuntabilitas perda nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat

yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Sukabumi No 17 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat<sup>56</sup> meskipun dalam laporan dan pemberitaan di media ada kecenderungan tiap tahunnya menunjukkan peningkatan jumlah dana zakat yang dihimpun,<sup>57</sup> namun dana itu masih sebagian besar masih bersumber dari elemen PNS di lingkungan Kabupaten Sukabumi. Kenyataan ini bisa dibaca bahwa dimensi pembayaran zakat oleh warga melalui BAZ masih rendah. PNS yang mengeluarkan zakat langsung melalui BAZ lebih dikarenakan adanya kebijakan pemotongan langsung, meski tidak menutup kemungkinan bahwa diantara mereka ada juga atas kesadaran sebagai Muslim yang taat. Namun sebagai bentuk kesadaran ini sesungguhnya ada banyak saluran yang dapat dipilih, selain melalui BAZ juga dapat melalui LAZ atau mereka cenderung mengeluarkan langsung kepada mustahik.<sup>58</sup> Adanya fenomena terakhir ini tidak lepas dari pemahaman fiqh yang berkembang di masyarakat terutama pengaruh dari kyai-kyai yang ada di Sukabumi. Seperti dalam konteks sejarah di masa lalu Sukabumi perbedaan pandangan ini telah memiliki dasar yang primordial.

Aspek rendahnya akuntabilitas juga dapat dilihat dari adanya poin-poin tertentu yang secara hukum berseberangan dengan regulasi lebih tinggi. Sehingga dalam tataran implementasi akan menyulitkan untuk adanya eksekusi dan tindakan hukum. Hal ini seperti terlihat dalam Bab VII tentang sanksi, pasal 16 poin (3) dijelaskan bahwa setiap muzaki yang tidak menyerahkan zakatnya dengan sukarela maka BAZ dapat memaksa muzaki tersebut untuk menyerahkan zakatnya. Pasal seperti ini tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan mengalami kesulitan karena tidak adanya dukungan hukum yang kuat serta penjelasan teknis tentang ini menjadi bias.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> <http://www.bidikusantara.com/2015/12/satpol-pp-kabupaten-sukabumi-bersama.html>. Lihat juga <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/09/ngbgrs-peracik-dan-penjual-miras-oplosan-diancam-penjara-seumur-hidup>.

<sup>56</sup> <http://www.kabsukabumi.baznas.go.id/hal-landasan-hukum.html#ixzz42qaM8LFK>

<sup>57</sup> <http://radarsukabumi.com/2015/07/03/zakat-2015-naik-rp-55-miliar/>

<sup>58</sup> Wawancara dengan salah seorang pegawai Kecamatan Curugkembang (25 Maret 2016), yang secara pribadi mengeluarkan lagi zakatnya disamping telah dipotong langsung oleh bendahara untuk zakat penghasilannya sebagai PNS.

Maka, boleh jadi bentuk pemaksaan yang dapat dilakukan hanya baru pada kelompok PNS di lingkungan Kabupaten Sukabumi, namun akan berbeda dengan masyarakat yang lebih luas.<sup>59</sup>

Kenyataan bahwa perda syariah di satu sisi memiliki tingkat *representativeness* yang relatif tinggi, dalam pengertian bahwa ia mencerminkan aspirasi politik banyak kalangan Muslim, terutama sejauh menyangkut pertanyaan hubungan antara agama dan negara, ataupun penerapan aturan agama oleh aparat negara.<sup>60</sup> Di sisi lain, perda syariah memiliki tingkat akuntabilitas rendah dalam pengertian tidak menyentuh hal-hal yang dianggap penting dan mendesak oleh masyarakat, senada dengan kesimpulan Permata.<sup>61</sup> Namun juga menunjukkan keberbedaan dengan sementara hasil analisis dalam perspektif hukum dan HAM yang menuding perda syariah lebih merupakan komoditas politik yang dilakukan elit politik tertentu, serta menolak tesis Susimanto yang melihat perda syariah sebagai upaya legalisasi agama (Islam) sebagai landasan pemerintahan yang merupakan kelanjutan dari formalisme syariah yang dilakukan Darul Islam.

### C. PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi dalam konteks perda syariah di Kabupaten Sukabumi sebagai berikut: Pertama, perda syariah di Kabupaten Sukabumi dalam perspektif demokratisasi menunjukkan keadaan yang representatif. Sebagai dampak dari mayoritasnya umat Islam yang ada di sana. Penerapan perda bernuansa syariah ini dapat dikatakan memiliki dukungan moral yang kuat baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural adalah sebagaimana diulas di atas, ada desakan yang kuat dari elemen masyarakat Muslim Sukabumi yang mengharapkan ada tatanan hukum positif yang mendukung terhadap aktifitas keislaman. Hal ini dapat dimaklumi bahwa penduduk Sukabumi mayoritas Muslim. Secara struktural adalah

adanya peraturan atau kebijakan teknis dari Bupati yang menjadi alat pelaksanaan perda tersebut. Demikian pula dapat terlihat dalam visi dan misi Kabupaten Sukabumi yang memiliki semangat Islam dalam narasinya.

Kedua, implementasi perda syariah di Kabupaten Sukabumi dari sisi akuntabilitas masih rendah. Karena masih adanya pola-pola pelanggaran atas perda yang juga penyebabnya adalah *setting* sosial ekonomi di Kabupaten Sukabumi yang masuk dalam geliat perubahan ekonomi yang lebih luas. Pun demikian dalam persoalan implementasi perda zakat, karena masih adanya perbedaan cara pandang umat Islam Sukabumi secara fiqih yang merupakan buah dari pengaruh perbedaan pemikiran Kyai setempat.

Kesimpulan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa dalam kerangka demokrasi, formalisme syariah perlu didukung oleh kajian-kajian yang lebih faktual sehingga peraturan bernuansa syariah bukan hanya mengedepankan formalisme dalam etika dan peribadatan, namun juga menjawab problem nyata umat Islam yang banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan sosial ekonomi. Sehingga perda tersebut bukan hanya representatif melainkan juga akuntabel dari sisi substansi. Kajian ini masih terbatas dan sederhana, sehingga membuka peluang untuk dilakukan kajian-kajian berikutnya baik dari sisi gerakan politik Islam, maupun politik identitas Islam pasca reformasi.[]

---

<sup>59</sup> Kesulitan ini juga diungkapkan oleh salah seorang fungsionaris PLZIS Pelabuhanratu dalam wawancara tanggal 24 Maret 2016.

<sup>60</sup> John Anderson. "Does God matter, and if so Whose God? Religion and democratization". Dalam Jeffrey Haynes, *Religion and Politics* (London and New York: Routledge, 2009), 203.

<sup>61</sup> Permata, *Perda syariah Islam...Loc. Cit.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, John. "Does God matter, and if so Whose God? Religion and democratization". Dalam Jeffrey Haynes, *Religion and Politics*. London and New York: Routledge, 2009.
- Dijk, Kees Van and Nico J.G. Kaptein. *Islam, Politics and Change*. Leiden: University Press, 2016.
- Epley, Jennifer L. "Development Issues And The Role Of Religious Organizations In Indonesia". *Studies on Asia*, series II, vol. 1, num. 1. 39-52.
- Hosen, Nadirsyah. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate". *Journal of Southeast Asian Studies*, 36 (3), (2005): 419-440. Printed in the United Kingdom.
- Haynes, Jeffrey. *Religion and Politics*. London and New York: Routledge, 2009.
- Iskandar, Muhammad. *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2001.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah." *Jurnal Al Manahij* Volume VII, no. 2 (2013).
- Komnas Perempuan, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2010.
- Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005, Perda Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2005.
- Liddle, R. William. "New Pattern of Islamic Politics in Democratic Indonesia." *Asia Program Special Report*, No. 10 (April 2003). [www.csi.edu/topics/pubs/asiarpt\\_110.pdf](http://www.csi.edu/topics/pubs/asiarpt_110.pdf).
- Muhtada, Dani. "Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem, dan Tantangannya". Makalah dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang.
- Ozzano, Luca. "Religious Fundamentalism and Democracy". *Journal of Politics and Religion*, 1/III (2009): 127-153.
- Permata, Ahmad Norma. *Perda syariah Islam, rekayasa institusional dan masa depan demokrasi*. Institut für Politikwissenschaft Westfälische Wilhelms-Universität Scharnhorstraße 100 48043 - Münster Deutschland.
- Permata, Ahmad Norma. "A Study of The Internal Dynamics of the Prosperous Justice Party and Jamaah tarbiyah". Dalam Kees Van Dijk and Nico J.G. Kaptein, *Islam, Politics and Change*. Leiden: University Press, 2016.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025.
- Shahin, Emad El-Din. *Political Ascent: Contemporary Islamic Movements in North Africa*. Boulder: Westview Press, 1998.
- Suismanto. "Perda Syariah dan Problematikanya (Kasus di Tasikmalaya), Aplikasi". *Jurnal Ilmu-ilmu Agama* Volume VIII, no. 1 (2007).

### Internet (Situs dan berita online):

- <http://dprd-sukabumikab.go.id/daftar-anggota-dprd/>
- <http://sukabumikab.go.id/home/>
- <http://www.dukcapilkabsukabumi.org/>
- <http://www.kabsukabumi.baznas.go.id/>
- <http://www.bps.sukabumi.go.id>
- <http://www.bidiknusanantara.com/2015/12/satpol-pp-kabupaten-sukabumi-bersama.html>.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/09/ngbgrs-peracik-dan-penjual-miras-oplosan-diancam-penjara-seumur-hidup>.
- <http://radarsukabumi.com/2015/07/03/zakat-2015-naik-rp-55-miliar/>
- ,Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang Penghapusan Perda Bermasalah Senin, 13 Juni 2016, di Istana Merdeka, Jakarta' [setkab.go.id](http://setkab.go.id), 13 Juni 2016.

Masad Masrur, 'Sejarah Singkat Komite Nasional Pemuda Indonesia', *Tribun Manado*, Selasa, 23 Juli 2013

'Menteri Tjahjo: Tak Ada Penghapusan Perda Syariah' *Tempo.co*, Kamis, 16 Juni 2016.

'MUI tak Setuju Penghapusan Perda Syariah' Khazanah, *Republika.co.id*, Rabu, 22 Juni 2016.

'MUI Sukabumi Desak Perda Kekerasan Seksual

Disahkan'. Khazanah. *Republika.co.id*, Sabtu, 18 Juni 2016

'Perda di Kota Sukabumi Efektif Turunkan Peredaran Miras'. Khazanah. *Republika.co.id*. Kamis, 02 Juni 2016.

# THE COMPATIBILITY OF ISLAM TO DEMOCRACY: AN ANALYSIS OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) VIEW ON ISLAM AND DEMOCRACY

ANA SABHANA AZMY\*)

---

## ABSTRACT

*Fundamentalist Islamic groups are often identified as resistant groups towards revolutionary values coming from the West. In Indonesian context, fundamentalist groups was represented by, one of them, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Fundamentally, HTI as a group opposes any changes and supports the establishment of Islamic nation. From this perspective, HTI is against democracy as a product of western thought. In fact, HTI is struggling for the unity Islamic ummah under khilafah islamiyyah by khalifah as a leader. From this background this paper aims at answering to questions. First, how is HTI view as a fundamentalist group on the compatibility of Islam to democracy? Second, Is Islam compatible with democracy?*

**KEY WORDS:** HTI, Democracy, Compatibility, Islam

## KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI: TELAAH ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP ISLAM DAN DEMOKRASI

## ABSTRAK

Kelompok Islam fundamentalis seringkali dicirikan sebagai kelompok yang resisten terhadap hal-hal baru dan nilai-nilai yang diusung dari Barat. Pada konteks ke-Indonesiaan, hadir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan representatif dari kelompok ini. Pada dasarnya, HTI sebagai kelompok yang menentang perubahan dan hal baru, menginginkan terwujudnya kehidupan Islam. Atas pemikiran tersebut, maka HTI menentang hadirnya demokrasi sebagai suatu hal yang datang dari Barat. HTI justru menginginkan bersatunya kembali umat Islam yang saat ini terpisah, di bawah naungan khilafah Islamiyyah dengan seorang khalifah sebagai pemimpinnya. Atas pandangan ini, maka ada dua hal yang ingin dijawab dalam tulisan ini, yaitu Pertama; bagaimana pandangan HTI sebagai kelompok fundamentalis terhadap kompatibilitas Islam dan demokrasi? Kedua; apakah pada kenyataannya Islam kompatibel dengan demokrasi?

**KATA KUNCI:** Islam dan Demokrasi, Hizbut Tahrir Indonesia

---

\*) Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alamat Instansi: Jl. Kertamukti No.5 Pisangan, Ciputat 15419. Email: [hana.azmy86@gmail.com](mailto:hana.azmy86@gmail.com)

\*\* Naskah diterima April 2017, direvisi Mei 2017 dan diestujui untuk diterbitkan Juni 2017

## A. PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 1970-an, ketika gelombang sejarah ketiga atas demokratisasi mulai, dunia muslim atau lebih dititik beratkan pada keintian Arab, telah dilihat hanya mempunyai signifikansi kecil atas bukti peningkatan dalam keterbukaan politik, penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan pers dan transparansi.<sup>1</sup> Gap demokrasi yang disebutkan oleh Azyumardi juga dinyatakan dalam data bahwa dari 192 negara di dunia saat ini, 121 diantaranya mengadakan pemilihan secara demokratis. Namun, di sebuah negara dengan muslim sebagai mayoritas, hanya sebelas dari empat puluh tujuh (atau dua puluh tiga persen) mempunyai pemerintahan pemilihan secara demokratis. Bagaimanapun, secara kontras laporan ini juga menyebutkan bahwa ada beberapa 'titik cerah' dari demokrasi secara bilangan utama dan setidaknya negara Muslim Arabisasi seperti Albania, Bangladesh, Turkey, Iran dan juga Indonesia di dalamnya. Meskipun hal ini ada dalam fondasi yang goyah, dan pengembangan, fermentasi demokrasi di sadari dalam negara-negara tersebut.<sup>2</sup>

Jika melihat pada fenomena yang ada, sebuah pertanyaan selalu hadir dalam tataran fakta antara Islam dan Demokrasi. Yaitu apakah Islam kompatibel dengan demokrasi sebagaimana yang terjadi dalam kebanyakan negara Islam? Bagaimanapun, catatan Freedom House meyakini bahwa sejarah saat ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah secara inheren tidak kompatibel dengan demokrasi dan nilai-nilai demokratis. Jika diamati, negara-negara dengan penduduk muslim mayoritas seperti Bangladesh, Turkey dan Indonesia, hidup secara demokratis di bawah pemerintahan yang menganut nilai-nilai demokratik. Hal ini menunjukkan bahwa ada harapan untuk sebuah demokrasi dalam dunia muslim.<sup>3</sup>

Indonesia yang menganut negara demokrasi dan mempunyai populasi penduduk mayoritas muslim, telah menjalankan pemerintahan demokratis ini semenjak reformasi bergulir di tahun 1998. Terbukti dengan adanya gerakan reformasi dan penetapan negara

demokrasi, kebebasan berpendapat, berbicara dan berekspresi telah diakui sampai saat ini. Meski demikian, harus dipahami bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim mempunyai berbagai kelompok, seperti kelompok moderat (yang diwakili oleh NU/ Muhammadiyah), fundamentalis radikal Islam serta militan Islam (yang diwakili oleh HTI, FPI atau JI). Salah satunya adalah kelompok fundamentalis Islam yang diwakili oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam aksinya, kelompok ini mengusung negara Islam/ kekhalifahan sebagai bentuk pemerintahan di Indonesia. HTI sebagai kelompok fundamentalis Islam juga menolak nilai-nilai baru yang diadaptasi dari barat, termasuk demokrasi.

Nilai-nilai demokratis yang mengusung sebuah kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*), pengakuan atas hak (*rights*) dan kesetaraan (*equality*) bagi tiap orang, dikatakan oleh HTI tidak sesuai dengan Islam. Islam mempunyai sistemnya sendiri.<sup>4</sup> Istilah fundamentalisme sendiri ditolak oleh Muhammad Imarah, seorang pemikir terkenal dari Mesir dan dunia Arab. Menurutnya, istilah fundamentalisme tidak dikenal dalam pemikiran Arab dan Islam. Ia merupakan produk pemikiran Barat yang berawal dari gerakan Kristen Protestan Amerika yang menafsirkan injil secara literal dengan menolak penakwilan. Menurutnya, sebutan Islamis lebih tepat untuk orang-orang yang menyeru pada keislaman. Ia juga menangkis pemikiran Roger Graudy yang menempatkan fundamentalisme pada gerakan Islam kontemporer.<sup>5</sup> Meski demikian, istilah fundamentalisme yang dipakai dan dilabelkan pada kelompok Islam di Indonesia, adalah sebuah kelompok yang menentang perubahan dan nilai demokrasi serta menginginkan sistem khilafah. Dengan kata lain, HTI menginginkan Islam menjadi sistem politik. Penolakan HTI terhadap demokrasi, bisa dilihat dalam berbagai demonstrasi yang terjadi di Indonesia.

## B. LATAR BELAKANG MASALAH

Kelompok Islam fundamentalis kerap kali dicirikan sebagai kelompok yang resisten

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy: dynamics in a global context*, Solstice Publishing with the support of The Asia Foundation: Jakarta, 2006, hal.3-4.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.4.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.4.

<sup>4</sup> <http://www.mediaumat.com/news-dalam-negeri/2060-omong-kosong-demokrasi-aksi-hti-tolak-obama-dihadang-.html>

<sup>5</sup> Disadur dari buku Muhammad Imarah, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, Gema Insani: Jakarta, 1999.

terhadap hal-hal baru dan nilai-nilai yang diusung dari Barat. Gagasan dasar fundamentalisme seperti yang dipaparkan oleh Gelner adalah bahwa suatu agama tertentu dipegang kokoh dalam bentuk literal (harfiah) dan bulat, tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi dan pengurangan.<sup>6</sup> Dalam konteks ke-Indonesiaan, kita dapat melihat HTI sebagai representatif dari kelompok ini. Beberapa aksi demonstrasi HTI yang ditunjukkan pada khalayak mencerminkan bahwa Islam seharusnya menjadi sebuah sistem pemerintahan. Salah satu contohnya adalah demonstrasi atas kedatangan Obama pada bulan November 2010. HTI mengatakan bahwa dengan berlindung di bawah kata demokrasi, maka pemerintahan Indonesia bersedia bekerjasama dengan Obama yang kebijakannya tidak berbeda dengan presiden sebelumnya, yaitu Bush.

*"Dua hal prinsipil masih dilakukan oleh Obama seperti Bush dan presiden Amerika lainnya : pembunuhan umat Islam dan perampokan kekayaan alam dunia Islam termasuk Indonesia !"*<sup>7</sup> *"Obama, Obama, usir, usir. Amerika, Amerika, hancurkan, hancurkan. Khilafah, khilafah, tegakkan, tegakkan!" Berbagai spanduk digelar dan berbunyi: 'Obama, the real terrorist', 'Menu favorit Obama, Sate! Dagingnya kaum Muslimin di Irak dan Afghanistan, kecapnya ExxonMobil, ditusuk dengan M16, dibakar ala US Army'.*<sup>8</sup>

HTI meyakini bahwa kerjasama dengan pihak Barat tidak akan memberikan keuntungan, karena Barat lah penyebab dari kehancuran Islam. Demokrasi yang diyakini sebagai sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan dan kewenangan terhadap rakyat, dinilai HTI tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh Islam. Ada berbagai pandangan tokoh dan teoritis mengenai substansi inti dari demokrasi. Pemahaman akan konteks makna inti dari demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Seymour Martin Lipset bahwa

<sup>6</sup> Ernest Gellner, *Post Modernism, Reason and Religion*, London:1992, dalam buku Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 2006, hal. 108.

<sup>7</sup> Disadur dari perkataan salah seorang demonstran HTI terhadap kedatangan Obama pada bulan November 2010.

<sup>8</sup> Teriakan demonstran atas kedatangan Obama, dan menginginkan sistem khilafah di tegakkan di Indonesia. diambil dari <http://www.mediaumat.com/news-dalam-negeri/2060-omong-kosong-demokrasi-aksi-hti-tolak-obama-dihadang-.html>.

demokrasi adalah *" a political system which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials, and a social mechanism which permits the largest possible part of the population to influence major decisions by choosing among contenders for political office"*. Sedangkan Robert Dahl, menekankan proses pemilihan secara umum dalam sebuah tatanan demokrasi.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, Hizbut Tahrir sebagai kelompok yang menentang terhadap perubahan dan sesuatu baru, yang keluar dari teks ke-Islaman, menginginkan keterwujudan dari kehidupan Islam tersebut. Kehidupan Islam ini dicirikan dengan dua hal. Pertama, kehidupan yang didalamnya diterapkan syariat Islam dalam seluruh sendi kehidupan, baik pribadi, keluarga dan masyarakat dan bernegara. Kedua, bersatunya kembali ummat Islam yang kini bercerai dalam lebih dari 50 negara, di bawah naungan khilafah Islamiyah dengan seorang khalifah sebagai pemimpinnya.<sup>10</sup> Kedua faktor ini mencerminkan bahwa tatanan demokrasi yang merupakan kedaulatan rakyat, tidak ada dalam pemahaman HTI. Jika HTI menginginkan sistem khilafah pada konteks kekinian, apa dengan didirikannya negara khilafah lantas umat Islam terjamin hidup damai? Bagaimana dengan hak tiap negara untuk menentukan masing-masing sistem pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan rakyatnya?

Atas keinginan HTI mendirikan negara *khilafah Islamiyyah* dan menentang nilai-nilai Barat, di mana hal ini selalu dicetuskan dalam tiap aksi demonstrasinya, maka ada dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana pandangan HTI sebagai kelompok fundamentalis terhadap kompatibilitas Islam dan Demokrasi? *Kedua*, apakah pada kenyataannya Islam kompatibel dengan demokrasi?

### C. LANDASAN TEORITIK

Dalam menganalisa pandangan HTI terhadap kompatibilitas Islam dan Demokrasi, ada beberapa teori yang akan di gunakan, yaitu Fundamentalisme Islam sebagai kelompok muslim

<sup>9</sup> Ali Reza Abootalebi, *Islam and Democracy: state-society relations in developing countries, 1980-1994*, Garland Publishing: New York, 2000, hal.34.

<sup>10</sup> Berdasarkan paparan Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI) dalam wawancara dengan media *Tsaqofah*, yang diakses dari <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/60>.

& Islam dan Demokrasi. Allan Samson dalam bukunya *Conceptions of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesian Islam* mencatat munculnya orientasi fundamentalis, reformis dan akomodasionis dalam kelompok-kelompok Muslim. Dalam paparannya, “kelompok fundamentalis mendukung jenis penafsiran atas Islam yang kaku dan murni, menentang pemikiran sekular, pengaruh Barat dan sinkretisme kepercayaan tradisional, dan menekankan keutamaan agama atas politik. Sedangkan reformis juga menekankan keutamaan agama atas politik, tetapi mereka jauh lebih mau bekerjasama dengan kelompok-kelompok sekular atas landasan yang sama-sama disepakati dibandingkan dengan kelompok fundamentalis”.<sup>11</sup> Menurut Martin E Marty dan R Scott Appleby, fundamentalism adalah “contemporary militant and political religious movements which have organized in reaction to the prevailing patterns of modernization in their respective societies”.<sup>12</sup>

Demokrasi menurut David Held adalah mengkombinasikan wawasan liberal dan tradisi Marxis supaya mencapai arti dari demokrasi yang mendukung prinsip utama dari otonomi;

*Persons should enjoy equal rights and, accordingly, equal obligations in the specification of the political framework which generates and limits the opportunities available to them; that is, they should be free and equal in the determination of the conditions of their own lives, so long as they do not deploy this framework to negate the rights of others.*<sup>13</sup>

Dengan demikian, hak yang setara dan kebebasan adalah merupakan inti dari demokrasi, selama hak dan kebebasan tersebut tidak mengganggu hak orang lainnya.

Sedangkan dalam tulisannya, *Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?* John O voll memaparkan ada juga kaum konservatif yang memandang bahwa sebenarnya Islam kompatibel dengan demokrasi. Badan resmi Al-Azhar

menyimpulkan deskripsi dari Al-Qur’an yang menyebutkan bahwa ayat Al-Qur’an berhubungan dengan kehidupan sosial politik. Ahmad Sawqi al Fanjari, penulis dari Mesir mengkompilasikan daftar dari hak-hak demokratik dan dan kebebasan yang ditemukan dalam tulisan para muslim masa terdahulu dan menyimpulkan bahwa “apa yang disebutkan kebebasan dalam Eropa, adalah apa yang didefinisikan dalam agama kita sebagai keadilan (*justice/al ‘adlu*), *right* (haqq), *consultation* (shura), and *equality* (musawaat).<sup>14</sup>

#### D. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Hizbut Tahrir secara inisial di dirikan di Yordania pada tahun 1952 oleh Shaykh Taqi al Din al Nabhani dan mulai menyebar di Indonesia di awal tahun 1980-an. Pergerakan HTI lebih menonjol di Indonesia sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto. Secara terbuka, HTI menyerukan pada sistem khalifah secara universal. Pergerakan ini mengadakan internasional konferensi atas khalifah di Jakarta pada awal tahun 2000. Meski konferensi internasional ini mengundang beberapa tokoh yang menonjol di Hizbut Tahrir dari luar negeri, namun tidak banyak kalangan muslim lokal yang menghadiri acara tersebut.<sup>15</sup> Selanjutnya, HTI membuat dirinya lebih terlihat, militant dan vocal dengan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukannya. Sebagai contoh saat itu dengan memprotes kebijakan pemerintahan pada masa Abdurrahman Wahid (GusDur) yang membuka hubungan perdagangan antara Indonesia dan Israel. Tidak hanya itu, HTI juga berdemonstrasi tentang kenaikan bahan bakar pada era pemerintahan Megawati dan demonstrasi terluasnya adalah ketika mengancam operasi militer AS di Afghanistan setelah peristiwa 11 September (penyerangan terhadap *World Trade Center*).

#### 1. Pandangan HTI terhadap Keterikaitan Islam dan Demokrasi

HTI berpendapat bahwa AS adalah master dari ide konspirasi Barat yang ingin menghancurkan Islam dan Muslim.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Allan Samson, *Conceptions of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesian Islam*, hal.199-200 dalam buku Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, PARAMADINA: Jakarta, 2009, hal.43. lihat juga buku Azyumardi Azra mengenai pemaparan fundamentalisme dalam Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 1996, hal. 109.

<sup>12</sup> Martin E Marty dan R Scott Appleby, *Fundamentalism Comprehended*, The University of Chicago Press: London, 1995, hal.1.

<sup>13</sup> David Held, *Models of Democracy*, UK: Polity Press, reprinted 2000, hal.301

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.174.

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy: dynamics in a global context*, Solstice Publishing with the support of The Asia Foundation: Jakarta, 2006, hal.10.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.10

Ketidakpercayaan HTI terhadap demokrasi dan menginginkan sistem khilafah, berawal dari gagasan terwujudnya kehidupan Islam. HTI berpendapat bahwa demokrasi itu intinya 'kedaulatan di tangan rakyat'. Yang dimaksud kedaulatan di situ adalah *yamlikul iradah* atau yang "memiliki kehendak paling tinggi", kemana seluruh rakyat dan seluruh elemen negara tunduk. Dalam konteks negara modern sekarang ini kedaulatan rakyat diwujudkan melalui wakil rakyat yang duduk di parlemen. Dalam parlemen, para wakil rakyat itu berhak menetapkan undang-undang. Dalam proses legislasi ini, wakil rakyat itu diasumsikan sebagai orang yang memiliki wisdom atau kebijaksanaan, bahwa mereka akan mengambil keputusan dan membuat hukum yang terbaik. Makanya kemudian ada adagium terkenal *Vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Namun faktanya tidak selalu demikian.<sup>17</sup> Sebagai kelompok Islam fundamentalis, HTI memang mengartikan ayat Al-Qur'an secara tekstual dan tidak menerima pengaruh sekular Barat, juga penafsiran lain selain yang mereka maksudkan, seperti dikatakan oleh Allan Samson.

Martin E Marty pun memberikan sebuah kerangka pemahaman dari ciri fundamentalisme, yang bisa kita lihat dalam kelompok fundamentalisme Islam. Prinsip **pertama** fundamentalisme adalah paham perlawanan. Fundamentalisme dalam agama manapun mengambil bentuk perlawanan, yang bahkan sering radikal terhadap ancaman yang membahayakan eksistensi agama, termasuk nilai-nilai Barat/ modernitas. **Kedua**, penolakan terhadap hermeutika. Mereka menolak sikap kritis terhadap teks dan interprestasinya. Teks Al-Qur'an harus di lihat secara literal. **Ketiga**, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi mereka, pluralisme merupakan hasil pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. **Keempat**, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Mereka beranggapan bahwa kedua hal itu telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dalam paparan wawancara antara media Tsaqafah dan Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI), diakses dari <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/60>.

<sup>18</sup> Martin E Marty, *What is Fundamentalism? Theological Perspective* dalam buku Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 2006, hal.109-110.

Menurut HTI, kehendak paling tinggi adalah Allah dan Rasul-Nya, atau dalam bahasa yang lebih simple adalah syariat. Syariat menurut mereka semestinya bukan *option* (pilihan), tapi *obligation* (kewajiban).<sup>19</sup> Dalam sistem demokrasi di negeri-negeri muslim termasuk Indonesia, syariat itu masih sekadar *option*, bukan *obligation*. Di sinilah HTI menolak demokrasi, karena syariat itu merupakan kewajiban, bukan pilihan, yang semestinya diterapkan sebagai satu-satunya sistem hukum yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai kelompok Islam yang menafsirkan Al-Qur'an secara kaku dan murni, dengan indikator beberapa penafsiran Al-Qur'an, seperti "*jaahidil kuffaar wal musyrikuun*", adalah dengan memerangi/berdemonstrasi terhadap Barat dan sama sekali tidak menerima pandangan apapun dari Barat. Pandangan HTI yang tidak menyetujui adanya sistem demokrasi dan mengartikan ayat Al-Qur'an secara harfiah, menyebabkan Islam di pahami sebagai agama yang kaku. Jika kita pahami, Al-Qur'an adalah nilai-nilai pedoman yang harus menjadi acuan dalam hidup manusia. Jika konteks demokrasi dalam arti kontemporer merupakan pengusungan atas kebebasan, pemenuhan hak dan kesetaraan, maka Islam telah mengajarkan nilai-nilai tersebut sejak dahulu. Penolakan atas penafsiran non tekstual, menjadikan HTI sebagai kelompok Islam fundamentalis menjelma dalam komitmen yang tinggi tidak hanya untuk mentransformasi kehidupan individual, tetapi sekaligus komunal dan sosial. Karena itu, fundamentalisme Islam juga sering bersifat eksoteris, yang sangat menekankan batas-batas kebolehan dan keharaman berdasarkan fiqh.<sup>20</sup>

Dalam tataran real, agama memegang peranan penting dalam sebuah kehidupan masyarakat, termasuk juga bagi berbagai kelompok Islam, seperti HTI. Pandangan mereka bahwa syari'at adalah kehendak Allah dan Rasul, karena itu harus di taati dan bukan dipilih, adalah refleksi bahwa agama (dalam hal ini Islam), adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, dan harus dijalankan berdasarkan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/60>,

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 2006, hal. 108.

Emile Durkheim dalam tulisannya *The elementary forms of the religious life* menyatakan bahwa agama menyediakan fungsi general untuk masyarakat, menciptakan solidaritas antar anggota-anggotanya, yang mana hal itu adalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok manapun. Dalam kata lain, adalah tujuan agama untuk mengatur hubungan antar manusia melalui konsep spiritual.<sup>21</sup> Konsep spiritual ini yang sering di definisikan berbeda-beda, terlebih dalam beberapa kelompok Islam, seperti fundamentalis, reformis dan sebagainya. Kelompok fundamentalis mengartikan konsep spiritual, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an, tanpa penafsiran yang lentur. Sedangkan bagi reformis, penafsiran Al-Qur'an senantiasa bersifat kondisional, sesuai keadaan dan kebutuhan umat Muslim, tanpa menyepelkan hakikat agama. HTI tidak setuju jika dikatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Mereka memisahkan antara kekuasaan dengan kedaulatan. Argumen yang disampaikan adalah bahwa kekuasaan memang ditangan rakyat, namun kedaulatan tidak. Pemimpin yang dipilih adalah untuk melaksanakan kedaulatan syari'at dan bukan kedaulatan rakyat. Sehingga kerap kali kita melihat demonstrasi yang diusung oleh HTI adalah menyalahkan pemimpin Indonesia yang tidak menjalankan syari'at Islam, yaitu memerangi kaum musyrik (dimana dalam pandangan mereka adalah orang Barat dan musuh Islam seperti Israel). HTI pun berpendapat bahwa ketika mereka mengadakan unjuk rasa, itu bukan bagian dari demokrasi, namun praktik dari ajaran Islam yang melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ummat muslim.

Sistem demokrasi yang dinilai tidak kompatibel dengan Islam oleh HTI, dijawab dengan pemberlakuan sistem khilafah. Menurut HTI, sistem ini mempunyai beberapa keunggulan: **pertama**: menjamin kebenaran yang hakiki, tidak seperti demokrasi. **kedua**, memberi ruang bagi masyarakat untuk berpendapat, memilih pemimpinnya sendiri, berekspresi, mengkritik sesuatu yang keliru. Dan ini tidak sama dengan yang telah diusung oleh sistem demokrasi (yang

menurut mereka berstandar ganda). **Ketiga**, menjamin hak-hak mendasar manusia dan tidak seperti ketika demokrasi diterapkan, di mana banyak pelanggaran HAM terjadi, bahkan oleh AS sendiri. **Keempat**, menjamin kepastian hukum dan persamaan di depan hukum. Syari'ah Islam menjamin ini semua, baik bagi yang muslim dan non muslim. **Kelima**, membuat kebijakan yang pro rakyat. Demokrasi di nilai telah melahirkan hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pemilik modal yang merugikan rakyat.<sup>22</sup> Pandangan HTI tersebut, meluruskan pandangan beberapa pihak konservatif yang menyebut Demokrasi tidak kompatibel dengan Islam, seperti yang dipaparkan oleh John O Voll bahwa konsep Islam atas kedaulatan yang absolut adalah pada Tuhan- mereka percaya bahwa ide atas kedaulatan orang dalam demokrasi kontradiktif dengan prinsip kedaulatan absolut tersebut.

Abul-Ala-Mawdudi dalam menjawab kompatibilitas Islam dengan demokrasi mencoba membedakan antara "deen (agama) yang sebagai keyakinan dan praktik dari demokrasi dengan "deen" (Islam). Dalam deen sebagai keyakinan, maka tiap orang bisa meletakkan kedaulatan, yang mana mereka bisa diperintah dengan shari'a yang telah dibingkai oleh mereka. sebaliknya, deen agama Islam adalah bahwa Allah merupakan pemilik kedaulatan yang ada di bumi dan juga manusia. Hanya Allah lah yang harus dihormati dan ditaati sesuai dengan shari'a yang berlaku.<sup>23</sup> Jika HTI sebagai salah satu kelompok Islam fundamentalis yang menolak kompatibilitas Islam dengan Demokrasi, lantas bagaimana sebetulnya relasi Islam dengan Demokrasi?

## 2. Relasi Islam dan Demokrasi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Islam-pemasrahan diri yang sempurna kepada Allah-adalah satu-satunya keyakinan yang terus menerus diwahyukan Allah kepada ummat manusia sejak awal kejadiannya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Disadur dari paparan dan pendapat HTI mengenai perbedaan demokrasi dan khilafah, dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/11/khilafah-vs-demokrasi/>.

<sup>23</sup> John O Voll, *Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?*, Religion Compass, Georgetown University, Blackwell Publishing, 2006, hal.172.

<sup>24</sup> Abul A'la Maududi, *Apakah Arti Islam dalam Altaf Gauhar, Tantangan Islam*, PUSTAKA: Bandung, 1982, hal.3.

<sup>21</sup> Pandangan Emile Durkheim dalam Ali Reza Abootalebi, *Islam and Democracy: state-society relations in developing countries, 1980-1994*, Garland Publishing: New York, 2000, hal.57.

Islam bukan hanya sekedar membahas bagaimana agama harus ditaati sesuai prinsip shari'a yang ada, namun adalah juga merupakan "the way of life". Cara hidup inilah yang termaktub dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an, termasuk juga tentang permusyawaratan dan nilai-nilai lain yang merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Sebagai contoh adalah penerapan Hak Asasi Manusia, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga musyawarah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujuraat ayat 13 dikatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia semuanya dari seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan, selain kemuliaan karena ketaqwaannya pada Allah.<sup>25</sup> Dari ayat tersebut, mencerminkan bahwa tidak ada diskriminasi/perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali ketaqwaannya pada Allah SWT. Namun, konsep kesetaraan yang diusung dalam agama Islam ini, jauh lebih dulu daripada konsep demokrasi yang lahir dari tatanan nilai-nilai Barat. Indikator atas hal ini bisa kita lihat bahwa hak pilih perempuan di AS sebagai negara demokratis, baru dimulai pada tahun 1970-an. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa konsep demokrasi pada zaman dulu, belum mengusung kebebasan memilih dan berpendapat seperti yang telah diajarkan dalam Islam.

Selanjutnya mengenai musyawarah, termaktub dalam Qur'an surat **Asy Syuura ayat 38**, bahwa bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antar mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah diberikan Allah SWT.<sup>26</sup> Ayat lainnya seperti termaktub dalam surat Ali 'Imran ayat 159, bahwa pemberian maaf dan bermusyawarah adalah jalan keluar dari sebuah urusan, seperti peperangan dan hal duniawiah (politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lainnya).<sup>27</sup> Tiga ayat tersebut mencerminkan bagaimana Islam telah mengatur

---

<sup>25</sup> Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 13 (manusia diciptakan berbagai bangsa untuk saling mengenal).

<sup>26</sup> Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat Qur'an Surat AsySyuura ayat 38 (kewajiban bermusyawarah tentang masalah keduniaan).

<sup>27</sup> Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 159 (akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad SAW).

masalah keduniawian yang juga tercermin dalam sistem demokrasi. Dimana David Held dalam bukunya *Models of Democracy* mengemukakan bahwa dalam sistem demokrasi, tiap orang harus mendapatkan hak yang setara. Sehingga dengan demikian, dari pemaparan ini menunjukkan bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi kekinian.

Dalam sebuah sistem demokrasi, ada hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya. Seorang pemimpin harus memperhatikan rakyatnya, begitupun rakyat mematuhi pemimpin. Ibnu Taimiyah mengungkapkan pandangannya mengenai relasi ini, bahwa kepatuhan pada pemimpin adalah wajib selama tidak bertentangan dengan shari'ah. Ia mengajukan bentuk prinsip persamaan antara pemerintah dengan masyarakat. Ia menggambarkan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam tulisannya, *Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?* John O voll memaparkan bahwa muslim konservatif berpendapat bahwa antara Islam dan demokrasi adalah tidak kompatibel karena dua hal. Pertama, konsep Islam atas kedaulatan yang absolut atas Tuhan-mereka percaya bahwa ide atas kedaulatan orang dalam demokrasi kontradiktif dengan prinsip fundamental ini. Kedua, dalam Islam, hukum didefinisikan dan diajarkan oleh Tuhan dan itu hukum Tuhan, Shari'a tidak bisa diubah dengan pemilihan parlemen dan ketiga konsep parlemen sebagai sumber dari hukum dilihat sebagai sesuatu yang menghina.<sup>29</sup> Meski demikian, ada juga muslim konservatif yang berpandangan sebaliknya.

Ada beberapa prinsip yang bisa kita lihat dalam Islam dan relevansinya dengan demokrasi. Pertama, adalah prinsip Tauhid. Prinsip ini merupakan salah satu dasar prinsip dasar dalam pemerintahan Islam. Kedua, prinsip musyawarah. Musyawarah mempunyai makna mengeluarkan pendapat. Dalam menetapkan keputusan bagi masyarakat, paling tidak ada tiga hal yang patut dilihat. 1. Keputusan yang

---

<sup>28</sup> Pandangan Ibnu Taimiyah dalam buku Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam, studi tentang fundamentalisme Islam*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001, hal.228-229.

<sup>29</sup> John O Voll, *Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?*, Religion Compass, Georgetown University, Blackwell Publishing, 2006, hal.172.

ditetapkan oleh penguasa, 2. Keputusan yang ditetapkan oleh pandangan minoritas, 3. Keputusan yang ditetapkan oleh pandangan mayoritas. Meski demikian, demokrasi tidak identik dengan syuro. Walau syuro membenarkan pandangan mayoritas, namun ini bukanlah suatu yang mutlak, karena pandangan mayoritas dalam syuro tidak boleh menindas minoritas. Suara mayoritas dalam syuro pun tidak boleh berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'at.<sup>30</sup> Dua prinsip lainnya adalah **prinsip keadilan** (*al'adaalah*) dan **kebebasan** (*al-hurriyah*), kebebasan yang diusung Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kompatibilitas ini seperti yang dipaparkan oleh kelompok yang berucap bahwa ada hubungan yang positif antara Islam dan demokrasi. Mereka melihat bahwa ayat Al-Qur'an berhubungan dengan kehidupan sosial politik.

### 3. Keunggulan Nilai Demokratis Islam dari Demokrasi Barat Kontemporer

Islam sebagai pedoman hidup juga mempunyai keunggulan tersendiri atas sistem demokrasi. Sebagai contoh, dalam demokrasi suara mayoritas adalah suara yang diunggulkan/*majority rule*, seperti yang dikatakan oleh Robert Dahl. Dalam bukunya, dipaparkan bahwa apakah proses demokrasi membutuhkan penggunaan prinsip mayoritas. Tiap orang berasumsi bahwa demokrasi pasti membutuhkan aturan mayoritas yang disupport oleh suara mayoritas untuk melewati sebuah hukum.<sup>31</sup> Demokrasi adalah tentang suara mayoritas. Namun, ketika ditanyakan bahwa apakah kebenaran adalah apapun yang diputuskan oleh mayoritas, maka jawabannya adalah tidak.<sup>32</sup>

Dalam demokrasi, suara mayoritas memang diunggulkan, namun ternyata banyak kejadian negatif terjadi karena keagungan suara mayoritas. Sebagai contoh, voting pendapat dalam rapat legislatif yang dihadiri oleh anggota dewan laki-laki dan perempuan untuk membahas masalah anggaran berbasis gender. Anggota dewan laki-laki lebih banyak daripada perempuan dalam menghadiri rapat tersebut, maka ketika

voting terjadi, suara mayoritas laki-laki yang banyak tidak memahami pentingnya anggaran tersebut dinyatakan menang. Hal ini dianggap telah sejalan dengan nilai demokrasi. Kenyataannya, hasil voting tersebut berdampak negatif bagi kepentingan perempuan. Dengan demikian, demokrasi tidak selamanya memberikan dampak positif dan merepresentasikan kepentingan warga negara. Hal ini juga yang menjadikan bahwa sistem syuro dan kebebasan dalam Islam lebih unggul daripada demokrasi. Sebagai contoh, jika atas nama kebebasan dalam sistem demokrasi maka banyak terjadi penyelewengan penggunaan sumber daya alam/ lahan oleh beberapa pengusaha dan *stakeholder*. Dengan berlindung di bawah kata demokrasi, maka mereka bebas dan berhak berinvestasi dan mendirikan gedung diberbagai kota. Pada akhirnya, pendirian gedung tersebut menjadi salah satu penyebab banjir yang merugikan banyak rakyat atas kurangnya daerah resapan air. Kebebasan ini dibatasi dalam konsep Islam, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Maka, konsep kebebasan dalam Islam bagi tiap orang adalah kebebasan yang tetap memperhatikan masalah ummat. Pada akhirnya, kompatibilitas Islam dan demokrasi di lihat dari semangat dan nilai-nilai yang diterapkan, di mana nilai tersebut telah mengatur bahwa tiap orang berhak mendapatkan kebebasan, pemenuhan hak dan kesetaraan antar sesama dalam hidup.

### E. KESIMPULAN

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai kaum fundamentalis Islam, menolak pada sebuah tatanan nilai Barat. Mereka menentang apapun yang dianggap mengancam eksistensi agama, termasuk modernisasi dan sistem demokrasi. HTI juga tidak menerima penafsiran hermeneutika. Bagi kaum fundamentalis, ayat Al Qur'an harus dimaknai dan dilakukan sesuai dengan apa yang tertera secara harfiah. Sistem demokrasi dianggap oleh mereka menyalahi prinsip shari'a karena meletakkan kedaulatan pada rakyat. Bagi HTI, kedaulatan adalah *yamlikul iradah* atau yang "memiliki kehendak paling tinggi". Kepemilikan ini adalah mutlak kepunyaan Allah dan tidak bisa dialihkan pada manusia. Atas penolakan pada demokrasi, mereka menawarkan sistem khalifah yang lebih mengakomodir kebutuhan ummat

<sup>30</sup> Disadur dari makalah Brigita Win Erwina, *Demokrasi dalam Perspektif Islam*: UII Yogyakarta, 2010, hal.7.

<sup>31</sup> Robert Dahl, *Democracy and It's Critics*, Yale University Press: US, 1989, hal.135.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.

muslim dan dapat menjamin kebenaran hakiki, serta kebebasan berpendapat dan berkespresi yang tidak sama dengan demokrasi karena bagi mereka, demokrasi menerapkan standar ganda. Penolakan atas demokrasi dan nilai-nilai Barat/modernisasi terlihat dalam beberapa demonstrasi HTI yang dilakukan dalam tiap periode pemerintahan dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Sedangkan di sisi lain, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada, tidaklah bisa diartikan secara tekstual atau harfiah, penafsiran atas Al-Qur'an mengikuti kebutuhan ummat muslim di segala zaman dan kondisi, tanpa menyalahi syari'at Islam. Dalam surat Ali 'Imran, Asy Syuraa dan Al Hujurat sebagai contoh beberapa ayat yang mengusung tata nilai kepemerintahan, maka ditemukan bahwa nilai-nilai Islam adalah kompatibel/sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa nilai tersebut seperti *justice* (al 'adalah), *freedom* (Al hurriyyah), *rights* (al haq), *equality* (al musaawaa). Semuanya telah diatur dalam Islam sesuai dengan kebutuhan dan penyelesaian masalah ummat di dunia. Bahkan, nilai demokratis Islam telah ada terlebih dahulu di banding nilai demokrasi dari dunia Barat, terbukti dengan tahap pembenahan makna demokrasi Barat dari masa ke masa, yang tidak sama antara saat ini dengan zaman Yunani Kuno.

### **Implikasi Teori**

Dalam melihat pandangan HTI yang tidak menyetujui kompatibilitas Islam dan Demokrasi, harus dilihat dari latar belakang alasan yang dikemukakan. Penyebab bahwa mereka tidak setuju dengan sistem demokrasi adalah karena kaum fundamentalis (HTI) tidak menerima atas penafsiran Islam yang keluar dari tekstual, berpedoman pada nilai Barat dan modernisasi. Bagi mereka sistem yang cocok atas sebuah pemerintahan adalah khilafah, di mana sistem ini lebih unggul dari demokrasi. HTI menganggap kedaulatan itu tetap ada di tangan Tuhan sebagai bentuk dari prinsip syari'ah, seperti yang dipaparkan dalam tulisan John O Voll. Sedangkan dalam sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat memegang kendali. Hal ini tidak masuk dalam nalar mereka dan menjadi tidak mengherankan karena pemahaman akan kedaulatan bagi kelompok HTI, dimaknai dalam bingkai harfiah. Karenanya Islam menjadi tidak

kompatibel dengan demokrasi. Penulis memahami bahwa dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memberikan pemahaman akan tata nilai pemerintahan yang demokratis. Berbagai ayat menerangkan bahwa tiap orang berhak mendapat hak nya, kebebasan dan kesetaraan dalam hidup. Permasalahan yang terjadi di dunia harus diselesaikan secara musyawarah. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam sistem pemerintahan demokrasi. Sehingga teori yang dipaparkan oleh John O Voll yang mengutip pendapat Ahmad Sawqi al Fanjari menjadi relevan, bahwa ia menyimpulkan kebebasan Eropa adalah apa yang didefinisikan dalam agama Islam mengenai keadilan, hak, musyawarah dan kesetaraan. Selain itu, kesetaraan dan kebebasan yang ada dalam Islam, adalah kebebasan yang bertanggung jawab dengan tidak mengganggu orang lain seperti yang dikemukakan David Held akan arti demokrasi.[]

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abootalebi, Ali Reza, *Islam and Democracy: state-society relations in developing countries*, 1980-1994, Garland Publishing: New York, 2000.
- Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 13 (manusia diciptakan berbagai bangsa untuk saling mengenal).
- Al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 159 (akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad SAW).
- Al-Qur'an Surat AsySyuura ayat 38 (kewajiban bermusyawarah tentang masalah dunia).
- Azra, Azyumardi, *Indonesia, Islam and Democracy: dynamics in a global context*, Solstice Publishing with the support of The Asia Foundation: Jakarta, 2006.
- Dahl, Robert, *Democracy and Its Critics*, Yale University Press: US, 1989.
- Gellner, Ernest, *Post Modernism, Reason and Religion*, London:1992, dalam buku Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 2006.
- Held, David, *Models of Democracy*, UK: Polity Press, reprinted 2000.
- Imarah, Muhammad, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, Gema Insani: Jakarta, 1999.
- Marty, Martin E dan R Scott Appleby, *Fundamentalism Comprehended*, The University of Chicago Press: London, 1995.
- Marty, Martin E, *What is Fundamentalism? Theological Perspective* dalam buku Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 2006.
- Maududi, Abul A'la, *Apakah Arti Islam dalam Alfat Gauhar, Tantangan Islam*, PUSTAKA: Bandung, 1982.
- O Voll, John, *Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?*, Religion Compass, Georgetown University, Blackwell Publishing, 2006.
- Pandangan Ibnu Taimiyah dalam buku Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam, studi tentang fundamentalisme Islam*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001.
- Samson, Allan, *Conceptions of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesian Islam*, hal.199-200 dalam buku Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, PARAMADINA: Jakarta, 2009.
- Win Erwina, Brigita, *Demokrasi dalam Perspektif Islam*: UII Yogyakarta, 2010.

### INTERNET

- <http://www.mediaumat.com/news-dalam-negeri/2060-omong-kosong-demokrasi-aksi-htitolak-obama-dihadang-.html>.
- <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/60>.
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/11/khilafah-vs-demokrasi/>.

## SUPPORTS FOR VIOLENCE: TESTING THE SOCIAL IDENTITY AND THREAT PERCEPTION

GAZI SALOOM\*

---

### ABSTRACT

*This study aimed at examining the impact of social identification and threat perception on public supports for violence. This study employed quantitative method involving 198 students of Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta. Supports for violence was measured by a questionnaire asking respondents' attitude towards the acts of violence committed by Front of Islamic Defence (FPI) as a radical Islamic movement. The data were analyzed by multiple regression and Structural Equation Modeling (SEM) using SPSS and M.Plus Program. This study concluded that strong identification as Muslims significantly influenced the supports to FPI acts through threat perception as a moderator variable. The study recommends for further investigation by employing qualitative approach to examine how independent variables influenced the supports for violence.*

**KEY WORDS:** Support, Violence, Identification

## DUKUNGAN TERHADAP KEKERASAN: MENGUJI IDENTITAS SOSIAL DAN PERSEPSI KETERANCAMAN

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh identitas sosial dan persepsi keterancaman terhadap dukungan publik kepada kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel mahasiswa UIN Jakarta sebanyak 198 orang. Dukungan terhadap kekerasan diukur dengan menanyakan sikap responden terhadap aksi razia yang dilakukan oleh Front Pembela Islam sebagai ormas Islam yang kerap kali dipersepsikan oleh sebagian publik sebagai gerakan Islam garis keras. Data dianalisis dengan tehnik regresi ganda dan SEM dengan menggunakan program SPSS dan M.Plus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa identifikasi sebagai orang Islam berpengaruh terhadap dukungan terhadap FPI melalui persepsi keterancaman sebagai variabel moderator. Peneliti merekomendasikan agar dilakukan riset lanjut dengan metode kualitatif untuk menelusuri bagaimana independent variabel mempengaruhi dukungan terhadap kekerasan.

**KATA KUNCI:** Kekerasan, Identitas, Persepsi Keterancaman

---

\*) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Kertamukti 5 Ciputat. Email : gazi@uinjkt.ac.id

\*\* Naskah diterima April 2017, direvisi Mei 2017 dan diestujui untuk diterbitkan Juni 2017

## A. PENDAHULUAN

Dukungan atas kekerasan yang bernuansa sosial, politik, dan agama diperdebatkan oleh banyak ilmuwan dan periset dari berbagai disiplin ilmu terutama bidang ilmu sosial dan perilaku. Pertanyaan paling mendasar terkait tema ini, mungkinkah seseorang atau kelompok atau masyarakat mendukung kekerasan? Pertanyaan ini penting dikemukakan mengingat dukungan terhadap kekerasan adalah satu hal yang tidak mungkin diterima secara akal sehat di satu sisi, tetapi di sisi lain, kerap kali tergambar dalam kehidupan sosial, politik dan budaya kita.

Victoroff dan Kruglanski (2009) menolak keras pendapat tentang adanya dukungan individu dan kelompok terhadap kekerasan. Menurutnya, fakta sejarah di Eropa dan Amerika menunjukkan hal yang sebaliknya. Dengan kata lain, penolakan terhadap kekerasan dan terorisme adalah hal umum dan masuk akal, misalnya penolakan masyarakat Eropa terhadap *Red Army Faction* di Jerman dan *Italian Red Brigades* di Italia<sup>1</sup>. Namun penelitian Pyszczynski dkk, penelitian Levin dkk, dan penelitian Jim Sidanius dkk bertolak belakang dengan pernyataan Victoroff dan Kruglanski. Penelitian mereka menunjukkan bahwa di sebagian kasus ada dukungan publik terhadap aksi kekerasan dan terorisme terutama di Timur Tengah dan dunia Islam<sup>2</sup>.

Pertentangan dan perdebatan tentang dukungan terhadap kekerasan ini tentu saja memunculkan pertanyaan yang penting untuk dijawab dalam konteks pengembangan teori psikologi sosial terutama menyangkut dukungan publik terhadap tindakan anarkisme.

Bagaimana dengan publik di Indonesia yang dikenal sangat cinta damai dan anti kekerasan sejak puluhan tahun lalu? Sebagai negara Muslim penganut Islam moderat, banyak kalangan meyakini bahwa Muslim Indonesia tidak

mungkin mendukung aksi kekerasan dan terorisme karena kekerasan dan terorisme bertentangan dengan ajaran Islam<sup>3</sup>. Tetapi banyak penelitian menunjukkan ada indikasi dukungan terhadap radikalisme dan kekerasan terutama terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menistakan agama<sup>4</sup>. Di antara contohnya adalah kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah atau penganut Syiah di Sampang Madura<sup>5</sup> atau kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam terhadap sejumlah pihak<sup>6</sup> (Syaefudin 2014).

Serangan dan kekerasan terhadap kelompok lain selalu membuat identitas menjadi sesuatu yang menonjol, baik pada kelompok penyerang maupun pada kelompok yang diserang<sup>7</sup>. Pyszczynski dkk (2003) mengemukakan tentang menonjolnya identitas nasional, keagamaan dan etnis terkait kasus penyerangan WTC tanggal 11 September 2001. Temuan mereka menyebutkan bahwa penyerangan tersebut memicu dan memunculkan rasa permusuhan dan konflik bukan hanya bagi rakyat Amerika tetapi bagi semua orang dari berbagai belahan dunia<sup>8</sup>.

Dalam situasi ketidakpastian dan penuh ancaman, banyak orang termotivasi untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan psikologis seperti situasi penyerangan dan kekerasan dengan mengidentifikasi orang-orang yang mereka definisikan memiliki keanggotan kelompok yang sama seperti rekan sebangsa, seagama, seetnik, sebudaya atau orang-orang

---

<sup>3</sup> Jamhari. "Fundamentalism and the implementation of sharia in Indonesia." Dalam *A Portrait of Contemporary Indonesian Islam*, oleh Chaidir Bamualim, 67-76. Jakarta : Center for Languages and Cultures, 2005.

<sup>4</sup> Elhady, Aminullah. "Simbolisasi agama: antara ketaatan dan kekerasan atas nama agama dalam masyarakat." *Harmon, Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 2002: Volume 1, Nomor 3, Juli-September. Halaman 37-48. Lihat juga, Baidlowi, Masduki. "Di balik jaringan Islam radikal." *Mimbal Ulama*, Edisi 351 Juni 2011: 3-7

<sup>5</sup> Kontras Surabaya. 2012. *Laporan Pemantauan dan Investigasi Kasus Syiah Sampang Madura*. Surabaya: Kontras Surabaya.

<sup>6</sup> Syaefudin, Machfud. 2014. "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 259-276.

<sup>7</sup> Dovidio, John F., Samuel L. Gaertner, dan Kerry Kawakami. "Intergroup contact: the past, present, and the future." *Group Process & Intergroup Relations*, 2003: 5-20.

<sup>8</sup> Pyszczynski, Tom, Abdolhossein Abdollahi, Sheldon Solomon, Jeff Greenberg, Florette Cohen, dan David Weise. "Mortality salience, martyrdom and military might: The great satan versus the axis of evil." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 281-297. New York: Psychology Press, 2009.

---

<sup>1</sup> Jeff Victoroff, Jeff dan Arie W. Kruglanski, *Psychology of Terrorism* (New York: Psychology Press, 2009), 281-297.

<sup>2</sup> Pyszczynski, Tom, Abdolhossein Abdollahi, Sheldon Solomon, Jeff Greenberg, Florette Cohen, dan David Weise. "Mortality salience, martyrdom and military might: The great satan versus the axis of evil." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski (Ed), 281-297. New York: Psychology Press, 2009. Lihat juga, Levin, Shana, P.J. Henry, Felicia Prato, dan Jim Sidanius. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implication for support of violence against the west." Dalam *Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski (Ed), 253-267. East Sussex: Psychology Press, 2009.

yang memiliki cara pandang keagamaan dan kebudayaan yang sama<sup>9</sup>.

Bahaya sosial paling besar dari situasi ini adalah bahwa identifikasi diri yang sangat kuat dengan ingroup seringkali mendorong orang untuk meremehkan dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain atau tepatnya, anggota kelompok lain di satu sisi, dan di sisi lain, cenderung bersikap berlebihan terhadap kelompok sendiri<sup>10</sup>.

Terdapat banyak penelitian empirik yang menguji peran identitas sosial dalam menggerakkan konflik antarkelompok tetapi dipastikan tidak banyak perhatian yang dicurahkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan identifikasi ingroup atau kelompok sendiri<sup>11</sup>.

Teori dominasi sosial menawarkan satu kemungkinan. Teori dominasi sosial berasumsi bahwa konflik-konflik yang melanda banyak kelompok merupakan hasil dari kecenderungan dasar manusia untuk membentuk sistem dominasi berbasis kelompok di mana kelompok-kelompok tertentu berada pada bagian puncak hirarki sosial dan kelompok lainnya berada pada bagian bawah<sup>12</sup>.

Menurut teori dominasi sosial, anggota kelompok berstatus tinggi dengan hasrat yang lebih besar terhadap ketidaksetaraan kelompok diperkirakan memiliki tingkat identifikasi ingroup yang lebih tinggi karena koneksi dengan ingroup yang dominan mempermudah akses kepada sumber daya sosial dan ekonomi yang dapat digunakan untuk memperkuat perbedaan status berbasis kelompok<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Hogg, Michael A., dan Dominic Abrams. *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. London: Routledge, 1998

<sup>10</sup> Brewer, Marilynn B., dan Samuel L. Gaertner. "Toward reduction of prejudice: Intergroup contact and social categorization." Dalam *Handbooks of Psychology: Intergroup Process*, oleh Rupert Brown dan Samuel L. Gaertner, 451-474. Melden : Blackwell Publishing, 2003

<sup>11</sup> Huddy, Leonnie. "From social to political identity: A critical examination of social identity theory." *Political Psychology*, 22 No. 1 Maret 2001, 2001: 127-156.

<sup>12</sup> Sidanius, Jim, dan Felicia Pratto. *Social Dominance*. New York: Cambridge University Press, 1999. Lihat juga, Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press, 2009.

<sup>13</sup> Sidanius, Jim, dan Felicia Pratto. *Social Dominance*. New York: Cambridge University Press, 1999. Hal ini juga ditemukan dalam artikel Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana

Salah satu cara yang dapat ditempuh anggota kelompok berstatus rendah untuk mereaksi identitas sosial negatif yang ditimbulkan oleh status yang rendah pada mereka adalah dengan mengadopsi struktur kepercayaan perubahan sosial<sup>14</sup>.

### Dukungan Terhadap Kekerasan

Mungkinkah kita mendukung kekerasan? Mungkin ya mungkin pula tidak. Apa yang dimaksudkan dengan dukungan terhadap kekerasan? Dukungan terhadap kekerasan adalah penerimaan terhadap aksi kekerasan dan lembaga atau organisasi yang cenderung memilih jalan kekerasan untuk mencapai tujuan dan penyelesaian masalah. Levin dkk menyebutkan ada dua dimensi dukungan kekerasan yaitu dukungan terhadap organisasi kekerasan dan dukungan terhadap aksi kekerasan<sup>15</sup>. Kesan keabsahan kekerasan dan terorisme di mata publik melahirkan kesan lain seolah-olah publik atau masyarakat terutama asal pelaku memberikan dukungan yang nyata, minimal simpati terhadap aksi kekerasan atau terorisme yang dilakukan segelintir atau sekelompok orang.

Victoroff dan Kruglanski (2009) memberikan bantahan terhadap asumsi yang mengatakan bahwa ada dukungan publik terhadap aksi teror yang dilakukan sejumlah kelompok<sup>16</sup>. Tetapi penelitian lain, misalnya (Levin, P. Henry dan F. Prato, et al. 2009)<sup>17</sup> dan Sidanius, Henry, et al. (2009)<sup>18</sup> menunjukkan ada dukungan publik

Levin. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press, 2009.

<sup>14</sup> Tajfel, Henry, dan John C. Turner. "The social identity theory of intergroup behavior." Dalam *Psychology of Intergroup Relations*, oleh Stephen Worchel dan William G. Austin, 7-24. Illinois: Nelson-Hall Inc, 1986.

<sup>15</sup> Levin, Shana, P.J. Henry, Felicia Prato, dan Jim Sidanius. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implications for support of violence against the west." Dalam *Psychology of Terrorism: Classic and Contemporary Insights*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 253-268. New York: Psychology Press, 2009.

<sup>16</sup> Victoroff, Jeff, dan Arie W. Kruglanski. *Psychology of Terrorism*. New York: Psychology Press, 2009.

<sup>17</sup> Levin, Shana, P.J. Henry, Felicia Prato, dan Jim Sidanius. 2009. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implications for support of violence against the west." In *Psychology of Terrorism: Classic and Contemporary Insights*, by Jeff Victoroff and Arie W. Kruglanski, 253-268. New York: Psychology Press.

<sup>18</sup> Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. 2009. "Arab attribution for the attack on America: the case of

terhadap aksi teror dan kekerasan yang dilakukan sejumlah kelompok teror<sup>19</sup>.

Para peneliti secara menunjuk ke wilayah Timur Tengah sebagai kawasan yang dipenuhi aksi teror dan kekerasan karena mendapatkan dukungan luas dari publik terutama umat Islam yang ada di sejumlah wilayah yang sedang dilanda konflik berkepanjangan. Levin dkk misalnya menemukan bahwa dukungan publik terhadap aksi kekerasan dan teror yang dilakukan sejumlah gerakan Islam seperti Hamas dan Hizbullah berkaitan erat dengan tingkat identifikasi seseorang terhadap negara dan agama, serta berkaitan erat pula dengan kecenderungan dominasi sosial yang melekat dalam dinamika kepribadian responden penelitian<sup>20</sup>.

Penelitian lain yang juga menggambarkan adanya dukungan publik terhadap aksi kekerasan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sidanius dkk (2004; 2009) mengenai atribusi Bangsa Arab terhadap serangan yang ditujukan kepada simbol dan kepentingan Amerika di Timur Tengah. Penelitian ini membandingkan dua penjelasan penting tentang motif di balik sikap permusuhan Bangsa Arab terutama kaum muda Arab terhadap Amerika dan simbol-simbolnya<sup>21</sup>.

Dua penjelasan penting ini, yaitu tesis Huntington tentang benturan peradaban atau perspektif dominasi sosial dari Sidanius, cukup mempengaruhi pola pikir para ilmuwan dalam melihat hubungan antara Islam dan Barat<sup>22</sup>. Simpulan penelitian menyebutkan bahwa motif di balik sikap permusuhan kaum muda Arab bukan benturan peradaban antara Barat dan Islam, tetapi lebih berkaitan dengan penolakan

---

Lebanese subelites." In *The Psychology of Terrorism*, by Jeff Victoroff and Arie W. Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press.

<sup>19</sup> Tim peneliti yang dipimpin oleh Levin dan Sidanius memberikan bukti empirik bahwa dukungan terhadap kekerasan ada di sejumlah lokasi penelitian yang mereka pilih.

<sup>20</sup> Levin, Shana, P.J. Henry, Fellicia Prato, dan Jim Sidanius. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implications for support of violence against the west." Dalam *Psychology of Terrorism: Classic and Contemporary Insights*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 253-268. New York: Psychology Press, 2009.

<sup>21</sup> Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press, 2009.

<sup>22</sup> Victoroff, Jeff, dan Arie W. Kruglanski. *Psychology of Terrorism*. New York: Psychology Press, 2009.

mereka terhadap dominasi Amerika atas Bangsa Arab<sup>23</sup>.

Sejumlah responden menyebutkan bahwa mereka tidak menerima jika diperlakukan tidak adil oleh bangsa-bangsa Barat terutama Amerika Serikat<sup>24</sup>. Penjelasan lain menyebutkan bahwa dukungan terhadap kekerasan, terutama terhadap kelompok-kelompok yang dipersepsi mengancam keyakinan dan ajaran pokok agamanya dimotivasi oleh kesamaan identitas dengan pelaku<sup>25</sup>. Kesimpulan yang sama disebutkan oleh penulis sendiri dalam penelitian lain. Ditemukan bahwa identifikasi yang kuat terhadap identitas sosial yang sama dengan pelaku yang mengatasnamakan pembelaan terhadap agama menjadi pendorong cukup kuat dalam memberikan dukungan<sup>26</sup>.

Untuk mengukur dukungan kekerasan digunakan instrumen dari Levin dkk yang telah diuji. Hasil uji realibilitas untuk skala ini sangat tinggi yaitu  $\alpha=0,93$ .<sup>27</sup> Jumlah penelitian yang jumlahnya relatif sedikit tentang dukungan terhadap kekerasan memperlihatkan bahwa terdapat beberapa faktor penting yang memberikan pengaruh signifikan terhadap dukungan atas kekerasan dan terorisme. Penelitian Levin dkk (2003) dan penelitian Sidanius dkk (2004) menyimpulkan bahwa identifikasi sosial, kecenderungan dominasi sosial dan persepsi keterancaman berpengaruh terhadap

---

<sup>23</sup> Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press, 2009.

<sup>24</sup> Levin, Shana, P.J. Henry, Fellicia Prato, dan Jim Sidanius. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implications for support of violence against the west." Dalam *Psychology of Terrorism: Classic and Contemporary Insights*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 253-268. New York: Psychology Press, 2009. Lihat juga, Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press, 2009.

<sup>25</sup> Ruth, Dyah Madya. *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Lazuardi Birru, 2010.

<sup>26</sup> Saloom, Gazi. *Infiltrasi radikalisme di masjid: Studi kasus di Bogor*. Laporan penelitian. Jakarta: Center for Study of Religion and Culture.

<sup>27</sup> Levin, Shana, P.J. Henry, Fellicia Prato, dan Jim Sidanius. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implications for support of violence against the west." Dalam *Psychology of Terrorism: Classic and Contemporary Insights*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 253-268. New York: Psychology Press, 2009.

dukungan untuk kekerasan<sup>28</sup>.

### Identifikasi Sosial

Identifikasi sosial akan diukur yang versi awalnya disusun oleh Levin dkk. Skala ini digunakan oleh Levin untuk mengukur identifikasi sosial yang sampel penelitiannya diambil dari kalangan orang Arab dan Libanon. Reliabilitas alat ukur identifikasi sosial termasuk tinggi ( $\alpha=0,87$  untuk identifikasi arab, dan  $\alpha=0,88$  untuk identifikasi Libanon)<sup>29</sup>

Sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa identifikasi sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tertentu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel moderator lainnya<sup>30</sup>. Penelitian juga memperlihatkan bahwa pengaruh identifikasi sosial menjadi signifikan terhadap variabel perilaku tertentu manakala dimediasi atau dimoderatori oleh variabel lainnya yang relevan<sup>31</sup>. Jumlah penelitian dengan model seperti ini relatif cukup banyak, termasuk studi-studi yang terkait dinamika psikologis antarkelompok, misalnya studi Brown dan Gaertner (2003)<sup>32</sup>,

<sup>28</sup> Penelitian Levin dkk bertujuan ingin mengetahui jenis atribusi pada sampel Libanon terhadap serangan atas Amerika. Atribusi adalah konsep psikologis yang digunakan menggambarkan sebab serangan yang ditujukan kepada Amerika, apakah disebabkan oleh kesalahan Amerika atau kebencian pihak lain kepada Amerika. Sedangkan penelitian Sidanius dkk ingin melihat pengaruh afiliasi identitas dan kecenderungan kepribadian dominan terhadap dukungan atas kekerasan. Kedua penelitian ini memberikan informasi penting bahwa dukungan terhadap kekerasan memang ada dan nyata.

<sup>29</sup> Levin, Shana, P.J. Henry, Fellicia Prato, dan Jim Sidanius. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implications for support of violence against the west." Dalam *Psychology of Terrorism: Classic and Contemporary Insights*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 253-268. New York: Psychology Press, 2009. Lihat juga, Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press, 2009.

<sup>30</sup> Thye, Shane R., dan Edward J. Lawler. 2005. *Social identification in group: Advances in group process Volume 22*. Oxford: Elsevier Ltd.

<sup>31</sup> Levin, Shana, P.J. Henry, Fellicia Prato, dan Jim Sidanius. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implications for support of violence against the west." Dalam *Psychology of Terrorism: Classic and Contemporary Insights*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 253-268. New York: Psychology Press, 2009. Lihat juga, Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press, 2009.

<sup>32</sup> Brown, Rupert, and Sam Gaertner. 2003. *Handbook of Psychology: Intergroup Processes*. Malden MA: Blackwell Publishing.

studi Castano, Leidner, Slawuta (2008)<sup>33</sup> atau Haslam, Reicher dan Reynolds (2012)<sup>34</sup>

Banyak penelitian yang mengkaji pengaruh identifikasi sosial terhadap konflik antarkelompok, tetapi tidak banyak penelitian yang mengkaji faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kekuatan identifikasi sosial. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa dukungan sosial tidak berpengaruh langsung terhadap dukungan atas aksi kekerasan, tetapi ia harus dimediasi oleh faktor lain seperti orientasi dominasi sosial dan persepsi keterancaman. Oleh karenanya, jika pengaruh identifikasi sosial dilihat pengaruhnya secara langsung terhadap dukungan atas aksi kekerasan maka besar kemungkinan pengaruhnya tidak akan signifikan<sup>35</sup>.

Pengaruh identifikasi sosial terhadap kolaborasi dan kinerja kelompok dalam seting kelompok berdasarkan penelitian dari Rink dkk memperlihatkan nilai yang sangat signifikan. Penelitian yang dilakukan Rink dkk menyimpulkan bahwa identifikasi sosial akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tertentu, dalam hal ini kolaborasi dan kinerja kelompok sesungguhnya bergantung pada sifat identitas dan distingsi norma yang ada pada kelompok<sup>36</sup>.

Rink dkk menyatakan bahwa semakin beririsan keanggotaan kelompok seseorang dengan keanggotaan orang lain maka semakin rendah tingkat identifikasi kelompok pada seseorang. Sebaliknya, semakin tunggal

<sup>33</sup> Brown, Rupert, and Sam Gaertner. 2003. *Handbook of Psychology: Intergroup Processes*. Malden MA: Blackwell Publishing.

<sup>34</sup> Haslam, S.Alexander, Stephen D. Reicher, and Katherine J. Reynolds. 2012. "Identity, influence, and change: Rediscovering John Turner's vision for social psychology." *British Journal of Social Psychology* 51 201-218.

<sup>35</sup> Levin, Shana, P.J. Henry, Fellicia Prato, dan Jim Sidanius. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implications for support of violence against the west." Dalam *Psychology of Terrorism: Classic and Contemporary Insights*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 253-268. New York: Psychology Press, 2009. Lihat juga, Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press, 2009.

<sup>36</sup> Rink, Naomi Ellemers and Floor. 2005. "Identity in work groups: The beneficial and detrimental consequences of multiple identities and group norms for collaboration and performance." Dalam *Social Identification in Groups*, oleh Shane R. Thye dan Edward J. Lawler, 1-42. Oxford: Elsevier.

keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok tanpa ada irisan dengan kelompok lain atau orang lain maka semakin tinggi tingkat identifikasi kelompoknya<sup>37</sup>

Penelitian lain menunjukkan bahwa identitas yang diverifikasi akan menimbulkan emosi positif sedangkan identitas yang tidak diverifikasi akan memunculkan emosi negatif. Kesimpulan ini merupakan data empirik yang memperkuat teori tentang kontrol identitas terhadap perilaku manusia termasuk dalam konteks hubungan antarkelompok<sup>38</sup>.

Dalam bahasa yang lain, semakin jelas identitas seseorang maka semakin positif emosinya sebagai akibat dari kejelasan identitasnya, dan sebaliknya, semakin kabur identitas seseorang semakin tinggi kemungkinan menyebabkan emosi negatif. Emosi positif lahir dari kejelasan identitas dan emosi negatif lahir dari ketidakjelasan identitas.

Dalam konteks dukungan terhadap kekerasan, hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian lain tentang dukungan terhadap kekerasan seperti penelitian Levin dkk (2003) dan penelitian Sidanius dkk (2004) yaitu bahwa identifikasi sosial yang kuat dan disertai dengan orientasi dominasi sosial yang tinggi atau persepsi keterancaman yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap dukungan atas aksi kekerasan dan terorisme<sup>39</sup>.

Terkait dengan hal ini, Lovaglia dkk (2005) menyebutkan bahwa suatu teori tentang diri dan identitas-identitas yang terdapat di dalamnya bisa menjelaskan perbedaan kinerja akademik dan kognitif karena kinerja yang sukses berkaitan dengan motivasi internal yang kuat. Teori kontrol identitas dan teori kontrol afeksi beranggapan bahwa individu berbuat dalam rangka

memperkuat identitas, walaupun perbuatan-perbuatan itu memiliki konsekuensi yang negatif terhadap dirinya<sup>40</sup>.

### Orientasi Dominasi Sosial

Orientasi dominasi sosial sendiri didefinisikan sebagai hasrat individu untuk meraih dominasi sosial, dukungan terhadap hirarki dan dominasi berbasis kelompok dalam wujud dominasi kelompok superior atas kelompok inferior<sup>41</sup>. Orientasi dominasi sosial (ODS) adalah perbedaan individual yang mencerminkan suatu preferensi bagi hubungan kelompok yang hirarkis; suatu preferensi bagi superioritas dan dominasi kelompok sendiri atas kelompok lain. Orang-orang yang memiliki SDO yang tinggi cenderung memfavoritkan ideologi dan kebijakan yang meningkatkan hirarki, sementara yang memiliki SDO rendah cenderung memfavoritkan ideologi dan kebijakan yang memberantas hirarki<sup>42</sup>.

Temuan lain justeru bertentangan dengan apa yang dikemukakan Li dkk, bila Li dkk menemukan bahwa orang-orang yang memiliki SDO rendah cenderung mendukung ideologi dan kebijakan yang memberantas hirarki maka ditemukan orang-orang yang memiliki SDO rendah justeru mendukung struktur yang hirarkis karena mereka terbiasa dan bahkan menikmati suasana dan struktur yang hirarkis tersebut<sup>43</sup>.

SDO atau ODS berkaitan dengan apapun yang menjadi distingsi kelompok yang menonjol dalam suatu konteks sosial yang ada. Distingsi kelompok ini bisa jadi dalam bentuk jenis kelamin, jender, ras, kelas sosial, kebangsaan, wilayah, agama, kelompok bahasa, tingkatan hidup, tim olah raga atau apapun yang secara esensial bisa menimbulkan distingsi potensial di antara kelompok manusia<sup>44</sup>.

---

<sup>37</sup> Rink, Naomi Ellemers and Floor. 2005. "Identity in work groups: The beneficial and detrimental consequences of multiple identities and group norms for collaboration and performance." Dalam *Social Identification in Groups*, oleh Shane R. Thye dan Edward J. Lawler, 1-42. Oxford: Elsevier.

<sup>38</sup> Stets, Jan E., dan Peter J. Burke. 2005. "New directions in identity control theory." Dalam *Social Identification in Groups Advances in Group Processes, Volume 22*, 43-64 ISSN: 0882-6145/doi:10.1016/S0882-6145(05)22002-7, oleh Edward J. Lawler dan Shane R. Thye, 43-64. Oxford : Elsevier.

<sup>39</sup> Identifikasi sosial yang kuat terhadap kelompok pelaku kekerasan atas nama agama dan kecenderungan memiliki kepribadian dominasi sosial dapat menjelaskan mengapa seseorang mendukung kekerasan terhadap pihak lain yang dianggap sebagai musuh target

---

<sup>40</sup> Lovaglia, Michael J., Reef Youngreen, dan Dawn T. Robinson. 2005. "Identity maintenance, affect control, and cognitive performance." Dalam *Social Identification in Groups Advances in Group Processes, Volume 22*, oleh Shane R. Thye dan Edward J. Lawler, 65-91. Oxford: Elsevier.

<sup>41</sup> Sidanius, Jim, dan Felicia Pratto. 1999. *Social Dominance*. New York: Cambridge University Press.

<sup>42</sup> Li, Zheng, Lei Wang, Junqi Shi, dan Wei Shi. 2006. "Support for exclusionism as an independent dimension of social dominance orientation in mainland China." *Asian Journal of Social Psychology* 9 203-209.

<sup>43</sup> Sidanius, Jim, dan Felicia Pratto. 1999. *Social Dominance*. New York: Cambridge University Press.

<sup>44</sup> Sidanius, Jim, dan Felicia Pratto. 1999. *Social Dominance*. New York: Cambridge University Press.

SDO dipengaruhi secara signifikan oleh minimal empat faktor, yaitu: Pertama, SDO akan dipengaruhi oleh keanggotaan seseorang dan identifikasi dengan kelompok yang paling menonjol dan diatur secara hirarkis<sup>45</sup>. Secara umum dan dengan kesetaraan setiap orang berharap bahwa anggota kelompok dominan dan atau siapa saja yang mengidentifikasi diri dengan kelompok dominan akan memiliki SDO yang lebih tinggi dibandingkan anggota kelompok subordinat dan atau siapa saja yang mengidentifikasi diri dengan kelompok subordinat<sup>46</sup>).

Kedua, tingkat SDO seseorang juga dipengaruhi oleh latarbelakang dan faktor sosialisasi seperti tingkat pendidikan, keyakinan keagamaan, dan seluruh pengalaman sosialisasi lainnya seperti perang, depresi, bencana alam<sup>47</sup> (Sidanius & Pratto, 1999) Ketiga, ada alasan untuk percaya bahwa orang-orang yang dilahirkan dengan ciri tempramental dan kepribadian yang berbeda. Salah satu contoh predisposisi itu adalah empati. Ada alasan untuk percaya bahwa semakin tinggi empati seseorang maka semakin rendah SDOnya<sup>48</sup>.

Keempat, tingkat SDO seseorang bergantung pada jender. Segala sesuatu diharapkan setara, laki-laki akan memiliki tingkat SDO yang relatif dan secara rerata lebih tinggi dibandingkan perempuan<sup>49</sup>. Sidanius dkk mengembangkan skala SDO 16 item untuk mengukur sikap terhadap perbedaan kelompok dan hirarki sosial. Terdapat bukti yang banyak mengenai realibilitas dan validitas skala ini atau variasinya yang diperoleh melalui penelitian di Swedia, Australia, negara-negara bekas Uni Soviet, dan beberapa

populasi etnik di Amerika Serikat<sup>50</sup>.

Kendati demikian, studi tentang dimensionalitas skala SDO menghasilkan hasil yang tidak dapat disimpulkan dengan dukungan tertentu, yaitu suatu struktur yang unidimensi dan dukungan lain, suatu struktur dua faktor. Dalam sampel mahasiswa Israel dan Amerika, Sidanius dan Pratto menemukan bahwa SDO terdiri dari dua faktor yang sangat berkaitan, yaitu: Pertama, egalitarianisme berbasis kelompok, dan kedua, dominasi berbasis kelompok. Oleh karena korelasi yang tinggi dan kesamaan konseptual, Sidanius dan Pratto menyatakan bahwa skala ini bersifat unidimensi<sup>51</sup>.

Sebaliknya, Jost dan Thompson di tahun 2000 juga menemukan dua faktor yaitu oposisi terhadap kesetaraan dan dukungan terhadap dominasi berbasis kelompok, dan karenanya mereka menyatakan bahwa SDO memiliki suatu struktur dua faktor<sup>52</sup>.

Di daratan Cina, Li dkk melakukan tiga studi dengan menggunakan analisa eksploratori dan konfirmatori. Studi-studi ini memberikan bukti empirik yang konsisten terhadap model 3 faktor SDO di daratan Cina. Dukungan terhadap pengeluaran yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya muncul sebagai faktor SDO yang independen. Dalam studi kedua, faktor tersebut memprediksi perbedaan SDO antara kelompok status tinggi (kelompok manajer) dan kelompok status rendah (pekerja yang baru bekerja). Dalam studi ketiga, faktor eksklusif berkorelasi secara positif dengan otoritarianisme dan berhubungan secara negatif dengan

---

<sup>45</sup> Identifikasi seseorang dengan suatu kelompok yang memiliki superioritas atas kelompok subordinat lainnya akan melahirkan kecenderungan dominan ketika melakukan interaksi sosial di tengah publik. Dengan kata lain, melahirkan kepercayaan diri yang kerap kali berlebihan.

<sup>46</sup> Sidanius, Jim, dan Felicia Pratto. 1999. *Social Dominance*. New York: Cambridge University Press.

<sup>47</sup> Temuan Sidanius dan Pratto dalam beberapa studi mereka menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi kecenderungan untuk berlaku dominan. Temuan mereka juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman keagamaan seseorang maka semakin tinggi kecenderungannya untuk mendominasi orang lain.

<sup>48</sup> Sidanius, Jim, dan Felicia Pratto. 1999. *Social Dominance*. New York: Cambridge University Press.

<sup>49</sup> Sidanius, Jim, dan Felicia Pratto. 1999. *Social Dominance*. New York: Cambridge University Press.

---

<sup>50</sup> Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. 2009. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press.

<sup>51</sup> Li, Zheng, Lei Wang, Junqi Shi, dan and Wei Shi. 2006. "Support for exclusionism as an independent dimension of social dominance orientation in mainland China." *Asian Journal of Social Psychology* 9 203-209; Lihat juga, Hogg, Michael A., dan Dominic Abrams. 1998. *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. London: Routledge. Baca juga Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. 2009. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press.

<sup>52</sup> Li, Zheng, Lei Wang, Junqi Shi, dan and Wei Shi. 2006. "Support for exclusionism as an independent dimension of social dominance orientation in mainland China." *Asian Journal of Social Psychology* 9 203-209

altruisme sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan hasil studi ini memberikan bukti empirik yang memadai atas validitas faktor SDO yang baru ini<sup>53</sup>.

Penelitian tentang pengaruh SDO terhadap dukungan atas aksi kekerasan telah dilakukan oleh Levin dkk. yang menyimpulkan bahwa SDO memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dukungan atas aksi kekerasan<sup>54</sup>. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sidanius dkk juga menemukan bahwa atribusi permusuhan kaum muda Arab terhadap Amerika dan simbol-simbolnya tidak disebabkan oleh benturan peradaban sebagaimana yang menjadi tesis Huttington, tetapi lebih disebabkan oleh sikap perlawanan sebagai kelompok subordinat<sup>55</sup>. Di dalam penelitian ini disebutkan sikap perlawanan sebagai kelompok tertindas terhadap kelompok penindas merupakan atribusi penting perilaku heroik dan perlawanan mereka. Oleh karenanya, dukungan mereka terhadap kekerasan sebagai perlawanan simbolik terhadap orientasi dominasi sosial yang dipersepsikan melekat pada Amerika dan sekutu-sekutunya<sup>56</sup>.

### Persepsi Keterancaman

Persepsi keterancaman adalah perasaan terancam yang dirasakan seseorang karena adanya ancaman dari pihak lain, baik dalam bentuk ancaman riil maupun ancaman simbolik. Persepsi keterancaman ini kemudian membentuk sikap permusuhan dan bahkan tindakan kekerasan terhadap anggota kelompok yang dipersepsi menjadi sumber ancaman. Ancaman yang lebih banyak dirasakan secara individual menimbulkan rasa takut dan ancaman yang lebih

banyak dirasakan secara kelompok akan melahirkan perilaku balas dendam atau kekerasan balasan yang ditujukan kepada pihak tertentu yang dipandang mengancam<sup>57</sup>.

Menurut Stephan dkk, ada empat jenis ancaman atau persepsi keterancaman, yaitu ancaman simbolik, ancaman riil, kecemasan antarkelompok, dan stereonegatif. Ancaman simbolik adalah ancaman yang berupa perbedaan moral, nilai, standar, keyakinan dan sikap; ancaman riil adalah ancaman yang jelas dan nyata; kecemasan antarkelompok adalah perasaan terancam yang terjadi karena interaksi kelompok di mana dalam proses itu muncul perasaan terhina atau diremehkan; dan terakhir stereonegatif yaitu ancaman yang disebabkan oleh label atau pandangan negatif dari kelompok lain<sup>58</sup>.

Lalonde, Doan dan Patterson di tahun 2000 melakukan suatu penelitian tentang sikap publik terhadap perbaikan politik. Mereka menemukan bahwa sikap individu berhubungan dengan ideologi mereka, dan bahwa sikap yang tidak mendukung ideologi individu pasti dianggap sebagai ancaman potensial terhadap identitas. Contoh, kaum gay dan lesbian dalam studi tersebut lebih besar kemungkinan untuk setuju dengan stereotipe bahwa para pendukung anti perbaikan politik merupakan pengikut kelompok ekstrim sayap kanan yang tidak toleran<sup>59</sup>.

Salah satu temuan paling menarik dalam penelitian Strauss dkk adalah hubungan yang kuat antara *agreeableness* dengan sikap terhadap keragaman. Sebenarnya hubungan seperti ini tidak mengherankan karena *agreeableness* adalah trait seperti sifat tidak mengutamakan diri sendiri, toleransi, sifat menolong, sopan dan kemampuan melakukan kerjasama, dan bahwa tingkat

---

<sup>53</sup> Levin, Shana, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Jim Sidanius. 2009. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implication for support of violence against the west." Dalam *Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 253-267. East Sussex: Psychology Press.

<sup>54</sup> Victoroff, Jeff, dan Arie W. Kruglanski. 2009. *Psychology of Terrorism*. New York: Psychology Press.

<sup>55</sup> Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. 2009. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W. Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press.

<sup>56</sup> Putra, Idhamsyah Eka, dan Ardiningtyas Pitaloka. 2012. *Psikologi Prasangka: Sebab, Dampak, dan Solusi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Lihat pula, Putra, Idhamsyah Eka, dan Ardiningtyas Pitaloka. 2012. *Psikologi Prasangka: Sebab, Dampak, dan Solusi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

---

<sup>57</sup> Putra, Idhamsyah Eka, dan Ardiningtyas Pitaloka. 2012. *Psikologi Prasangka: Sebab, Dampak, dan Solusi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Lihat pula, Putra, Idhamsyah Eka, dan Ardiningtyas Pitaloka. 2012. *Psikologi Prasangka: Sebab, Dampak, dan Solusi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

<sup>58</sup> Strauss, Judy P., Mary L. Connerley, dan Peter A. Ammermann. 2003. "The "Threat Hypothesis," Personality and Attitudes Toward Diversity." *The Journal Of Applied Behavioral Science*, Vol. 39 No. 1, March DOI: 10.1177/0021886303252594 35-52.

<sup>59</sup> *agreeableness* adalah salah satu kepribadian dari model kepribadian *big five* (Oceon) yaitu kepribadian yang mudah akur dan bersepakat. Orang yang memiliki kepribadian ini cenderung ingin menghindari konflik dan lebih memilih untuk melakukan kerjasama, percaya penuh kepada orang lain, hangat dan lembut.

*agreeableness*<sup>60</sup> yang rendah ditemukan berhubungan dengan sikap antisosial dan perilaku yang disfungsi<sup>61</sup>.

Temuan Strauss dkk mendukung hasil penelitian terdahulu seperti Maunt dkk (1998); dan Witt dkk (2002) yang menekankan pentingnya *agreeableness* dalam tugas di mana suasana saling ketergantungan dan kerjasama merupakan persyaratan penting untuk meraih kinerja kontekstual. Trend peningkatan keragaman terkait dan perubahan lingkungan kerja melahirkan kebutuhan yang lebih banyak p orang-orang yang mampu berinteraksi secara positif dengan keragaman orang lain dalam seting kerja<sup>62</sup>.

Dalam penelitian ini, hanya persepsi keterancaman simbolik yang akan digunakan karena lebih relevan dengan konteks hubungan antarkelompok yang terjadi pada sampel penelitian yang dipilih. Konstruksi alat ukur persepsi keterancaman didasarkan atas teori persepsi keterancaman yang dikembangkan oleh Stephen. Teori ini dipandang mampu mendasari pembuatan alat ukur yang mengukur persepsi atau perasaan terancam seseorang atas ideologi atau keyakinan yang ia anut.<sup>63</sup>

Ketidakpastian, diri maupun kolektif, dapat melahirkan persepsi keterancaman pribadi maupun kelompok. Kondisi ini memotivasi seseorang untuk melakukan identifikasi diri yang kuat terhadap kelompoknya serta perilaku yang dapat memunculkan jiwa korsa kelompok. Pada kondisi ketidakpastian yang lebih ekstrim, identifikasi terkesan lebih tegas dan jiwa korsa berkaitan dengan ortodoksi, hirarki dan

ekstrimisme serta berhubungan pula dengan sistem keyakinan yang bersifat ideologis<sup>64</sup>.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan non eksperimen dan metode kuantitatif dengan prosedur sebagai berikut: kuisioner yang mengukur reaksi terhadap kekerasan dan serangan kepada kelompok Islam Jamaah dan Syiah, serta sikap terhadap berbagai ormas Islam atau kelompok Islam yang dipersepsi publik sering melakukan kekerasan terhadap Islam Jamaah dan Syiah (seperti FPI dan lain-lain) dibagikan kepada kurang lebih kepada 220 responden mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Jakarta yang mewakili semua mahasiswa aktif pada tahun ajaran 2014/2015, tetapi yang dipakai untuk penelitian sebanyak 198 paket karena yang lain dipandang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis.

Data dianalisis dengan menggunakan program komputer statistik Lisrel dan SPSS. Program komputer statistik Lisrel digunakan untuk menguji validitas konstruk dan item pengukuran, sedangkan program statistik SPSS digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu melalui tehnik analisis regresi berganda. Selain itu, untuk menemukan kesesuaian model teoritik dengan model data maka digunakan tehnik analisis SEM.

## C. HASIL PENELITIAN

Penulis menguji validitas konstruk pada masing – masing variabel. Teknik uji validitas yang penulis gunakan adalah uji validitas *confirmatory factor analysis* (CFA). Pada CFA peneliti berteori bahwa terdapat faktor yang diukur oleh item atau *observed variables*, kemudian model teoritis tersebut dibandingkan dengan data empiris. Jika kedua data tersebut fit atau tidak ada perbedaan, maka model teoritis dinyatakan tidak ditolak dan sebaliknya. Kriteria model teoritis dan data dinyatakan fit atau tidak ialah apabila nilai chi-square pada model tersebut lebih besar dari 0.05 ( $p > 0.05$ ).

Skala orientasi dominan sosial memiliki item sejumlah 16 Hasil pertama analisis CFA pada variabel dominan sosial menunjukkan bahwa model pengukuran skala dominan sosial tidak fit dengan data ( $p < 0.05$ ), pada nilai chi-square = 628.04;  $df = 104$ ; dan RMSEA = 0.167. namun

---

<sup>60</sup> Strauss, Judy P., Mary L. Connerley, dan Peter A. Ammermann. 2003. "The "Threat Hypothesis," Personality and Attitudes Toward Diversity." *The Journal Of Applied Behavioral Science*, Vol. 39 No. 1, March DOI: 10.1177/0021886303252594 35-52.

<sup>61</sup> Strauss, Judy P., Mary L. Connerley, dan Peter A. Ammermann. 2003. "The "Threat Hypothesis," Personality and Attitudes Toward Diversity." *The Journal Of Applied Behavioral Science*, Vol. 39 No. 1, March DOI: 10.1177/0021886303252594 35-52.

<sup>62</sup> Sidanius, Jim, dan Felicia Pratto. 1999. *Social Dominance*. New York: Cambridge University Press. Lihat pula, Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, dan Shana Levin. 2009. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." Dalam *The Psychology of Terrorism*, oleh Jeff Victoroff dan Arie W Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press.

<sup>63</sup> Hogg, Michael A., dan Dominic Abrams. 1998. *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. London: Routledge.

penulis memodifikasi model tersebut dengan cara membebaskan korelasi kesalahan pengukuran antar item, sehingga diperoleh model fit. Model teoritis orientasi dominasi sosial dinyatakan fit dengan data ( $p > 0.05$ ) pada nilai chi-square = 83.02;  $df = 64$ ; RMSEA = 0.041. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara model teoritis DS dengan model empiris orientasi dominasi sosial. Selanjutnya yang dilakukan adalah menguji signifikan atau tidaknya item – item skala ODS.

Skala persepsi keterancaman terdiri dari 4 item. Hasil analisis awal CFA pada skala persepsi keterancaman menunjukkan bahwa model pengukuran persepsi keterancaman dinyatakan tidak fit dengan data empiris ( $p < 0.05$ ). Nilai chi-square awal pada model ini yaitu 12.47,  $df = 2$  dan RMSEA = 0.171. Model pengukuran skala persepsi keterancaman dinyatakan fit dengan data empiris ( $p > 0.05$ ). Nilai chi-square pada model tersebut yaitu 0.00;  $df = 1$ ; dan RMSEA = 0.000

Pada skala DTK dan IS, penulis menggabungkan kedua skala tersebut dikarenakan item pada skala IS hanya ada dua. Jika item hanya ada dua, maka analisis CFA pada Lisrel tidak dapat dilakukan sebab derajat kebebasan menjadi negatif. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah menggabungkan data item tersebut dengan data item yang lain. Hasil awal analisis CFA atas kedua variabel tersebut menunjukkan model teoritis yang tidak fit, dengan nilai chi-square = 6.19;  $df = 4$ ; dan RMSEA = 0.055. Oleh karena itu, penulis memodifikasi model pengukuran tersebut sehingga diperoleh model fit.

### Uji Hipotesis

Penulis menguji hipotesis hubungan antar variabel. Variabel independen dalam penelitian ini ialah identifikasi sosial, orientasi dominan hasil, dan persepsi keterancaman, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini ialah dukungan terhadap perilaku kekerasan. Analisis statistik yang digunakan ialah analisis regresi. Pada analisis regresi, peneliti menguji dampak variabel independen terhadap variabel dependen (R Square)

R square merupakan informasi mengenai seberapa besar bervariasinya variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Dengan kata lain, penulis ingin mengetahui seberapa banyak varian dari dukungan terhadap perilaku

kekerasan yang dijelaskan atas bervariasinya variabel identifikasi sosial, orientasi dominan hasil dan persepsi keterancaman

Melalui analisis statistik dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: Variabel dominasi sosial memberikan kontribusi rsquare sebesar 0.033 atau 3.3% bervariasinya variabel dukungan terhadap kekerasan disebabkan oleh variabel dominasi sosial. Sumbangan varians tersebut signifikan ( $p < 0.05$ ). Sedangkan variabel persepsi keterancaman memberikan kontribusi varian sebesar 0.293 atau 29.3% atas bervariasinya variabel dukungan terhadap kekerasan. Sumbangan tersebut signifikan ( $p < 0.05$ ).

Sementara itu, variabel identifikasi sosial memberikan kontribusi varian yang tidak signifikan ( $p > .05$ ) yaitu sebesar 0.007 atau 0.7% atas bervariasinya variabel dukungan terhadap kekerasan. Koefisien regresi variabel dominasi sosial sebesar 0.486 ( $p < 0.05$ ). Kemudian variabel persepsi keterancaman memiliki koefisien regresi sebesar 0.917 ( $p < 0.05$ ). Koefisien regresi variabel identifikasi sosial tidak berpengaruh secara signifikan ( $p > 0.05$ ), dengan koefisien regresi yaitu 0.072.

Tabel 1 Hasil Regresi Berganda

Variabel	R Square	Change Statistics				
		R Change	Square Change	F Change	df1	df2
Dominasi Sosial	,033	,033	6,023	1	179	,015
Persepsi Keterancaman	,325	,293	77,186	1	178	,000
Identifikasi Sosial	,332	,007	1,813	1	177	,180

Pada tahapan analisis ini penulis menguji pengaruh secara keseluruhan atau simultan variabel dominan sosial, persepsi keterancaman dan identifikasi sosial terhadap variabel dukungan terhadap kekerasan. Apabila nilai uji-F signifikan ( $p < 0.05$ ), maka artinya seluruh IV tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dukungan terhadap kekerasan. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji-F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	207.827	3	69.276	29.326	,000*
	Residual	418.127	177	2.362		
	Total	625.955	180			

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel independen yaitu orientasi dominasi sosial, persepsi keterancaman dan identifikasi sosial berpengaruh secara simultan terhadap variabel dukungan terhadap kekerasan. Untuk mengetahui pengaruhnya secara detail satu persatu, maka berikut penulis laporkan uji-t terhadap masing-masing koefisien regresi variabel independen.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.325E-5	.114		.001	.999
	Dominasi Sosial	.486	.159	.246	3.051	.003
	Persepsi Keterancaman	.917	.108	.649	8.455	.000
	Identifikasi Sosial	.072	.054	.096	1.346	.180

Berdasarkan informasi koefisien beta (kolom *standardized coefficient*) variabel persepsi keterancaman memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap dukungan kekerasan dibandingkan dengan pengaruh variabel independen lainnya. Hal ini dapat dilihat melalui koefisien beta variabel persepsi atas keterancaman paling besar diantara koefisien beta variabel independen lainnya yaitu sebesar 0.649. Lihat tabel 3 di bawah ini.

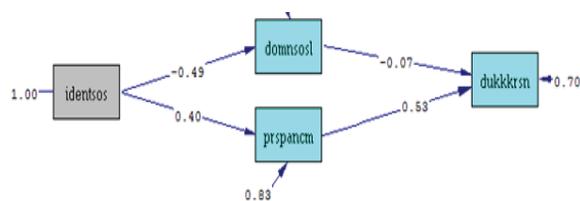
Tabel 3

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.325E-5	.114		.001	.999
	Dominasi Sosial	.486	.159	.246	3.051	.003
	Persepsi Keterancaman	.917	.108	.649	8.455	.000
	Identifikasi Sosial	.072	.054	.096	1.346	.180

### Variabel Mediator Orientasi Dominasi Sosial dan Persepsi Keterancaman

Penulis menguji model penelitian yang telah digambar pada bagian sebelumnya, yang mana variabel orientasi dominasi sosial dan persepsi keterancaman berperan sebagai variabel mediator atas pengaruh identifikasi sosial terhadap dukungan terhadap kekerasan. Adapun hasil uji model tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4  
Hasil Uji Model Variabel Mediator



Chi-Square=0.05, df=1, P-value=0.82220, RMSEA=0.000

Model diatas memiliki beberapa indek kriteria fit Model yang menyatakan bahwa variabel dominasi sosial dan persepsi keterancaman berperan sebagai variabel mediator atas pengaruh variabel identifikasi sosial terhadap dukungan terhadap kekerasan dinyatakan fit dengan data.

Dengan demikian model tersebut dinyatakan tidak ditolak pada data empiris penelitian ini. Variabel persepsi keterancaman berpengaruh signifikan terhadap variabel dukungan kekerasan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.53 ( $t=8.78$ ;  $p < 0.05$ ). Variabel identifikasi sosial berpengaruh signifikan terhadap dukungan kekerasan dengan koefisien regresi sebesar 0.25 ( $t=4.46$ ;  $p < 0.05$ ). Variabel identifikasi sosial berpengaruh signifikan terhadap variabel dominasi sosial dengan koefisien regresi sebesar -0.49 ( $t=7.61$ ;  $p < 0.05$ ). Kemudian koefisien regresi identifikasi sosial pada persepsi keterancaman sebesar 0.40 ( $t=5.92$ ;  $p < 0.05$ ).

Pada kolom total effect, variabel identifikasi sosial berpengaruh signifikan baik terhadap dukungan kekerasan, dominasi sosial maupun terhadap persepsi keterancaman. Namun begitu, variabel mediator yang hanya berpengaruh signifikan terhadap dukungan kekerasan hanyalah variabel persepsi keterancaman, sedangkan variabel dominasi sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap dukungan kekerasan.

### D. KESIMPULAN

Secara keseluruhan atau bersama-sama, seluruh independent variables (identifikasi sosial, orientasi dominasi sosial, dan persepsi keterancaman) berpengaruh signifikan terhadap dukungan atas kekerasan. Secara sendiri-sendiri, orientasi dominasi sosial dan persepsi keterancaman berpengaruh signifikan terhadap dukungan atas aksi kekerasan, sedangkan identifikasi sosial tidak berpengaruh terhadap dukungan atas aksi kekerasan. Orientasi

dominasi sosial memberikan sumbangan sebesar 3,3% terhadap dukungan atas perilaku kekerasan, sedangkan persepsi keterancaman memberikan sumbangan sebesar 29,3% terhadap dukungan atas perilaku kekerasan. Untuk identifikasi sosial sumbangannya terhadap dukungan atas perilaku kekerasan hanya sebesar 0,07% dan karenanya tidak signifikan.

Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan studi kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika

identitas dan persepsi keterancaman terhadap dukungan melakukan kekerasan. Dengan studi eksplorasi sebagai tindaklanjut penelitian ini maka diharapkan akan diperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengapa kecenderungan intoleransi dan kekerasan mendapatkan dukungan publik.[]

## DAFTAR PUSTAKA

- Baidlowi, Masduki. 2011. "Di balik jaringan Islam radikal." *Mimbal Ulama*, Juni Edisi 351: 3-7.
- Bakar, Irfan Abu, and Chaidar S. Bamualim. 2006. *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.
- Bates, Debbie S., and Paul A. Toro. 1999. "Developing measures to assess social support among homeless and poor people." *Journal of Community Psychology*, Vol. 27, No. 2 137-156.
- Brewer, Marilynn B., and Samuel L. Gaertner. 2003. "Toward reduction of prejudice: Intergroup contact and social categorization." In *Handbooks of Psychology: Intergroup Process*, by Rupert Brown and Samuel L. Gaertner, 451-474. Malden : Blackwell Publishing.
- Brown, Rupert, and Sam Gaertner. 2003. *Handbook of Psychology: Intergroup Processes*. Malden MA: Blackwell Publishing.
- Castano, Emanuele, Bernhard Leidner, and Patrycja Slawuta. 2008. "Social identification processes, group dynamics and the behaviour of combatants." *International Review of Red Cross* Volume 90 Number 870 June 259-271.
- Cowman, Shaun E., Joseph R. Ferrari, and Matthew Liao-Troth. 2004. "Mediating effect of social support on firefighter's sense of community and perception of care." *JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY*, Vol. 32, No. 2 121-126. DOI: 10.1002/jcop.10089 .
- Descamps, Jean Claude, and Thierry Devos. 1998. "Regarding the relationship between social identity and personal identity." In *Social Identity: International Perspective*, by Stephen Worchel, 123-140. London: Sage Publication.
- Dovidio, John F., Samuel L. Gaertner, and Kerry Kawakami. 2003. "Intergroup contact: the past, present, and the future." *Group Process & Intergroup Relations* 5-20.
- Elhady, Aminullah. 2002. "Simbolisasi agama: antara ketaatan dan kekerasan atas nama agama dalam masyarakat." *Harmon, Jurnal Multikultural dan Multireligius* Volume 1, Nomor 3, Juli-September. Halaman 37-48.
- Ellemers, Naomi, Russels Spears, and Bertjan Doosje. 2002. "Self and Social Identity." *Annual Review of Psychology* 53 161-186.
- Fiedler, Klaus, and Jeanette Schmid. 2003. "How language contributes to persistence of stereotypes as well as other, more general, intergroup issues." In *Intergroup Process: Handbook of Social Psychology*, by Rupert Brown and Sam Gaertner, 261-280. Oxford: Blackwell Publishing.
- Hamm, Mark S. 2009. "Prison Islam in the age of sacred terror." *Brit. J. Criminol* 49, 667-685; doi:10.1093/bcj/azp035.
- Hasan, Noorhaidi, and Irfan Abubakar. 2011. *Islam di ruang publik: politik identitas dan masa depan demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Center for Study of Religion and Culture.
- Haslam, S.Alexander, Stephen D. Reicher, and Katherine J. Reynolds. 2012. "Identity, influence, and change: Rediscovering John Turner's vision for social psychology." *British Journal of Social Psychology* 51 201-218.
- Hogg, Michael A., and Dominic Abrams. 1998. *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. London: Routledge.
- Huddy, Leonnie. 2001. "From social to political identity: A critical examination of social identity theory." *Political Psychology*, 22 No. 1 Maret 2001 127-156.
- Ismail, Noor Huda. 2010. *Temanku, Teroris? Saat Dua Santri Ngruki Menempuh Jalan Berbeda*. Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Jamhari. 2005. "Fundamentalism and the implementation of sharia in Indonesia." In *A Potrait of Contemporary Indonesian Islam*, by Chaidir Bamualim, 67-76. Jakarta : Center for Languages and Cultures.
- Kontras Surabaya. 2012. *Laporan Pemantauan dan*

*Investigasi Kasus Syiah Sampang Madura*. Surabaya: Kontras Surabaya.

*Dampak, dan Solusi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Levin, Shana, P.J. Henry, Felicia Pratto, and Jim Sidanius. 2009. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implication for support of violence against the west." In *Psychology of Terrorism*, by Jeff Victoroff and Arie W. Kruglanski, 253-267. East Sussex: Psychology Press.
- Levin, Shana, P.J. Henry, Fellicia Pratto, and Jim Sidanius. 2009. "Social dominance and social identity in Lebanon: Implications for support of violence against the west." In *Psychology of Terrorism: Classic and Contemporary Insights*, by Jeff Victoroff and Arie W. Kruglanski, 253-268. New York: Psychology Press.
- Li, Zheng, Lei Wang, Junqi Shi, and and Wei Shi. 2006. "Support for exclusionism as an independent dimension of social dominance orientation in mainland China." *Asian Journal of Social Psychology* 9 203-209.
- Lovaglia, Michael J., Reef Youngreen, and Dawn T. Robinson. 2005. "Identity maintenance, affect control, and cognitive performance." In *Social Identification in Groups Advances in Group Processes, Volume 22*, by Shane R. Thye and Edward J. Lawler, 65-91. Oxford: Elsevier.
- Milla, Mirra Noor. 2010. *Mengapa memilih jalan teror: Analisa psikologis pelaku teror*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miller, R. Jeff, and Yvonne Darlington. 2002. "Who supports? The provider of social support to dual parent families caring for young children." *JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY*, Vol. 30, No. 5, 461-473 461-473.
- Nelson, Todd D. 2002. *The Psychology of Prejudice*. Boston: Allyn & Bacon.
- Nemoto, Tooru. 1998. "Subjective Norms Toward Social Support Among Japanese American Elderly in New York City: Why Help Does Not Always Help." *Journal Of Community Psychology*, Vol. 26, No. 4 293-316.
- Putra, Idhamsyah Eka, and Ardiningtyas Pitaloka. 2012. *Psikologi Prasangka: Sebab, Dampak, dan Solusi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pyszczynski, Tom, Abdolhossein Abdollahi, Sheldon Solomon, Jeff Greenberg, Florette Cohen, and David Weise. 2009. "Mortality salience, martyrdom and military might: The great satan versus the axis of evil." In *The Psychology of Terrorism*, by Jeff Victoroff and Arie W. Kruglanski, 281-297. New York: Psychology Press.
- Rink, Naomi Ellemers and Floor. 2005. "Identity in work groups: The beneficial and detrimental consequences of multiple identities and group norms for collaboration and performance." In *Social Identification in Groups*, by Shane R. Thye and Edward J. Lawler, 1-42. Oxford: Elsevier.
- Ruth, Dyah Madya. 2010. *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Lazuardi Birru.
- Saloom, Gazi. 2012. "Hubungan Mayoritas-Minoritas di Bogor: Kajian Psikologi Sosial Tentang Perilaku Antarkelompok." *Dialog Volume 35 Nomor 1* 73-88.
- Saloom, Gazi. in press. *Infiltrasi radikalisme di masjid: Studi kasus di Bogor*. Jakarta: Center for Study of Religion and Culture.
- Searing, Donald D. 1986. "A Theory of Political Socialization: Institutional Support and Deradicalization in Britain." *British Journal of Political Science*, Vol. 16, No. 3. (Jul., 1986), pp. 341-376.
- Sidanius, Jim, and Felicia Pratto. 1999. *Social Dominance*. New York: Cambridge University Press.
- Sidanius, Jim, P.J. Henry, Felicia Pratto, and Shana Levin. 2009. "Arab attribution for the attack on America: the case of Lebanese subelites." In *The Psychology of Terrorism*, by Jeff Victoroff and Arie W. Kruglanski, 269-279. East Sussex: Psychology Press.
- Stets, Jan E., and Peter J. Burke. 2005. "New directions in identity control theory." In *Social Identification in Groups Advances in Group Processes, Volume 22*, 43-64 ISSN: 0882-6145/ doi:10.1016/S0882-6145(05)22002-7, by Edward J. Lawler and Shane R. Thye, 43-

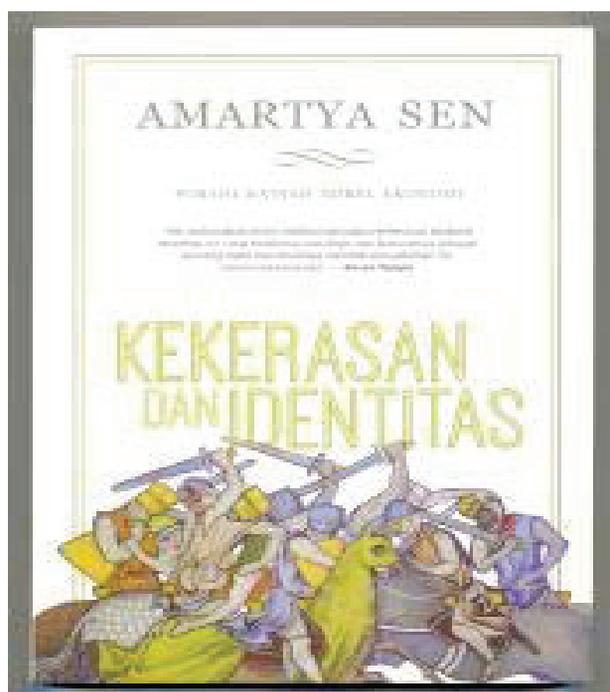
64. Oxford : Elsevier.
- Strauss, Judy P., Mary L. Connerley, and Peter A. Ammermann. 2003. "The "Threat Hypothesis," Personality and Attitudes Toward Diversity." *THE JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE*, Vol. 39 No. 1, March DOI: 10.1177/0021886303252594 35-52.
- Syaefudin, Machfud. 2014. "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)." *JURNAL ILMU DAKWAH*, Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 259-276.
- Tajfel, Henry, and John C. Turner. 1986. "The social identity theory of intergroup behavior." In *Psychology of Intergroup Relations*, by Stephen Worchel and William G. Austin, 7-24. Illinois: Nelson-Hall Inc.
- Thye, Shane R., and Edward J. Lawler. 2005. *Social identification in group: Advances in group process Volume 22*. Oxford: Elsevier Ltd.
- Victoroff, Jeff, and Arie W. Kruglanski. 2009. *Psychology of Terrorism*. New York: Psychology Press.
- Wijayanto, Setyo Hari. 2008. *Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8: Konsep dan Tutorial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



# MENOLAK KEKERASAN IDENTITAS TUNGGAL

FATHUROZI\*

---



Judul Buku:  
**Kekerasan dan Identitas**  
Penulis:  
**Amartya Sen**  
Penerjemah:  
**Arif Susanto**  
Penerbit:  
**Marjin Kiri Jakarta**  
Cetakan:  
**Edisi 2, Februari 2016**  
Tebal:  
**xxii+242 Halaman**

Indonesia tak bisa terhindar dari namanya konflik suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Konflik ini hampir setiap tahun terjadi, padahal berbagai cara dilakukan pemerintah dan penggerak kerukunan mulai dari diskusi, seminar dan workshop berbasis kerukunan dalam memutus rantai konflik. Namun konflik tetap terjadi dalam masyarakat yang majemuk.

Rentetan konflik yang mengganggu keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia yaitu. Pertama, tahun 1998 konflik antar Etnis. Konflik terjadi antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Kedua, tahun 1999 konflik antar agama di Ambon. Konflik melibatkan umat agama Islam dan Kristen. Ketiga, tahun 2000

konflik antar golongan agama. Kekerasan yang dialami warga Ahmadiyah dan Syiah. Keempat, tahun 2001 konflik antar suku di Sampit, antara warga Dayak dengan Warga Madura. Kelima, tahun 2012 terjadi konflik di Sampang Madura. Konflik ini melibatkan dua aliran agama dalam komunitas muslim Syiah dan Sunni. Keenam, tahun 2015 terjadi konflik agama di Tolikara, Papua. Konflik kaum muslimin dan Kristen.

Konflik yang berbau SARA yang terjadi di Indonesia dan dunia internasional, sebabkan adanya pemaksaan identitas tunggal. Identitas tunggal memandang identitas lainnya penuh kecurigaan, tak ayal kekerasan semakin membara. Padahal identitas bisa dijadikan kekuatan dalam menjalin hubungan antar kelompok keagamaan.

Identitas menjadi penting dalam tataran pemerintahan, orang tanpa identitas tak akan mendapatkan haknya sebagai warga negara. Semisal kasus anak dari aliran kepercayaan tidak naik kelas karena tidak mau mengikuti pelajaran agama yang diakui pemerintah. Kelihatannya identitas takdir yang harus melekat pada tiap

---

\* Staf Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.  
Email: fathurozi1983@gmail.com

manusia.

Dalam buku "Kekerasan dan Identitas" karya Amartya Sen. Sen mengutarakan dalam penggunaan identitas terdapat dua kesalahan yakni. Pertama, memahami bahwa identitas itu secara mutlak bersifat majemuk, dan bahwa taraf kepentingan suatu identitas tidak harus meniadakan kepentingan identitas lainnya. Kedua, seseorang harus mengambil pilihan secara tegas ataupun tidak mengenai kepentingan relatif manakah yang harus diberikan sesuai konteksnya, di antara berbagai kesetiaan dan prioritas yang mungkin saling berebut untuk diutamakan.

Adanya pengotakan identitas seperti agama, etnis, ras akan menimbulkan kekerasan karena kecintaanya terhadap kelompoknya melebihi segalanya. Tak heran, jika identitas sering dijadikan alat untuk kepentingan kelompoknya. Sen menceritakan kekerasan komunal di India antara Hindu-Muslim, peristiwa ini terjadi karena adanya pimpinan yang memelintir identitas. Mereka mendoktrin pengikutnya, dengan mengatakan orang Hindu atau orang Islam yang harus balas dendam pada komunitas lain (halaman 221).

Buku dengan tebal 242 halaman menggunakan analisa kritis. Sen mengkritik Samuel Huntington yakni. Pertama, teori "benturan peradaban" yang menggambarkan "India sebagai peradaban Hindu" merupakan kesalahan besar karena mengabaikan fakta. Menurut Sen, India memiliki penduduk Muslim terbanyak ketiga di dunia. Kurang lebih tercatat 145 juta penduduk muslim di India. Kedua, teori kategorisasi keagamaan seperti peradaban Islam, peradaban Hindu. Sen menjelaskan dengan adanya kategorisasi ini membuat kesalahan karena melihat manusia dari afiliasi tunggal yakni agamanya.

### **Multikulturalisme**

Islam dewasa ini menjadi agama yang paling banyak diperdebatkan. Sebagian orang berpikir, Islam mencetak fanatisme dan kekerasan. Padahal agama Islam adalah agama damai dan memiliki daya pikat spiritual yang dalam. Namun jika agama dilibatkan dalam politik akan menimbulkan perpecahan. Contohnya Spanduk yang bertuliskan "Masjid Ini Tidak Mensholatkan Jenazah Pendukung dan Pembela

Penista Agama" menjelang putaran kedua pilkada DKI. Spanduk ini memunculkan pro kontra di kalangan kaum muslim.

Menurut Sen, menjadi Muslim hampir mustahil menjadi satu-satunya identitas yang dimiliki seorang Muslim. Contohnya kejadian 11 September pengeboman World Trade Center (WTC) menempatkan kubu umat Muslim saling berseberangan. Hal ini menandakan kaum Muslim tanpa harus meninggalkan identitas Islamnya dalam menyikapi peristiwa tersebut.

Pasca peristiwa pengeboman WTC sangat penting memahami identitas Muslim yakni. Pertama, memandang kaum Muslim semata-mata atau terutama dalam kerangka keIslaman mereka. Kedua, memahami mereka secara lebih luas dalam kerangka afiliasinya yang beragam (halaman 91).

Terkadang dikalangan muslim kurang mampu melihat perbedaan antara menjadi seorang muslim dan memiliki identitas Islam akan teruskan dan bertanya 'Manakah pandangan yang benar menurut Islam? Apakah Islam mendukung toleransi, atau tidak? Manakah yang sesungguhnya benar?' Persoalan utama yang kita hadapi di sini bukanlah apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas, melainkan apakah pertanyaannya itu sendiri tepat. Menjadi seorang muslim bukanlah suatu identitas mutlak yang menentukan segala keyakinan orang yang bersangkutan" (halaman 84).

Pada tahun 1998, Amartya Sen menerima penghargaan Nobel bidang ekonomi atas karyanya dalam "Ekonomi Kesejahteraan". Menurut laki-laki kelahiran India, Penganut identitas tunggal kurang memperdulikan sikap toleransi. Padahal toleransi sangat penting diterapkan dalam masyarakat multikultural.

Sen menunjukkan sebagian besar sarjana Muslim menolak mentah-mentah klaim bahwa ajaran Islam mewajibkan atau membolehkan dan bahkan mentolerir terorisme. Buku ini mengajak pembaca merenungi konflik-konflik keagamaan yang terjadi di belahan dunia.

Menurutnya, setidaknya ada dua pendekatan berbeda dalam memandang multikulturalisme. Pertama, memandang bahwa menggencarkan multikulturalisme itu sudah dengan sendirinya merupakan nilai yang mesti dibela. Sementara pendekatan yang lain berfokus pada kebebasan dalam menalar dan mengambil keputusan.

Buku ini, menelusuri isu-isu

multikulturalisme, pasca-kolonialisme, fundamentalisme, terorisme, dan globalisasi. Identitas yang kini menjadi pemicu utama pertikaian-pertikaian kontemporer. Buku ini

layak dibaca untuk menambah wawasan pengetahuan tentang konflik yang terjadi Indonesia dan Dunia internasional.



**KOMUNIKASI BUDAYA: SUATU  
TINJAUAN ANTROPOLOGI  
PENGGUNAAN TANGAN KIRI PADA  
MASYARAKAT DI SEKITAR KAMPUS  
PERAK**

**ABDUL JALIL**

**ABSTRACT:**

*The phenomenon of left hand use (which is culturally unusual) by the community around the Campus Perak urges the authors explore its background from the cultural approach in an ethnographic study. There had been some community practices around Campus Perak in Southeast Sulawesi that are considered as anomalies by outsiders' perspectives. Among those anomalies is the use of the left hand in giving something to others, such as serving food, writing, and signing letters. This paper explores the use of the left hand amidst the society around the Perak Campus. In general, several ethnic groups inhabit the area around campus, thus no particular ethnic dominates the use of everyday language. Tribal languages are commonly used among people from the similar ethnicity. In the context of formal ceremonies involving community outside Campus Perak, the use of left hand was seen as a culture shock. Meanwhile, the use of left hand was (intra)culturally acceptable since children were taught using left hands by their parents.*

**KEY WORDS**

*Left Hand, Cultural Communication, Campus Perak, Society*

**ABSTRAK:**

Fenomena penggunaan "tangan kiri" oleh masyarakat di sekitar Kampus Perak, mendorong penulis untuk mencari akar masalah melalui pendekatan kebudayaan dengan metode etnografi. Di Kampus Perak Sulawesi Tenggara, banyak perilaku yang menurut kaca mata others banyak keganjilan. Di antara keganjilannya adalah penggunaan tangan kiri dalam memberikan sesuatu kepada orang lain, baik dalam hal memberikan makanan atau saat menulis, bahkan penandatanganan surat. Tulisan ini hendak melihat kembali sejauhmana

penggunaan tangan kiri yang berlaku di sekitar Kampus Perak. Secara umum, kampus ini banyak dihuni oleh beberapa etnis, sehingga satu sama lain tidak dapat mendominasi sebagai penggunaan bahasa sehari-hari. Umumnya bahasa sesama suku sering digunakan ketika hendak bercakap dengan sesama jenis suku saja. Penggunaan tangan kiri akan dipahami oleh orang lain sebagai perilaku yang shock culture ketika dalam ceremonial atau upacara resmi. Selain itu, hasil dari pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa tangan kiri yang digunakan oleh masyarakat tidak lepas dari pola pengasuhan orang tua terhadap penggunaan tangan kiri saat masih kecil.

**KATA KUNCI:**

Tangan Kiri, Kidal, Komunikasi Budaya, Kampus Perak.

---

**DINAMIKA PERIBADATAN  
GEREJA INJILI DI INDONESIA PASCA  
KONFLIK TOLIKARA: STUDI KASUS  
DI DESA MOJOKERTO KECAMATAN  
KEDAWUNG SRAGEN**

**MUSTOLEHUDIN**

**ABSTRACT**

*Evangelical church named Gereja Injili di Indonesia (GIDI) has been established in Sragen since 1990. Since its establishment to the mid-2015, there has been no significant disagreement with the local people. A friction appeared shortly after Tolikara conflict in July 2015. By employing a qualitative approach, this study finds out that: first, GIDI in Sragen has not obtained a juridical license according to Joint Ministerial Regulations (PBM) No. 8 and 9 2006. Second, the accusation of Surakarta Muslim Troops (Laskar Umat Islam Surakarta) that GIDI created disharmony in the society was proven not true. The church committee maintained a good cooperation with local society in terms of helping them during their celebration ceremonies.*

**KEY WORDS:**

### ABSTRAK

Keberadaan Gereja Injili di Indonesia di Sragen telah ada sejak tahun 1990. Sejak berdiri hingga pertengahan tahun 2015 tidak terjadi kendala yang berarti. Gesekan mulai muncul pasca peristiwa konflik Tolikara bulan Juli 2015. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini diperoleh temuan bahwa; Pertama, secara yuridis GIDI di Sragen belum berizin sesuai PBM No 8 dan 9 Tahun 2006 karena gereja ini sudah ada sejak tahun 1990. Kedua, tuduhan Laskar Umat Islam Surakarta bahwa gereja tersebut meresahkan warga tidak terbukti, hal ini disebabkan pengurus gereja menjalin kerja sama dengan warga dalam bentuk gotong royong apabila di antara warga mempunyai hajat.

### KATA KUNCI:

GIDI Sragen, Rumah Ibadat, LUIS, FKUB

---

## STRATEGI DAN KEUTUHAN TEKS BACAAN DALAM MENGOPTIMALKAN KEPEDULIAN ANAK TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL

VILYA LAKSTIAN CATRA MULIA

### ABSTRACT

*Each text genre has their own social function to fulfill the purpose of reading activities, therefore texts serve as an inseparable medium of learning in schools. This study explores the function and purposes of texts in correlation of recent social issues in the society. The data includes textbooks from the most recent curriculum. The data was analyzed into some phases of each genre based on Islamic perspectives. Social literacy is essentially needed since early ages of the children to equip them with the knowledge of socializing. In this case, texts are expected to be internalized by the children in their surrounding social environment. Besides exploring the text genres, this study also formulates some suggestions for the development of texts as well as for the teachers who communicate the content of the texts to the students.*

### KEY WORDS:

*Social Function, Genre, Literacy, Text*

### ABSTRAK

Setiap *genre* teks memiliki fungsi sosialnya masing-masing untuk memenuhi tujuan dari aktifitas membaca. Oleh karena itu, teks menjadi media pembelajaran yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan belajar di sekolah. Berkaitan dengan fungsi dan tujuan dari teks yang lebih luas, penulis mengkaitkannya dengan permasalahan sosial terkini di masyarakat dengan sumber data dari buku kurikulum terbaru. Literasi sosial diperlukan sejak dini untuk memberikan bekal pengetahuan bermasyarakat sehingga manfaat teks diharapkan dapat diinternalisasikan oleh anak-anak terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Selain mengeksplorasi *genre* teks pada sumber data, penulis juga berusaha memberikan saran pengembangan bagi teks maupun kepada guru sebagai pihak yang berperan penting sebagai penghubung berbagai aspek yang dibawa teks kepada para siswanya. Penulis memperoleh temuan tersebut melalui analisis pentahapan dari setiap *genre* dan sudut pandang Islami.

### KATA KUNCI:

Fungsi Sosial, Genre, Literasi, Teks

---

## EVALUASI PENYELENGGARAAN MADRASAH UNGGULAN: STUDI KASUS DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) SERAWI KALIMANTAN SELATAN

FARIDA HANUN

### ABSTRACT

*This study aims at evaluating the management of Madrasah Unggulan regarding the input, process, and product in MIN Serawi, Kalimantan Selatan by employing qualitative design. The results show that: (a) MIN Serawi excels in the extra curricular activities, such as: science competition, Rudat arts, and tahlil, (b) department of religion in central, city, and regency levels need to conduct coaching, quality assurance and supervision on the management of MIN Serawi which is conducted consistently and sustainably, (c) community involvement needs to be improved in order to attract more*

*sources of funds.*

**KEY WORDS:**

*Evaluation, Management, Madrasah, Unggulan*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan madrasah Unggulan terkait input, proses dan produk di MIN Serawi Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (a) keunggulan dan kekhasan MIN Serawi adalah kegiatan ekstrakurikuler KSM (Kompetisi Sains Madrasah), Seni Rudat, dan kegiatan Tahlilan, (b) Kementerian Agama Pusat/Kota/Kab perlu melakukan pembinaan, penjaminan mutu, dan pengawasan terhadap pengelolaan komponen-komponen strategis MIN Serawi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, (c) keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan dalam upaya penggalan sumber-sumber dana.

**KATA KUNCI:**

*Evaluasi, Penyelenggaraan, Madrasah, Unggulan*

---

## DIALOG FIKIH DAN BUDAYA DALAM KUMANDANG AZAN

AHMAD MUNIF

**ABSTRACT**

*This paper attempts to examine the background of prayer calls (adzan) that was influenced by the customs and habits of the local people. Adzan which should be sounded immediately after the prayer time comes was deliberately sounded an hour later by the Muslims in Tlogogedong village, the southern part of Demak district. Though it seems that Muslims in Tlogogedong village do not follow the religious order to perform prayers in early time, this late prayer calls had a deeper purpose. The study finds out that the delayed adzan was intended to accommodate local people to perform another religious order, which is congregated prayers. The delay in prayer calls give more time for local people who work as farmers, for other professions to wait until their break times, and for children to finish their quranic reading activities. with religious texts related to the early morning prayer and congregational prayers. This finding indicates*

*that there was a dialogue between religious order and local practice and situation that can be used an example or model in understanding Islamic texts by adjusting the local culture of a region.*

**KEY WORDS:**

*Adzan, Prayer Time, Dialog, Local Culture*

**ABSTRAK**

Tulisan ini mencoba menguraikan latar belakang dibalik kumandang azan yang dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Azan yang semestinya dikumandangkan di awal waktu sebagaimana perintah salat, oleh umat Islam di Dusun Tlogogedong, ujung selatan Kabupaten Demak, sengaja diperlambat setengah hingga satu jam. Secara lahiriah, hal tersebut tampak seolah-olah umat Islam di Dusun Tlogogedong tidak mengikuti seruan perintah untuk salat di awal waktu. Hasil dari kajian dalam tulisan ini, kumandang azan yang sengaja diperlambat tampak bertentangan dengan perintah salat di awal waktu, namun ternyata itu dilakukan agar masyarakat bisa melakukan perintah lainnya, yaitu salat berjamaah. Di sana ada proses dialog yang adaptif antara kebutuhan aktifitas masyarakat sehari-hari, seperti bertani di ladang, waktu rehat, dan aktivitas mengaji anak-anak, dengan teks keagamaan terkait tuntunan salat di awal waktu dan perintah salat berjamaah. Dialog tersebut bisa menjadi contoh atau model dalam memahami teks Islam dengan menyesuaikan budaya lokal suatu daerah.

**KATA KUNCI:**

*Azan, Waktu Salat, Dialog, Budaya Lokal*

---

## PENGARUH KOMPETENSI GURU BAHASA ARAB DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS IX MTS DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA

NENENG LM

**ABSTRACT**

*This study aims at determining the factors that influence students' learning outcomes by examining the*

effect of Arabic teacher competence and students' interest in learning Arabic towards students' outcomes of Grade IX MTs (Islamic Junior High Schools) in Kebayoran Lama subdistrict. The study finds out that: first, there is a direct and significant influence of the high competence of teachers on students' Arabic learning outcomes. Secondly, there is a positive and significant effect of teacher competence on student interest. Thirdly, by the value of  $\beta_{32} = 0.46 > 0$ , the regression equation  $X_3 = -6.866 + 0,264X_2$ , the correlation coefficient  $r_{23} = 0.785$  and determination coefficient  $r_{23}^2 = 0.617$ , or 61.70% it can be inferred that there is a direct and significant influence of students' learning interest to their Arabic learning outcomes. These findings imply that obtaining good outcome in students' Arabic learning can be done by improving the competence of teachers and students' interest in learning.

#### KEY WORDS:

Teacher Competence, Learning Interest, Learning Outcomes, Islamic Junior High School

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar Bahasa Arab siswa dengan meneliti Pengaruh Kompetensi Guru dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas IX Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, terdapat pengaruh langsung dan signifikan yang tinggi kompetensi guru terhadap hasil belajar bahasa Arab siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama. *Kedua*, terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi guru terhadap minat belajar siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama. *Ketiga*, dengan diperolehnya nilai  $\beta_{32} = 0,46 > 0$ , dengan persamaan regresi  $X_3 = -6,866 + 0,264X_2$ , koefisien korelasi  $r_{23} = 0,785$ , dan koefisien determinasi  $r_{23}^2 = 0,617$ , atau 61,70% menunjukkan terdapat pengaruh langsung dan sangat signifikan minat belajar siswa terhadap hasil belajar bahasa Arab siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama. Impilikasi dari hasil penelitian di atas adalah hasil belajar bahasa arab siswa dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kompetensi guru dan minat belajar siswa.

#### KATA KUNCI:

Kompetensi Guru, Minat Belajar, Hasil Belajar, Madrasah Tsanawiyah

---

## DEMOKRASI DAN PERDA SYARIAH: KASUS SUKABUMI

FIRMAN NUGRAHA

#### ABSTRACT

This article sheds some lights on the implementation of regional sharia regulations (Perda syariah) from the perspective of democracy, focusing on the aspects of representation and accountability. Qualitative study was employed in this research. The study finds out that the presence of regional sharia regulations in the context of democratic Sukabumi is substantially representative. This is due to the fact that Sukabumi people represent the majority group, which is Muslims. However, from the side of accountability, the regulations have low level of accountability since the sharia regulations have not solved the real issues amidst Sukabumi people.

#### KEY WORDS:

Accountability, Democracy, Regional Sharia Regulations, Reformation, Representative

#### ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk membedah implementasi perda syariah di Sukabumi dalam perspektif demokrasi, dengan fokus utama pada representasi dan akuntabilitas. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perda bernuansa syariah ini dalam kontek demokrasi secara substantif cukup representatif. Karena masyarakat Sukabumi mewakili suatu kelompok Muslim yang mayoritas. Kendati memiliki akuntabilitas rendah karena belum menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi penduduk sukabumi.

#### KATA KUNCI:

Akuntabilitas, Demokrasi, Perda Syariah, Reformasi, Refrepresentatif

---

## KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI: TELAHAH ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP

### ISLAM DAN DEMOKRASI

ANA SABHANA AZMY

#### ABSTRACT

*Fundamentalist Islamic groups are often identified as resistant groups towards revolutionary values coming from the West. In Indonesian context, fundamentalist groups was represented by, one of them, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Fundamentally, HTI as a group opposes any changes and supports the establishment of Islamic nation. From this perspective, HTI is against democracy as a product of western thought. In fact, HTI is struggling for the unity Islamic ummah under khilafah islamiyyah by khalifah as a leader. From this background this paper aims at answering to questions. First, how is HTI view as a fundamentalist group on the compatibility of Islam to democracy? Second, Is Islam compatible with democracy?*

#### KEY WORDS:

*HTI, Democracy, Compatibility, Islam*

#### ABSTRAK

Kelompok Islam fundamentalis seringkali dicirikan sebagai kelompok yang resisten terhadap hal-hal baru dan nilai-nilai yang diusung dari Barat. Pada konteks ke-Indonesiaan, hadir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan representatif dari kelompok ini. Pada dasarnya, HTI sebagai kelompok yang menentang perubahan dan hal baru, menginginkan terwujudnya kehidupan Islam. Atas pemikiran tersebut, maka HTI menentang hadirnya demokrasi sebagai suatu hal yang datang dari Barat. HTI justru menginginkan bersatunya kembali ummat Islam yang saat ini terpisah, di bawah naungan khilafah Islamiyyah dengan seorang khalifah sebagai pemimpinnya. Atas pandangan ini, maka ada dua hal yang ingin dijawab dalam tulisan ini, yaitu Pertama; bagaimana pandangan HTI sebagai kelompok fundamentalis terhadap kompatibilitas Islam dan demokrasi? Kedua; apakah pada kenyatannya Islam kompatibel dengan demokrasi?.

#### KATA KUNCI:

Islam dan Demokrasi, Hizbut Tahrir Indonesia

---

## DUKUNGAN TERHADAP KEKERASAN: MENGUJI IDENTITAS SOSIAL DAN PERSEPSI KETERANCAMAN

GAZI SALOOM

#### ABSTRACT

*This study aimed at examining the impact of social identification and threat perception on public supports for violence. This study employed quantitative method involving 198 students of Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta. Supports for violence was measured by a questionnaire asking respondents' attitude towards the acts of violence committed by Front of Islamic Defence (FPI) as a radical Islamic movement. The data were analyzed by multiple regression and Structural Equation Modeling (SEM) using SPSS and M.Plus Program. This study concluded that strong identification as Muslims significantly influenced the supports to FPI acts through threat perception as a moderator variable. The study recommends for further investigation by employing qualitative approach to examine how independent variables influenced the supports for violence.*

#### KEY WORDS:

*Support, Violence, Identification*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh identitas sosial dan persepsi keterancaman terhadap dukungan publik kepada kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel mahasiswa UIN Jakarta sebanyak 198 orang. Dukungan terhadap kekerasan diukur dengan menanyakan sikap responden terhadap aksi razia yang dilakukan oleh Front Pembela Islam sebagai ormas Islam yang kerap kali dipersepsikan oleh sebagian publik sebagai gerakan Islam garis keras. Data dianalisis dengan tehnik regresi ganda dan SEM dg menggunakan program SPSS dan M.Plus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa identifikasi sebagai orang Islam berpengaruh terhadap dukungan terhadap FPI melalui persepsi

keterancaman sebagai variabel moderator. Peneliti merekomendasikan agar dilakukan riset lanjut dengan metode kualitatif untuk menelusuri bagaimana independent variabel mempengaruhi dukungan terhadap kekerasan.

**KATA KUNCI:**

Kekerasan, Identitas, Persepsi Keterancaman

## INDEKS PENULIS

---

### A

#### **Abdul Jalil**

Jurusan Antropologi FIB UHO, alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari Sulawesi Tenggara Fax (0401) 390006 Telp. (0401) 394061, [abduljalil.uho@gmail.com](mailto:abduljalil.uho@gmail.com)/  
[jalil\\_kaya79@yahoo.co.id](mailto:jalil_kaya79@yahoo.co.id)

“KOMUNIKASI BUDAYA: SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI PENGGUNAAN TANGAN KIRI PADA MASYARAKAT DI SEKITAR KAMPUS PERAK”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 1-10

#### **Ahmad Munif**

Universitas Islam Negeri Walisongo, Jl. Walisongo no. 3-5 Kota Semarang, email: [ahmadmunif@walisongo.ac.id](mailto:ahmadmunif@walisongo.ac.id)

“DIALOG FIKIH DAN BUDAYA DALAM KUMANDANG AZAN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 47-56

#### **Ana Sabhana Azmy**

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alamat Instansi: Jl. Kertamukti No.5 Pisangan, Ciputat 15419. Email: [hana.azmy86@gmail.com](mailto:hana.azmy86@gmail.com)

“KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI: TELAHAH ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP ISLAM DAN DEMOKRASI”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 85-94

### F

#### **Farida Hanun**

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jl. MH. Thamrin N0. 6 Jakarta. E-Mail: [farida\\_ridwan@yahoo.com](mailto:farida_ridwan@yahoo.com)

“EVALUASI PENYELENGGARAAN MADRASAH UNGGULAN: STUDI KASUS DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) SERAWI KALIMANTAN SELATAN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 34-46

#### **Firman Nugraha**

Balai Diklat Keagamaan Bandung. Jl. Soekarno hatta No. 716 Bandung

“DEMOKRASI DAN PERDA SYARIAT: KASUS SUKABUMI”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 69-84

### G

#### **Gazi Saloom**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Kertamukti 5 Ciputat. Email : [gazi@uinjkt.ac.id](mailto:gazi@uinjkt.ac.id)

“DUKUNGAN TERHADAP KEKERASAN: MENGUJI IDENTITAS SOSIAL DAN PERSEPSI KETERANCAMAN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 95-110

## M

### **Mustolehudin**

Balai Litbang Agama Semarang Jl. Untung Suropati Kav 69 – 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang  
Telepon (024) 7601327, Facs (024) 7611386, Email : [mustolehuddin@gmail.com](mailto:mustolehuddin@gmail.com)

“DINAMIKA PERIBADATAN GEREJA INJILI DI INDONESIA PASCA KONFLIK TOLIKARA:  
STUDI KASUS DI DESA MOJOKERTO KECAMATAN KEDAWUNG SRAGEN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 11-20

## N

### **Neneng LM**

Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Jl. Ir. H. Juanda Nomor 37 Ciputat, Tangerang  
Selatan. Email: [neneng\\_lm@yahoo.co.id](mailto:neneng_lm@yahoo.co.id)

“PENGARUH KOMPETENSI GURU BAHASA ARAB DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP  
HASIL BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS IX MTS DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 57-68

## V

### **Vilya Lakstian Catra Mulia**

Dosen Linguistik dan Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi  
Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Email:  
[vilyalakstian@gmail.com](mailto:vilyalakstian@gmail.com). Alamat: Jl. Maluku No. 12 Keprabon Tengah, Banjarsari, Solo. Nomor  
telepon: 085 628 347 15

“STRATEGI DAN KEUTUHAN TEKS BACAAN DALAM MENGOPTIMALKAN KEPEDULIAN  
ANAK TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 21-34

## KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian dengan topik masalah sosial dan keagamaan.
2. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan kaidah tata Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku dan benar.
4. Penulis membuat surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim adalah asli dan memenuhi persyaratan klirens etik dan etika publikasi ilmiah (bebas dari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi) berdasarkan Peraturan Kepala LIPI No. 8 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2014.
5. Apabila naskah ditulis dari hasil penelitian kelompok dan akan diterbitkan sendiri, diharuskan menyertakan surat pernyataan persetujuan tertulis dari anggota kelompok yang lain.
6. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4).
7. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 15 kata menggambarkan isi naskah secara keseluruhan.
8. Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, *bold*, *center*, sedangkan judul Bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, *italic*, *bold* dan *center*.
9. Nama penulis tanpa gelar akademik diletakkan di tengah (*center*). Nama instansi, alamat instansi, dan email penulis diletakkan dalam satu baris dan di tengah (*center*).
10. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwi bahasa (Inggris dan Indonesia). Abstrak ditulis dalam satu paragraph, diketik dengan 1 spasi, jenis huruf Palatino Linotype ukuran 11, jumlah kata 150-200 kata. Abstrak Bahasa Inggris diketik dengan menggunakan format *italic*.
11. Abstrak, berisi gambaran singkat keseluruhan naskah mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan.
12. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki.
13. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah *Arabic Transparent* atau *Traditional Arabic* ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki.
14. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

### **Buku**

Footnote

Satu Penulis

Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Dua Penulis

John B. Christianse and Irene W. Leigh, *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices* (Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002), 45-46.

Artikel pada Jurnal

Footnote

Tom Buchanan. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Bibliografi

Buku

Satu Penulis

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

Dua Penulis

Christianse, John B., and Irene W. Leigh. *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices*. Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002.

Tiga Penulis

Venolia, Jean P., Giorgio Cordini, and Joseph Hitchcock. *What Makes a Literary Masterpiece*. Chicago: Hudson, 1995.

Banyak Penulis

Bailyn, Bernard, et al. *The Great Republic*. Lexington, MA: D.C. Heath, 1977.

Penulis Anonim

*Beowulf: A New Prose Translation*. Trans. E. Talbot Donaldson. New York: W.W. Norton, 1966.

Multi-Volume

Dorival, Bernard. *Twentieth Century Painters*. Vol 2. New York: Universe Books, 1958.

Hasil Produksi Editor

Guernsey, Otis L., Jr., and Jeffrey Sweet, eds. *The Burns Mantle Theatre Yearbook of 1989-90*. New York: Applause, 1990.

Artikel pada Jurnal

Buchanan, Tom. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Artikel pada Prosiding/Conference Paper

Tidak diterbitkan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." Paper presented at the 16<sup>th</sup> Annual Agriculture Conference, Pietersburg University, South Africa, April 8-11, 2003.

Diterbitkan dan diedit

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." In *Proceedings of the 16<sup>th</sup> Annual Agricultural Conference*, April 8-11, 2003, Pietersburg University, South Africa. Edited by Jan Van Riebeeck. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

Diterbitkan tanpa pengeditan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." In *Agricultural in the North: Are We Making a Difference?* Conference Proceeding, April 8-11, 2003. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

Sumber Online

Website

Tice-Deering, Beverly. *English as a Second Language*. <http://www.seattlecentral.org/faculty/bticed> (accessed July, 2005).

University of Chicago Dept. of Romance Languages and Literatures. *Romance Languages and Literature*. <http://humanities.uchicago.edu/romance> (accessed July 27, 2009).

E-Book

Thornton, Chris. *Truth from Trash: How Learning Makes Sense*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. <http://emedia.netlibrary.com>.

E-Journal

Warr, Mark, and Christophers G. Ellison. "Rethinking Social Reaction to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households." *American Journal of Sociology* 106, no. 3 (2000): 551-78. <http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v106n3/050125/050126.html>. (accessed June 28, 2003),

15. Transliterasi berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 –Nomor: 0543 b/u/1987.

16. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah halaman sebagai berikut:

- a. **Pendahuluan**, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
- b. **Kajian literatur**, menguraikan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%)

- c. **Metode penelitian**, berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%)
- d. **Hasil** penelitian dan pembahasan (50%)
- e. **Penutup** yang berisi simpulan dan saran (15%)
- f. **Ucapan terima kasih**
- g. **Daftar Pustaka**. Jumlah sumber acuan dalam satu naskah paling sedikit 10 dan 80% di antaranya merupakan sumber acuan primer dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dapat berupa tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis maupun skripsi

Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.